



Pemerintah Daerah  
Kabupaten Gunung Mas

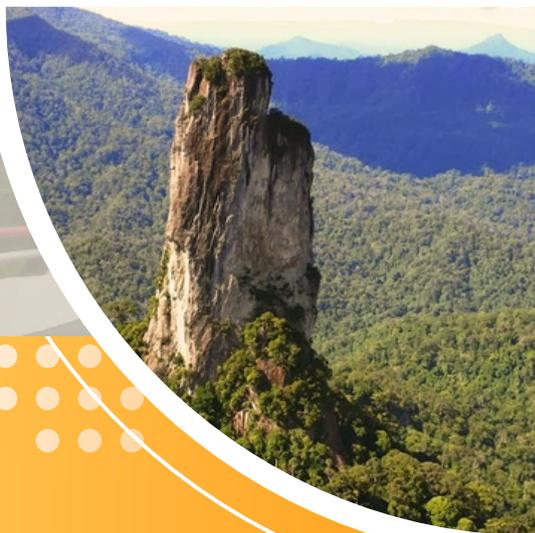
RANCANGAN AKHIR

# RPJMD

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

# KABUPATEN GUNUNG MAS

2025-2029



BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH  
KABUPATEN GUNUNG MAS

**DAFTAR ISI**

<b>BAB I</b>	<b>PENDAHULUAN</b>	<b>I</b>	<b>1</b>
	1.1 Latar Belakang	I	1
	1.2 Dasar Hukum Penyusunan	I	3
	1.3 Hubungan Antar Dokumen	I	5
	1.4 Maksud dan Tujuan	I	8
	1.5 Sistematika Penulisan	I	9
<b>BAB II</b>	<b>GAMBARAN UMUM DAERAH</b>	<b>II</b>	<b>1</b>
	2.1 Gambaran Umum Kondisi Daerah	II	1
	2.1.1 Aspek Geografi Dan Demografi	II	1
	2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat	II	27
	2.1.3 Aspek Daya Saing Daerah	II	43
	2.1.4 Aspek Pelayanan Umum	II	50
	2.2 Gambaran Umum Keuangan Daerah	II	66
	2.2.1 Kinerja Keuangan Masa Lalu	II	67
	2.2.2 Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu	II	101
	2.2.3 Kerangka Pendanaan	II	108
	2.3 Permasalahan dan Isu Strategis	II	138
	2.3.1 Permasalahan Pembangunan Daerah	II	138
	2.3.2 Isu Strategis	II	148
<b>BAB III</b>	<b>VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH</b>	<b>III</b>	<b>1</b>
	3.1 Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran	III	1
	3.1.1 Visi	III	1
	3.1.2 Misi	III	2
	3.1.3 Tujuan dan Sasaran	III	3
	3.2 Strategi, Arah Kebijakan dan Program Prioritas Pembangunan	III	31
	3.2.1 Arah Kebijakan Pembangunan Daerah	III	31
	3.2.2 Program Pembangunan Daerah	III	35
	3.2.3 Pusat Pertumbuhan Kabupaten Gunung Mas	III	37
<b>BAB IV</b>	<b>PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH</b>	<b>IV</b>	<b>1</b>
	4.1 Program Perangkat Daerah	IV	1
	4.2 Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	IV	75
	4.2.1 Indikator Kinerja Utama (IKU)	IV	75
	4.2.2 Indikator Kinerja Daerah (IKD)	IV	78
<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP</b>	<b>V</b>	<b>1</b>
	5.1 Pedoman Transisi	V	1
	5.2 Kaidah Pelaksanaan	V	2

**DAFTAR GAMBAR**

Gambar I.1	Keterkaitan RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Sektor Lain	I	6
Gambar II.1	Peta Kabupaten Gunung Mas	II	2
Gambar II.2	Grafik Persentase Luas Kecamatan Terhadap Luas Kabupaten Gunung Mas Tahun 2024	II	3
Gambar II.3	Peta Topografi (Kiri) dan Peta Kelerengan (Kanan) Kabupaten Gunung Mas Tahun 2021	II	4
Gambar II.4	Peta Hidrologi Kabupaten Gunung Mas Tahun 2021	II	5
Gambar II.5	Peta Persebaran Geologi Kabupaten Gunung Mas 2021	II	7
Gambar II.6	Gambar Model Daya Dukung Air	II	13
Gambar II.7	Grafik Daya Dukung Air serta proyeksi ketersediaan dan kebutuhan air di Kabupaten Gunung Mas	II	14
Gambar II.8	Model Daya Tampung Beban Pencemaran	II	14
Gambar II.9	Gambar Grafik Daya Tampung Beban Pencemaran	II	15
Gambar II.10	Gambar Model Pengelolaan Persampahan	II	15
Gambar II.11	Grafik Peningkatan Sampah Rumah Tanggal, Kapasitas Angkut dan TPA	II	16
Gambar II.12	Gambar Persentase Pengelolaan Persampahan di Kabupaten Gunung Mas	II	16
Gambar II.13	Grafik Rasio Sampah Tidak Terangkut	II	17
Gambar II.14	Gambar Model Daya Dukung Pangan	II	17
Gambar II.15	Grafik Proyeksi Produksi Beras di Kabupaten Gunung Mas	II	17
Gambar II.16	Grafik Daya Dukung Pangan	II	18
Gambar II.17	Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten Gunung Mas Tahun 2021-2024	II	19
Gambar II.18	Prevalensi Ketidacukupan Pangan Kabupaten Gunung Mas Tahun 2020-2023	II	20
Gambar II.19	Rumah Tangga mempunyai Akses Sanitasi Aman di Kabupaten Gunung Mas Tahun 2020-2024 (%)	II	21
Gambar II.20	Indeks Risiko Bencana Kabupaten Gunung Mas Tahun 2020-2024	II	22
Gambar II.21	Persentase Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Gunung Mas Tahun 2024	II	23
Gambar II.22	Piramida Penduduk Kabupaten Gunung Mas Tahun 2024 (ribu jiwa)	II	25
Gambar II.23	Produk Domestik Regional Bruto Per Kapita Kabupaten Gunung Mas, 2020-2024 (Juta Rupiah)	II	31
Gambar II.24	Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Gunung Mas Tahun 2020 – 2024	II	32
Gambar II.25	Indeks Gini Kabupaten Gunung Mas Tahun 2020-2024	II	33
Gambar II.26	Usia Harapan Hidup Kabupaten Gunung Mas Tahun 2020-2024	II	35



Gambar II.27	Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2020-2024	II	37
Gambar II.28	Angka Harapan Lama Sekolah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2020-2024	II	38
Gambar II.29	Indeks Pendidikan Kabupaten Gunung Mas Tahun 2020-2024	II	39
Gambar II.30	Pengeluaran Per Kapita Disesuaikan (Ribu/Kapita/Tahun) Kabupaten Gunung Mas Tahun 2020-2024	II	40
Gambar II.31	Rata-rata Pengeluaran Per Kapita Sebulan Untuk Makanan dan Bukan Makanan di Kabupaten Gunung Mas tahun 2020-2024	II	41
Gambar II.32	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten Gunung Mas Tahun 2020-2024	II	45
Gambar II.33	Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2021-2024	II	46
Gambar II.34	Indeks Kualitas Infrastruktur Kabupaten Gunung Mas Tahun 2020-2024	II	49
Gambar II.35	Perkembangan Pendapatan Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2020-2024 (dalam jutaan)	II	70
Gambar II.36	Perkembangan Struktur Pendapatan Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2020-2024	II	70
Gambar II.37	Perkembangan Komposisi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2020-2024 (%)	II	72
Gambar II.38	Rata-Rata Kontribusi Komponen Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2020-2024 (%)	II	73
Gambar II.39	Komponen Komponen Pendapatan Transfer Kabupaten Gunung Mas Tahun 2019-2023 (%)	II	73
Gambar II.40	Kontribusi Komponen Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Kabupaten Gunung Mas Tahun 2020-2024 (%)	II	74
Gambar II.41	Rata-Rata Kontribusi Komponen Dana Perimbangan Kabupaten Gunung Mas Tahun 2020-2024 (%)	II	74
Gambar II.42	Perkembangan Komposisi Dana Perimbangan Kabupaten Gunung Mas Tahun 2020-2024	II	75
Gambar II.43	Perkembangan Struktur Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2020-2024	II	75
Gambar II.44	Perkembangan Belanja Kabupaten Gunung Mas Tahun 2020-2024	II	78
Gambar II.45	Rata-rata Struktur Belanja Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2020-2024	II	79
Gambar II.46	Rata-rata Struktur Belanja Operasi Kabupaten Gunung Mas Tahun 2020-2024	II	80
Gambar II.47	Perkembangan Struktur Belanja Operasi Kab Gunung Mas Tahun 2020-2024	II	80
Gambar II.48	Perkembangan Struktur Belanja Modal Kab Gunung Mas Tahun 2020-2024	II	81



Gambar II.49	Perkembangan Komposisi Belanja Transfer Kabupaten Gunung Mas Tahun 2020-2024	II	82
Gambar II.50	Perkembangan Komposisi Pembiayaan Kabupaten Gunung Mas Tahun 2020-2024	II	86
Gambar II.51	Target Komposisi PAD Kabupaten Gunung Mas Tahun 2025-2030	II	112
Gambar II.52	Target Komposisi Dana Perimbangan Kabupaten Gunung Mas Tahun 2025-2029	II	113
Gambar II.53	Target Belanja Operasi Kabupaten Gunung Mas Tahun 2025-2030 (dalam juta)	II	118
Gambar II.54	Rata-rata Proporsi Komponen Belanja Modal Kabupaten Gunung Mas Tahun 2025-2030	II	119
Gambar II.55	Target Alokasi Komponen Belanja Modal Kabupaten Gunung Mas Tahun 2025-2030 (dalam juta)	II	119
Gambar II.56	IPM Kabupaten se-Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024	II	141
Gambar II.57	Pertumbuhan IPM Kabupaten se-Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024	II	141
Gambar II.58	Usia harapan Hidup Kabupaten se-Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024	II	142
Gambar II.59	Laju pertumbuhan PDRB Kabupaten se-Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024	II	143
Gambar II.60	Kontribusi PDRB Kabupaten se-Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024	II	144
Gambar II.61	Tingkat pengangguran Terbuka Kabupaten se-Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024	II	145
Gambar II.62	Tingkat Kemiskinan Kabupaten se-Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024	II	146
Gambar II.63	Indeks Gini Kabupaten se-Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024	II	146
Gambar II.64	Arah Pengembangan Kewilayahan Provinsi Kalimantan Tengah	II	155
Gambar III.1	Tema Pembangunan Per Tahun Kabupaten Gunung Mas	III	35

**DAFTAR TABEL**

Tabel II.1	Data Wilayah Administratif Kabupaten Gunung Mas Tahun 2024	II	2
Tabel II.2	Panjang Sungai Di Kabupaten Gunung Mas	II	5
Tabel II.3	Indeks Polusi dan Kriteria Mutu Air Sungai di Gunung Mas	II	6
Tabel II.4	Formasi Geologi di Kabupaten Gunung Mas	II	8
Tabel II.5	Pengamatan Unsur Iklim di Kabupaten Gunung Mas, Tahun 2024	II	9
Tabel II.6	Rencana Sistem Pusat Kegiatan Wilayah	II	10
Tabel II.7	Rencana Sistem Pusat Kegiatan Lokal Tewah	II	10
Tabel II.8	Rencana Sistem Pusat Kegiatan Lokal Tumbang Miri	II	11
Tabel II.9	Rencana Sistem Pusat Kegiatan Lokal Sepang Simin	II	11
Tabel II.10	Rencana Sistem Pusat Kegiatan Lokal Jekan Raya	II	12
Tabel II.11	Rencana Sistem Pusat Kegiatan Lokal Tumbang Talaken	II	12
Tabel II.12	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten Gunung Mas, Tahun 2020 – 2024	II	21
Tabel II.13	Jumlah, Distribusi dan Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan Kabupaten Gunung Mas Tahun 2024	II	23
Tabel II.14	Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kabupaten Gunung Mas (Ribu Jiwa) Tahun 2024	II	24
Tabel II.15	Proyeksi Penduduk Kabupaten Gunung Mas Tahun 2025-2030	II	27
Tabel II.16	Laju Pertumbuhan Ekonomi Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Gunung Mas, Tahun 2020-2024	II	28
Tabel II.17	Distribusi PDRB Kabupaten Gunung Mas Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2020-2024	II	29
Tabel II.18	Tabel Garis Kemiskinan, Penduduk Miskin, P0, P1, dan P2 Kabupaten Gunung Mas Tahun 2020-2024	II	30
Tabel II.19	Capaian Indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Gunung Mas Tahun 2020-2024	II	34
Tabel II.20	Indikator Pembangunan Kesehatan Kabupaten Gunung Mas Tahun 2020 – 2024	II	35
Tabel II.21	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Menurut Kelompok Makanan dan Bukan Makanan Kabupaten Gunung Mas Tahun 2020-2024	II	41
Tabel II.22	Indikator Pembangunan Kebudayaan Kabupaten Gunung Mas Tahun 2020-2024	II	42
Tabel II.23	Indeks Pembangunan Gender dan Indeks Pemberdayaan Gender Kabupaten Gunung Mas Tahun 2020-2023	II	42
Tabel II.24	Rasio Ketergantungan Kabupaten Gunung Mas Tahun 2020-2024	II	44



Tabel II.25	Rasio PDRB Industri Pengolahan dan Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum Kabupaten Gunung Mas Tahun 2020-2024	II	44
Tabel II.26	Capaian Perekonomian Sektor Pertanian Kabupaten Gunung Mas Tahun 2020-2024	II	46
Tabel II.27	Pembentukan Modal Tetap Bruto dan Net Ekspor Barang dan Jasa Kabupaten Gunung Mas Tahun 2020-2024	II	48
Tabel II.28	Panjang Jalan (km) Menurut Jenis Permukaan dan Kondisi Jalan Kabupaten Gunung Mas Tahun 2020-2024	II	49
Tabel II.29	Capaian Pembangunan Pemerintahan Kabupaten Gunung Mas Tahun 2020-2024	II	50
Tabel II.30	Kondisi Kemanan dan Ketertiban di Kabupaten Gunung Mas Tahun 2020-2024	II	51
Tabel II.31	Indeks Daya Saing Daerah Kabupaten Gunung Mas dan Pilar Penyusunnya Tahun 2022-2024	II	51
Tabel II.32	Indikator Kinerja Kunci Pembangunan Kabupaten Gunung Mas Tahun 2020-2024	II	52
Tabel II.33	Skala interval Otonomi Fiskal	II	67
Tabel II.34	Derajat Otonomi Fiskal Daerah Kabupaten Gunung Mas, Tahun 2020-2024	II	68
Tabel II.35	Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2019-2023 (dalam juta rupiah)	II	76
Tabel II.36	Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2019-2023 (dalam juta)	II	84
Tabel II.37	Rata-Rata Pertumbuhan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2020-2024 (Dalam Jutaan)	II	87
Tabel II.38	Pertumbuhan Neraca Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2020-2024	II	93
Tabel II.39	Rasio Lancar Kabupaten Gunung Mas Tahun 2020-2024	II	97
Tabel II.40	Rasio Hutang Kabupaten Gunung Mas Tahun 2020-2024	II	99
Tabel II.41	Rasio Hutang Terhadap Total Aktiva Kabupaten Gunung Mas Tahun 2020-2024	II	99
Tabel II.42	Rasio Perputaran Aktiva Tetap Kabupaten Gunung Mas Tahun 2020-2024	II	100
Tabel II.43	Rasio Perputaran Total Aktiva Kabupaten Gunung Mas Tahun 2020-2024	II	101
Tabel II.44	Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kabupaten Gunung Mas Tahun 2020-2024 (dalam Jutaan)	II	103
Tabel II.45	Realisasi Pengeluaran Belanja Periodik dan Pengeluaran Pembiayaan Yang Wajib Dan Mengikat Serta Prioritas Utama Kabupaten Gunung Mas Tahun 2020-2024 (dalam Jutaan)	II	105
Tabel II.46	Defisit Riil Anggaran Kabupaten Gunung Mas Tahun 2019-2023 (dalam Jutaan)	II	106



Tabel II.47	Nilai Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran Kabupaten Gunung Mas Tahun 2020-2024 (dalam Jutaan)	II	107
Tabel II.48	Proyeksi Pendapatan Kabupaten Gunung Mas Tahun 2025-2030 (dalam jutaan)	II	114
Tabel II.49	Proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2025-2029 (dalam juta)	II	122
Tabel II.50	Proyeksi APBD Kabupaten Gunung Mas Tahun 2025-2029 (dalam juta)	II	126
Tabel II.51	Proyeksi Belanja Periodik Dan Pengeluaran Pembiayaan Yang Wajib Dan Mengikat Serta Prioritas Kabupaten Gunung Mas Tahun 2025-2030 (dalam Jutaan)	II	133
Tabel II.52	Proyeksi Kapasitas Riil Keuangan Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2025-2030 (dalam Jutaan)	II	136
Tabel II.53	Proyeksi Kapasitas Riil Pagu OPD Kabupaten Gunung Mas Tahun 2025-2030 (dalam Jutaan)	II	136
Tabel II.54	Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kabupaten Gunung Mas Tahun 2025-2030	II	137
Tabel II.55	Highlight Intervensi dan lokasi Prioritas Kalimantan Tengah	II	155
Tabel III.1	Rumusan Tujuan dan Indikator Tujuan RPJMD Tahun 2025-2030	III	3
Tabel III.2	Keterkaitan antara Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Gunung Mas Tahun 2025-2030	III	7
Tabel III.3	Penjabaran Tujuan dan Sasaran Daerah dan Perangkat Daerah Kabupaten Gunung Mas	III	13
Tabel III.4	Strategi Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Gunung Mas	III	32
Tabel III.5	Arah Kebijakan Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2025-2029	III	36
Tabel III.6	Program Prioritas Kepala Daerah Dalam Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2025-2029	III	37
Tabel IV.1	Indikasi Rencana Program Perangkat Daerah yang Disertai Kebutuhan Pendanaan Kabupaten Gunung Mas Tahun 2025 - 2030	IV	2
Tabel IV.2	Penetapan Indikator Kinerja Utama Kabupaten Gunung Mas Tahun 2025-2030	IV	76
Tabel IV.3	Penetapan Indikator Kinerja Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2025-2030	IV	79



# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Kabupaten Gunung Mas merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Kalimantan Tengah yang memiliki karakteristik geografis didominasi oleh wilayah perbukitan dan hutan tropis yang lebat. Terletak di wilayah tengah pulau Kalimantan, kabupaten ini memiliki potensi alam yang melimpah seperti sumber daya mineral, kayu, dan kekayaan flora-fauna khas hutan hujan tropis. Letak geografis ini menjadikan Kabupaten Gunung Mas sebagai salah satu daerah yang memiliki nilai strategis dalam pengembangan wisata cagar alam (*ecotourism*) dan wisata budaya yang masih perlu dikembangkan untuk mampu mendongkrak kunjungan wisatawan domestik maupun wisatawan asing.

Keunikan Kabupaten Gunung Mas terletak pada kehidupan masyarakatnya yang masih sangat kental dengan nilai-nilai adat dan tradisi Dayak. Upacara adat Tiwah yakni ritual penghantaran roh leluhur ke alam baka yang masih sering dilaksanakan dengan khidmat dan menjadi daya tarik budaya yang unik bagi wisatawan. Selain itu, rumah betang sebagai simbol kehidupan komunal dan gotong royong masyarakat Dayak, masih dapat ditemukan dan dijadikan ikon kultural yang merepresentasikan kearifan lokal. Dalam aspek budaya dan kekhasan, Kabupaten Gunung Mas juga dikenal sebagai daerah yang menjunjung tinggi nilai spiritual dan filosofi hidup yang selaras dengan alam. Masyarakatnya hidup dengan semangat Huma Betang, yakni falsafah kebersamaan, persatuan, dan toleransi antar umat beragama maupun antar suku.

Pembangunan Kabupaten Gunung Mas mempunyai tujuan memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia yang berkualitas. Pembangunan di Kabupaten Gunung Mas difokuskan pada upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata. Dengan strategi yang terencana, pemerintah daerah berupaya menciptakan pemerataan pendapatan, membuka lapangan kerja, meningkatkan kualitas pelayanan publik, dan memperkuat daya saing daerah. Dalam hal ini, penyusunan dokumen RPJMD 2025-2029 menjadi sangat penting sebagai pedoman utama bagi perangkat daerah dalam merumuskan program-program prioritas yang mendukung pembangunan berkelanjutan, baik dari segi ekonomi, sosial, maupun lingkungan.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, pemerintah memerlukan perencanaan mulai dari perencanaan jangka panjang hingga perencanaan jangka menengah yang substansinya saling berkaitan. Penyusunan rencana pembangunan daerah Kabupaten Gunung Mas merujuk pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Selain itu, peraturan yang relevan, seperti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, menjadi landasan dalam penyusunan RPJMD. Dokumen RPJMD

menurut ketentuan Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dan ketentuan Pasal 263 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan Daerah serta program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten serta memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi.

Dengan dilantikannya Bapak Jaya S. Monong S.E., M.Si., sebagai Bupati dan Ibu Ir. Efrensia L.P. Umbing, M.Si., sebagai Wakil Bupati pada tanggal 20 februari tahun 2025, pemerintah daerah Kabupaten Gunung Mas berkomitmen untuk segera mewujudkan visi dan misi pembangunan dengan menyusun dokumen RPJMD 2025-2029. Dengan adanya Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang pedoman penyusunan RPJMD dan Renstra PD Tahun 2025-2029, maka dalam penyusunan RPJMD dalam penyusunan dokumen RPJMD dilakukan beberapa pendekatan yaitu *Teknokratik, Partisipatif, Politis, atas-bawah dan bawah-atas, Holistik-Tematik, Integratif, Spasial*. Kemudian dalam pelaksanaan penyusunan dokumen RPJMD Kabupaten Gunung Mas tahun 2025-2029 memiliki beberapa tahapan yaitu (1) Persiapan penyusunan; (2) Penyusunan rancangan awal; (3) Penyusunan rancangan; (4) Pelaksanaan Musrenbang; (5) Perumusan rancangan akhir dan (6) Penetapan.

Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) memiliki peranan krusial dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Gunung Mas. RPJMD menjadi pedoman dalam arah pembangunan daerah selama 5 (lima) tahun ke depan, yang secara sistematis menjabarkan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, dan program pembangunan yang terukur. Dengan adanya RPJMD, arah pembangunan menjadi jelas dan terfokus pada prioritas-prioritas yang telah ditetapkan berdasarkan aspirasi masyarakat dan potensi daerah. Dokumen ini memastikan bahwa setiap kebijakan dan program yang dijalankan oleh Pemerintah Kabupaten Gunung Mas memiliki landasan yang kuat dan saling terintegrasi, sehingga sumber daya yang ada dapat dialokasikan secara efektif dan efisien untuk mencapai hasil yang optimal dalam meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

Lebih lanjut, RPJMD Kabupaten Gunung Mas menjadi instrumen penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel. Proses penyusunannya yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari perangkat daerah, DPRD, tokoh masyarakat, hingga dunia usaha, memastikan adanya partisipasi dan transparansi dalam perencanaan pembangunan. Dengan adanya indikator kinerja yang jelas dalam RPJMD, kemajuan pembangunan dapat dipantau dan dievaluasi secara berkala. Hal ini memungkinkan pemerintah daerah untuk mengidentifikasi keberhasilan dan tantangan, serta melakukan koreksi yang diperlukan demi tercapainya tujuan utama, yaitu peningkatan

kesejahteraan masyarakat Kabupaten Gunung Mas melalui pembangunan yang berkelanjutan dan berkeadilan.

## 1.2 Dasar Hukum

Dasar hukum dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Gunung Mas Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, **Kabupaten Gunung Mas**, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);



7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6420);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6178);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
15. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang

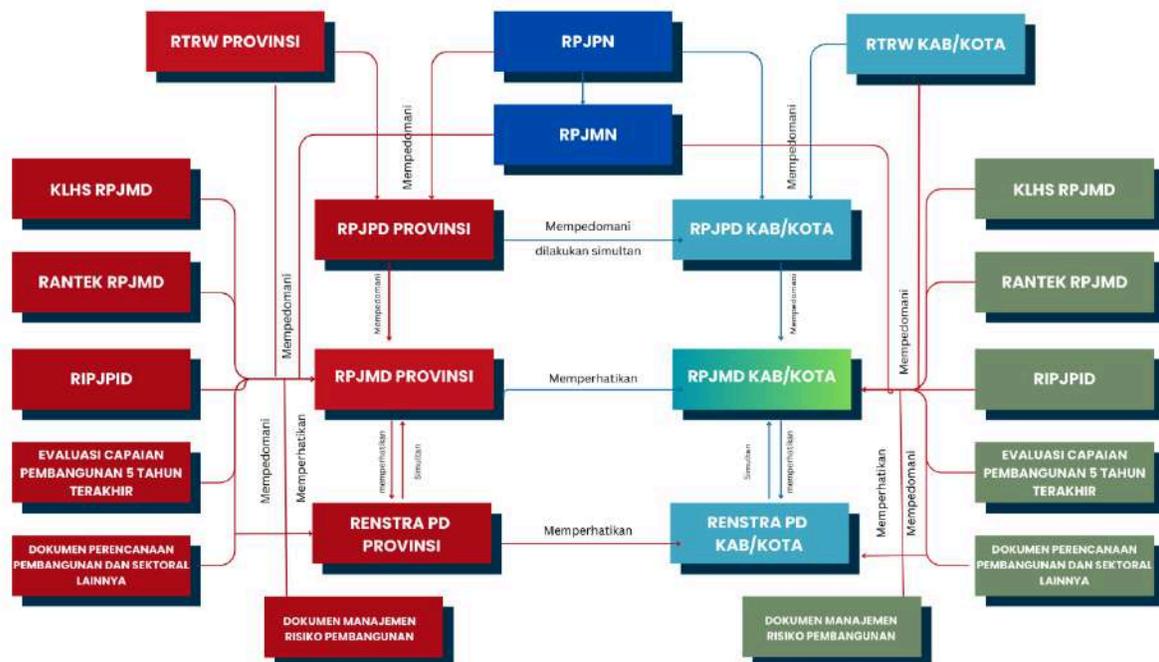


- Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
  20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
  21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
  22. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2024-2045;
  23. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
  24. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 8 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2014 - 2034;
  25. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2025–2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas nomor 325 Tahun 2024); dan
  26. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunung Mas.

### **1.3 Hubungan Antar Dokumen**

Penyusunan RPJMD Kabupaten Gunung Mas merupakan proses komprehensif yang wajib berpedoman pada hierarki Perencanaan Pembangunan Nasional (RPJMN) dan Provinsi (RPJMD Provinsi) untuk sinkronisasi tujuan dan sasaran, serta memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) sebagai landasan spasial pembangunan. Selain itu, Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) diintegrasikan untuk memastikan keberlanjutan lingkungan, Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan IPTEK Daerah (RIPJPID) sebagai arah pengembangan inovasi, evaluasi capaian pembangunan 5 (lima) tahun terakhir sebagai refleksi dan pembelajaran, berbagai dokumen perencanaan pembangunan dan sektoral lainnya untuk keselarasan program, serta dokumen manajemen risiko pembangunan sebagai mitigasi potensi hambatan, sehingga menghasilkan RPJMD yang terukur, realistis, dan responsif terhadap berbagai aspek pembangunan daerah. Hubungan dan keterpaduan antara RPJMD dan dokumen-dokumen perencanaan tersebut dapat diilustrasikan sebagai berikut:

Gambar I.1.

**Keterkaitan RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Sektoral Lainnya**

Sumber: Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025

Berdasarkan gambar di atas dijelaskan keterkaitan antar dokumen perencanaan yang dijabarkan sebagai berikut:

**a. Hubungan RPJMD Kabupaten Gunung Mas Tahun 2025-2029 dengan RPJMN Tahun 2025-2029**

Hubungan antara Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gunung Mas Tahun 2025-2029 dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029 terletak pada sinergi antara tujuan pembangunan daerah dan prioritas pembangunan nasional. RPJMD sebagai dokumen strategis 5 (lima) tahun di tingkat daerah harus sejalan dengan arah kebijakan RPJMN, khususnya dalam mendukung pencapaian target pembangunan nasional yang telah ditetapkan. RPJMN Tahun 2025-2029 sebagai dokumen perencanaan pembangunan nasional memiliki agenda prioritas yang terangkum dalam Asta Cita, yang mencakup penguatan ekonomi inklusif, peningkatan kualitas SDM, pemerataan pembangunan, dan keberlanjutan lingkungan. RPJMD Kabupaten Gunung Mas Tahun 2025-2029 disusun dengan mempertimbangkan keselarasan terhadap agenda nasional.

Sinergi ini memastikan bahwa program pembangunan daerah tidak hanya berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi lokal tetapi juga mendukung visi nasional dalam menciptakan pembangunan yang adil, merata, dan berkelanjutan.

**b. Hubungan RPJMD Kabupaten Gunung Mas Tahun 2025-2029 dengan RPJMD Kalimantan Tengah Tahun 2025-2029**

Hubungan antara Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gunung Mas Tahun 2025-2029 dengan RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025-2029 terletak pada keterpaduan dan sinergi kebijakan pembangunan di tingkat kabupaten dengan arah pembangunan provinsi. RPJMD Kabupaten Gunung Mas sebagai panduan pembangunan daerah 5 (lima) tahun harus mendukung pencapaian target pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah. Hal ini melibatkan penyesuaian prioritas, program, dan kegiatan di Kabupaten Gunung Mas agar sesuai dengan kerangka pembangunan yang dirumuskan di tingkat provinsi. RPJMD Kabupaten Gunung Mas Tahun 2025-2029 juga perlu memastikan keterpaduan dalam hal pengelolaan sumber daya alam, pelestarian lingkungan, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat, yang merupakan tujuan utama dalam pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah. Dengan menyelaraskan kebijakan, antara Kabupaten Gunung Mas dan Provinsi Kalimantan Tengah diharapkan dapat menciptakan pembangunan yang lebih harmonis, efektif, dan inklusif, sehingga dapat memberikan dampak positif yang maksimal bagi masyarakat di tingkat lokal maupun regional.

**c. Hubungan RPJMD Kabupaten Gunung Mas Tahun 2025-2029 dengan RPJPD Kabupaten Gunung Mas Tahun 2025-2045**

Hubungan antara Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gunung Mas Tahun 2025-2029 dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Gunung Mas Tahun 2025-2045 bersifat strategis dan berkesinambungan. RPJMD, sebagai dokumen perencanaan 5 (lima) tahun, merupakan tahap implementasi dari arah pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJPD, terutama pada periode tahap I dalam arah kebijakan RPJPD. Dengan memastikan keselarasan ini, RPJMD dapat berfungsi sebagai langkah konkret yang strategis dalam membawa Kabupaten Gunung Mas menuju visi besar yang telah ditetapkan dalam RPJPD.

**d. Hubungan RPJMD Kabupaten Gunung Mas Tahun 2025-2029 dengan RTRW Kabupaten Gunung Mas**

Hubungan antara Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gunung Mas Tahun 2025-2029 dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gunung Mas harus memiliki keselarasan antara perencanaan pembangunan dengan tata ruang wilayah. RTRW sebagai dokumen perencanaan tata ruang jangka panjang menjadi acuan utama dalam mengatur pemanfaatan ruang di Kabupaten Gunung Mas agar pembangunan yang dirancang dalam RPJMD dapat dilaksanakan secara optimal dan sesuai dengan fungsi ruang yang telah ditetapkan. RPJMD Kabupaten Gunung Mas Tahun 2025-2029 harus merujuk pada arahan RTRW dalam menetapkan lokasi dan prioritas pembangunan, baik untuk pengembangan sektor unggulan maupun

untuk pembangunan infrastruktur dan fasilitas umum. Selain itu, RTRW juga berfungsi untuk mengintegrasikan aspek tata ruang dengan program pembangunan daerah yang termuat dalam RPJMD, seperti pengembangan kawasan, desa, dan infrastruktur transportasi. Dengan menyelaraskan RPJMD dengan RTRW, Kabupaten Gunung Mas dapat memastikan bahwa seluruh kegiatan pembangunan tidak hanya berjalan secara terencana tetapi juga sesuai dengan peruntukan ruang yang telah ditetapkan, sehingga menciptakan pembangunan yang efektif, efisien, dan berkelanjutan.

**e. Hubungan RPJMD dengan Renstra Perangkat Daerah**

RPJMD Kabupaten Gunung Mas Tahun 2025-2029 menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) dalam rentang waktu 5 (lima) tahun. Renstra Perangkat Daerah merupakan penjabaran teknis RPJMD yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dalam menentukan arah kebijakan serta indikasi program dan kegiatan setiap urusan bidang dan/atau fungsi pemerintahan untuk jangka waktu 5 (lima) tahunan, yang disusun oleh setiap perangkat daerah Kabupaten Gunung Mas.

**f. Hubungan RPJMD dengan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)**

Penyusunan RPJMD Kabupaten Gunung Mas harus mengimplementasikan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). Dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Gunung Mas harus mampu mengintegrasikan rekomendasi KLHS-RPJMD. Sehingga penyusunan RPJMD harus mempertimbangkan aspek keberlanjutan lingkungan. Dengan demikian rekomendasi dari KLHS dapat diakomodir dalam program pembangunan daerah.

**g. Hubungan RPJMD dengan Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan IPTEK Daerah (RIPJPID)**

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) memiliki hubungan yang erat dan saling melengkapi dengan Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Daerah (RIPJPID). RPJMD sebagai dokumen perencanaan pembangunan daerah secara menyeluruh untuk periode 5 (lima) tahun, menetapkan visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan di berbagai sektor, termasuk potensi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) sebagai salah satu pilar kemajuan daerah. RIPJPID kemudian hadir sebagai penjabaran yang lebih spesifik dan terfokus pada upaya pemajuan IPTEK di Kabupaten Gunung Mas. RIPJPID mengidentifikasi potensi dan tantangan daerah dalam pengembangan IPTEK, merumuskan visi dan misi yang lebih spesifik di bidang IPTEK, serta menetapkan arah kebijakan, program, dan kegiatan yang strategis untuk mendorong inovasi, adopsi teknologi, dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang IPTEK. Dengan demikian, RIPJPID menjadi panduan operasional yang lebih detail dalam mewujudkan visi dan misi RPJMD yang berkaitan dengan penguatan IPTEK. Program dan kegiatan yang tertuang dalam RIPJPID harus selaras dan berkontribusi pada pencapaian sasaran-sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJMD.

**h. Hubungan RPJMD dengan Dokumen perencanaan sektoral**

RPJMD harus mampu menindaklanjuti dan mengakomodir dokumen rencana sektoral pembangunan. Sehingga rekomendasi atau masukan kebijakan

pada berbagai bidang urusan yang memiliki dokumen perencanaan harus diperhatikan dalam penyusunan RPJMD. Dengan ini diharapkan kebijakan atau perencanaan sektoral dapat berkontribusi secara optimal terhadap pencapaian tujuan RPJMD.

#### **1.4 Maksud dan Tujuan**

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gunung Mas Tahun 2025–2029 disusun sebagai dokumen strategis yang menjadi pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Gunung Mas dalam merancang dan melaksanakan pembangunan 5 (lima) tahun. Dokumen ini menjadi instrumen penting untuk merumuskan kebijakan, menetapkan prioritas program, dan menentukan target pembangunan yang sejalan dengan visi dan misi kepala daerah terpilih. Penyusunan RPJMD Kabupaten Gunung Mas Tahun 2025–2029 memiliki beberapa tujuan utama, antara lain:

- 1) Mewujudkan visi dan misi kepala daerah melalui strategi dan kebijakan pembangunan yang operasional dan terarah, serta merancang program-program kerja yang dapat diimplementasikan secara nyata.
- 2) Menjamin adanya keselarasan dan keterpaduan antara perencanaan pembangunan daerah dengan perencanaan pembangunan tingkat provinsi dan nasional, seperti RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah dan RPJMN.
- 3) Memberikan arahan yang jelas dalam penggunaan sumber daya agar tercapai efisiensi dan efektivitas dalam pelaksanaan program pembangunan.
- 4) Menjamin bahwa seluruh kebijakan dan program pembangunan yang dirancang mendukung prinsip pembangunan berkelanjutan yang mencakup dimensi ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup.
- 5) Menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai alat ukur untuk memantau, mengevaluasi, dan memastikan keberhasilan pembangunan secara akuntabel dan transparan.
- 6) Menyerap kebutuhan, potensi, serta aspirasi masyarakat lokal agar pembangunan yang dilaksanakan dapat memberikan manfaat secara merata dan berkeadilan bagi seluruh masyarakat Kabupaten Gunung Mas.

#### **1.5 Sistematika Penulisan**

RPJMD Kabupaten Gunung Mas Tahun 2025-2029 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

##### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini menjelaskan latar belakang penyusunan RPJMD, landasan hukum, hubungan atau keterkaitan dengan dokumen perencanaan lainnya, maksud dan tujuan penyusunan, serta sistematika penulisan dokumen RPJMD.

##### **BAB II GAMBARAN UMUM DAERAH**

Bagian ini menyajikan gambaran umum mengenai kondisi Kabupaten Gunung Mas secara menyeluruh yang menjadi dasar dalam proses perencanaan pembangunan daerah. Beberapa aspek yang dijabarkan antara lain yaitu aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek daya saing daerah, aspek pelayanan umum. Selain itu, dalam bab ini juga memuat gambaran keuangan daerah dan permasalahan dan isu strategis.



### **BAB III VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH**

Bab ini menjelaskan visi dan misi Kepala Daerah yang dijabarkan kedalam tujuan dan sasaran yang dirumuskan untuk mendukung pencapaian visi dan misi. Selain itu, dalam bab ini dijabarkan strategi, arah kebijakan, serta program prioritas pembangunan daerah.

### **BAB IV PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH**

Bagian ini merinci program-program perangkat daerah yang dilengkapi dengan indikator kinerja beserta target dan alokasi anggaran indikatif. Selain itu, bab ini juga memuat kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang diukur melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK), sebagai alat evaluasi terhadap capaian pembangunan pemerintahan secara menyeluruh.

### **BAB V PENUTUP**

Bab terakhir ini memberikan arahan transisi untuk memastikan kesinambungan pembangunan di masa mendatang. Di dalamnya juga tercantum panduan pelaksanaan RPJMD Tahun 2025–2029 agar sejalan dengan rencana strategis yang telah ditetapkan.

## BAB II

### GAMBARAN UMUM DAERAH

#### 2.1 Gambaran Umum Kondisi Daerah

Kabupaten Gunung Mas merupakan salah satu kabupaten pemekaran dari Kabupaten Kapuas pada tahun 2002 berdasarkan UU Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180).

Gambaran umum kondisi Kabupaten Gunung Mas terdiri dari aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan rakyat, aspek pelayanan umum, dan aspek daya saing daerah. Keempat aspek tersebut merupakan hasil kinerja pembangunan di Kabupaten Gunung Mas oleh Pemerintah Daerah, swasta maupun masyarakat. Berikut ini gambaran umum Kabupaten Gunung Mas yang dilihat dari ke empat aspek tersebut.

##### 2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi

Aspek geografi dan demografi bertujuan untuk memberikan gambaran dan hasil analisis dari aspek geografi mengenai karakteristik lokasi dan wilayah, potensi pengembangan wilayah, dan kerentanan wilayah terhadap bencana. Sedangkan aspek demografi, menggambarkan kondisi penduduk secara keseluruhan atau kelompok dalam waktu tertentu di Kabupaten Gunung Mas.

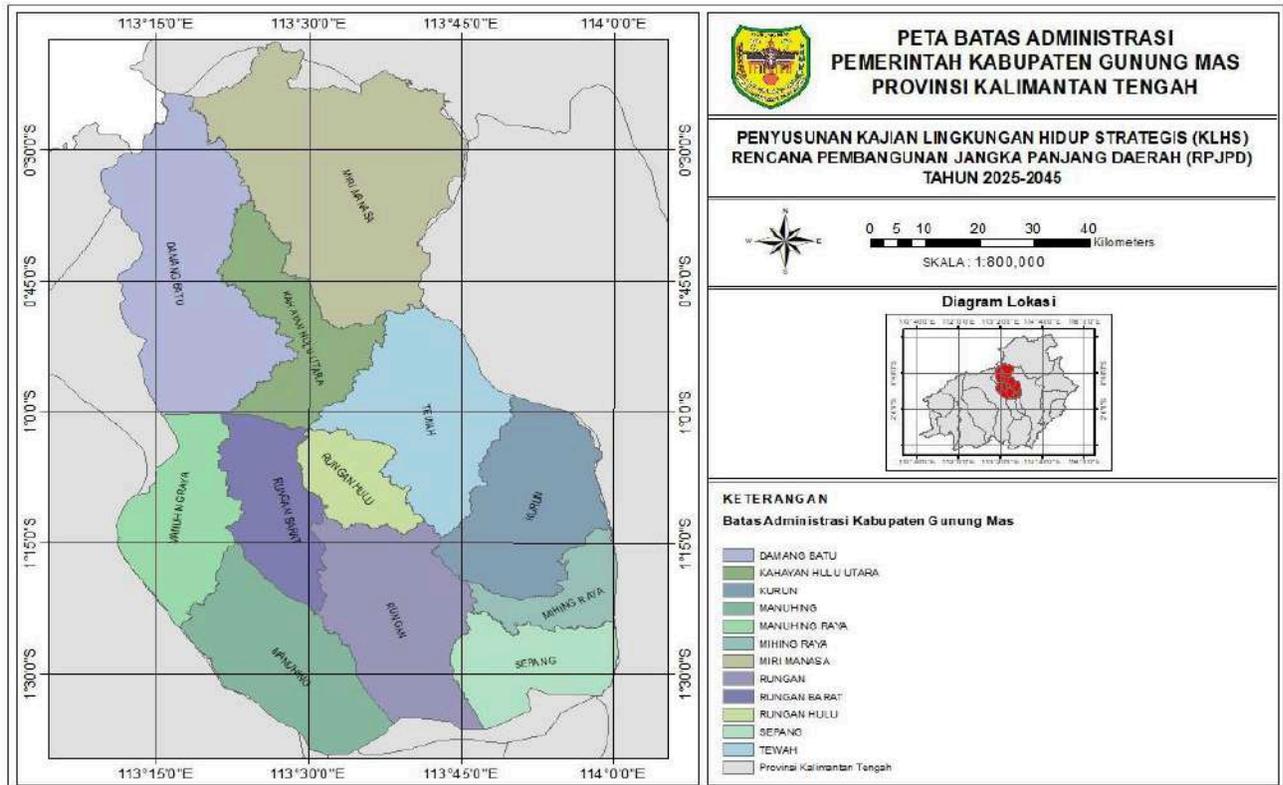
##### 2.1.1.1 Posisi dan Peran Strategis Daerah

Pada posisi dan peran strategis daerah menjelaskan letak geografis dan batas wilayah serta fungsi dan kontribusi daerah terhadap wilayah sekitar atau wilayah yang lebih luas.

#### 1. Geografis

Wilayah administratif Kabupaten Gunung Mas pada tahun 2024, memiliki total luas wilayah mencapai 9.317,115 km<sup>2</sup>. Kecamatan Damang Batu memiliki luas terbesar, yakni 1.824,038 km<sup>2</sup> atau 19,6% dari total wilayah kabupaten, diikuti oleh Miri Manasa dengan 1.405,197 km<sup>2</sup> (15,1%). Kecamatan dengan luas terkecil adalah Rungan Barat, hanya 347,091 km<sup>2</sup> atau 3,7% dari luas kabupaten. Kurun, sebagai ibu kota Kabupaten Gunung Mas, mencakup 772,049 km<sup>2</sup> atau 8,3% dari total luas. Beberapa kecamatan lain seperti Tewah (9,2%) dan Rungan (10,5%) juga memiliki cakupan wilayah yang cukup besar. Data ini menunjukkan bahwa luas wilayah di Kabupaten Gunung Mas tidak merata, dengan beberapa kecamatan memiliki cakupan wilayah yang jauh lebih besar dibandingkan kecamatan lainnya:

**Gambar II.1**  
**Peta Kabupaten Gunung Mas**



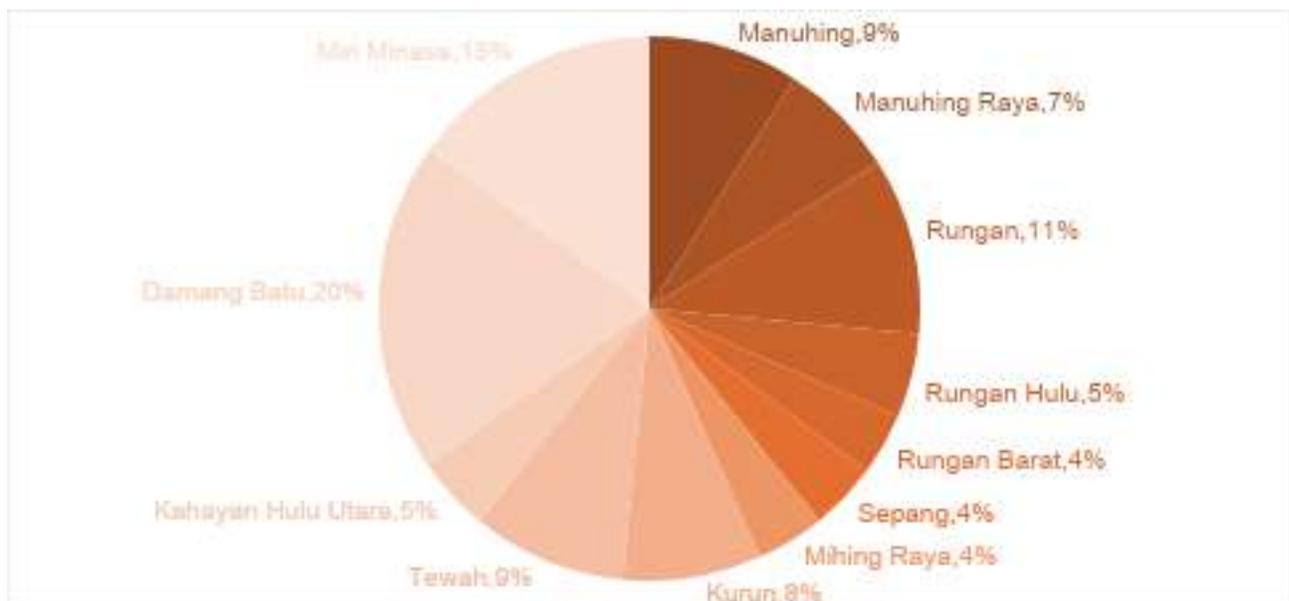
Sumber: Peta Bapperida Kabupaten Gunung Mas, 2025

**Tabel II.1**  
**Data Wilayah Administratif Kabupaten Gunung Mas Tahun 2024**

Kecamatan	Ibukota Kecamatan	Luas Total Area (Km <sup>2</sup> )	Persentase terhadap Luas Kabupaten/Kota
<b>Manuhing</b>	Tumbang Talaken	839,056	9
<b>Manuhing Raya</b>	Tehang	654,627	7
<b>Rungan</b>	Jakatan Raya	977,442	10,5
<b>Rungan Hulu</b>	Tumbang Rahuyan	468,570	5
<b>Rungan Barat</b>	Rabambang	347,091	3,7
<b>Sepang</b>	Sepang Simin	368,765	4
<b>Mihing Raya</b>	Kampuri	383,743	4,1
<b>Kurun</b>	Kuala Kurun	772,049	8,3
<b>Tewah</b>	Tewah	854,330	9,2
<b>Kahayan Hulu Utara</b>	Tumbang Miri	422,206	4,5
<b>Damang Batu</b>	Tumbang Marikoi	1.824,038	19,6
<b>Miri Minasa</b>	Tumbang Napoi	1.405,197	15,1
<b>Gunung Mas</b>		<b>9.317,115</b>	<b>100</b>

Sumber: BPS Kabupaten Gunung Mas, 2025

**Gambar II.2**  
**Grafik Persentase Luas Kecamatan Terhadap Luas Kabupaten Gunung Mas**  
**Tahun 2024**



Sumber: BPS Kabupaten Gunung Mas, 2025

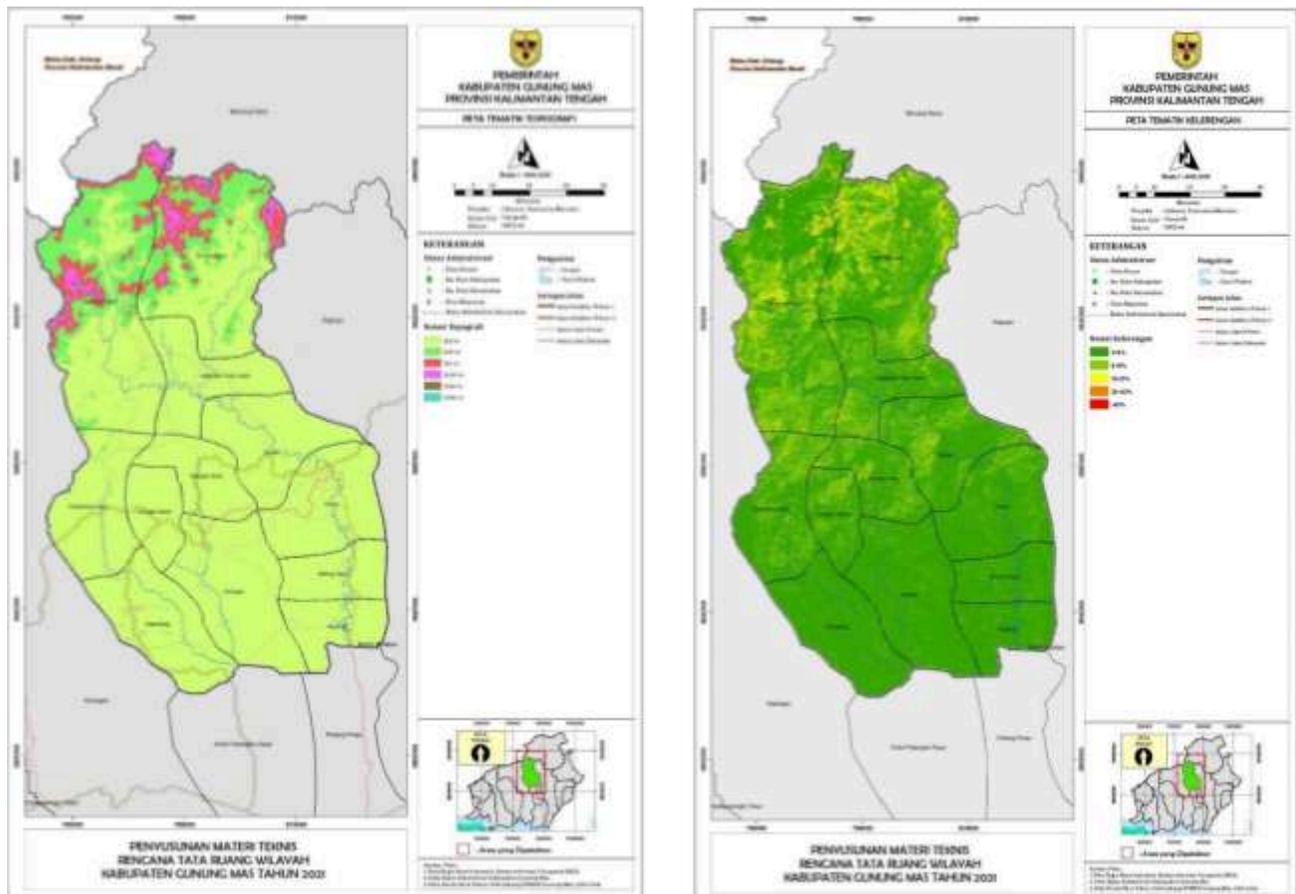
## 2. Topografi

Secara umum kondisi topografi di wilayah Kabupaten Gunung Mas yaitu:

1. Wilayah bagian utara merupakan daerah perbukitan dengan ketinggian antara 100-500 meter dari permukaan air laut dan mempunyai tingkat kemiringan  $8^{\circ}$ - $15^{\circ}$  serta mempunyai daerah pegunungan dengan tingkat kemiringan  $\pm 15^{\circ}$ - $25^{\circ}$ .
2. Wilayah bagian selatan terdiri dari dataran rendah dan rawa-rawa yang berpotensi mengalami banjir cukup besar pada musim-musim hujan, selain itu juga daerah Kabupaten Gunung Mas memiliki perairan yang meliputi danau, rawa-rawa dan ada empat jalur sungai yang masuk wilayah Kabupaten Gunung Mas yaitu Sungai Kahayan, Sungai Rungan, Sungai Manuhing dan Sungai Miri serta anak-anak sungai lainnya.

Gambar II.3

## Peta Topografi (Kiri) dan Peta Kelerenghan (Kanan) Kabupaten Gunung Mas Tahun 2021



Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Gunung Mas 2025-2029

Dilihat dari topografinya luas lahan di Wilayah Kabupaten Gunung Mas didominasi lahan dengan kondisi topografi 0-250 m seluas 768.761,62 Ha (82,28%) dan interval 250-500 m seluas 102.173,68 Ha (10,94%). Adapun kondisi kelerenghan dominan dengan kelerenghan 0-8% seluas 677.676,60 Ha (72,53%) dan interval 212.153,52 Ha (22,71%) yang tersebar di seluruh wilayah kecamatan di Kabupaten Gunung Mas. Kondisi topografi, kondisi kontur dan kondisi kelerenghan di wilayah Kabupaten Gunung Mas di ditampilkan pada gambar di atas.

### 3. Hidrologi

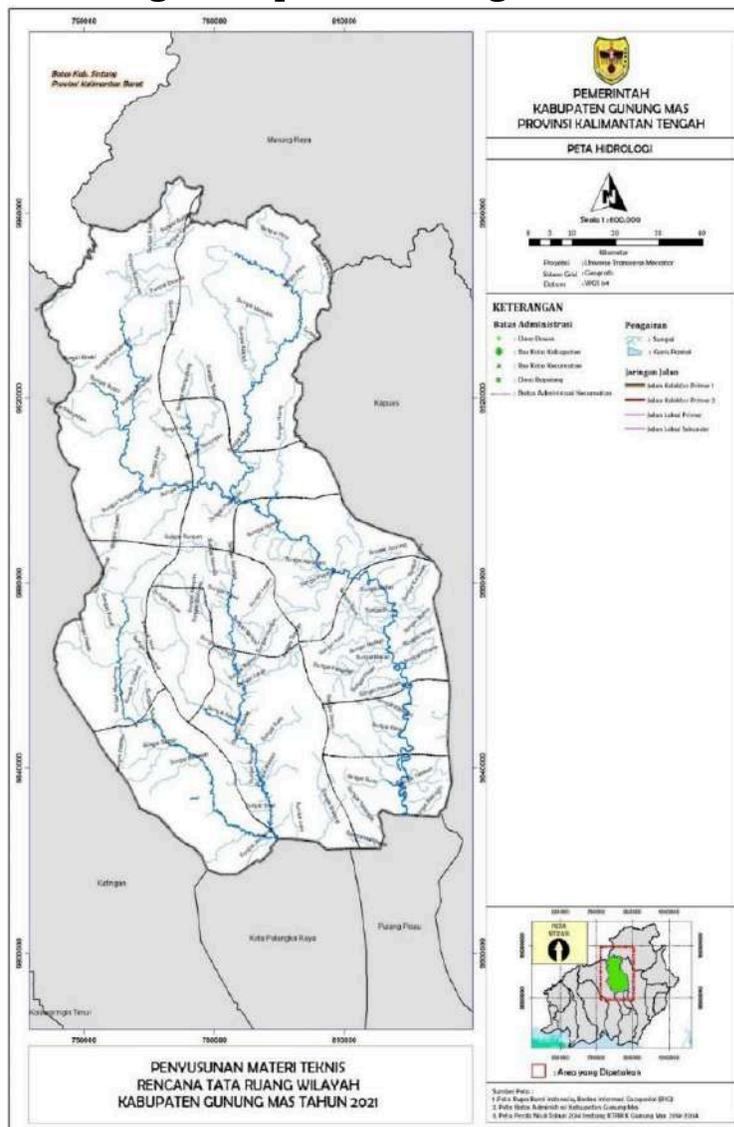
Kabupaten Gunung Mas merupakan kabupaten yang sebagian wilayahnya bergantung pada pemanfaatan sungai. Di Kabupaten Gunung Mas terdapat 3 (tiga) cabang sungai yang langsung bermuara ke Sungai Kahayan, yaitu Sungai Rungan, Sungai Miri, dan Sungai Manuhing. Terdapat Sungai utama di Kabupaten Gunung Mas seperti pada tabel berikut:

**Tabel II.2**  
**Panjang Sungai Di Kabupaten Gunung Mas**

No.	Nama Sungai	Panjang (km)
1	Manuhing	± 28,75
2	Rungan	± 86,25
3	Kahayan	± 600
4	Miri	-

Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Gunung Mas 2025-2029

**Gambar II.4**  
**Peta Hidrologi Kabupaten Gunung Mas Tahun 2021**



Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Gunung Mas 2025-2029

Hasil pengukuran status kualitas air sungai di Kabupaten Gunung Mas tahun 2020 dan 2021 yang diambil di beberapa titik sungai berdasarkan kriteria mutu air pada Peraturan Pemerintah 82/2001 kelas II didapatkan sebagai berikut:

**Tabel II.3**  
**Indeks Polusi dan Kriteria Mutu Air Sungai di Kabupaten Gunung Mas**

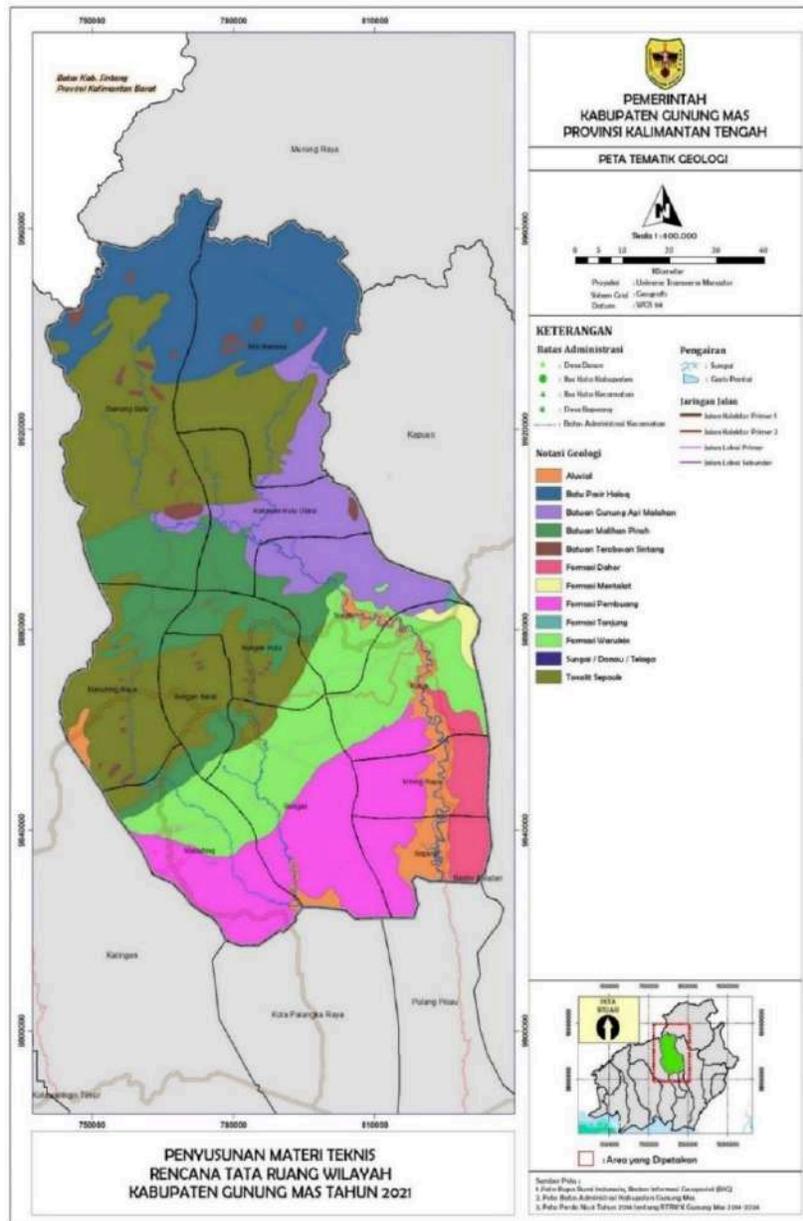
Nama Sungai	Titik Sampling	Indeks Polusi		Kriteria Mutu Air	
		2020	2021	2020	2021
Miri	Napoi	5,57	1,89	Cemar Ringan	Cemar Ringan
	Desa Siruk	4,19	1,83	Cemar Ringan	Cemar Ringan
	Tumbang Lapan	3,83	4,03	Cemar Ringan	Cemar Ringan
Kahayan	Teluk Kanduri	2,91	1,56	Cemar Ringan	Cemar Ringan
	Tewah	2,96	3,42	Cemar Ringan	Cemar Ringan
	Sepang	2,92	4,31	Cemar Sedang	Cemar Ringan
	Tumbang Talaken	3,43	2,48	Cemar Ringan	Cemar Ringan
Manuhing	Luwuk Tukau	5,14	8,84	Cemar Ringan	Cemar Sedang
	Takaras	4,38	2,01	Cemar Ringan	Cemar Ringan
	Bereng Malaka	2,76	8,78	Cemar Ringan	Cemar Sedang
Rungan	Guhung Rawai	4,14	7,09	Cemar Ringan	Cemar Sedang
	Tumbang Rahuyan	3,08	8,77	Cemar Sedang	Cemar Sedang

Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Gunung Mas 2025-2029

#### 4. Geologi

Jenis tanah di wilayah Kabupaten Gunung Mas terdiri atas beberapa jenis tanah yaitu Podsolik Merah Kuning, Alluvial, Hydromorfik Kelabu, Alluvial Hydromorfik, Gley Humus dan Kompleks Regosol Podsolik. Jenis tanah yang dominan adalah tanah Podsolik Merah Kuning tersebar di bagian utara wilayah Gunung Mas dengan ketebalan  $\pm 110$  cm. Kemudian pada daerah-daerah pinggir sungai umumnya didominasi oleh tanah Aluvial yang berasal dari endapan sungai dengan jenis tanah Aluvial Hydromorfik Kelabu, tersebar dan dapat di jumpai di beberapa sungai/anak sungai di wilayah Kabupaten Gunung Mas yaitu Sungai Kahayan, Sungai Miri (anak Sungai Kahayan), Sungai Rungan dan Sungai Manuhing (anak Sungai Rungan).

Gambar II.5  
Peta Persebaran Geologi Kabupaten Gunung Mas 2021



Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Gunung Mas 2025-2029

Kondisi Geologi Kabupaten Gunung Mas terdiri atas 11 (sebelas) formasi geologi diantaranya, yaitu:

- Formasi Tonalit Sepauk (*Kls*)  
Formasi Tonalit Sepauk merupakan batuan granit berkomposisi tonalit, diorit dan granodiorit hingga mozoit, yang berumur kurang lebih 8,7 juta tahun.
- Formasi Batu Malihan Pinoh (*PzTRp*)  
Formasi Malihan Pinoh merupakan batuan fillit, sekis, kuarsit dan ganes, yang secara umum berasal dari batu lumpur, dengan umur diperkirakan trias.
- Formasi Endapan Aluvium (*Qa*)  
Formasi endapan aluvium berasal dari batuan pasir kuarsa, kerikil, dan bongkah yang berasal dari batuan metamorf yang bersifat granit dan kuarsit lepas.
- Formasi Batu Pasir Haloq (*Teh*)

- Formasi batu pasir haloq terdiri atas batu pasir kuarsa, batu pasir sela kuarsa, batu pasir kerikilan, jarang batu lanau, batu lumpur, batu gamping.
- e. Formasi Mentemoi (*Teme*)  
Formasi Mentemoi terdiri atas batu pasir pada bagian bawah dan batu pasir arkosa pada bagian atas yang berbutir halus hingga kasar. Selain itu terdapat sisipan konglomerat kuarsa dan batu lempung. Formasi ini berumur eosen – oligosen.
- f. Formasi Tanjung (*Tet*)  
Formasi ini terdiri atas perselingan batu pasir, serpih, batu lanau dan konglomerat dan sebagian bersifat gampingan.
- g. Formasi Warukin (*Tmw*)  
Formasi ini terdiri atas batu pasir, batu pasir tufan, gampingan, batu lanau, dan batu lempung. Formasi ini berumur kurang lebih Miosen.
- h. Formasi Montalat (*Tomm*)  
Formasi ini terdiri atas batu pasir kuarsa, gampingan, batu lanau, serpih dan batubara dan berumur Oligosen.
- i. Formasi Terobosan Sintang (*Toms*)  
Formasi ini merupakan terobosan korok, rentas andesit dan basal dengan umur Miosen Awal.
- j. Batuan Gunung Api Malasan (*Tomv*)  
Formasi ini terdiri atas breksi gunung api, tuf, aglomerat, dan lava andesit. Formasi ini berumur Miosen Awal dan diendapkan di lingkungan litoral.
- k. Formasi Dahor (*TQd*)  
Formasi dahor terdiri atas batuan konglomerat coklat kehitaman, batu pasir, batu lempung karbonan. Formasi ini diduga berumur Pliosen-Plistosen.

**Tabel II.4****Formasi Geologi di Kabupaten Gunung Mas**

Formasi Geologi	Luas	Persen
Aluvial	36079,09	3,86
Batu Pasir Haloq	140231,47	15,01
Batuan Gunung Api Malahan	88496,09	9,47
Batuan Malihan Pinoh	104121,95	11,15
Batuan Terobosan Sintang	9539,62	1,02
Formasi Dahor	28335,47	3,03
Formasi Mentalat	5690,58	0,61
Formasi Pembuang	132004,5	14,13
Formasi Tanjung	901,71	0,1
Formasi Warukin	134124,09	14,36
Sungai / Danau / Telaga	3596,29	0,38
Tonalit Sepauk	251085,09	26,88
Jumlah	934205,95	100

Sumber: Dokumen Revisi RTRW Kabupaten Gunung Mas

**5. Kondisi Klimatologi**

Kabupaten Gunung Mas memiliki iklim tropis dengan temperatur rata-rata di tahun 2024 sebesar 27,03°C hingga 28,30°C. Namun jika dilihat dari minimumnya, suhu di Kabupaten Gunung Mas sempat mencapai 21,50°C pada bulan Juni dan September. Sedangkan suhu maksimum berada pada bulan

September juga dengan maksimal suhu mencapai 35,70°C. Dari sisi kelembaban udara, di Kabupaten Gunung Mas secara rata-rata berada pada kelembaban 78,00%-87,00%.

Kecepatan angin di Kabupaten Gunung Mas secara umum berada pada rata-rata 2,00 knot dengan tekanan udara rata-rata berkisar antara 1.007,00 mbar hingga 1.010,20 mbar. Adapun curah hujan selama tahun 2024, tertinggi berada di bulan Maret dengan jumlah curah hujan mencapai 488,00 mm/tahun dan jumlah hari hujan terbanyak selama 31 hari di bulan Agustus, Oktober dan Desember.

**Tabel II.5**  
**Pengamatan Unsur Iklim di Kabupaten Gunung Mas, Tahun 2024**

Bulan	Rata-rata Suhu (°C)	Rata-rata Kelembaban (%)	Rata-rata Kecepatan Angin (knot)	Rata-rata Tekanan Udara (mbar)	Jml Curah Hujan (mm/thn)	Jml Hari Hujan (hari)
Januari	27,44	84,00	2,00	1.008,90	242,70	22
Februari	27,90	83,00	2,00	1.009,50	456,00	24
Maret	27,85	83,00	2,00	1.008,60	488,00	22
April	28,18	83,00	2,00	1.007,00	222,60	16
Mei	28,37	84,00	2,00	1.007,10	329,00	16
Juni	27,47	84,00	2,00	1.008,60	99,60	18
Juli	27,03	84,00	2,00	1.009,10	77,80	28
Agustus	27,40	81,00	2,00	1.010,20	120,80	31
September	28,30	78,00	2,00	1.009,60	154,20	30
Oktober	28,12	79,00	2,00	1.010,00	195,80	31
November	27,96	82,00	2,00	1.008,20	416,50	30
Desember	27,23	87,00	1,00	1.008,10	421,10	31

Sumber: Kabupaten Gunung Mas Dalam Angka Tahun 2025

### 2.1.1.2 Potensi Sumber Daya Alam

Laporan Akhir Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gunung Mas, yang kemudian dijabarkan lagi dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 8 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gunung Mas tahun 2014-2034 tanggal 12 Agustus 2014, wilayah Kabupaten Gunung Mas terbagi kedalam 3 (tiga) Satuan Wilayah Pengembangan (SWP). Satuan Wilayah Pengembangan (SWP) adalah suatu konsep pengelompokan wilayah berdasarkan kesamaan karakteristik yang dilihat dari berbagai aspek. Tujuan pengelompokan ini adalah sebagai dasar dalam merencanakan kegiatan pembangunan agar tercipta keseimbangan pertumbuhan dan perkembangan dalam suatu wilayah dan antar wilayah pengembangan. Agar terwujud pola pelayanan yang terpadu dan pemerataan dalam hal pembangunan dan pengembangan wilayah, maka Satuan Wilayah Pengembangan (SWP) di Kabupaten Gunung Mas adalah sebagai berikut:

1. SWP 1 dengan pusat pengembangan di Kota Kuala Kurun. Wilayah termasuk kedalam SWP ini adalah Kecamatan Tewah dan Kecamatan Mihing Raya dan Sepang, di samping sebagai pusat pelayanan kabupaten, juga berfungsi sebagai pusat pengembangan wilayah bagian tengah Provinsi Kalimantan Tengah. Fungsi SWP ini sebagai pusat pemerintahan skala kabupaten, perdagangan, pertanian, perkebunan dan pariwisata sejarah.
2. SWP 2 dengan pusat pengembangan di Kota Jakatan Raya. Wilayah termasuk ke dalam SWP ini adalah Kecamatan Rungan Hulu, Rungan,

Rungan Barat, Manuhing dan Manuhing Raya. Fungsi wilayah adalah sebagai wilayah kabupaten bagian barat, industri pengolahan hasil-hasil pertanian, perkebunan dan kehutanan.

- SWP 3 dengan pusat pengembangan di Kota Tumbang Miri. Wilayah yang termasuk kedalam SWP ini adalah Kecamatan Kahayan Hulu Utara, Kecamatan Damang Batu dan Kecamatan Miri Manasa. Wilayah ini relatif memiliki sumber daya alam yang sebagian diarahkan untuk menjadi fungsi lindung.

Adapun rincian pengembangan wilayah dan arah pengembangan sarana dan prasarana pendukung dan indikasi programnya sebagaimana tabel dibawah ini.

**Tabel II.6**  
**Rencana Sistem Pusat Kegiatan Wilayah**

Hirarki Pelayanan	Pusat Pengembangan Kegiatan	Arahan Pengembangan Kegiatan Utama	Arahan Pengembangan Kegiatan Penunjang Utama	Arahan Pengembangan Sarana dan Prasarana
Pusat Kegiatan Wilayah (PKW)	Ibukota Kabupaten Gunung Mas (Kuala Kurun)	Pusat Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Pendidikan	Pengembangan Jalan arteri primer
		Perekonomian jasa Kabupaten dan Regional	Kesehatan	Pengembangan prasarana lingkungan
		Pusat Distribusi dan Koleksi barang dan Jasa	Peribadatan	Pengembangan fasilitas perdagangan & jasa
		Pusat Jasa Pendukung Kegiatan Perekonomian (Pengolahan & Pemasaran)	Perdagangan/ Pemasaran	Pengembangan fasilitas Pendidikan & kesehatan
		Pusat Pengembangan Wilayah Bagian Tengah KALTENG	Permukiman	Pengembangan kawasan pariwisata
		Pariwisata	Optimalisasi Bandar Udara Kuala Kurun	
			Pertambangan	

**Tabel II.7**  
**Rencana Sistem Pusat Kegiatan Lokal Tewah**

Hirarki Pelayanan	Pusat Pengembangan Kegiatan	Arahan Pengembangan Kegiatan Utama	Arahan Pengembangan Kegiatan Penunjang Utama	Arahan Pengembangan Sarana dan Prasarana
Pusat Kegiatan Lokal (PKL)	Tewah	Pusat pengembangan sekunder untuk menunjang pusat	Pelayanan Sosial	Pengembangan jalan Kolektor Primer



	elayanan kota Hierarki I (PKW)		
	Pusat permukiman Pedesaan di seluruh Kecamatan	Perumahan	Pengembangan & perbaikan jalan akses ke PPK
	Perdagangan dan jasa skala wilayah pengembangan	Pertanian	Pengembangan fasilitas lingkungan
		Perkebunan dan kehutanan	Pengembangan fasilitas perdagangan dan jasa
		Pertambangan	
		Industri	

**Tabel II.8**  
**Rencana Sistem Pusat Kegiatan Lokal Tumbang Miri**

Hirarki Pelayanan	Pusat Pengembangan Kegiatan	Arahan Pengembangan Kegiatan Utama	Arahan Pengembangan Kegiatan Penunjang Utama	Arahan Pengembangan Sarana dan Prasarana
	Tumbang Miri	Pemukiman pedesaan di seluruh Kecamatan	Pelayanan Sosial	Pengembangan jalan kolektor primer
		Pusat pengumpul hasil bumi	Perumahan	Pengembangan & perbaikan jalan akses ke PPK
		Industri pengolahan hasil-hasil pertanian	Pertanian	Pengembangan fasilitas lingkungan
		Distributor barang dan jasa skala regional	Perkebunan dan Kehutanan	Pengembangan fasilitas perdagangan dan jasa
			Industri	Pengembangan fasilitas pendidikan dan Kesehatan
			Pertambangan	Optimalisasi Pelabuhan Sungai
				Pengembangan industri

**Tabel II.9**  
**Rencana Sistem Pusat Kegiatan Lokal Sepang Simin**

Hirarki Pelayanan	Pusat Pengembangan Kegiatan	Arahan Pengembangan Kegiatan Utama	Arahan Pengembangan Kegiatan Penunjang Utama	Arahan Pengembangan Sarana dan Prasarana
	Sepang Simin	Pusat pemukiman	Pelayanan Sosial	Pengembangan jalan kolektor primer



Pemukiman pedesaan di seluruh Kecamatan	Perumahan	Pengembangan & perbaikan jalan akses ke PPK
Pusat pengumpul hasil bumi	Pertanian	Pengembangan fasilitas lingkungan
Industri pengolahan hasil pertanian	Perkebunan	Pengembangan fasilitas perdagangan dan jasa
Distributor barang dan jasa skala regional	Kehutanan	Pengembangan fasilitas pendidikan dan Kesehatan
	Pertambangan	Pengembangan industri

**Tabel II.10**  
**Rencana Sistem Pusat Kegiatan Lokal Jakatan Raya**

Hirarki Pelayanan	Pusat Pengembangan Kegiatan	Arahan Pengembangan Kegiatan Utama	Arahan Pengembangan Kegiatan Penunjang Utama	Arahan Pengembangan Sarana dan Prasarana
	Jakatan Raya	Pusat pengembangan sekunder untuk menunjang pusat pelayanan kota hierarki I (PKW)	Pelayanan Sosial	Pengembangan jalan arteri primer
		Pusat pemukiman pedesaan di seluruh kecamatan	Perumahan	Pengembangan dan perbaikan jalan akses ke PPK
		Perdagangan dan jasa skala wilayah pengembangan	Pertanian	Pengembangan fasilitas lingkungan
		Pusat pengumpul hasil bumi	Perkebunan dan kehutanan	Pengembangan fasilitas perdagangan dan jasa
		Industri pengolahan hasil-hasil pertanian	Industri	Pengembangan fasilitas pendidikan dan Kesehatan
		Distributor barang dan jasa skala regional	Pertambangan	Pengembangan industri
				Optimalisasi Pelabuhan sungai

**Tabel II.11**  
**Rencana Sistem Pusat Kegiatan Lokal Tumbang Talaken**

Hirarki Pelayanan	Pusat Pengembangan Kegiatan	Arahan Pengembangan Kegiatan Utama	Arahan Pengembangan Kegiatan Penunjang Utama	Arahan Pengembangan Sarana dan Prasarana
-------------------	-----------------------------	------------------------------------	--	--

Tumbang Talaken	Pusat pemukiman pedesaan di seluruh Kecamatan	Pelayanan Sosial	Pengembangan jalan arteri primer
	Perdagangan dan jasa skala wilayah pengembangan	Perumahan	Pengembangan & perbaikan jalan akses ke PPK
	Pusat pengumpul hasil bumi	Pertanian	Pengembangan fasilitas lingkungan
	Industri pengolahan hasil-hasil pertanian	Perkebunan dan kehutanan	Pengembangan fasilitas perdagangan dan jasa
	Distributor barang dan jasa skala regional	Industri	Pengembangan fasilitas pendidikan & Kesehatan
			Pengembangan industri
			Optimalisasi Pelabuhan sungai

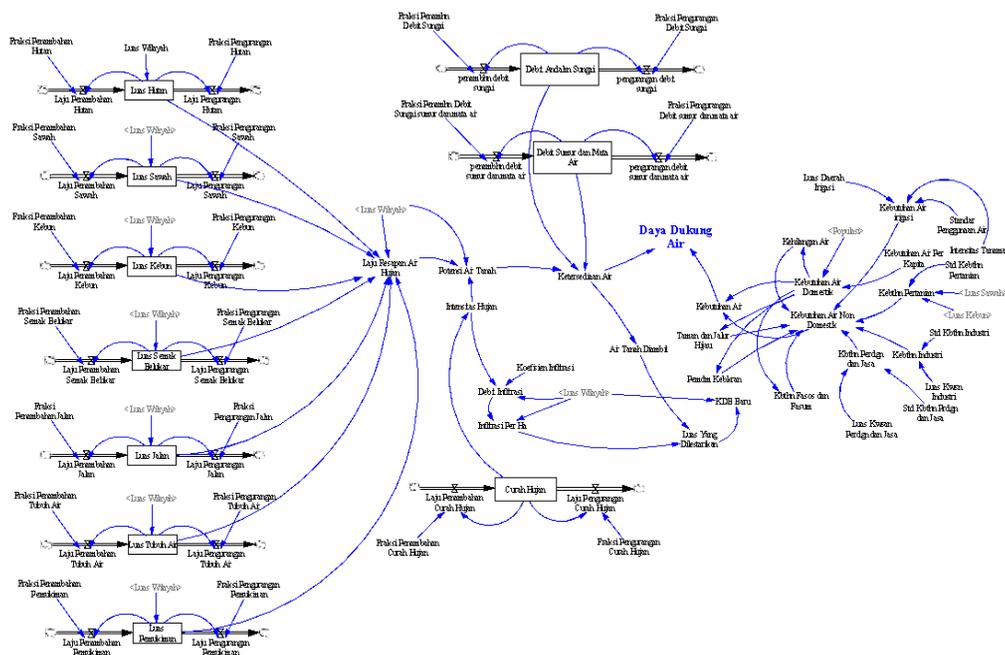
Sumber: Laporan Akhir RTRW Gunung Mas, 2014

### 2.1.1.3 Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup

Kajian daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup (D3TLH) dilakukan untuk mengukur kemampuan suatu ekosistem dalam mendukung rangkaian aktivitas pembangunan dan ambang batas kemampuannya berdasarkan kondisi yang ada.

#### 1. Daya Dukung Air

Gambar II.6  
Gambar Model Daya Dukung Air

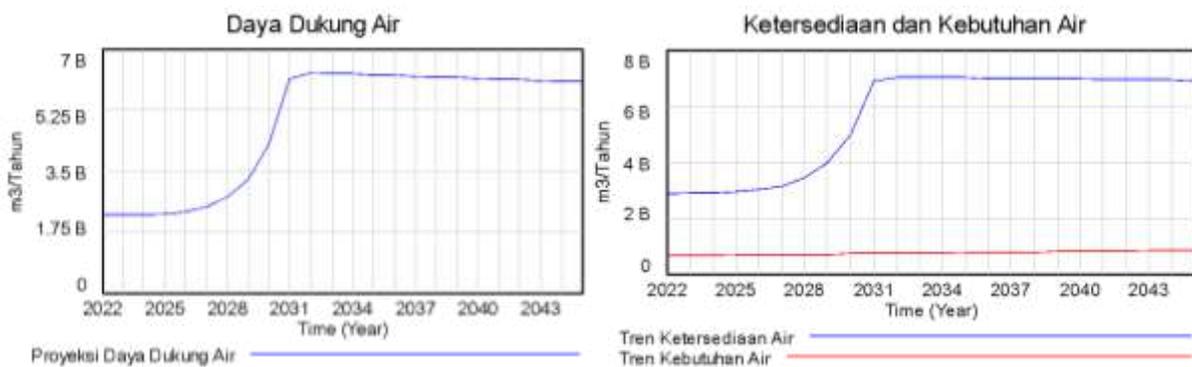


Sumber: Modifikasi dan pengembangan bersama KLHS Center Squad

Selain perhitungan juga dikembangkan model daya dukung air berdasarkan pemodelan sistem dinamis yang diintegrasikan dengan metode euler. Di dalam

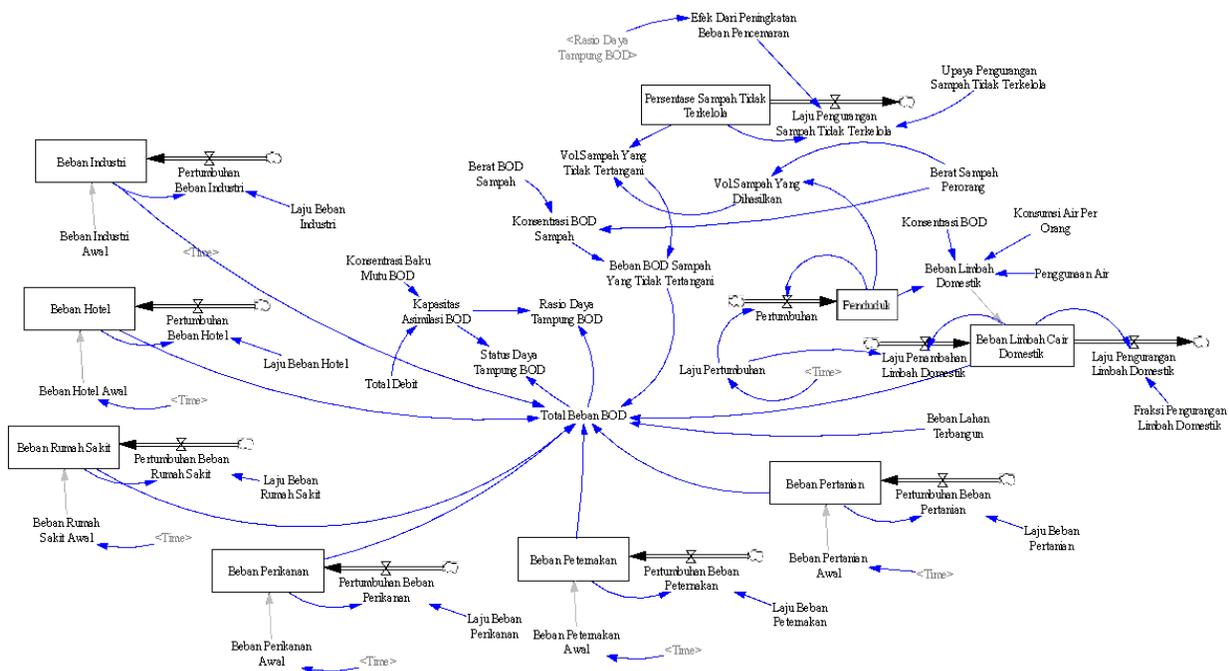
model tersebut dipertimbangkan ketersediaan air yang berasal dari potensi air tanah, debit andalan sungai, sumur dan mata air. Selain itu juga dipertimbangkan kebutuhan air yang berasal dari kebutuhan domestik dan non domestik. Hasilnya didapat daya dukung air di Kabupaten Gunung Mas bernilai positif yang artinya ketersediaan air masih melimpah sehingga masih memungkinkan untuk dimanfaatkan sebagai sumber daya alam dalam memenuhi kebutuhan masyarakat di Kabupaten Gunung Mas. Hasil dari proyeksi ketersediaan dan kebutuhan air sampai dengan tahun 2045 seperti pada gambar di bawah juga menunjukkan ketersediaan air masih melimpah dalam memenuhi kebutuhan air baik dari domestik maupun non domestik.

**Gambar II.7**  
**Grafik Daya Dukung Air serta proyeksi ketersediaan dan kebutuhan air di Kabupaten Gunung Mas**



2. Daya Tampung Beban Pencemaran

**Gambar II.8**  
**Model Daya Tampung Beban Pencemaran**

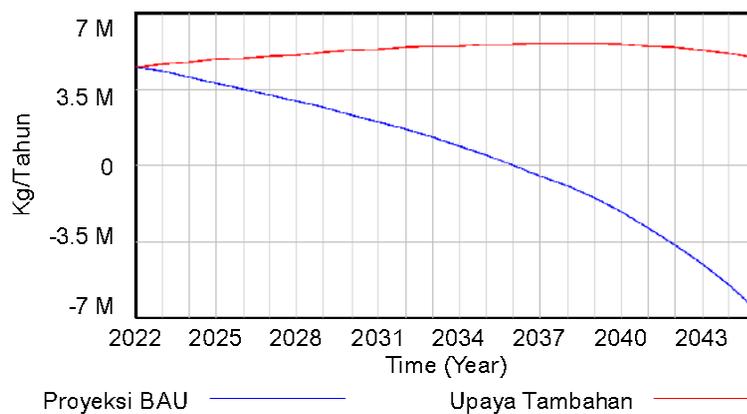


Sumber: Modifikasi dan pengembangan bersama KLHS Center Squad

Model daya tampung beban pencemaran dilakukan dengan permodelan sistem dinamik yang diintegrasikan dengan metode euler. Di dalam model tersebut dipertimbangkan sumber-sumber pencemar khususnya *Biological*

Oxygen Demand (BOD) yang umumnya merupakan parameter yang selalu diukur dalam berbagai standar kualitas air. Sumber-sumber pencemaran tersebut antara lain dari sampah tidak terkelola, limbah domestik, perikanan, peternakan, perkebunan, rumah sakit, hotel dan industri. Dalam model tersebut masih terdapat data-data yang belum didapat yakni terkait industri, hotel dan rumah sakit sehingga masih diperlukan perbaikan dikemudian hari. Namun demikian dari data-data yang tersedia diharapkan sudah dapat menggambarkan daya tampung beban pencemaran di Kabupaten Gunung Mas. Berdasarkan data dan model yang disusun didapat beban pencemaran terbesar berasal dari sampah yang tidak tertangani dan limbah cair domestik. Selain itu hal yang perlu diperhatikan adalah peningkatan beban pencemaran dari peternakan dimana peningkatan jumlah ternak tanpa adanya pengolahan limbah tentu akan meningkatkan debit BOD.

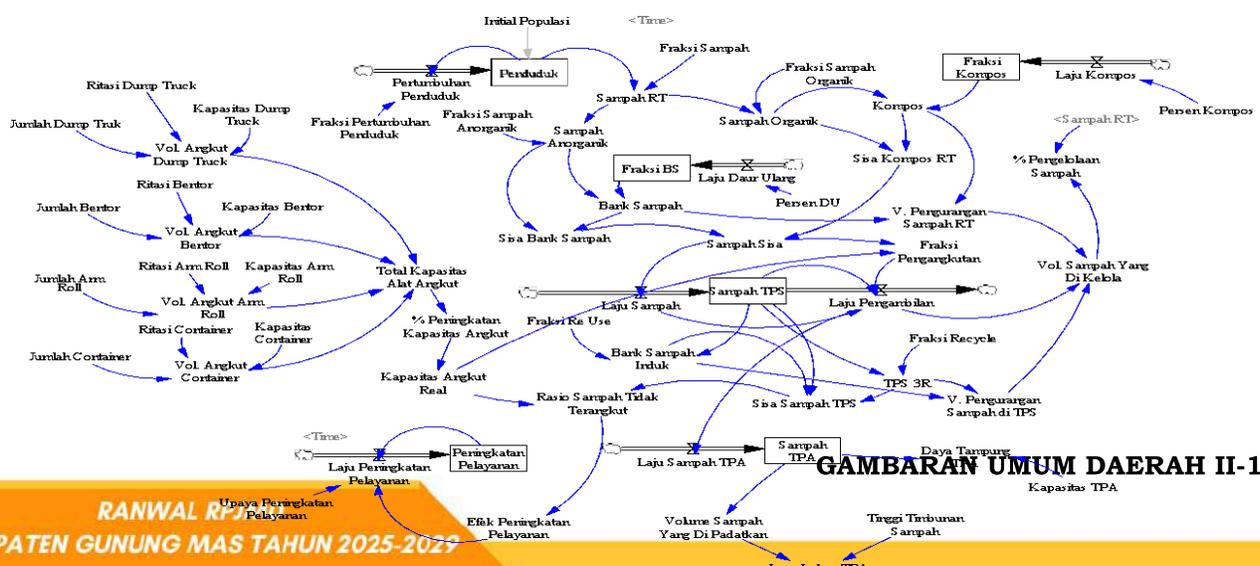
**Gambar II.9**  
**Gambar Grafik Daya Tampung Beban Pencemaran**



Proyeksi daya tampung beban pencemaran dari tahun 2022-2045 pada gambar di atas menunjukkan penurunan dimana nilai awal positif dan pada tahun 2036 diproyeksikan menjadi negatif akibat peningkatan penduduk dan sampah yang tidak terkelola serta industri lainnya. Dari hasil tersebut diperlukan upaya tambahan untuk menjaga daya tampung beban pencemaran tetap positif. Upaya tambahan yang diperlukan khususnya pada pengurangan sampah tidak terkelola sebesar 5%, pengurangan limbah domestik 3% dan penurunan laju beban peternakan sebesar 14%.

### 3. Pengelolaan Persampahan

**Gambar II.10**  
**Gambar Model Pengelolaan Persampahan**

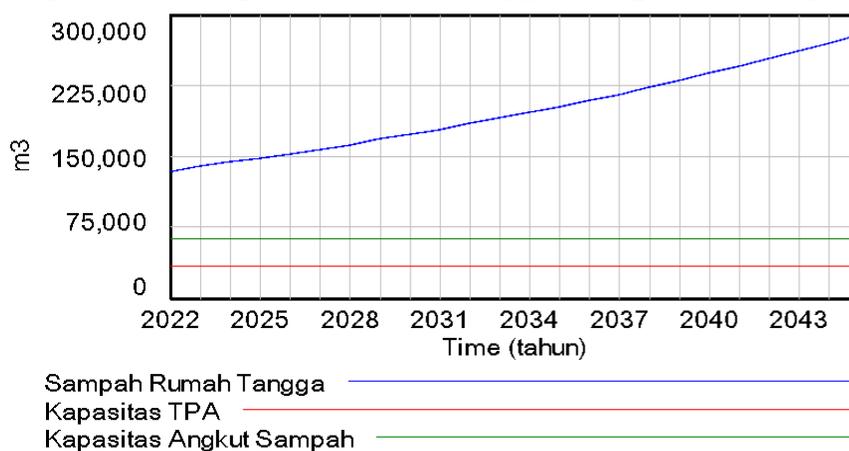


Sumber: Modifikasi dan pengembangan bersama KLHS Center Squad

Model status pengelolaan persampahan dilakukan dengan permodelan sistem dinamik yang diintegrasikan dengan metode *euler*. Di dalam model tersebut mempertimbangkan sampah yang dihasilkan dari aktivitas rumah tangga dengan mempertimbangkan pertumbuhan jumlah penduduk di Kabupaten Gunung Mas, pengelolaan sampah baik organik dan anorganik, kapasitas tempat pembuangan akhir, sisa sampah di tempat pembuangan sementara, serta kapasitas angkut sampah dalam melayani masyarakat. Dari hasil model tersebut, secara real infrastruktur pelayanan baik kapasitas TPA dan kapasitas angkut sampah masih jauh dibandingkan proyeksi sampah yang dihasilkan dari aktivitas rumah tangga seperti pada gambar di bawah. Hal ini terlihat dari grafik antara peningkatan sampah rumah tangga, kapasitas angkut dan kapasitas TPA yang tersedia. Oleh karena itu diperlukan upaya tambahan dalam pengelolaan persampahan.

**Gambar II.11**

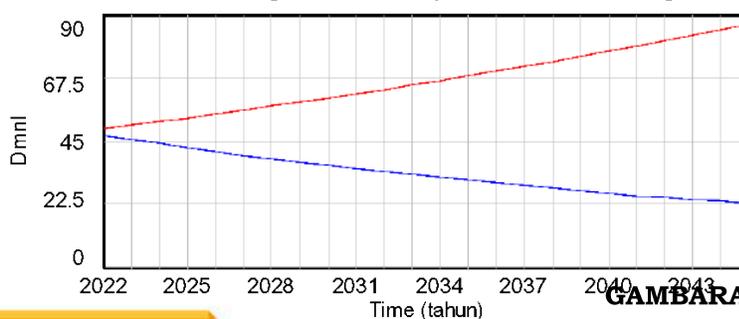
**Grafik Peningkatan Sampah Rumah Tangga, Kapasitas Angkut dan TPA**



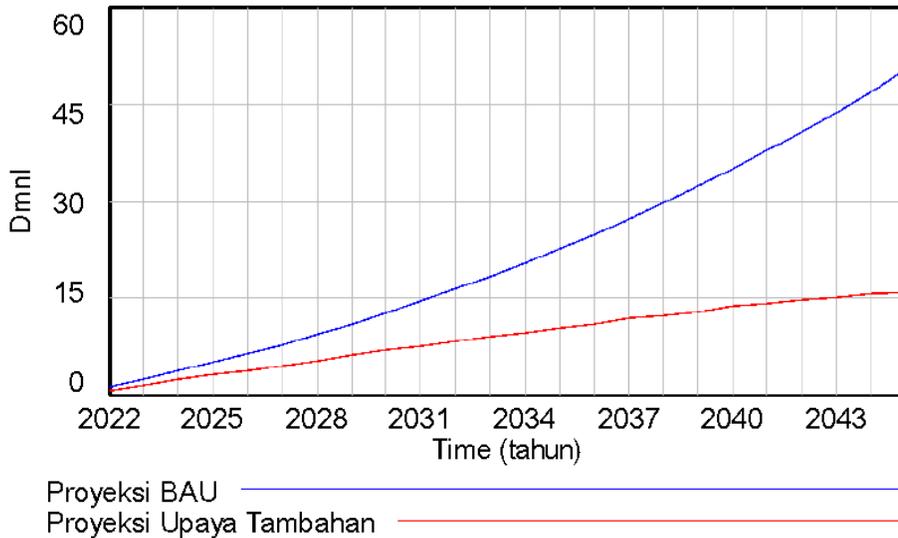
Gambar persentase pengelolaan persampahan menunjukkan sampah yang dikelola oleh kabupaten Gunung Mas, pada kondisi saat ini hanya sekitar 46% sampah yang dikelola oleh Kabupaten Gunung Mas dan diproyeksikan akan terus menurun seiring dengan penambahan jumlah penduduk dan tidak adanya pengelolaan sampah organik dan anorganik. Dalam kasus ini untuk meningkatkan persentase pengelolaan sampah melebihi 80% diperlukan upaya tambahan berupa pemanfaatan kembali sampah anorganik dengan upaya 2% dan komposting sampah organik sebesar 3%. Selain itu dalam menurunkan rasio sampah tidak terangkut diperlukan peningkatan pelayanan dalam pengangkutan persampahan yang merata di Kabupaten Gunung Mas sebesar 20% seperti ditunjukkan pada gambar II.13 di bawah grafik rasio sampah tidak terangkut.

**Gambar II.12**

**Persentase Pengelolaan Persampahan di Kabupaten Gunung Mas**

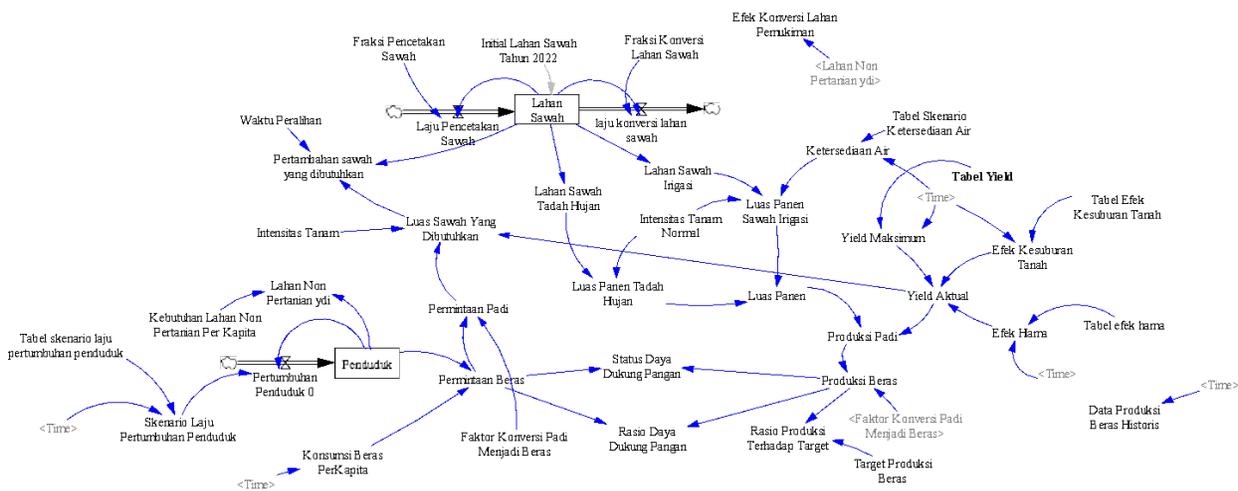


**Gambar II.13**  
**Grafik Rasio Sampah Tidak Terangkut**



4. Daya Dukung Pangan

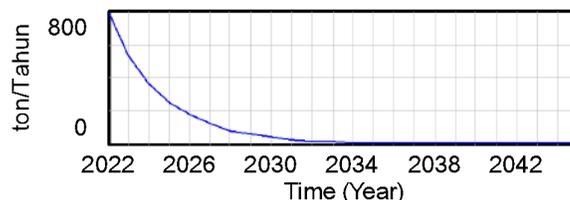
**Gambar II.14**  
**Gambar Model Daya Dukung Pangan**



Model daya dukung pangan dilakukan dengan pemodelan sistem dinamik yang diintegrasikan dengan metode *euler*. Di dalam model tersebut mempertimbangkan produksi dan permintaan beras berdasarkan pertumbuhan penduduk dan konsumsi beras per kapita. Dalam produksi beras yang dipertimbangkan adalah pertumbuhan luas lahan sawah, konversi padi menjadi beras serta faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan padi. Hasil dari model tersebut menunjukkan proyeksi produksi beras terus menurun yang juga tercermin dari data tren luas sawah yang semakin lama semakin kecil.

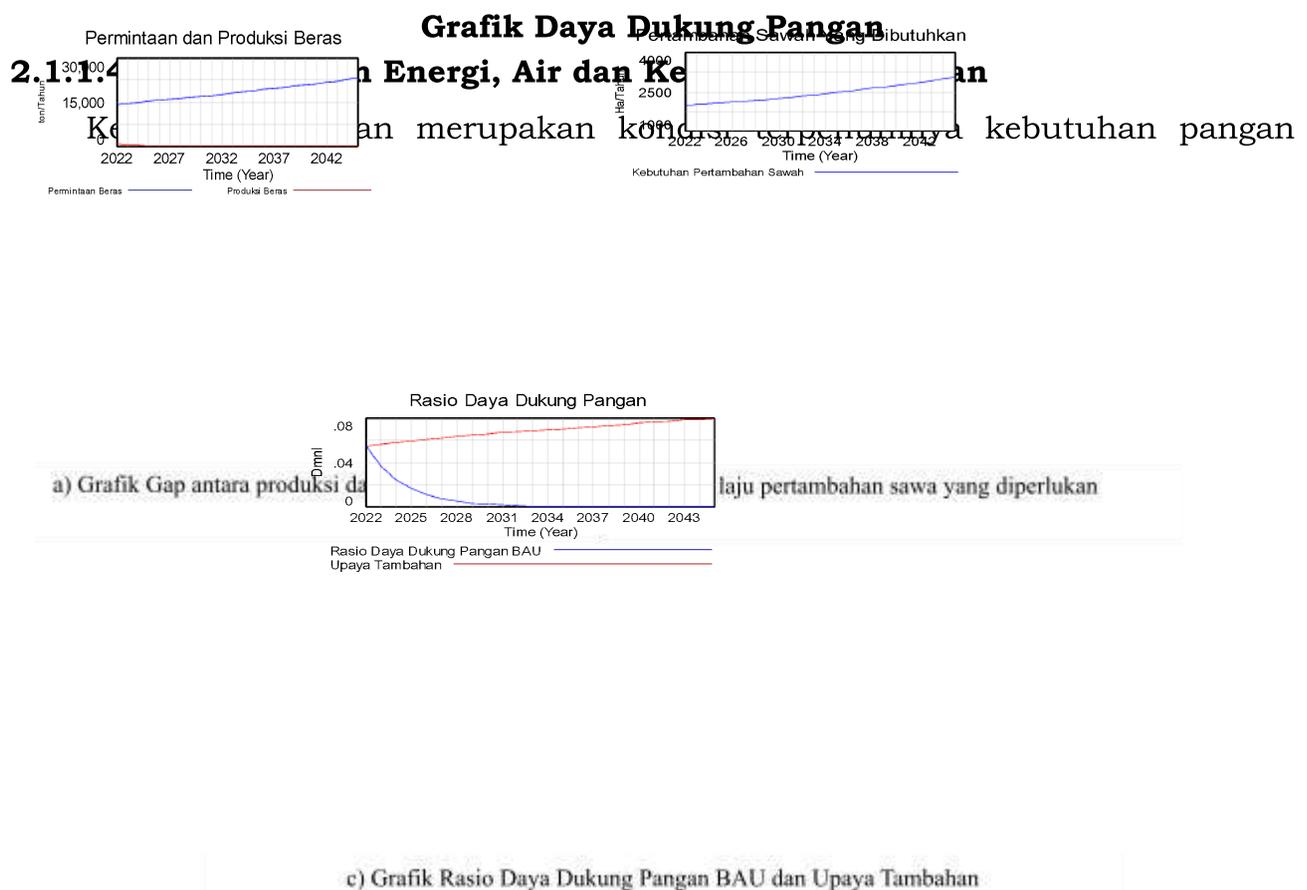
**Gambar II.15**  
**Grafik Proyeksi Produksi Beras di Kabupaten Gunung Mas**

Penurunan produksi beras tersebut tentu akan mengakibatkan gap antara



permintaan dan produksi beras semakin besar, sehingga Kabupaten Gunung Mas

bergantung dari produksi beras diluar kabupaten dengan jumlah yang besar seperti pada grafik antara produksi dan permintaan beras pada Gambar 6.11(a). Hal tersebut juga tercermin dari rasio daya dukung pangan dibawah satu seperti pada Gambar II.16. Untuk mengatasi hal tersebut secara keseluruhan diperlukan peningkatan produksi beras melalui pencetakan sawah pada tahap awal sebesar 1.947 ha/tahun dan terus meningkat. Upaya tambahan yang diperlukan untuk meningkatkan rasio daya dukung pangan minimal sebesar 42%, hal ini menggambarkan diperlukan usaha yang sangat besar dalam mengatasi masalah pangan yang ada di Kabupaten Gunung Mas. Dari hasil tersebut Kabupaten Gunung Mas yang memiliki daya dukung air yang tinggi dapat dimanfaatkan dalam mendukung daya dukung pangan.

**Gambar II.16**

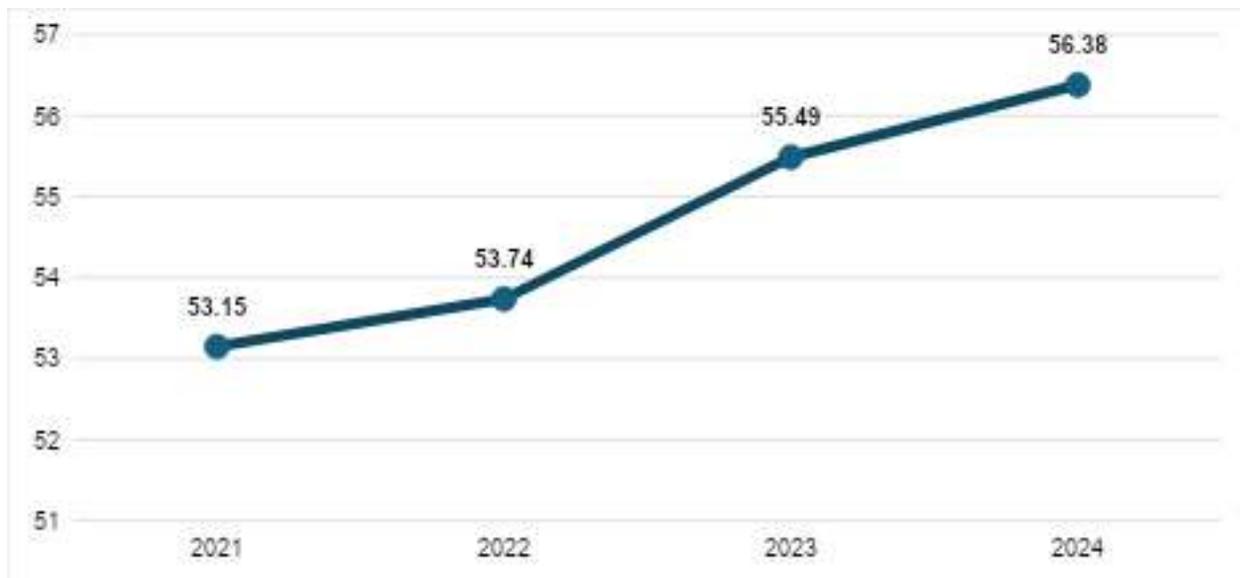
secara menyeluruh, mulai dari tingkat nasional hingga individu, yang tercermin dari ketersediaan pangan yang cukup baik secara jumlah maupun mutu, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau. Hal ini juga harus sejalan dengan nilai-nilai agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, guna menjamin kehidupan yang sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. Pembangunan ketahanan pangan dan gizi memerlukan pendekatan sistemik lintas sektor, yang mencakup upaya peningkatan produksi pangan domestik, stabilisasi ketersediaan dan akses pangan di berbagai tingkatan, serta peningkatan kualitas konsumsi pangan yang didukung oleh infrastruktur yang memadai. Selain itu, kebijakan ekonomi makro yang stabil juga sangat dibutuhkan untuk menjamin kelancaran pasokan dan harga pangan.

Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten Gunung Mas tahun 2024 berada pada angka 56,38 dengan peringkat 462 secara nasional. Peringkat ini menunjukkan bahwa masih terdapat tantangan besar yang harus diatasi di wilayah ini. Beberapa faktor yang kemungkinan besar mempengaruhi rendahnya indeks

tersebut antara lain keterbatasan infrastruktur pendukung seperti jaringan transportasi dan distribusi pangan, rendahnya kapasitas produksi pertanian lokal, serta kurang optimalnya akses masyarakat terhadap pangan bergizi dan aman. Selain itu, tantangan geografis serta keterbatasan sumber daya manusia dan dukungan lintas sektor juga dapat menjadi kendala dalam mewujudkan sistem pangan yang tangguh. Upaya perbaikan secara menyeluruh dan terintegrasi perlu dilakukan, baik dari sisi produksi, distribusi, konsumsi, maupun penguatan kelembagaan pangan di tingkat daerah.

**Gambar II.17**

**Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten Gunung Mas Tahun 2021-2024**



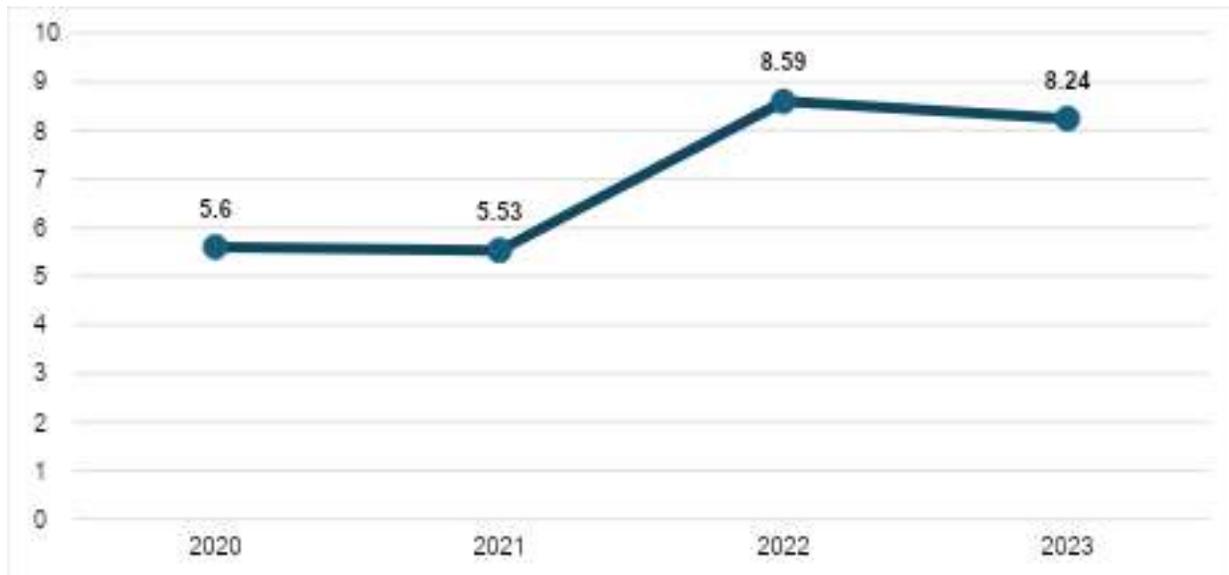
Sumber: Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian, 2022-2025

Prevalensi Ketidakcukupan Pangan atau *Prevalence of Undernourishment* (PoU) merupakan indikator penting yang digunakan untuk mengukur persentase penduduk suatu wilayah yang diperkirakan tidak memperoleh asupan energi makanan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan minimum harian. Indikator ini sangat bermanfaat dalam memantau kondisi ketahanan pangan dan gizi masyarakat, serta menjadi dasar dalam perumusan kebijakan dan intervensi pemerintah untuk mengurangi kelaparan dan kekurangan gizi. Semakin rendah angka PoU, semakin baik pula kondisi ketahanan pangan suatu daerah karena menandakan bahwa lebih banyak penduduk yang telah mampu mengakses pangan yang cukup secara kuantitatif.

Capaian PoU di Kabupaten Gunung Mas menunjukkan tren yang kurang stabil dalam kurun waktu 2020 hingga 2023. Pada tahun 2020, prevalensi ketidakcukupan pangan tercatat sebesar 5,6% dan sedikit menurun menjadi 5,53% pada tahun 2021. Namun, pada tahun 2022 terjadi peningkatan hingga mencapai 8,59%, sebelum akhirnya menurun menjadi 8,24% di tahun 2023. Kenaikan ini dipicu oleh gangguan distribusi akibat kondisi geografis yang sulit dijangkau, ketergantungan terhadap pasokan pangan dari luar daerah, serta rendahnya produktivitas pertanian lokal akibat keterbatasan sarana, teknologi, dan pendampingan. Selain itu, rendahnya daya beli masyarakat dan kurangnya edukasi gizi turut memperburuk akses dan konsumsi pangan yang cukup dan berkualitas. Kondisi ini menunjukkan perlunya intervensi terintegrasi yang mencakup penguatan produksi lokal, perbaikan infrastruktur distribusi, serta

peningkatan literasi pangan dan perlindungan sosial untuk menurunkan angka PoU secara berkelanjutan.

**Gambar II.18**  
**Prevalensi Ketidacukupan Pangan Kabupaten Gunung Mas Tahun 2020-2023**



Sumber: BPS RI, 2024

#### 2.1.1.5 Lingkungan Hidup Berkualitas

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) merupakan indikator komposit yang digunakan untuk mengukur kondisi lingkungan suatu wilayah secara keseluruhan. IKLH mencakup tiga komponen utama, yaitu Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan. Ketiga komponen ini mencerminkan kualitas sumber daya alam yang menjadi penopang kehidupan manusia. IKLH bermanfaat dalam mengevaluasi efektivitas kebijakan lingkungan, memantau tren kualitas lingkungan dari waktu ke waktu, serta menjadi dasar dalam perumusan kebijakan pembangunan berkelanjutan.

Berdasarkan data IKLH Kabupaten Gunung Mas tahun 2020–2024, terlihat adanya variasi capaian dari tahun ke tahun. Pada tahun 2020, IKLH berada di angka 76, kemudian menurun menjadi 69,8 pada tahun 2021, dan terus mengalami sedikit penurunan hingga mencapai 68,82 di tahun 2022. Namun pada tahun 2023, terjadi sedikit peningkatan menjadi 70,58, sebelum kembali menurun ke angka 69,33 pada tahun 2024. Komponen yang paling stabil dan tinggi adalah Indeks Kualitas Udara, dengan peningkatan signifikan dari 89 (2020) menjadi 92,82 (2024). Sebaliknya, Indeks Kualitas Air menunjukkan tren penurunan, dari 46 (2020) menjadi 42,86 (2024), yang dapat menjadi perhatian khusus dalam pengelolaan sumber daya air di wilayah ini. Indeks Kualitas Tutupan Lahan relatif stabil meski sedikit menurun di tahun 2023, lalu naik kembali di 2024. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun kualitas udara cukup baik dan tutupan lahan terjaga, tantangan utama terletak pada peningkatan kualitas air sebagai upaya menjaga keseimbangan ekologi secara keseluruhan.

**Tabel II.12**

### Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten Gunung Mas, Tahun 2020 – 2024

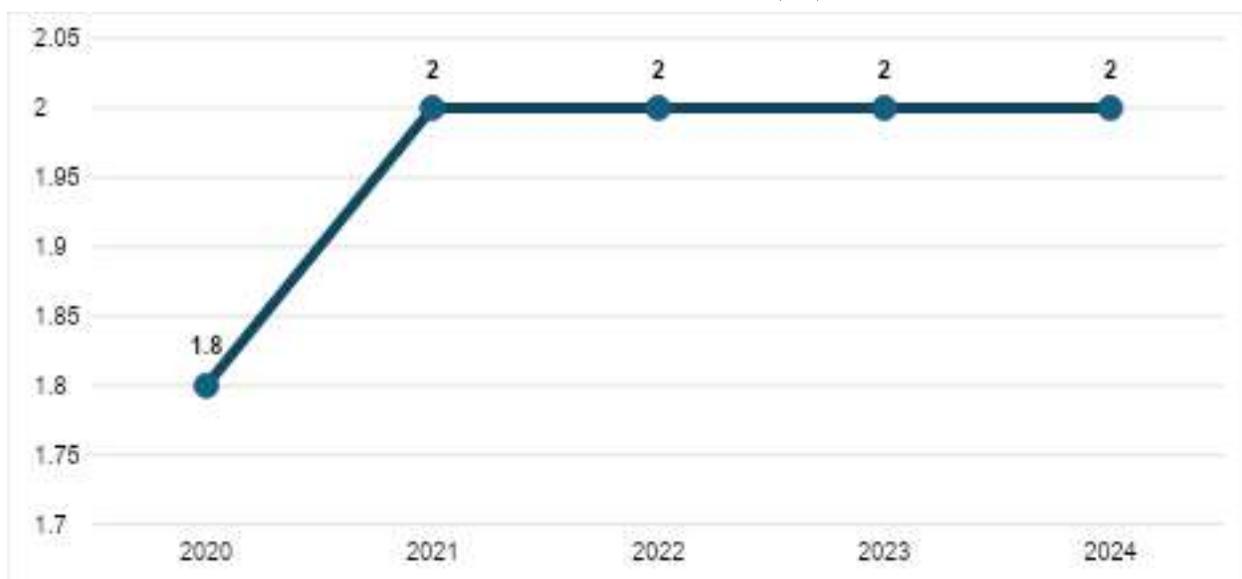
Komponen IKLH	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Kualitas Air	46	50,00	46,67	50,00	42,86
Indeks Kualitas Udara	89	87,65	87,85	89,64	92,82
Indeks Kualitas Tutupan Lahan	90	71,25	71,25	70,66	71,31
<b>IKLH</b>	76	69,8	68,82	70,58	69,33

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Perhubungan, 2025

Selain dilihat dari Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH), kualitas lingkungan hidup juga dapat diukur melalui indikator akses sanitasi aman oleh rumah tangga. Akses terhadap sanitasi yang layak dan aman merupakan aspek penting dalam menjaga kesehatan masyarakat dan mencegah pencemaran lingkungan. Berdasarkan data di Kabupaten Gunung Mas tahun 2020–2024, proporsi rumah tangga yang memiliki akses sanitasi aman masih sangat rendah dan stagnan. Pada tahun 2020, angka ini berada di 1,8%, kemudian meningkat sedikit menjadi 2% pada tahun 2021, dan stagnan di angka tersebut hingga tahun 2024. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat upaya perbaikan, namun peningkatan akses sanitasi aman masih sangat minim dalam 5 (lima) tahun terakhir. Hal ini mengindikasikan perlunya intervensi lebih serius, baik dalam bentuk infrastruktur maupun edukasi kepada masyarakat, agar standar sanitasi dapat ditingkatkan secara lebih merata dan berkelanjutan di wilayah ini.

**Gambar II.19**

#### Rumah Tangga mempunyai Akses Sanitasi Aman di Kabupaten Gunung Mas Tahun 2020-2024 (%)



Sumber: Dinas Pekerjaan Umum, 2025

#### 2.1.1.6 Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim

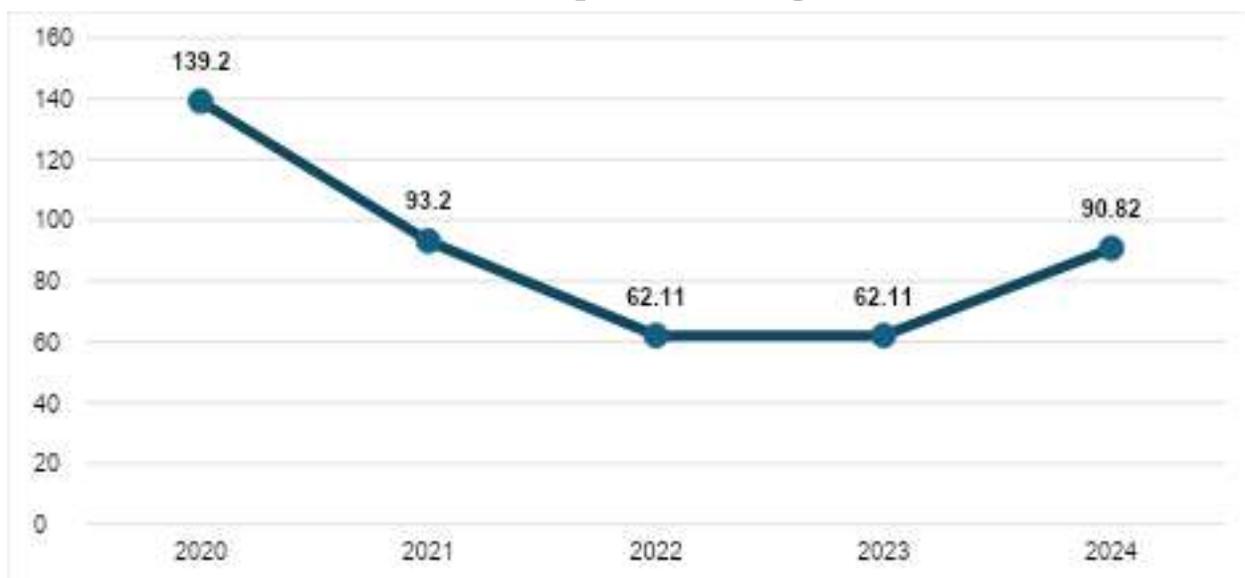
Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) yang dikembangkan oleh BNPB disusun berdasarkan tiga komponen utama, yaitu bahaya (*hazard*), kerentanan (*vulnerability*), dan kapasitas (*capacity*). Bahaya dihitung berdasarkan

kemungkinan kejadian suatu bencana secara spasial, frekuensi, dan kekuatannya, seperti gempa, banjir, dan letusan gunung api. Kerentanan mencakup aspek sosial, ekonomi, fisik, dan lingkungan yang membuat suatu wilayah rentan terhadap bencana. Sementara itu, kapasitas mencerminkan kemampuan daerah dalam menghadapi bencana, diukur melalui tujuh prioritas seperti kebijakan, perencanaan, sistem informasi, kesiapsiagaan, dan pemulihan.

Berdasarkan data Indeks Risiko Bencana Kabupaten Gunung Mas tahun 2020–2024, terlihat adanya tren penurunan signifikan dari tahun 2020 (139,2) ke tahun 2022 (62,11), yang menunjukkan perbaikan dalam pengurangan risiko bencana, baik dari sisi mitigasi maupun kapasitas penanganan. Namun, pada tahun 2024 terjadi kenaikan kembali menjadi 90,82. Peningkatan ini bisa mengindikasikan adanya penurunan kapasitas daerah atau meningkatnya ancaman bencana yang belum diimbangi dengan strategi mitigasi yang cukup. Meskipun nilai tahun 2024 masih lebih rendah dibandingkan tahun 2020, tren ini menunjukkan perlunya evaluasi terhadap kebijakan pengurangan risiko dan peningkatan kesiapsiagaan di tingkat lokal agar capaian positif di tahun-tahun sebelumnya dapat dipertahankan atau ditingkatkan.

**Gambar II.20**

**Indeks Risiko Bencana Kabupaten Gunung Mas Tahun 2020-2024**



Sumber: Inarisk, 2024

### **2.1.1.7 Demografi**

Aspek demografi dalam pembangunan Kabupaten Gunung Mas mencakup analisis dan pemahaman karakteristik populasi yang berpengaruh pada perencanaan pembangunan. Penduduk sebagai objek sekaligus subjek dalam pembangunan wilayah merupakan salah satu potensi internal yang cukup penting dalam pengembangan wilayah itu sendiri, dimana kualitas pengelolaan potensi dan kapasitas penduduk akan menentukan tingkat keberhasilan pembangunan daerah

#### **1. Kependudukan**

Jumlah penduduk senantiasa berubah dari waktu ke waktu. Terdapat beragam faktor yang menyebabkan perubahan jumlah penduduk. Misalnya, wabah penyakit atau epidemi, kelaparan, dan bencana alam. Di lain pihak, kestabilan wilayah, peningkatan gizi, dan kesehatan dapat mengakibatkan

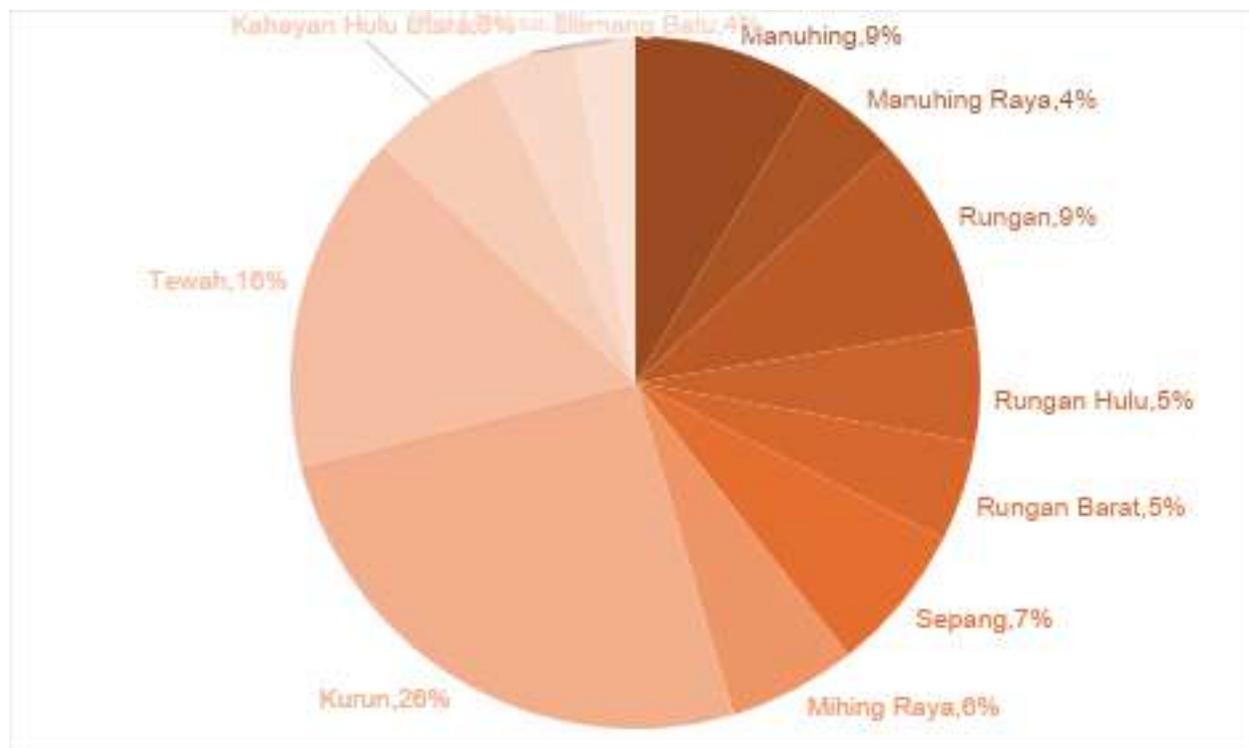
jumlah penduduk cenderung naik. Fenomena bertambah atau berkurangnya jumlah penduduk dari waktu ke waktu dalam suatu wilayah tertentu sehingga gejala dinamika penduduk dipengaruhi oleh tiga faktor utama yaitu kelahiran (fertilitas atau natalitas), kematian (mortalitas), dan perpindahan penduduk (migrasi).

Dalam pelaksanaan pembangunan, penduduk merupakan faktor yang sangat dominan, karena tidak saja berperan sebagai pelaksana pembangunan, tetapi juga sebagai sasaran pembangunan. Dengan kata lain bahwa sumber daya manusia yang berkualitas tinggi sangat dibutuhkan dalam menunjang keberhasilan pembangunan. Oleh karena itu pembangunan sumber daya manusia merupakan suatu keharusan dalam pelaksanaan pembangunan yang berkesinambungan di Kabupaten Gunung Mas. Sebagai input dalam setiap penyusunan rencana pembangunan, maka pengetahuan tentang data kondisi kependudukan eksisting di wilayah rencana sangat dibutuhkan.

Jumlah penduduk Kabupaten Gunung Mas pada tahun 2024 berdasarkan data BPS mencapai 145,53 ribu jiwa, terdiri dari 76,40 ribu laki-laki dan 69,13 ribu perempuan, dengan rasio jenis kelamin sebesar 111. Laju pertumbuhan penduduk dari tahun 2023 ke 2024 tercatat sebesar 1,89%, menunjukkan adanya peningkatan jumlah penduduk dalam satu tahun terakhir. Adapun kecamatan dengan jumlah penduduk terbanyak adalah Kecamatan Kurun (37,4 ribu jiwa), Kecamatan Tewah (23,07 ribu jiwa), Kecamatan Rungan (13,63 ribu jiwa), dan Kecamatan Manuhing (12,54 ribu jiwa), yang menempati posisi empat teratas dalam jumlah populasi di Kabupaten Gunung Mas.

**Gambar II.21**

**Persentase Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Gunung Mas Tahun 2024**



**Tabel II.13**  
**Jumlah, Distribusi dan Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan Kabupaten Gunung Mas Tahun 2024**

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk (ribu jiwa)	Persentase Penduduk	Laju Pertumbuhan Penduduk (%)
1	Manuhing	12,54	8,61	2,86
2	Manuhing Raya	6,5	4,47	0,79
3	Rungan	13,63	9,37	1,58
4	Rungan Hulu	7,75	5,32	1,02
5	Rungan Barat	6,8	4,67	0,39
6	Sepang	10,16	6,98	3,23
7	Mihing Raya	8,73	6	3,23
8	Kurun	37,4	25,7	2,88
9	Tewah	23,07	15,85	1,24
10	Kahayan Hulu Utara	8,85	6,08	0,32
11	Damang Batu	5,93	4,07	2,13
12	Miri Minasa	4,2	2,89	0,32
<b>Gunung Mas</b>		<b>145,534</b>	<b>100</b>	<b>1,95</b>

Sumber: BPS, Kabupaten Gunung Mas dalam angka 2025

## 2. Struktur Penduduk Menurut Kelompok Umur

Pertumbuhan penduduk di Kabupaten Gunung Mas selalu naik setiap tahunnya. Pada tahun 2024 sebanyak 145,534 jiwa. Analisis kependudukan salah satunya adalah piramida penduduk yang dilihat dari karakteristik umur. Piramida penduduk merupakan sebuah gambaran awal mengenai struktur kependudukan yang dilihat dari segi umur penduduk dan jenis kelamin untuk dianalisis mengenai produktivitas umur. Jika dilihat dari bentuk piramida penduduk Kabupaten Gunung Mas, menggambarkan sebagian besar penduduk Kabupaten Gunung Mas berada pada usia muda lebih dominan dibandingkan dengan orang-orang yang masuk dalam usia produktif. Jumlah penduduk usia muda perlu diikuti oleh upaya pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas manusia melalui pendidikan dan kesehatan. Di satu sisi pertumbuhan penduduk ini merupakan modal dasar pembangunan yang cukup potensial, namun di sisi lain juga mengandung permasalahan yang cukup krusial apabila pertumbuhannya tidak dikendalikan.

**Tabel II.14**

**Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kabupaten Gunung Mas (Ribuan Jiwa) Tahun 2024**

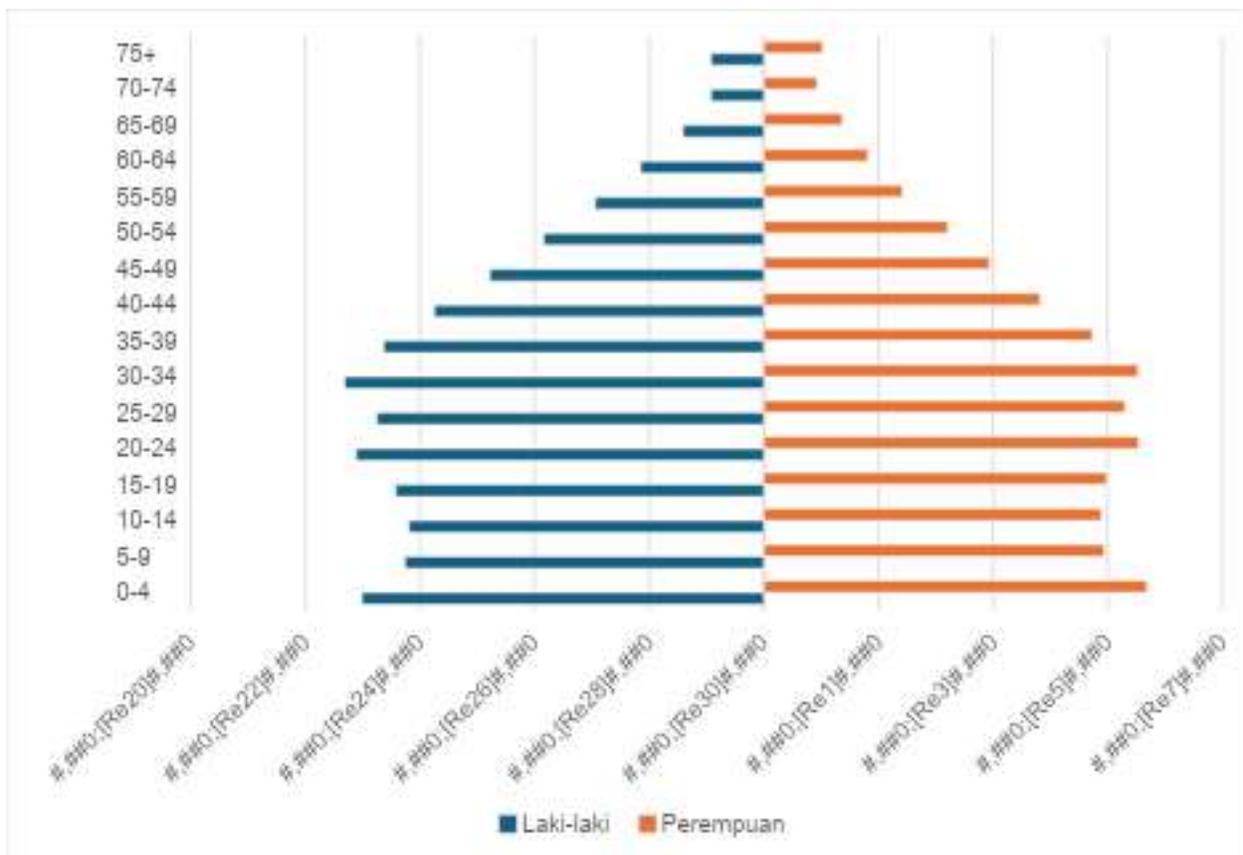
<b>Kelompok Umur</b>	<b>Laki-laki</b>	<b>Perempuan</b>	<b>Jumlah</b>
0-4	7,01	6,69	13,7
5-9	6,26	5,94	12,2
10-14	6,19	5,89	12,07
15-19	6,42	5,98	12,4
20-24	7,11	6,54	13,66
25-29	6,75	6,3	13,05
30-34	7,31	6,53	13,84
35-39	6,63	5,73	12,36
40-44	5,75	4,82	10,57
45-49	4,78	3,94	8,72
50-54	3,84	3,21	7,05
55-59	2,94	2,42	5,36
60-64	2,15	1,82	3,97
65-69	1,41	1,37	2,78
70-74	0,92	0,93	1,86
75+	0,92	1,03	1,95
<b>Kabupaten Gunung Mas</b>	<b>76,4</b>	<b>69,13</b>	<b>145,53</b>

Sumber: BPS Kabupaten Gunung Mas, 2025

Salah satu langkah antisipasi untuk menekan laju pertumbuhan penduduk yang begitu cepat adalah menggugah kesadaran masyarakat dan sosialisasi secara berkelanjutan kepada keluarga usia produktif untuk lebih berpartisipasi secara aktif dalam pemantapan dan peningkatan program Keluarga Berencana (KB).

Gambar II.22

**Piramida Penduduk Kabupaten Gunung Mas Tahun 2024 (ribu jiwa)**



Sumber: BPS Kabupaten Gunung Mas, 2025

### 3. Keberadaan Masyarakat Adat

Kabupaten Gunung Mas merupakan salah satu daerah di Provinsi Kalimantan Tengah, Indonesia, yang memiliki kekayaan budaya serta keberagaman masyarakat adat yang masih kuat menjaga tradisi dan kearifan lokal mereka. Keberadaan masyarakat adat di wilayah ini menjadi bagian penting dari identitas budaya daerah dan warisan bangsa. Beberapa kelompok masyarakat adat yang hidup di Kabupaten Gunung Mas dan memiliki keberagaman budaya serta tradisi dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Suku Dayak Ngaju: Suku Dayak Ngaju merupakan kelompok etnis mayoritas di Kabupaten Gunung Mas. Mereka memiliki budaya yang kaya dan khas, terutama dalam hal bahasa, sistem kepercayaan (seperti Kaharingan), adat istiadat, serta seni tradisional seperti tari, musik, dan kerajinan tangan. Kehidupan masyarakat Dayak Ngaju erat kaitannya dengan alam dan hutan, yang menjadi bagian tak terpisahkan dari sistem kepercayaan dan pola hidup mereka.
2. Suku Dayak Ot Danum: Suku ini juga merupakan bagian dari masyarakat Dayak yang mendiami wilayah Kabupaten Gunung Mas. Mereka memiliki dialek bahasa sendiri, serta berbagai tradisi unik seperti upacara adat dan teknik bercocok tanam tradisional. Suku Dayak Ot Danum dikenal dengan rumah betang (rumah panjang) sebagai bentuk tempat tinggal komunal yang mencerminkan nilai kebersamaan.
3. Suku Jawa dan Bali: Selain masyarakat Dayak, terdapat pula komunitas pendatang seperti suku Jawa dan Bali yang telah lama bermukim di Kabupaten Gunung Mas. Mereka datang melalui program transmigrasi dan membawa serta kebudayaan mereka sendiri, seperti dalam bentuk seni pertunjukan, adat istiadat, dan praktik keagamaan.

4. Suku-suku Minoritas Lainnya: Kabupaten Gunung Mas juga dihuni oleh kelompok etnis lain seperti suku Madura, Bugis, dan Banjar, yang meskipun jumlahnya tidak sebesar kelompok utama, turut menyumbangkan warna dalam keberagaman budaya daerah ini.

Masyarakat adat di Kabupaten Gunung Mas terus berupaya menjaga dan melestarikan nilai-nilai leluhur, termasuk dalam hal agama lokal (seperti Kaharingan), adat istiadat, sistem sosial tradisional, dan pengelolaan sumber daya alam secara arif. Keberadaan mereka menjadi pilar penting dalam menjaga keseimbangan lingkungan dan budaya lokal.

Pemerintah daerah bersama dengan berbagai pihak telah melakukan berbagai langkah untuk mendukung hak-hak masyarakat adat, seperti pengakuan wilayah adat, pelestarian budaya, dan pemberdayaan ekonomi berbasis lokal. Namun demikian, tantangan seperti modernisasi, ekspansi perkebunan, penebangan hutan, dan perubahan iklim menjadi ancaman nyata bagi kelangsungan hidup masyarakat adat. Oleh karena itu, perlu adanya pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif, yang melibatkan masyarakat adat sebagai subjek aktif dalam proses pembangunan, serta penghormatan terhadap hak-hak tradisional mereka.

#### **4. Proyeksi Demografi Kabupaten Gunung Mas**

Proyeksi penduduk merupakan perkiraan tentang bagaimana jumlah penduduk suatu wilayah akan berubah dari waktu ke waktu, berdasarkan tren demografis yang ada pada saat ini. Proyeksi penduduk juga merupakan upaya untuk memprediksi bagaimana struktur umur dan ukuran populasi suatu wilayah sehingga dapat dijadikan acuan penyusunan kebijakan khususnya dalam hal perencanaan kebijakan publik, infrastruktur, ekonomi, hingga pendidikan dan kesehatan.

Selama pelaksanaan pembangunan jangka menengah di Kabupaten Gunung Mas hingga tahun 2030, diproyeksikan terjadi kenaikan jumlah penduduk secara bertahap hingga mencapai 161,46 ribu jiwa di tahun 2023. Adapun rasio jenis kelamin mengalami penurunan namun masih di atas 100 yang mengindikasikan bahwa jumlah penduduk laki-laki lebih banyak dibandingkan penduduk perempuan. Kepadatan penduduk di Kabupaten Gunung Mas mengalami kenaikan sebagai dampak meningkatnya jumlah penduduk, namun dari sisi rasio ketergantungan, terjadi peningkatan ketergantungan antara usia non produktif terhadap penduduk usia produktif. Meskipun begitu, angka ketergantungan masih di bawah 50, yang mengindikasikan bahwa Kabupaten Gunung Mas berada pada jendela Bonus Demografi.

Kondisi ini perlu menjadi perhatian dan isu yang harus ditindaklanjuti sehingga perlu adanya program prioritas khusus dalam pemberdayaan SDM sehingga mampu mengakselerasi pencapaian pembangunan yang lebih baik. Bonus demografi juga bisa menjadi bumerang jika tidak dikelola dengan baik. Sebagai salah satu contoh, kurangnya lapangan kerja dapat berakibat pada naiknya tingkat pengangguran. Selain itu, banyaknya penduduk usia produktif yang tidak dibarengi dengan naiknya kualitas sumber daya manusia, dapat mengakibatkan tingkat perekonomian masyarakat tidak mengalami eskalasi atau terjebak dalam kondisi *middle income trap*.

**Tabel II.15**  
**Proyeksi Penduduk Kabupaten Gunung Mas Tahun 2025-2030**

Indikator Proyeksi Penduduk	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Jumlah Penduduk (Ribu Jiwa)	148,23	150,94	153,61	156,26	158,87	161,46
Laki-laki	77,69	79,05	80,36	81,64	82,92	84,16
Perempuan	70,54	71,89	73,25	74,62	75,95	77,30
Rasio Jenis Kelamin	110,14	109,96	109,71	109,41	109,18	108,87
Kepadatan Penduduk	15,91	16,20	16,49	16,77	17,05	17,33
Rasio Ketergantungan	44,15	44,22	44,32	44,43	44,60	44,77
Kelompok Umur (Ribu Jiwa)						
0-14	38,50	39,03	39,56	40,08	40,61	41,13
15-64	102,83	104,66	106,44	108,19	109,87	111,53
65+	6,90	7,25	7,61	7,99	8,39	8,80

Sumber: BPS Kalimantan Tengah, 2025, data diolah

### 2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Dalam rangka mewujudkan masyarakat sejahtera, ada beberapa aspek pembangunan yang harus diperhatikan, yaitu aspek ekonomi dan sosial budaya. Pada aspek ekonomi, beberapa indikator yang umum digunakan untuk menganalisis keberhasilan pembangunan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat adalah pertumbuhan ekonomi, inflasi, serta ketimpangan pendapatan.

Aspek sosial dan seni budaya terlihat dalam indikator bidang pendidikan dan kesehatan, antara lain Angka Partisipasi Kasar (APK), angka partisipasi murni (APM), Angka Harapan Hidup (AHH), Angka Kematian Ibu melahirkan (AKI), balita gizi buruk, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), angka kemiskinan, selain itu aspek kesejahteraan masyarakat berisi tentang capaian-capaian makro pembangunan yang mengindikasikan tentang kondisi tingkat kesejahteraan masyarakat. Aspek ini terdiri atas fokus pemerataan ekonomi, kesejahteraan sosial serta seni budaya dan olah raga dan sebagainya. Penjelasan terinci aspek kesejahteraan Masyarakat dapat dilihat di bawah ini:

#### 2.1.2.1 Kesejahteraan Ekonomi

Indikator yang dipakai dalam mengukur pemerataan ekonomi adalah pertumbuhan ekonomi dan laju ekonomi. Indikator-indikator tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

##### 1. Laju Pertumbuhan Ekonomi

Laju pertumbuhan perekonomian di Kabupaten Gunung Mas mengalami perubahan setiap tahunnya dalam periode 2020-2024. Pada tahun 2020, pertumbuhan ekonomi tercatat sebesar 3,39%, yang dipengaruhi oleh dampak pandemi Covid-19 yang melanda secara global. Seiring dengan pemulihan ekonomi, pertumbuhan meningkat menjadi 5,09% pada 2021 dan terus naik secara signifikan menjadi 6,47% pada 2022, menunjukkan adanya perbaikan aktivitas ekonomi di berbagai sektor. Namun pada tahun 2023, pertumbuhan ekonomi sedikit melambat menjadi 4,25%, dan pada 2024 kembali mengalami kenaikan menjadi 4,48%. Meskipun mengalami perlambatan di beberapa tahun, tren pertumbuhan ekonomi Kabupaten Gunung Mas secara keseluruhan menunjukkan pergerakan positif seiring dengan upaya pemulihan dan pengembangan sektor ekonomi di daerah setempat.

**Tabel II.16**  
**Laju Pertumbuhan Ekonomi Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Gunung Mas, Tahun 2020-2024**

Tahun	Harga Berlaku	Harga Konstan (2010=100)	Pertumbuhan Nyata (%)
2024	9761,7	4412,2	4,48
2023	8620	4222,9	4,25
2022	8135,3	4050,9	6,47
2021	7173,2	3804,7	5,09
2020	6275	3620,4	3,39

Sumber: Kabupaten Gunung Mas dalam angka 2025

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi suatu wilayah dalam periode tertentu. Penghitungan PDRB dilakukan berdasarkan harga berlaku, yaitu harga pada tahun penghitungan, serta harga konstan, yakni harga yang mengacu pada tahun dasar penghitungan. Kabupaten Gunung Mas memiliki perekonomian yang bergantung pada sektor pertanian, terutama subsektor perkebunan, karena karakteristik wilayahnya yang mendukung kegiatan tersebut. Meskipun pertumbuhan PDRB bersifat naik turun, secara tren terus mengalami peningkatan. Berdasarkan data Kabupaten Gunung Mas dalam Angka 2025, distribusi sektoral terhadap pembentukan PDRB atas harga berlaku tahun 2024 menunjukkan bahwa sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan tetap menjadi penyumbang terbesar dengan 33,05%, sama seperti tahun-tahun sebelumnya. Sektor konstruksi juga berkontribusi cukup besar, yakni 12,63%, dan terus menunjukkan peran signifikan selama dua tahun terakhir.

Sementara itu, sektor pertambangan yang pada periode 2020–2022 memiliki kontribusi tinggi, seperti 13,69% pada 2020, terus mengalami penurunan hingga hanya 8,33% pada 2024. Penurunan ini disebabkan oleh berkurangnya lokasi pertambangan emas di Kabupaten Gunung Mas, yang berdampak pada menurunnya kontribusi sektor tersebut terhadap perekonomian daerah. Menyadari bahwa sumber daya tambang semakin lama dapat habis, pemerintah daerah kini berupaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan mengajarkan praktik usaha pertanian, perikanan, dan peternakan sebagai alternatif sumber mata pencaharian agar masyarakat tidak lagi bergantung pada sektor pertambangan. Secara keseluruhan, distribusi PDRB Kabupaten Gunung Mas mencerminkan dominasi sektor primer dan adanya pergeseran kontribusi antar sektor ekonomi yang perlu diantisipasi demi keberlanjutan ekonomi daerah.

**Tabel II.17**  
**Distribusi PDRB Kabupaten Gunung Mas Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2020-2024**

No	Sektor	2020	2021	2022	2023*	2024**
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	29,2	30,86	29,56	31,69	33,05
2	Pertambangan/Penggalian	13,69	13,08	13,86	8,66	8,33

3	Industri Pengolahan	8,28	8,24	8,2	8,52	8,28
4	Pengadaan Listrik dan Gas	0,12	0,35	0,35	0,37	0,35
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,05	0,05	0,05	0,06	0,05
6	Konstruksi	11,88	11,9	11,96	12,79	12,63
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	10,08	9,59	9,93	10,2	9,98
8	Transportasi dan Pergudangan	1,8	1,79	1,89	2,07	2,18
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1,66	1,54	1,66	1,7	1,65
10	Informasi dan Komunikasi	1,23	1,34	1,39	1,44	1,35
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	0,53	0,52	0,56	0,6	0,57
12	Real Estate	2,96	2,83	2,76	2,9	2,69
13	Jasa Perusahaan	0,05	0,04	0,05	0,05	0,05
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan social Wajib	6,9	6,42	5,86	6,1	6,25
15	Jasa Pendidikan	7,79	7,37	7,79	8,39	8,24
16	Jasa Kesehatan & Kegiatan Sosial	3,5	3,8	3,84	4,16	4,03
17	Jasa Lainnya	0,29	0,27	0,27	0,3	0,29
<b>Distribusi PDRB</b>		<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

Sumber: Kabupaten Gunung Mas Dalam Angka 2025

## 2. Tingkat Kemiskinan

Angka kemiskinan merupakan indikator makro untuk melihat sejauh mana tingkat kesejahteraan masyarakat dalam suatu daerah. Kemiskinan merupakan kondisi di mana terjadi ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan dan kesehatan.

Angka kemiskinan diukur berdasarkan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan (*basic needs approach*). Konsep ini mengacu pada *Handbook on Poverty and Inequality* yang diterbitkan oleh *Worldbank*. Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Penduduk dikategorikan sebagai penduduk miskin jika memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan.

Garis Kemiskinan (GK) mencerminkan nilai rupiah pengeluaran minimum yang diperlukan seseorang untuk memenuhi kebutuhan pokok hidupnya selama sebulan, baik kebutuhan makanan maupun non- makanan. GK terdiri dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM). Selama periode 5 (lima) tahun ini garis kemiskinan cenderung meningkat/naik tiap tahunnya, yang mana mempengaruhi juga jumlah Penduduk miskin tiap tahunnya yang ikut naik. Penduduk Miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan.

Indeks Kedalaman Kemiskinan-P1 merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan. Indeks Keparahan Kemiskinan P2 memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Semakin tinggi

nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin.

Berdasarkan data tahun 2020–2024, garis kemiskinan di Kabupaten Gunung Mas mengalami kenaikan setiap tahunnya, dari Rp438.881 pada tahun 2020 menjadi Rp562.332 pada tahun 2024. Seiring dengan itu, jumlah penduduk miskin juga mengalami peningkatan. Pada tahun 2020, terdapat 5,78 ribu jiwa penduduk miskin dengan persentase 4,75%. Angka ini meningkat pada tahun 2021 menjadi 6,29 ribu jiwa dengan persentase 5,35%, yang disebabkan oleh dampak pandemi COVID-19 yang masih mempengaruhi perekonomian masyarakat. Pada tahun 2022, jumlah penduduk miskin kembali naik menjadi 6,70 ribu jiwa atau 5,64%, dengan garis kemiskinan meningkat menjadi Rp479.550. Peningkatan ini dikarenakan kenaikan harga kebutuhan pokok serta tantangan dalam pemulihan ekonomi pasca-pandemi.

Pada tahun 2023, jumlah penduduk miskin sedikit menurun menjadi 6,55 ribu jiwa dengan persentase 5,47%, yang kemungkinan besar dipengaruhi oleh perbaikan ekonomi dan bantuan sosial dari pemerintah. Namun, di tahun 2024, angka kemiskinan kembali meningkat menjadi 6,86 ribu jiwa, dengan persentase penduduk miskin naik menjadi 5,68%. Kenaikan ini disebabkan oleh naiknya garis kemiskinan yang cukup signifikan dibanding tahun sebelumnya, serta faktor ekonomi seperti kenaikan harga barang dan biaya hidup. Selain itu, indeks kedalaman dan keparahan kemiskinan pada tahun 2024 menunjukkan sedikit perbaikan dibandingkan tahun 2022, yang menandakan bahwa meskipun jumlah penduduk miskin bertambah, tingkat ketimpangan ekonomi dan tingkat keparahan kemiskinan secara perlahan mulai berkurang.

**Tabel II.18**

**Tabel Garis Kemiskinan, Penduduk Miskin, P0, P1, dan P2 Kabupaten Gunung Mas Tahun 2020-2024**

Tahun	Garis kemiskinan (Rp)	Jumlah Penduduk Miskin (Ribu Jiwa)	Persentase Penduduk Miskin (%)	Indeks Kedalaman Kemiskinan	Indeks Keparahan Kemiskinan
2024	562.332	6,86	5,68	0,48	0,09
2023	526.341	6,55	5,47	0,49	0,06
2022	479.550	6,70	5,64	0,99	0,26
2021	456.984	6,29	5,35	0,53	0,1
2020	438.881	5,78	4,75	0,75	0,21

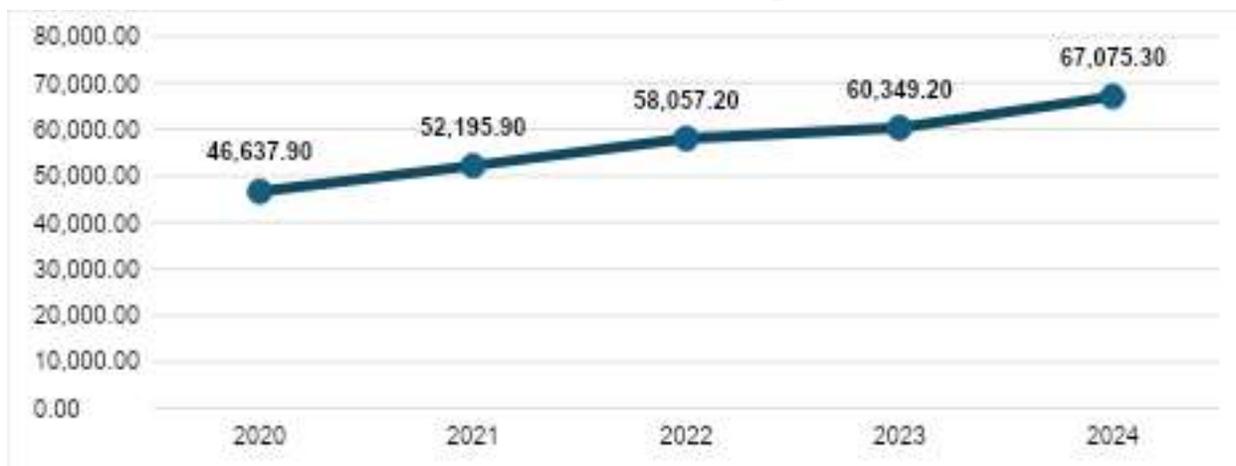
Sumber: BPS Kabupaten Gunung Mas 2025

### 3. PDRB Per Kapita

PDRB per kapita merupakan indikator makro ekonomi yang digunakan untuk menggambarkan rata-rata pendapatan yang diterima oleh penduduk di suatu wilayah, meskipun belum sepenuhnya mencerminkan distribusi pendapatan yang sesungguhnya. Di Kabupaten Gunung Mas, PDRB per kapita menunjukkan tren peningkatan dari tahun 2020 hingga 2024, yang

mencerminkan pertumbuhan ekonomi daerah dan potensi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pada 2020, PDRB per kapita tercatat sebesar 46.637,90 juta rupiah, kemudian mengalami kenaikan setiap tahunnya hingga mencapai 76.075,30 juta rupiah pada tahun 2024. Peningkatan ini mencerminkan adanya perkembangan positif dalam aktivitas ekonomi di berbagai sektor, yang berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan di Kabupaten Gunung Mas. Namun, untuk mendapatkan gambaran yang lebih akurat mengenai tingkat kesejahteraan masyarakat, diperlukan analisis lebih lanjut mengenai ketimpangan pendapatan dan distribusi ekonomi di wilayah tersebut.

**Gambar II.23**  
**Produk Domestik Regional Bruto Per Kapita Kabupaten Gunung Mas, 2020-2024 (Juta Rupiah)**



Sumber: BPS, Kabupaten Gunung Mas dalam Angka 2025

#### 4. Tingkat Pengangguran Terbuka

Ketenagakerjaan merupakan aspek penting dalam pembangunan daerah, karena secara langsung berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Bidang ini mencerminkan kualitas sumber daya manusia sekaligus menentukan tingkat pendapatan rumah tangga, yang menjadi faktor utama dalam pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari. Oleh karena itu, penguatan sektor ketenagakerjaan memiliki peran strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

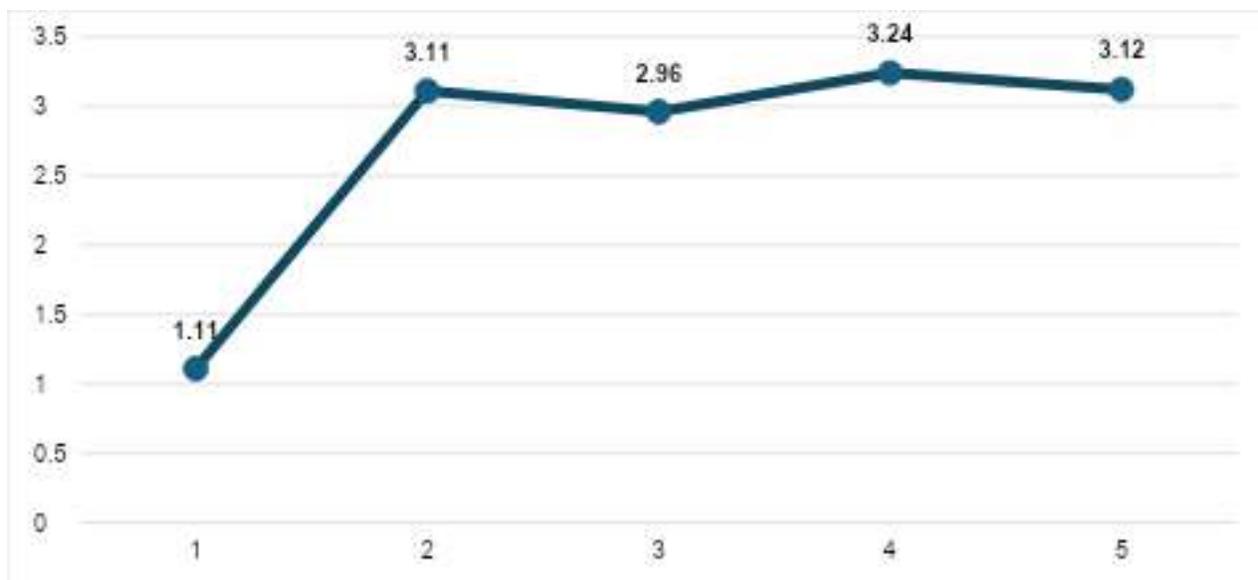
Salah satu indikator utama dalam menilai kondisi ketenagakerjaan adalah Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). TPT digunakan untuk mengukur persentase penduduk usia kerja yang aktif mencari pekerjaan namun belum mendapatkan pekerjaan. Indikator ini menjadi tolok ukur penting dalam menilai kesejahteraan ekonomi suatu wilayah, karena semakin rendah tingkat pengangguran umumnya mencerminkan adanya peningkatan dalam penyediaan lapangan kerja dan kestabilan ekonomi masyarakat. Tingginya TPT sering kali menjadi indikator adanya ketidakseimbangan antara jumlah angkatan kerja dengan ketersediaan lapangan kerja, serta mencerminkan tantangan dalam hal kompetensi tenaga kerja dan keterbatasan akses terhadap pelatihan dan bimbingan usaha.

Di Kabupaten Gunung Mas, Tingkat Pengangguran Terbuka mengalami fluktuasi selama periode tahun 2020–2024. Pada tahun 2020, TPT berada di angka 1,11%, namun meningkat tajam menjadi 3,11% pada tahun 2021, yang

kemungkinan besar dipengaruhi oleh dampak pandemi COVID-19 dan kebijakan pembatasan sosial. Pada tahun 2022, angka ini sedikit membaik menjadi 2,96%, namun kembali naik menjadi 3,24% pada tahun 2023, sebelum akhirnya menurun sedikit ke 3,12% di tahun 2024. Perubahan ini menunjukkan bahwa meskipun ada upaya pemulihan ekonomi, tantangan dalam menciptakan kesempatan kerja yang memadai masih cukup besar dan memerlukan strategi yang lebih efektif dan berkelanjutan.

**Gambar II.24**

**Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Gunung Mas Tahun 2020 – 2024**



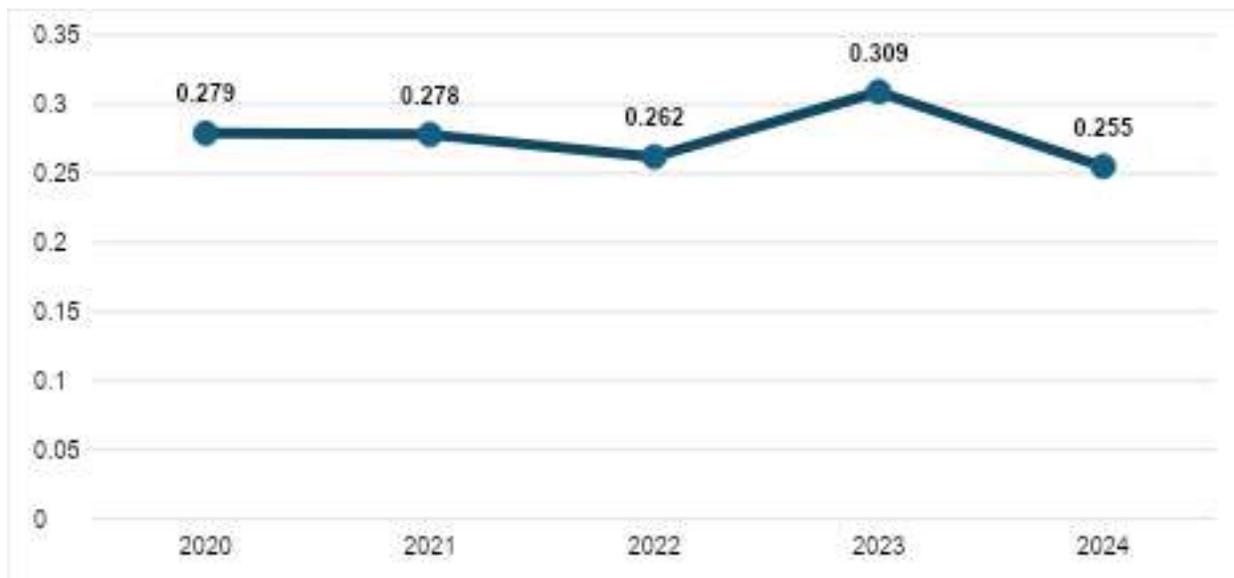
Sumber: Kabupaten Gunung Mas dalam angka 2025

## 5. Indeks Gini

Indeks Gini adalah indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan distribusi pendapatan di suatu wilayah. Nilai indeks ini berkisar antara 0 hingga 1, di mana angka 0 menunjukkan distribusi pendapatan yang sempurna (setiap orang memiliki pendapatan yang sama), sedangkan angka 1 menunjukkan ketimpangan yang sangat tinggi (seluruh pendapatan hanya dimiliki oleh satu orang atau kelompok). Indeks Gini menjadi salah satu ukuran penting dalam menilai kesejahteraan ekonomi masyarakat, karena semakin rendah nilai indeks tersebut, semakin merata distribusi pendapatan di wilayah tersebut, yang berarti kesejahteraan masyarakat secara umum lebih baik dan kesenjangan ekonomi lebih kecil.

Di Kabupaten Gunung Mas, capaian Indeks Gini selama periode tahun 2020–2024 menunjukkan adanya fluktuasi. Pada tahun 2020, indeks tercatat sebesar 0,279, kemudian sedikit menurun ke 0,278 pada tahun 2021, dan terus menurun hingga mencapai titik terendah yaitu 0,262 pada tahun 2022. Namun, pada tahun 2023 terjadi lonjakan signifikan ke angka 0,309, sebelum akhirnya kembali menurun menjadi 0,255 di tahun 2024. Kenaikan tajam pada tahun 2023 dapat mengindikasikan adanya ketimpangan pendapatan yang meningkat pada tahun tersebut yang dipengaruhi oleh ketidakseimbangan dalam pemulihan ekonomi pasca pandemi, di mana sebagian kelompok masyarakat lebih cepat pulih dibandingkan kelompok lainnya. Penurunan indeks pada tahun 2024 menjadi sinyal positif bahwa kebijakan pemerataan ekonomi atau bantuan sosial mulai menunjukkan dampaknya terhadap pengurangan kesenjangan.

**Gambar II.25**  
**Indeks Gini Kabupaten Gunung Mas Tahun 2020-2024**



Sumber: BPS Kabupaten Gunung Mas, 2025

## 6. IPM (Indeks Pembangunan Manusia)

Mengutip isi *Human Development Report (HDR)* pertama tahun 1990, pembangunan manusia adalah suatu proses untuk memperbanyak pilihan-pilihan yang dimiliki oleh manusia. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Sebagai ukuran kualitas hidup, IPM dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar. Dimensi tersebut mencakup umur panjang dan sehat, pengetahuan, dan kehidupan yang layak. Dimensi panjang umur dan sehat diukur melalui Angka Harapan Hidup. Dimensi pengetahuan diukur melalui Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah. Dimensi kehidupan yang layak diukur melalui Pengeluaran Per Kapita yang disesuaikan

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Gunung Mas menunjukkan tren peningkatan selama periode 2020-2024, meskipun masih berada dalam kategori sedang dibandingkan dengan kabupaten lainnya di Provinsi Kalimantan Tengah. Pada 2020, IPM Kabupaten Gunung Mas tercatat sebesar 72,00, kemudian mengalami peningkatan setiap tahunnya hingga mencapai 73,88 pada 2024. Peningkatan ini mencerminkan adanya perbaikan dalam berbagai indikator pembangunan manusia, termasuk umur harapan hidup, harapan lama sekolah, rata-rata lama sekolah, serta pengeluaran per kapita masyarakat. Meskipun demikian, capaian ini masih berada di bawah beberapa kabupaten lain di Kalimantan Tengah, sehingga perlu adanya upaya lebih lanjut untuk mempercepat peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Dari sisi indikator penyusun, umur harapan hidup meningkat dari 72,99 pada tahun 2020 menjadi 73,58 pada tahun 2024, yang mengindikasikan adanya perbaikan dalam sektor kesehatan. Harapan lama sekolah juga mengalami peningkatan dari 11,78 pada tahun 2020 menjadi 12,1 pada tahun 2024, menunjukkan semakin banyaknya peluang pendidikan bagi generasi muda. Begitu pula dengan rata-rata lama sekolah yang naik dari 9,14 tahun 2020 menjadi 9,37 tahun 2024, menandakan bahwa masyarakat Kabupaten Gunung Mas semakin lama mengenyam pendidikan formal. Selain itu, pengeluaran per

kapita terus meningkat, dari Rp10.793 pada tahun 2020 menjadi Rp11.902 pada tahun 2024, yang menunjukkan daya beli masyarakat semakin membaik. Secara keseluruhan, peningkatan IPM Kabupaten Gunung Mas mencerminkan adanya perkembangan positif dalam aspek kesehatan, pendidikan, dan ekonomi, meskipun masih diperlukan kebijakan yang lebih strategis untuk mempercepat peningkatan kualitas hidup masyarakat.

**Tabel II.19**  
**Capaian Indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Gunung Mas Tahun 2020-2024**

Indikator	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Umur Harapan Hidup (Tahun)	72,99	73,04	73,09	73,31	73,58
Harapan Lama Sekolah (Tahun)	11,78	11,9	11,91	12,05	12,10
Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)	9,14	9,18	9,24	9,25	9,37
Pengeluaran per Kapita (000 Rp/Kapita)	10.793	10.809	10.990	11462	11902
<b>IPM</b>	<b>72,00</b>	<b>72,22</b>	<b>72,50</b>	<b>73,18</b>	<b>73,88</b>

Sumber: BPS, Kabupaten Gunung Mas Dalam Angka Tahun 2025

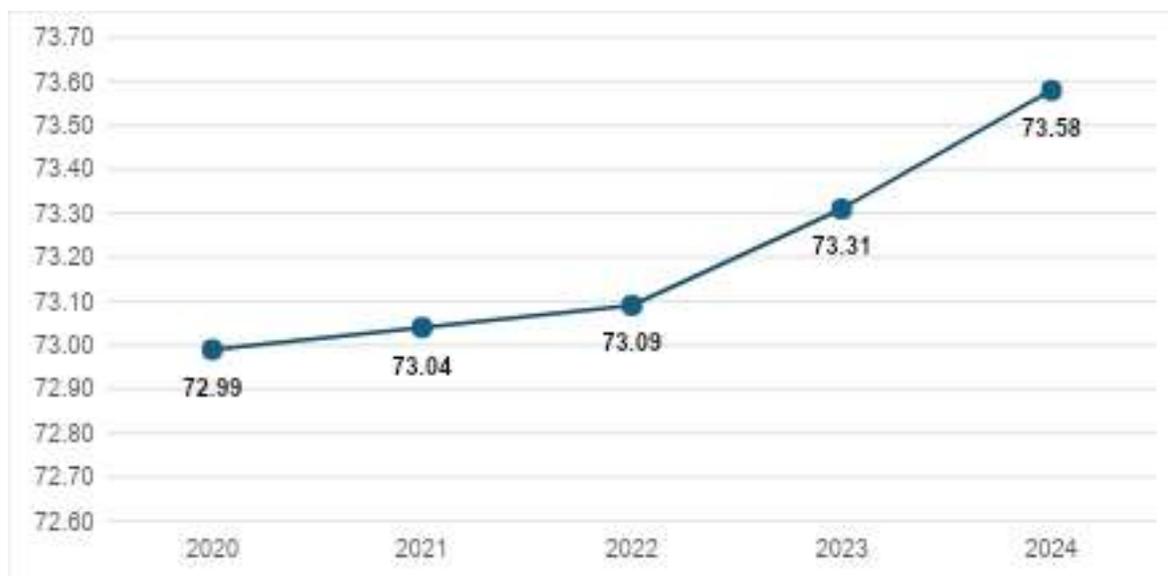
### 2.1.2.2 Kesehatan Untuk Semua

Angka Harapan Hidup (AHH) merupakan indikator penyusun Indeks Pembangunan Manusia dalam bidang kesehatan di mana angka tersebut mengindikasikan rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang sejak lahir. AHH mencerminkan derajat kesehatan suatu masyarakat sehingga capaian positifnya sangat mengindikasikan perkembangan fasilitas pelayanan kesehatan di suatu wilayah.

Angka Harapan Hidup (AHH) atau Usia Harapan Hidup (UHH) di Kabupaten Gunung Mas pada tahun 2024 meningkat dibandingkan tahun 2020, dari 72,99 tahun menjadi 73,58. Artinya, bayi yang lahir pada tahun 2024 diperkirakan memiliki harapan hidup hingga usia 73-74 tahun, dengan asumsi pola kesehatan dan kesejahteraan masyarakat tetap terjaga. Peningkatan ini mencerminkan adanya perbaikan dalam layanan kesehatan, pola hidup yang lebih baik, serta kesadaran masyarakat dan akses yang lebih luas terhadap fasilitas kesehatan di Kabupaten Gunung Mas.

Gambar II.26

### Usia Harapan Hidup Kabupaten Gunung Mas Tahun 2020-2024



Sumber: BPS, Kabupaten Gunung Mas dalam angka 2025

Selama periode 2020–2024, indikator pembangunan kesehatan di Kabupaten Gunung Mas menunjukkan berbagai perbaikan signifikan. Angka kematian ibu menurun dari 117 menjadi 110 per 100.000 kelahiran hidup, dan angka kematian bayi juga turun dari 7 menjadi 4,9 per 1.000 kelahiran hidup. Prevalensi stunting mengalami penurunan drastis dari 22,87% di tahun 2020 menjadi 10,39% di tahun 2024, mencerminkan peningkatan intervensi gizi dan kesehatan anak. Sementara itu, angka gizi buruk tetap rendah, meski meningkat dari 0,074% (2022) menjadi 2% (2023 dan 2024). *Total Fertility Rate (TFR)* sedikit menurun dari 2,57 menjadi 2,34, yang sejalan dengan peningkatan *Modern Contraceptive Prevalence Rate (mCPR)* dari 74,22% menjadi 72,03% meskipun sempat fluktuatif. Selain itu, *unmet need* (kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi) menurun drastis dari 16,1% menjadi 5,25%, dan pengguna Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) meningkat hampir 10 kali lipat dari 2,57% menjadi 23,20%. Secara keseluruhan, capaian ini menunjukkan kemajuan nyata dalam layanan kesehatan ibu dan anak, pengendalian kelahiran, serta penurunan beban gizi buruk di Kabupaten Gunung Mas. Tren perbaikan ini mencerminkan efektivitas kebijakan intervensi pemerintah daerah di sektor kesehatan, meskipun masih diperlukan perhatian khusus terhadap stabilitas angka gizi buruk dan upaya menjaga konsistensi cakupan pelayanan kesehatan di tahun-tahun mendatang.

**Tabel II.20**

**Indikator Pembangunan Kesehatan Kabupaten Gunung Mas Tahun 2020 – 2024**

INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	2020	2021	2022	2023	2024
Angka Kematian Ibu (Per 100.000 LH)	117	183	135	175	110
Angka Kematian Bayi (per 1.000 LH)	7	11	5	5,3	4,9
Prevalensi Stunting (%)	22,87	20,6	18,34	16,37	10,39
Angka Gizi Buruk (%)	1	1.03	0,074	2	2

Total Fertility Rate (TFR) (%)	2,57	2,57	2,42	2,34	2,34
Modern Contraceptive Prevalence Rate (mCPR) (%)	74,22	84	57,85	73,37	72,03
Unmet Need (%)	16,1	8,57	17,13	6,50	5,25
Peserta Pengguna MKJP (%)	2,57	16	8,8	29,60	23,20

Sumber: Dinas Kesehatan dan Dinas P2KBP3A Kabupaten Gunung Mas, 2024

### 2.1.2.3 Pendidikan Berkualitas yang Merata

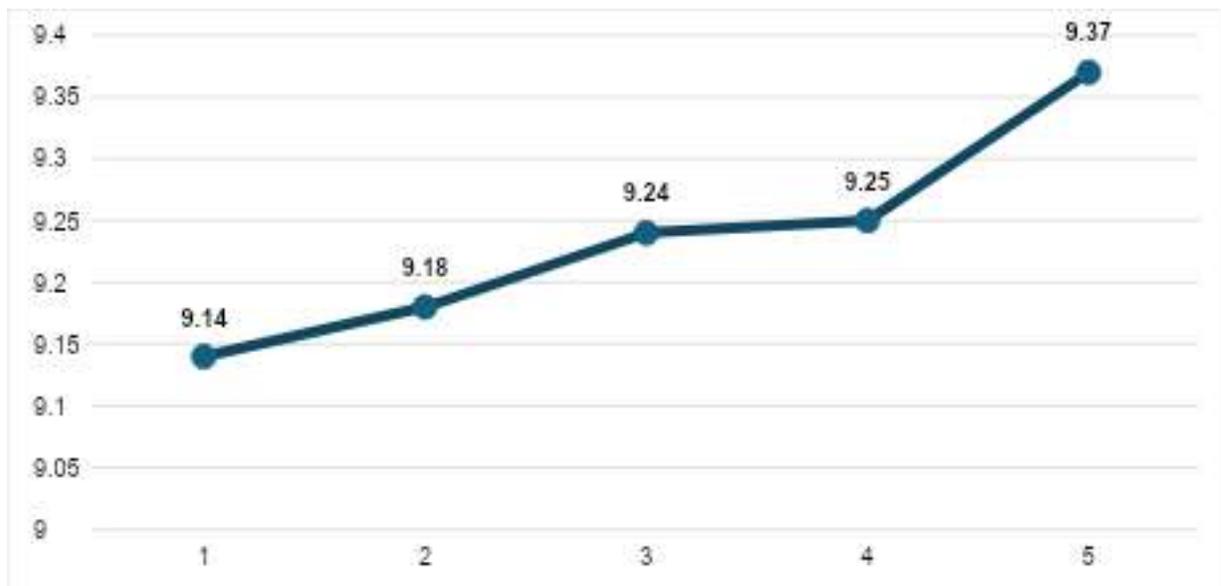
Pendidikan berkualitas memperlihatkan kondisi pendidikan masyarakat yang berperan sentral dalam peningkatan kualitas hidup manusia serta mewujudkan kehidupan masyarakat dan bangsa yang bermartabat. Pendidikan dapat menggambarkan kualitas sumber daya manusia dari segi ilmu pengetahuan. Indikator pendidikan yang menjadi unsur pembentuk IPM adalah rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah.

#### 1. Rata-rata Lama Sekolah (RLS)

Rata-rata Lama Sekolah (RLS) menggambarkan jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk usia 15 tahun ke atas dalam menjalani pendidikan formal. Angka RLS merupakan kombinasi antara partisipasi sekolah, jenjang pendidikan yang sedang dijalani, kelas yang diduduki, dan pendidikan yang telah ditamatkan. Angka ini mengindikasikan jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk suatu wilayah dalam mengenyam pendidikan sekolah formal. Adapun cakupan penduduk yang dihitung dalam RLS adalah penduduk berusia 25 tahun ke atas dengan asumsi pada umur 25 tahun, proses pendidikan sudah berakhir. Penghitungan ini mengikuti standar internasional yang digunakan oleh UNDP.

Rata-rata Lama Sekolah (RLS) di Kabupaten Gunung Mas menunjukkan tren positif, dengan peningkatan dari 9,14 pada tahun 2020 menjadi 9,37 pada tahun 2024. Angka ini mengindikasikan bahwa secara rata-rata, penduduk Kabupaten Gunung Mas telah mengenyam pendidikan selama 9,37 pada tahun 2024, setara dengan kelas 3 SMP semester 1. Peningkatan ini mencerminkan adanya kemajuan dalam akses dan kesempatan pendidikan bagi masyarakat, sebagaimana ditunjukkan dalam data berikut:

Gambar II.27

**Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2020-2024**

Sumber: BPS, Kabupaten Gunung Mas dalam angka 2025

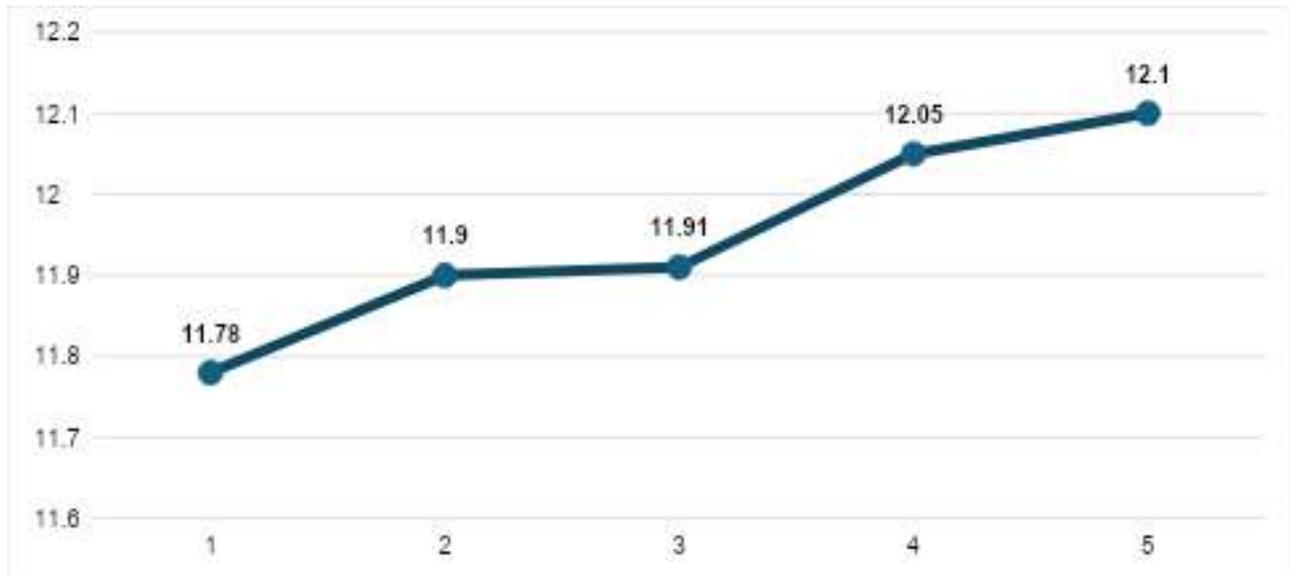
**2. Harapan Lama Sekolah**

Selain Rata-rata Lama Sekolah (RLS), indikator lain yang memperlihatkan kualitas pendidikan suatu wilayah adalah harapan lama sekolah. Indikator Harapan Lama Sekolah merupakan indikator yang menggantikan indikator sebelumnya yaitu Angka Melek Huruf yang sudah tidak digunakan lagi karena sudah tidak relevan dengan perkembangan zaman. Harapan Lama Sekolah (HLS) dapat didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Nilai HLS yang semakin tinggi, dapat menggambarkan bahwa rata-rata lamanya sekolah seseorang diharapkan akan semakin besar (semakin tinggi pendidikan yang ditempuh). HLS ini dihitung pada usia 7 tahun ke atas karena mengikuti kebijakan pemerintah yaitu program wajib belajar.

Berdasarkan data di bawah, Harapan Lama Sekolah (HLS) di Kabupaten Gunung Mas pada tahun 2024 mencapai 12,1. Hal ini berarti bahwa seseorang yang berusia 7 tahun ke atas memiliki peluang untuk menempuh pendidikan hingga setara dengan jenjang pendidikan menengah atas (SMA/SMK). Tingginya angka HLS ini mencerminkan harapan masyarakat terhadap akses pendidikan yang lebih baik. Namun, untuk mewujudkan harapan tersebut, diperlukan peningkatan fasilitas pendidikan yang memadai guna mendukung kualitas pembelajaran dan meningkatkan daya saing individu di Kabupaten Gunung Mas.

Gambar II.28

## Angka Harapan Lama Sekolah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2020-2024



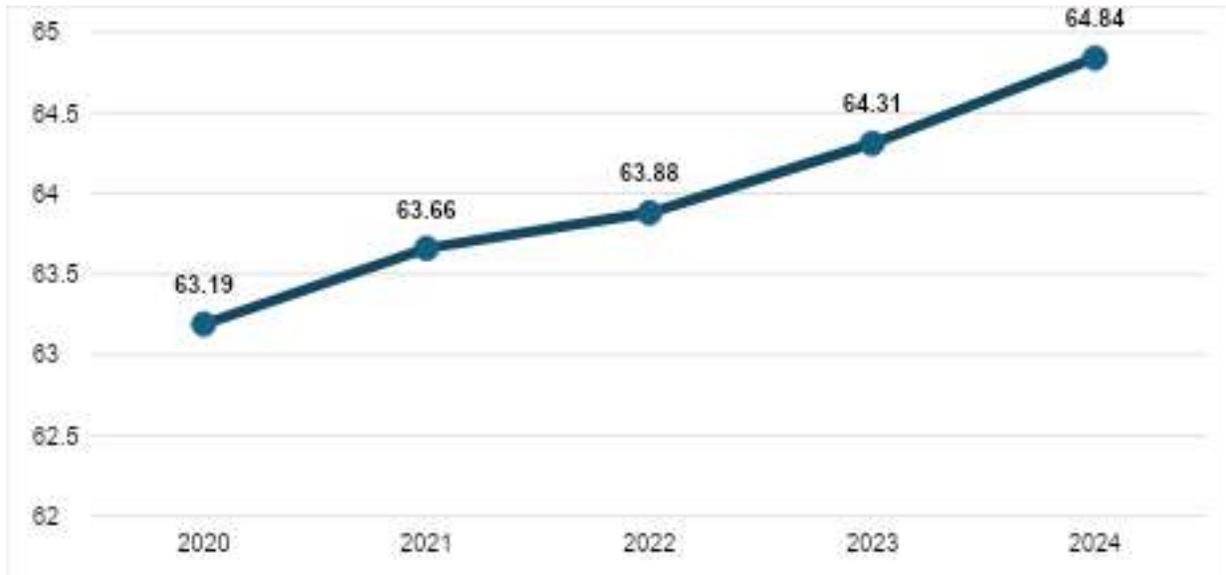
Sumber: BPS, Kabupaten Gunung Mas dalam angka 2025

### 3. Indeks Pendidikan

Pendidikan merupakan syarat utama yang harus ditempuh seseorang untuk dapat memasuki pasar kerja. Pendidikan yang diperoleh baik dari sekolah maupun dari luar sekolah akan memberikan bekal pengetahuan dan ketrampilan, sehingga akan memudahkan penempatan seorang karyawan sesuai dengan kecakapannya. Tingkat pendidikan yang dimiliki seorang karyawan akan mempengaruhi pola pikir, sikap dan tindakan dalam menghadapi suatu permasalahan yang timbul khususnya dalam masalah pekerjaan. Orang yang mempunyai tingkat pendidikan yang lebih tinggi pada umumnya lebih cepat mengatasi masalah yang dihadapi, daripada orang yang tingkat pendidikannya lebih rendah

Indeks pendidikan merupakan hasil perhitungan dari rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah. Adapun pencapaian indeks pendidikan di Kabupaten Gunung Mas menunjukkan tren peningkatan yang konsisten sepanjang tahun 2020 hingga tahun 2024. Pada tahun 2020, indeks pendidikan berada di angka 63,19 dan meningkat menjadi 63,66 pada 2021. Kenaikan terus berlanjut di tahun 2022 dengan capaian 63,88, kemudian naik ke 64,31 pada tahun 2023, dan mencapai titik tertinggi dalam 5 (lima) tahun terakhir di angka 64,84 pada tahun 2024. Peningkatan ini mencerminkan adanya upaya pemerintah daerah dalam memperluas akses pendidikan serta meningkatkan kualitas pembelajaran, meskipun masih dibutuhkan strategi lanjutan untuk mempercepat akselerasi kualitas pendidikan yang merata di seluruh wilayah.

**Gambar II.29**  
**Indeks Pendidikan Kabupaten Gunung Mas Tahun 2020-2024**

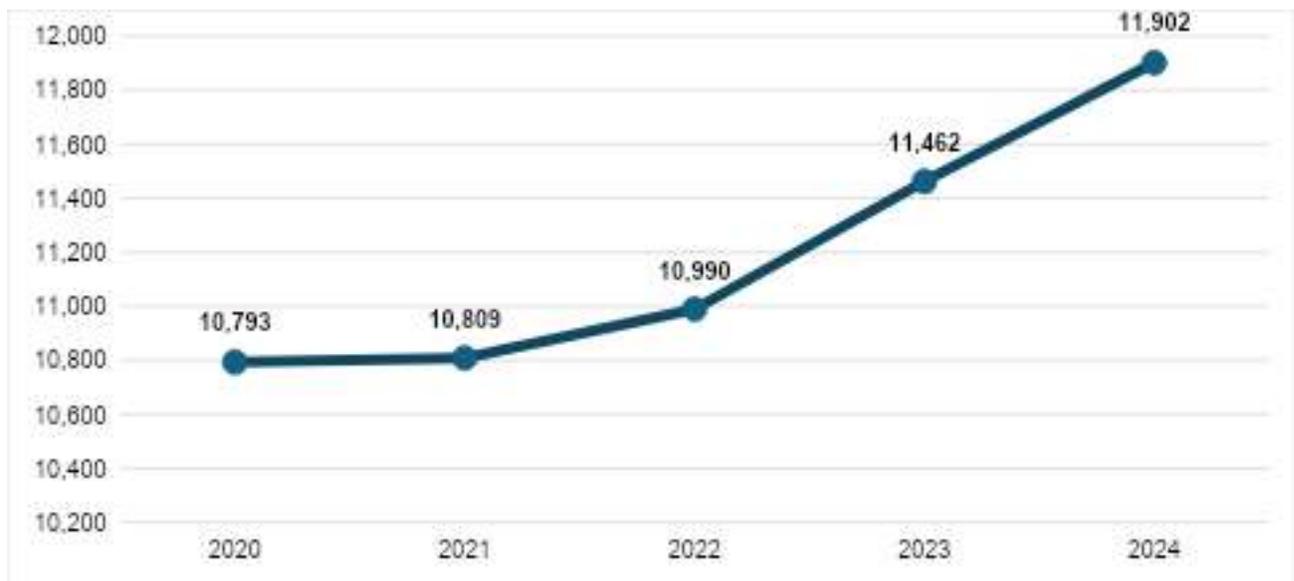


Sumber: BPS Kabupaten Gunung Mas (data diolah), 2025

#### **2.1.2.4 Perlindungan Sosial yang Adaptif**

Perlindungan sosial merupakan kunci dalam membangun masyarakat yang tangguh dan inklusif, di mana setiap individu memiliki kesempatan yang sama untuk menjalani kehidupan yang lebih baik. Salah satu indikator untuk menilai efektivitas perlindungan sosial, khususnya bantuan sosial dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, adalah peningkatan pengeluaran konsumsi rumah tangga. Dalam hal ini, pengeluaran rata-rata per kapita mencerminkan total biaya konsumsi seluruh anggota rumah tangga selama satu bulan, baik yang berasal dari pembelian, pemberian, maupun produksi sendiri, dibagi dengan jumlah anggota rumah tangga. Di Kabupaten Gunung Mas, pengeluaran per kapita disesuaikan menunjukkan tren peningkatan dari Rp10.793 ribu/kapita/tahun pada tahun 2020, menjadi Rp11.902 ribu/kapita/tahun pada tahun 2024. Kenaikan ini mengindikasikan adanya peningkatan daya beli masyarakat, yang juga dapat mencerminkan perbaikan kondisi sosial ekonomi di Kabupaten Gunung Mas.

**Gambar II.30**  
**Pengeluaran Per Kapita Disesuaikan (Ribu/Kapita/Tahun) Kabupaten Gunung Mas Tahun 2020-2024**



Sumber: BPS Kabupaten Gunung Mas, 2025

Indikator pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita juga dapat mengetahui tingkat konsumsi rumah tangga yang menjelaskan seberapa atraktif tingkat pengeluaran rumah tangga. Semakin besar rasio atau angka konsumsi rumah tangga semakin atraktif bagi peningkatan kemampuan ekonomi daerah. Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita dapat diketahui dengan menghitung angka konsumsi rumah tangga per kapita, yaitu rata-rata pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita. Angka ini dihitung berdasarkan pengeluaran penduduk untuk makanan dan bukan makanan per jumlah penduduk. Makanan mencakup seluruh jenis makanan termasuk makanan jadi, minuman, tembakau, dan rokok. Bukan makanan mencakup perumahan, sandang, biaya kesehatan, sekolah, dan sebagainya.

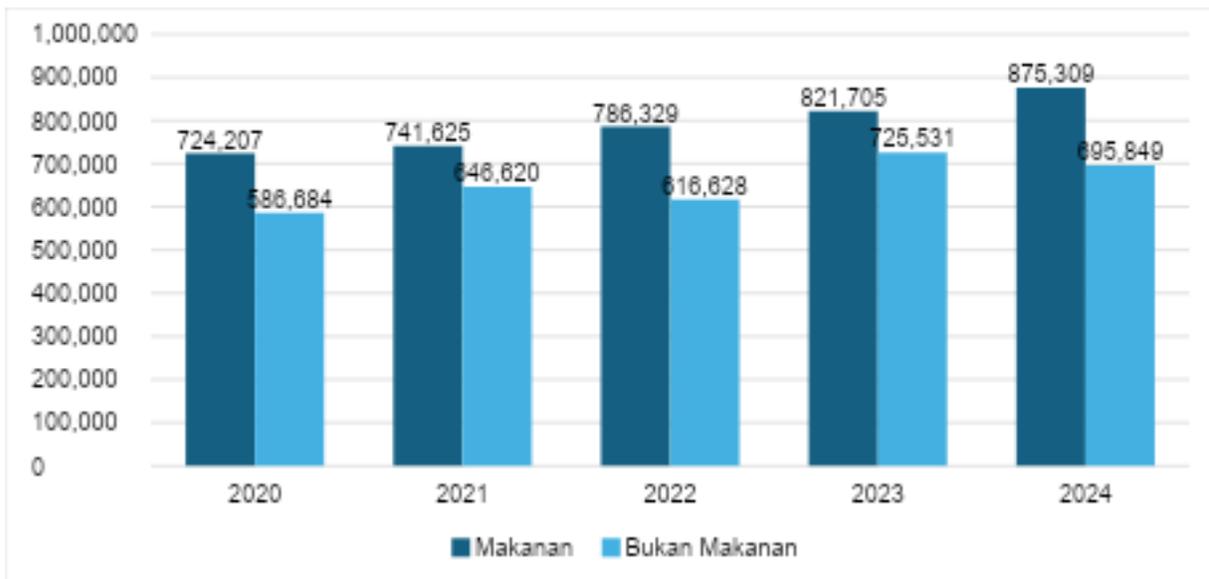
Penduduk Kabupaten Gunung Mas rata-rata memiliki pendapatan yang memungkinkan mereka untuk mengalokasikan pengeluaran di atas 500.000 rupiah per bulan. Seiring dengan meningkatnya pendapatan, konsumsi baik untuk makanan maupun non-makanan juga mengalami peningkatan. Berdasarkan data tahun 2020-2024, pengeluaran konsumsi per kapita untuk makanan terus mengalami kenaikan dari Rp724.207 pada tahun 2020 menjadi Rp875.309 pada tahun 2024. Sementara itu, pengeluaran untuk non-makanan juga meningkat dari Rp586.684 pada tahun 2020 menjadi Rp695.849 pada tahun 2024. Meskipun pengeluaran untuk makanan masih lebih tinggi dibandingkan dengan non-makanan, tren ini menunjukkan adanya peningkatan daya beli masyarakat, termasuk untuk kebutuhan di luar makanan.

Selain itu, meskipun nominal pengeluaran untuk makanan lebih besar, porsi konsumsi non makanan menunjukkan kecenderungan meningkat dari tahun ke tahun. Hal ini mengindikasikan bahwa masyarakat Kabupaten Gunung Mas mulai mengalokasikan pendapatan mereka untuk kebutuhan lain di luar makanan, seperti perumahan dan fasilitas rumah tangga, aneka barang dan jasa, pakaian, barang tahan lama, pajak dan asuransi, serta keperluan pesta dan upacara. Pergeseran ini mencerminkan adanya peningkatan kesejahteraan dan perubahan pola konsumsi masyarakat menuju standar hidup yang lebih baik

seiring pertumbuhan ekonomi daerah.

**Gambar II.31**

**Rata-rata Pengeluaran Per Kapita Sebulan Untuk Makanan dan Bukan Makanan di Kabupaten Gunung Mas tahun 2020-2024**



Sumber: Kabupaten Gunung Mas dalam angka 2025

**Tabel II.21**

**Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Menurut Kelompok Makanan dan Bukan Makanan Kabupaten Gunung Mas Tahun 2020-2024**

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Makanan	724.207	741.625	786.329	821.705	875.309
Bukan Makanan	586.684	646.620	616.628	725.531	695.849
<b>Proporsi (%)</b>					
Makanan	55,24	53,42	56,05	53,11	55,71
Bukan Makanan	44,75	46,58	43,95	46,89	44,29

Sumber: Kabupaten Gunung Mas dalam angka 2025

**2.1.2.5 Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju**

Kesejahteraan sosial budaya merujuk pada kondisi kesejahteraan yang mencakup aspek-aspek sosial dan budaya dalam suatu masyarakat. Kondisi ini melibatkan kesejahteraan dan pemberdayaan individu dalam konteks norma-norma, nilai-nilai, dan struktur sosial budaya. Pembangunan jangka menengah daerah tentu saja menjadi salah satu titik vital bagi perwujudan harmonisasi kesejahteraan masyarakat. Pendekatan kesejahteraan sosial budaya menekankan pentingnya memahami dan mempertimbangkan faktor-faktor budaya dalam merancang kebijakan dan program-program kesejahteraan. Ini mencerminkan pengakuan bahwa kesejahteraan sosial tidak hanya bersifat ekonomi, tetapi juga berkaitan dengan kehidupan sosial dan budaya.

Masyarakat yang berkebudayaan maju ditandai dengan upaya pelestarian, pengembangan, dan pewarisan nilai-nilai budaya lokal yang berkelanjutan. Di Kabupaten Gunung Mas, indikator pembangunan kebudayaan selama tahun 2020–2024 menunjukkan dinamika yang menarik. Jumlah budaya daerah yang telah ditetapkan sebagai warisan budaya mengalami penurunan signifikan, dari

20 budaya pada tahun 2020 dan tahun 2021, menjadi hanya 2 pada tahun 2024. Sebaliknya, jumlah kesenian daerah dan Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) yang dilestarikan menunjukkan tren peningkatan yang sangat pesat, dari 28 pada tahun 2021 menjadi 229 pada tahun 2024. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun penetapan formal warisan budaya menurun, namun upaya pelestarian kekayaan budaya lokal justru meningkat tajam, menandakan perhatian yang lebih besar terhadap keberlangsungan ekspresi budaya masyarakat.

**Tabel II.22**  
**Indikator Pembangunan Kebudayaan Kabupaten Gunung Mas Tahun 2020-2024**

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Tingkat budaya daerah yang sudah ditetapkan menjadi warisan budaya	20	20	11	11	2
Jumlah kesenian daerah dan Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) yang dilestarikan	NA	28	43	45	229

Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Gunung Mas, 2025

#### 2.1.2.6 Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif

Pada arah pembangunan ini menjelaskan tentang peningkatan ketangguhan individu, keluarga dan masyarakat untuk memastikan terbentuknya sumber daya manusia berkualitas sebagai motor penggerak pembangunan, termasuk pengarusutamaan gender.

Pengarusutamaan gender dalam rangka mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender perlu menjadi perhatian dalam mewujudkan kesejahteraan yang berkeadilan. Kesetaraan dan keadilan gender dapat terjadi apabila porsi dan siklus sosial perempuan dan laki-laki setara, serasi, seimbang dan harmonis. Perlindungan anak adalah kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan, diskriminasi, eksploitasi, pelecehan dan tindakan salah lainnya.

Indeks Pembangunan Gender (IPG) adalah sebuah indikator yang digunakan untuk mengukur kesetaraan gender dalam suatu negara atau wilayah. IPG dirancang untuk memberikan gambaran tentang perbedaan antara perempuan dan laki-laki dalam beberapa dimensi kunci, seperti kesehatan, pendidikan, dan partisipasi ekonomi.

**Tabel II.23**  
**Indeks Pembangunan Gender dan Indeks Pemberdayaan Gender Kabupaten Gunung Mas Tahun 2020-2023**

INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	2020	2021	2022	2023
Indek Pemberdayaan Gender (IDG) (%)	88,2	88,22	89,15	89,29

Indeks Pembangunan Gender (IPG) (%)	92,34	92,09	92,18	92,61
--	-------	-------	-------	-------

Sumber: BPS dan Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gunung Mas, 2024

### 2.1.3 Aspek Daya Saing Daerah

Daya saing daerah merupakan salah satu aspek tujuan penyelenggaraan otonomi daerah sesuai dengan potensi, kekhasan, dan unggulan daerah. Suatu daya saing (*competitiveness*) merupakan salah satu faktor keberhasilan pembangunan ekonomi yang berhubungan dengan tujuan pembangunan daerah dalam mencapai tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan.

#### 2.1.3.1 Daya Saing Sumber Daya Manusia

Kualitas tenaga kerja dapat dilihat dari kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang mengenyam pendidikan tinggi dan mempunyai keahlian serta menguasai teknologi yang dibutuhkan di dunia kerja. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan kunci keberhasilan pembangunan nasional dan daerah. Hal ini dapat disadari oleh karena manusia sebagai subyek dan obyek dalam pembangunan. Mengingat hal tersebut, maka pembangunan SDM diarahkan agar benar-benar mampu dan memiliki etos kerja yang produktif, terampil, kreatif, disiplin dan profesional. Di samping itu juga mampu memanfaatkan, mengembangkan dan menguasai ilmu dan teknologi yang inovatif dalam rangka memacu pelaksanaan pembangunan nasional. Kualitas sumber daya manusia juga memiliki peranan penting dalam meningkatkan daya saing daerah dan perkembangan investasi di daerah.

Angka beban ketergantungan (*dependency ratio*) merupakan salah satu indikator demografi yang penting. Semakin tinggi persentase angka beban ketergantungan menunjukkan semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Sedangkan persentase angka beban ketergantungan yang semakin rendah menunjukkan semakin rendahnya beban yang ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Dampak keberhasilan pembangunan kependudukan juga dapat dilihat pada perubahan komposisi penduduk menurut umur seperti tercermin pada semakin rendahnya angka beban ketergantungan. Angka beban ketergantungan yang semakin mengecil dapat menggambarkan adanya kesempatan yang semakin besar bagi penduduk usia produktif untuk meningkatkan kualitas dirinya.

Pada tahun 2024, angka beban ketergantungan di Kabupaten Gunung Mas tercatat sebesar 47,03, mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2023 yang sebesar 44,15. Angka ini menunjukkan bahwa setiap 100 penduduk usia produktif masih menanggung beban sekitar 47 penduduk tidak produktif, yaitu mereka yang berusia di bawah 15 tahun dan di atas 65 tahun. Penurunan angka ketergantungan ini mengidentifikasi adanya pergeseran demografi yang berpotensi meningkatkan produktivitas ekonomi, karena proporsi penduduk usia kerja yang lebih besar dibandingkan dengan penduduk yang bergantung pada mereka. Hal ini memberikan peluang bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat

jika diimbangi dengan kebijakan yang mendukung peningkatan keterampilan dan kesempatan kerja bagi penduduk usia produktif.

**Tabel II.24****Rasio Ketergantungan Kabupaten Gunung Mas Tahun 2020-2024**

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah penduduk usia <15 tahun	36,4	36,6	37,1	37,4	37,97
Jumlah penduduk usia >64 tahun	5,5	5,9	6,46	6,28	6,59
Jumlah penduduk usia tidak produktif	41,9	42,5	43,56	43,68	44,56
Jumlah penduduk usia 15-64 tahun	90,2	95,78	98,76	99,09	100,98
<b>Rasio ketergantungan</b>	<b>46,45</b>	<b>49,99</b>	<b>46,09</b>	<b>44,15</b>	<b>47,03</b>

Sumber: BPS Kabupaten Gunung Mas, 2021-2025 (data diolah)

**2.1.3.2 Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi**

Arah pembangunan Kabupaten Gunung Mas dalam mewujudkan kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi difokuskan sebagai pendorong utama untuk menjaga sekaligus mempercepat keberlanjutan produktivitas sektor-sektor ekonomi unggulan daerah. Inovasi diposisikan tidak hanya sebagai pelengkap, melainkan sebagai fondasi dalam memperkuat struktur ekonomi daerah secara jangka menengah maupun panjang. Melalui pemanfaatan teknologi tepat guna serta penguatan ekosistem riset dan pengembangan, Kabupaten Gunung Mas diharapkan mampu meningkatkan efisiensi produksi, memperluas nilai tambah, serta mendorong transformasi ekonomi daerah menuju model yang lebih modern dan berdaya saing.

Dalam kerangka akselerasi pembangunan ekonomi daerah, strategi berbasis hilirisasi menjadi langkah penting yang diambil Kabupaten Gunung Mas, khususnya dengan mengembangkan potensi unggulan lokal. Hilirisasi, sebagai proses pengolahan sumber daya menjadi produk bernilai lebih tinggi, diharapkan mampu mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui penciptaan nilai tambah dan peningkatan produktivitas tenaga kerja. Dengan adanya hilirisasi, komoditas-komoditas lokal tidak hanya dijual dalam bentuk mentah, tetapi diolah menjadi produk jadi atau setengah jadi yang memiliki pasar lebih luas dan nilai ekonomi lebih tinggi. Hal ini membuka peluang pertumbuhan industri lokal, memperluas lapangan kerja, serta mengakselerasi pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan.

Berdasarkan data kontribusi sektor terhadap PDRB Kabupaten Gunung Mas, sektor industri pengolahan pada tahun 2020 tercatat sebesar 8,28% dan tetap pada angka yang sama di tahun 2024, menunjukkan kestabilan meskipun sempat naik turun di tahun-tahun sebelumnya. Sementara itu, sektor penyediaan akomodasi dan makan minum mengalami sedikit penurunan dari 1,66% pada tahun 2020 menjadi 1,65% pada tahun 2024. Secara umum, kedua sektor menunjukkan kontribusi yang relatif stabil dengan fluktuasi ringan selama 5 (lima) tahun terakhir.

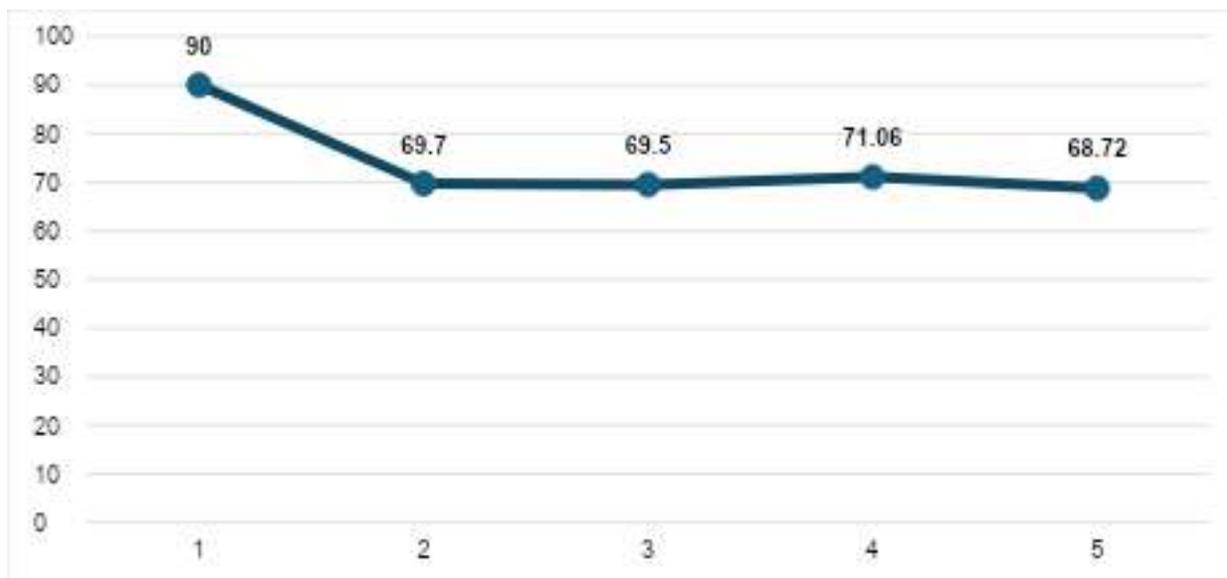
**Tabel II.25**  
**Rasio PDRB Industri Pengolahan dan Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum Kabupaten Gunung Mas Tahun 2020-2024**

Sektor	2020	2021	2022	2023*	2024**
Industri Pengolahan	8,28	8,24	8,2	8,52	8,28
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1,66	1,54	1,66	1,7	1,65

Sumber: Kabupaten Gunung Mas dalam angka 2025

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Kabupaten Gunung Mas juga menunjukkan dinamika yang menarik. TPAK pada tahun 2020 tercatat sebesar 90%, namun mengalami penurunan drastis menjadi 69,7% di tahun 2021 dan sedikit menurun lagi menjadi 69,5% pada 2022. Tahun 2023 mencatat kenaikan menjadi 71,06%, namun pada 2024 kembali menurun ke angka 68,72%. TPAK merupakan indikator yang menggambarkan proporsi penduduk usia kerja yang aktif di pasar tenaga kerja, baik yang bekerja maupun yang sedang mencari pekerjaan. Fluktuasi TPAK ini menunjukkan adanya perubahan dalam dinamika angkatan kerja, baik dari sisi minat untuk bekerja, peluang kerja yang tersedia, maupun faktor eksternal seperti kondisi ekonomi dan sosial yang memengaruhi keterlibatan masyarakat dalam aktivitas ekonomi.

**Gambar II.32**  
**Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten Gunung Mas Tahun 2020-2024**



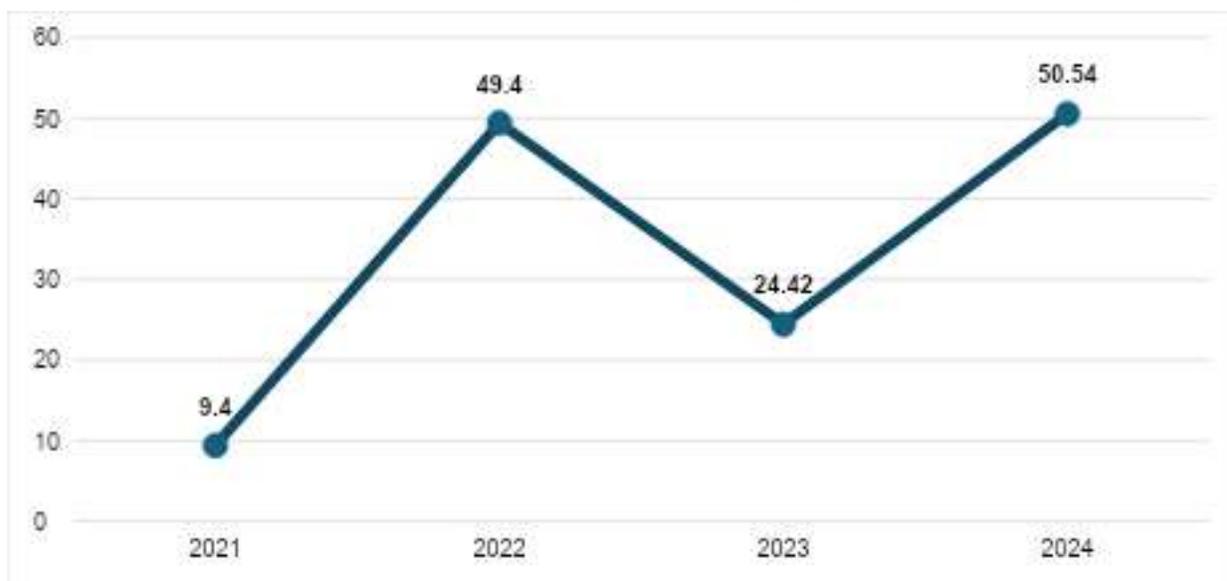
Sumber: Kabupaten Gunung Mas dalam angka 2025

Inovasi daerah merupakan salah satu kunci untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan kualitas hidup. Dengan memanfaatkan potensi lokal dan melibatkan masyarakat, inovasi dapat menjadi alat efektif untuk mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan.

Berdasarkan data Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Gunung Mas, capaian tahun 2021 sebesar 9,4 dan tahun 2023 sebesar 24,42 masih tergolong kurang inovatif. Namun, capaian tersebut meningkat signifikan pada tahun 2022 sebesar 49,4 dan kembali naik pada tahun 2024 menjadi 50,54 yang masuk dalam kategori inovatif. Perbedaan capaian ini menunjukkan bahwa tingkat inovasi daerah sangat dipengaruhi oleh keberlanjutan kebijakan, komitmen pemerintah daerah, serta efektivitas kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan pelaku usaha. Kenaikan capaian di tahun 2022 dan tahun 2024 menunjukkan adanya penguatan perencanaan inovasi dan implementasi program yang lebih terarah.

**Gambar II.33**

**Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2021-2024**



Sumber: Kementerian Dalam Negeri, 2022-2025

### 2.1.3.3 Penerapan Ekonomi Hijau dan Biru

Penerapan ekonomi hijau dan biru di Kabupaten Gunung Mas terus didorong dalam kerangka pembangunan daerah yang berkelanjutan. Hal ini tercermin dari aktivitas sektor ekonomi berbasis sumber daya alam, khususnya pada kategori pertanian, kehutanan, dan perikanan. Data menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi sektor ini mengalami pergerakan yang dinamis sepanjang tahun 2020 hingga 2024. Pada tahun 2020, pertumbuhan mencapai 3,42%, meningkat di tahun-tahun berikutnya dengan capaian tertinggi pada tahun 2023 sebesar 7,21%. Namun, pada tahun 2024 terjadi perlambatan dengan hanya mencapai 2,18%.

Meskipun mengalami perlambatan pada sisi pertumbuhan, kontribusi sektor ini terhadap PDRB Kabupaten Gunung Mas justru mengalami peningkatan yang konsisten. Pada tahun 2020, kontribusinya sebesar 29,20% dan terus meningkat hingga mencapai 33,05% pada tahun 2024. Hal ini menunjukkan bahwa sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan tetap menjadi sektor andalan dalam struktur ekonomi daerah. Kenaikan kontribusi ini mengindikasikan adanya penguatan sektor primer dalam perekonomian lokal, meskipun pertumbuhan tahunan tidak selalu tinggi. Penurunan pertumbuhan pada tahun 2024 dapat dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti cuaca ekstrem atau ketidakstabilan harga komoditas, namun sektor ini tetap memberikan fondasi kuat dalam mendukung ekonomi berkelanjutan di Kabupaten Gunung Mas.

Tabel II.26

**Capaian Perekonomian Sektor Pertanian Kabupaten Gunung Mas Tahun 2020-2024**

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Pertumbuhan Ekonomi Kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (%)	3,42	4,97	5,21	7,21	2,18
Kontribusi PDRB Kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (%)	29,20	30,86	29,56	31,69	33,05

Sumber: BPS Kabupaten Gunung Mas, 2025

**2.1.3.4 Transformasi Digital**

Transformasi digital memiliki peran strategis dalam mendorong pembangunan, baik di tingkat nasional maupun daerah, karena mampu mempercepat laju pertumbuhan ekonomi, meningkatkan efisiensi tata kelola pemerintahan, serta memperkuat daya saing di era global. Melalui penerapan teknologi digital, sistem administrasi pemerintahan dapat menjadi lebih transparan, efisien, dan akuntabel, sehingga meningkatkan kualitas pelayanan publik. Di sektor ekonomi, digitalisasi membuka peluang besar bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) untuk berkembang melalui platform *e-commerce*, layanan keuangan digital (*fintech*), dan berbagai inovasi teknologi. Selain itu, penguatan infrastruktur digital juga berperan penting dalam mempercepat konektivitas antar wilayah yang mendukung distribusi informasi, barang, dan jasa. Dalam sektor pendidikan dan kesehatan, transformasi digital memungkinkan masyarakat mengakses layanan berkualitas secara lebih luas, seperti melalui pembelajaran daring dan layanan kesehatan berbasis teknologi (*telemedicine*). Penerapan pembangunan berbasis digital juga berkontribusi pada keberlanjutan lingkungan dengan mengurangi ketergantungan terhadap sumber daya alam dan mendorong solusi yang ramah lingkungan.

Bagi Kabupaten Gunung Mas, transformasi digital menjadi kunci dalam menjawab tantangan pembangunan di daerah. Melalui digitalisasi, potensi wilayah dapat dioptimalkan, pelayanan publik diperbaiki, serta akses masyarakat terhadap informasi, pendidikan, dan layanan kesehatan dapat diperluas. Hal ini akan mendorong inklusi sosial dan ekonomi, serta memperkuat posisi daerah dalam mendukung pembangunan berkelanjutan dan adaptif di era digital.

**2.1.3.5 Integrasi Ekonomi Domestik dan Global**

Integrasi ekonomi domestik dan global dalam perwujudan pembangunan daerah akan mendorong peningkatan produktivitas perekonomian dalam negeri yang terintegrasi dan mendukung partisipasi dalam rantai pasok secara global. Hasil dari arah pembangunan ini dapat terlihat pada beberapa indikator seperti

Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) maupun ekspor barang dan jasa yang diindikasikan melalui net ekspor barang dan jasa dari PDRB menurut pengeluaran.

Dalam pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Gunung Mas, kontribusi Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) tetap menjadi pendorong utama dalam struktur ekonomi daerah dengan andil yang cukup besar, yaitu mencapai 45,49% pada tahun 2024, meskipun sedikit menurun dibandingkan tahun 2020 yang berada di angka 50,13%. Sementara itu, net ekspor barang dan jasa masih menunjukkan kontribusi negatif terhadap PDRB, meskipun membaik dari -21,02% di tahun 2020 menjadi -7,64% pada tahun 2024. Dari sisi pertumbuhan, PMTB sempat mengalami kontraksi pada masa pandemi di tahun 2020 sebesar -1,82%, namun bangkit signifikan hingga tumbuh 10,04% pada tahun 2024. Hal ini mencerminkan pulihnya aktivitas pembangunan infrastruktur dan investasi setelah terdampak pandemi, meskipun perbaikan pada sektor ekspor masih berlangsung secara bertahap.

**Tabel II.27**

**Pembentukan Modal Tetap Bruto dan Net Ekspor Barang dan Jasa Kabupaten Gunung Mas Tahun 2020-2024**

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Pertumbuhan Ekonomi (%)</b>					
a. Pembentukan Modal Tetap Bruto	-1,82	3,96	2,19	4,16	10,04
b. Net Ekspor Barang dan Jasa	-	-	-	-	-
<b>Distribusi PDRB (%)</b>					
a. Pembentukan Modal Tetap Bruto	50,13	48,44	44,98	46,15	45,49
b. Net Ekspor Barang dan Jasa	-21,02	-14,03	-8,01	-8,10	-7,64

Sumber: BPS Kabupaten Gunung Mas, 2025

### 2.1.3.6 Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi

Pengembangan wilayah baik perkotaan dan perdesaan menjadi salah satu upaya pemerataan pembangunan di Kabupaten Gunung Mas. Pembangunan perkotaan sebagai pusat jasa dan perdagangan yang maju sekaligus menjadi kota yang inklusif dan berkelanjutan, serta pembangunan perdesaan mandiri yang memiliki keunggulan pada potensi daerah perlu diperhatikan secara seksama dalam pembangunan periode saat ini.

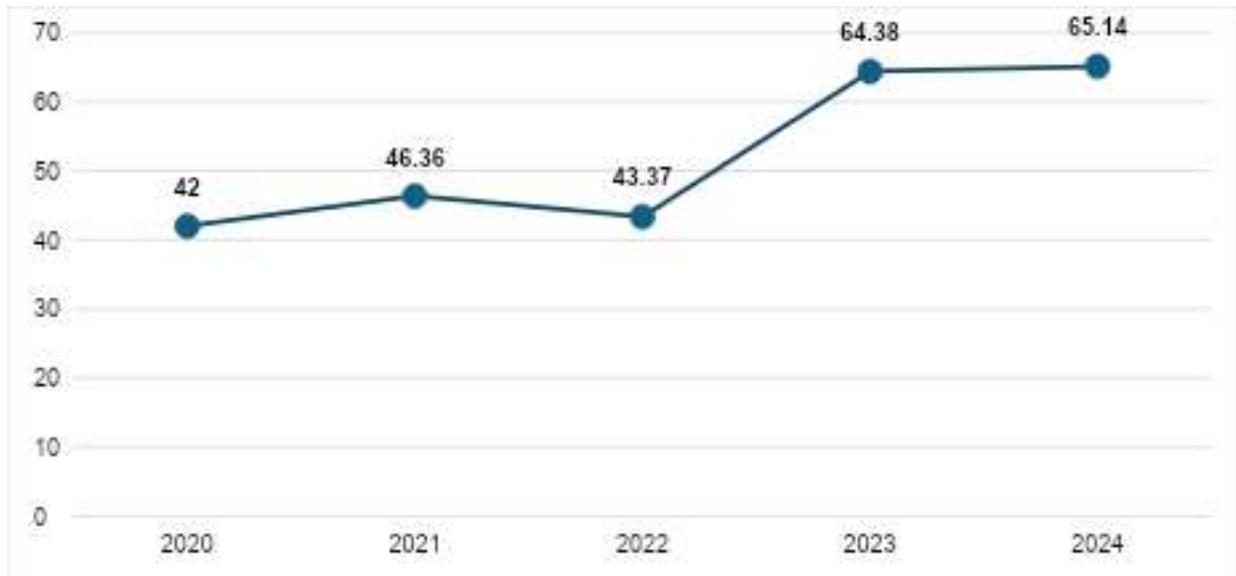
Salah satu indikator untuk melihat pembangunan perkotaan maupun perdesaan adalah indeks kualitas infrastruktur. Indikator ini akan melihat sejauh mana ketersediaan dan kualitas infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, listrik, air bersih, dan fasilitas umum lainnya dalam mendukung aktivitas ekonomi dan sosial masyarakat baik di kawasan perkotaan maupun perdesaan. Di Kabupaten Gunung Mas, pencapaian indeks kualitas infrastruktur dari tahun 2020 hingga 2024 menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan. Pada tahun 2020, indeks kualitas infrastruktur berada pada angka 42, kemudian meningkat menjadi 46,36 di tahun 2021. Namun, sempat mengalami sedikit penurunan pada tahun 2022 menjadi 43,37 sebelum akhirnya melonjak tajam di tahun 2023 dan 2024 masing-masing mencapai 64,38 dan 65,14.

Peningkatan tajam yang terjadi sejak tahun 2023 mencerminkan keberhasilan kebijakan pembangunan infrastruktur yang mulai menyentuh

kebutuhan masyarakat secara merata, baik di kawasan terpadu perkotaan maupun wilayah pedesaan yang sebelumnya terisolasi. Hal ini juga menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam memperkuat konektivitas dan meningkatkan akses layanan dasar yang berkelanjutan. Pembangunan infrastruktur yang terus membaik ini diharapkan menjadi pondasi penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, memperkuat daya saing wilayah, serta menciptakan ruang hidup yang lebih layak dan inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat di Kabupaten Gunung Mas.

**Gambar II.34**

**Indeks Kualitas Infrastruktur Kabupaten Gunung Mas Tahun 2020-2024**



Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gunung Mas, 2025

Pada tahun 2023, panjang jalan dengan permukaan teraspal di Kabupaten Gunung Mas tercatat sepanjang 274,863 km. Jika ditinjau dari kondisi jalan, terdapat 237,506 km jalan dalam kondisi baik, 9,691 km dalam kondisi sedang, 94,3 km dalam kondisi rusak, dan 2,483 km dalam kondisi rusak berat. Pada tahun 2024, terjadi peningkatan panjang jalan dengan permukaan aspal yang juga diiringi dengan peningkatan panjang jalan dalam kondisi baik, yakni mencapai 283,339 km. Sementara itu, jalan dalam kondisi rusak tercatat tetap sebesar 2,483 km, namun terjadi lonjakan signifikan pada panjang jalan dengan kondisi rusak berat yang mencapai 480,474 km. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun capaian infrastruktur jalan dalam kondisi baik meningkat, masih terdapat tantangan besar terkait perawatan dan peningkatan kualitas jalan yang rusak berat.

Tabel II.28

**Panjang Jalan (km) Menurut Jenis Permukaan dan Kondisi Jalan Kabupaten Gunung Mas Tahun 2020-2024**

Keadaan Jalan	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Jenis Permukaan Jalan</b>					
Aspal	226,752	231,16	259,928	274,863	283,339
Kerikil	101,578	366,03	135,092	126,293	119,078
Tanah	408,712	2,970	339,477	332,711	331,560
Tidak Dirinci	-	-	4,495	4,495	5,015
<b>Jumlah</b>	<b>738,992</b>	<b>738,99</b>	<b>738,99</b>	<b>738,99</b>	<b>738,99</b>
<b>Kondisi Jalan</b>					

Keadaan Jalan	2020	2021	2022	2023	2024
Baik	187,157	184,9	218,759	237,506	245,726
Sedang	82,787	113,06	11,029	9,691	10,309
Rusak	260,553	286,44	2,283	2,483	2,483
Rusak Berat	208,495	154,59	506,921	489,282	480,474
<b>Jumlah</b>	<b>738,992</b>	<b>738,99</b>	<b>738,992</b>	<b>738,992</b>	<b>738,992</b>

Sumber: Kabupaten Gunung Mas dalam Angka, 2020-2025

### 2.1.3.7 Stabilitas Ekonomi Makro

Stabilitas ekonomi makro diarahkan untuk mewujudkan kesinambungan fiskal, serta menjaga stabilitas moneter dan sektor keuangan dalam mendukung kebijakan pro-stabilitas, pro-pertumbuhan dan pro-pemerataan. Stabilitas ekonomi makro juga merupakan pondasi utama dalam mendorong keberhasilan pembangunan wilayah. Dengan kondisi ekonomi yang stabil, ditandai oleh inflasi yang terkendali, nilai tukar yang relatif stabil, serta defisit fiskal dan neraca perdagangan yang terkelola dengan baik, pemerintah memiliki ruang yang lebih luas untuk merancang dan melaksanakan kebijakan pembangunan secara konsisten dan berkelanjutan. Stabilitas ini menciptakan iklim investasi yang kondusif, meningkatkan kepercayaan pelaku usaha dan investor, serta mendorong pertumbuhan sektor-sektor produktif.

### 2.1.4 Aspek Pelayanan Umum

Pelayanan publik atau pelayanan umum merupakan segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang menjadi tanggung jawab pemerintah Kabupaten Gunung Mas dalam upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

#### 2.1.4.1 Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif

Regulasi dan tata kelola yang berintegritas dan adaptif mencerminkan pengelolaan sektor publik yang efisien, efektif, akuntabel, serta didasarkan pada pertukaran informasi yang terbuka, transparan, dan sesuai dengan kerangka hukum yang berlaku. Pemerintah Kabupaten Gunung Mas terus berupaya meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan melalui implementasi reformasi birokrasi yang berkelanjutan. Upaya tersebut tercermin dari meningkatnya capaian Indeks Reformasi Birokrasi, yaitu sebesar 51,66 pada tahun 2022 dan naik menjadi 54,77 pada tahun 2023 dengan kategori CC. Selain itu, Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) juga menunjukkan tren positif, dari 81,66 pada tahun 2023 menjadi 83,93 pada tahun 2024. Namun demikian, terdapat penurunan pada nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dari 62,14 pada tahun 2023 menjadi 61,63 pada tahun 2024. Sementara itu, Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) pada tahun 2022 tercatat sebesar 1,96 dan menjadi perhatian dalam mendorong digitalisasi pelayanan publik yang lebih optimal.

**Tabel II.29**

### Capaian Pembangunan Pemerintahan Kabupaten Gunung Mas Tahun 2020-2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Nilai Reformasi Birokrasi	60	50,01	51,66 (CC)	54,77 (CC)	
Nilai SAKIP	B	B	B	B (62,14)	B (61,63)
Indeks SPBE			1,96		
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	77,53	84,25 (baik)	81,06 (Baik)	81,66 (baik)	83,93 (sangat Baik)
Indeks Integritas Nasional	NA	74,5	71,34		
Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	

Sumber: Setda dan Badan Kesbangpol Kabupaten Gunung Mas Tahun 2021-2025

#### 2.1.4.2 Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional yang Tangguh, dan Demokrasi Substansial

Dalam pelaksanaan pembangunan, pembangunan hukum diarahkan pada terwujudnya supremasi hukum yang berkeadilan, berkepastian, bermanfaat dan berlandaskan hak asasi manusia. Sedangkan pembangunan demokrasi diarahkan pada terwujudnya demokrasi substansial yang mengemban amanat rakyat.

Tabel II.30

#### Kondisi Kemanan dan Ketertiban di Kabupaten Gunung Mas Tahun 2020-2024

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase penurunan jumlah pelanggaran perda (%)	50	4,00%	16,66%		
Persentase penyelesaian tindak pidana (%)	91,2	43,03%	107,89%	84,76%	72,41%

Sumber: BPS dan Satpol PP Kabupaten Gunung Mas, 2021-2024

#### 2.1.4.3 Ketangguhan Pemerintah Daerah

Ketangguhan pemerintah daerah dalam pelaksanaan pembangunan dapat dilihat dari meningkatnya daya saing daerah. Daya saing daerah merupakan kemampuan suatu wilayah untuk bersaing dengan wilayah lain dalam berbagai aspek, seperti ekonomi, infrastruktur, sumber daya manusia, inovasi, dan investasi. Hal ini melibatkan berbagai faktor, termasuk kebijakan pemerintah, regulasi, ketersediaan sumber daya alam, tingkat pendidikan dan keterampilan tenaga kerja, serta infrastruktur yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan investasi. Salah satu indikator yang cukup komprehensif dalam melihat daya saing daerah adalah Indeks Daya Saing Daerah (IDSD).

Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) Kabupaten Gunung Mas menunjukkan tren peningkatan dalam tiga tahun terakhir, dari 2,55 pada tahun 2022 menjadi 3,27 pada tahun 2024. Peningkatan ini mencerminkan perbaikan dalam berbagai aspek pembangunan daerah, khususnya pada pilar institusi yang menjadi pilar dengan capaian tertinggi selama dua tahun terakhir, yaitu sebesar 4,07 pada tahun 2023 dan naik menjadi 4,34 pada tahun 2024. Sebelumnya, pada tahun

2022, pilar dengan capaian tertinggi adalah dinamisme bisnis dengan nilai 5, yang menunjukkan kekuatan sektor usaha dan iklim bisnis yang kondusif saat itu. Namun demikian, pilar sistem kapabilitas inovasi konsisten menjadi yang terendah sepanjang tahun 2022 hingga tahun 2024 dengan nilai berturut-turut sebesar 0,54; 0,67; dan 0,64. Hal ini mengindikasikan bahwa meskipun tata kelola dan sektor bisnis mengalami kemajuan, kapasitas daerah dalam menghasilkan dan mengelola inovasi masih perlu mendapatkan perhatian serius agar daya saing daerah dapat meningkat secara lebih merata dan berkelanjutan.

**Tabel II.31****Indeks Daya Saing Daerah Kabupaten Gunung Mas dan Pilar Penyusunnya Tahun 2022-2024**

Nilai Indeks	2022	2023	2024
Pilar Institusi	4,21	4,07	4,34
Pilar Infrastruktur	2,35	1,41	2,29
Pilar Adopsi TIK	2,4	3,55	3,94
Pilar Stabilitas Ekonomi Makro	2,79	3,51	3,67
Pilar Kesehatan	3,85	3,89	3,83
Pilar Keterampilan	3,07	3,37	4,1
Pilar Pasar Produk	2,37	2,45	3,28
Pilar Pasar Tenaga Kerja	2,4	2,95	2,9
Pilar Sistem Keuangan	1,37	0,42	2,78
Pilar Ukuran Pasar	0,25	3,7	3,72
Pilar Dinamisme Bisnis	5	1,52	3,71
Pilar Kapabilitas Inovasi	0,54	0,67	0,64
<b>Indeks Daya Saing Daerah</b>	<b>2,55</b>	<b>2,63</b>	<b>3,27</b>

Sumber: BRIN, 2025

**2.1.4.4 Kinerja Setiap Urusan Pemerintahan Daerah**

Kinerja setiap urusan pemerintahan daerah merupakan Indikator Kinerja Kunci yang menjadi ukuran keberhasilan melaksanakan program pembangunan setiap urusan pemerintahan daerah. Adapun kinerja setiap urusan pemerintahan daerah Kabupaten Gunung Mas dapat terlihat pada tabel berikut:

**Tabel II.32****Indikator Kinerja Kunci Pembangunan Kabupaten Gunung Mas Tahun 2020-2024**

Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Realisasi				
	2020	2021	2022	2023	2024
<b>A. FOKUS LAYANAN URUSAN WAJIB DASAR</b>					
<b>1. Pendidikan</b>					
Angka Melek Huruf (%)	100	99,4	99,82%	99,84	99,84
<b>Angka Partisipasi Kasar</b>					
Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD (%)	90	57,78	100	31,03	33,74



Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Realisasi				
	2020	2021	2022	2023	2024
Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI (%)	116	112,21	112,24 / 112	109,65	100
Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs (%)	101	89,23	81,74 / 82,24	94,71	100
<b>Angka Partisipasi Murni</b>					
Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A (%)	100	99,12	99,98 / 97,86	99,79	100
Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B (%)	84,78	79,12	80,20 / 81,28	81,5	100
Perbandingan Siswa dan Guru SD/MTs	1:12	1:11,1	1:10	1:10	1:10
Angka Partisipasi Sekolah (%)	108	99,73	102	98,49	98,26
Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah (SD)	1:130	1:130	1:20	1:115	1:74
<b>SMP/MTs</b>					
Perbandingan siswa dan guru SMP/MTs	1:11	1:11,04	1:10	1:11	1:11
Angka Partisipasi Sekolah (%)	102	95,23	102	100	100
Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah SMP	1:130	1:125	1:130	1:120	
<b>Pendidikan Menengah</b>					
Rasio siswa terhadap guru	1:20	1:11	1:20	1:20	1,20
Angka Partisipasi Sekolah (%)	55	61,92	65	62,13	60,61
Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah	50	55	60	60	
<b>Fasilitas Pendidikan</b>					
Persentase SD/MI yang memiliki ruang kelas sesuai SPM	27,5	22	32		
Persentase SMP/Mts yang memiliki ruang kelas sesuai SPM	35	40	45		
Angka Harapan Lama Sekolah	12,41	11,90	11,91	12,05	
Rata-rata Lama Sekolah	9,26	9,18	9,24	9,25	9,37
<b>Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV</b>					
Guru SD/SDLB yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	83	87	1278 Guru		1871
Guru SMP/SMPLB yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	94	95	595 Guru		790
<b>Angka Kelulusan</b>					
Angka Kelulusan (AL) SD/MI	100	100	100	100	100
Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	100	100	100	100	100
Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	100	100	100	100	100
<b>2. Kesehatan</b>					
Angka Usia Harapan Hidup (tahun)	72,99	73,04	73,09	73,31	73,58
Angka Kematian Ibu (Per 100.000 LH)	117	183	135	175	110
Angka Kematian Bayi (per 1.000 LH)	7	11	5	5,3	4,9
Angka Stunting (%)	22,87	20,6	18,34	16,37	10,39



Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Realisasi				
	2020	2021	2022	2023	2024
Angka Gizi Buruk (%)	1	1,03	0,074	2	2
Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat Perawatan (%)	100	100	100	100	100
Persentase anggaran Kesehatan terhadap APBD (%)	11,16	13,38	10	10	10
Persentase Puskesmas Terakreditasi (%)	100	100	100	100	100
Persentase Rumah Sakit Terakreditasi (%)	100	100	50	50	100
Persentase Ketersediaan Sarana, Prasarana dan Alat (SPA) pada FKTP (%)	61,69	62,15	62,9	41,55	65
Persentase Ketersediaan Sarana, Prasarana dan Alat (SPA) pada Pada RS Milik Pemerintah Daerah (%)	66,18	45,06	65	59,25	66,19
Persentase cakupan kepersertaan Jaminan Kesehatan Nasional (%)	77,23	65,52	89,18	100	100
Persentase Ketersediaan Obat dan Vaksinasi Esensial (%)	94,12	90	94	95	95
Rasio Dokter Spesialis (per 100.000 penduduk)	9	11	9	10	9,8
Rasio Dokter (per 100.000 penduduk)	28	35	38	20	28,0
Rasio Dokter Gigi (per 100.000 penduduk)	2	1	1	1	1
Rasio Perawat (per 100.000 penduduk)	332	332	455	294	343,7
Rasio Bidan (per 100.000 penduduk)	185	191	259	222	205,8
Rasio Tenaga Kesehatan Masyarakat (per 100.000 penduduk)	7	13	16	7	14,7
Rasio Tenaga Sanitasi Lingkungan (per 100.000 penduduk)	10	9	12	8	9,8
Rasio Nutrisonis (per 100.000 penduduk)	19	26	28	24	25,2
Rasio Tenaga Apoteker dan/atau Tenaga Teknis Kefarmasian (per 100.000 penduduk)	20	30	41	18	23,8
Rasio Ahli Teknologi Laboratorium medik (per 100.000 penduduk)	21	25	35	18	29,4
Persentase Sarana air minum yang memenuhi syarat (%)	38,10	97,5	36,6	46,15	2,2
Persentase keluarga dengan akses sanitasi yang layak (%)	89,36	88,76	92,64	90,3	94,0
Persentase desa yang melaksanakan STBM (%)	100	100	100	100	100
Persentase desa /kelurahan dengan Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS)	47,24	47,24	48,03	50,39	50,4



Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Realisasi				
	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Rumah Tangga yang ber- - PHBSS (rumah tangga)	4495	2393	14133	5204	
Pelayanan kesehatan ibu hamil (%)	84,06	92,84	94,81	99,79	100
Pelayanan kesehatan Ibu Bersalin (%)	30	31,06	57,1	70	80,10
Pelayanan Kesehatan bayi baru lahir (%)	91,93	100,28	100	100	100
Pelayanan Kesehatan Balita (%)	74,21	82,96	86,84	89,16	99,79
pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar (%)	77,66	56,2	87,93	98,22	98,49
Pelayanan kesehatan pada usia produktif (%)	30,49	50,6	86,64	100	100
Pelayanan kesehatan pada usia lanjut (%)	78,59	50,57	95,78	93,75	93,94
Pelayanan kesehatan penderita hipertensi (%)	46,06	76,39	100	100	100
Pelayanan kesehatan penderita diabeter melitus (%)	238,89	102,86	100	100	100
Pelayanan kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) (%)	125.56	119,77	100	100	100
Pelayanan kesehatan orang terduga TB (%)	78,53	55	52,16	86,06	91,49
Pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi HIV (%)	52,55	63	75,67	98,76	91,12
Angka kesakitan akibat Demam Berdarah Dengue (DBD) (per 100.000 penduduk)	34	9	11,76	195	102
Angka kesakitan API ( <i>Annual Parasite Incidence</i> ) Malaria (per 1.000 penduduk)	0,19	0,14	0,059	0,08	0,017
Jumlah kasus kronis filariasis (kasus)	0	0	0	0	0
Persentase kejadian Luar Biasa (KLB)	0	100	0,19	0	0
Cakupan Desa/Kelurahan <i>Universal Child Immunization</i> (UCI)	86,61	55,9	77,2	62,2	61,2
Persentase penerapan KTR (%)	59	70,58	65	0	99
Jumlah fasyankes yang memiliki pengelolaan limbah medis sesuai standar (unit)	2 RS dan 17 PUSKES MAS	2 RS dan 17 PUSKESM AS	1 RS & 17 Puskesma s)	2 RS dan 17 PUSKE SMAS	2 RS dan 17 PUSKESMAS
Cakupan kunjungan rawat jalan (%)	15,35	25,3	9,51	12,99	45,7
Cakupan kunjungan rawat inap (%)	1,79	1,6	2,85	1,3	3,4
Jumlah RSUD kabupaten/kota yang memiliki 4 dokter spesialis dasar dan 3 dokter spesialis lainnya sebesar 90% (minimal 4 spesialis dasar wajib) (unit)	1 RSUD	1 RSUD	1 RSUD	1 RSUD	1 RSUD



Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Realisasi				
	2020	2021	2022	2023	2024
Angka Kematian umum/ <i>Gross Death Rate (GDR)</i> di RS (per 1.000 pasien keluar)	18,23	35,47	25,63	21,66	22,96
Angka Kematian Murni/ <i>Nett Death Rate (NDR)</i> di RS (per 1.000 pasien keluar)	3,4	19,61	9	7,09	7,82
Tingkat Keterisian Tempat Tidur/ <i>Bed Occupation Rate (BOR)</i> di RS (%)	15,72	35,47	25,60	25,84	36,12
Angka Penggunaan Tempat Tidur/ <i>Bed Turn Over (BTO)</i> (kali)	26,55	35	29	26	38,48
Tenggang Perputaran Tempat Tidur/ <i>Turn Of Interval (TOI)</i> di RS (hari)	11,59	7	9	10,41	6,08
Rata - rata lama pasien dirawat / <i>Avarage Length of Stay (ALOS)</i> di RS (hari)	3,17	3	2	2,63	2,44
<b>3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>					
Luas Wilayah Produktif (Juta Ha)	0,565	0,565	0,565	0,565	0,565
Luas Wilayah Kebanjiran (Ha)	20	20	20	20	20
Luas Wilayah Perkotaan (Ha)	7,492	7,506	7,520	7,530	7,530
Proporsi Panjang Jalan Dalam Kondisi Baik	37,75	39,18	30,24	33,63	34,65
Rasio Saluran Irigasi yang Berfungsi Optimal	78	75,33	87,23	72,02	73,2
Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi	55,6	61,47%	57,12	57,97	58,65
Rasio Tempat Pembuangan Sampah (TPS) Persatuan Penduduk	23,37	0%	0,43	3,33	2,90
Persentase penanganan sampah (%)	20	8%	72,7	16,66	64,50
Rasio Rumah Layak Huni	33,65	40,50	74,97	91,79	92,04
Pemukiman Layak Huni (Ha)	7.100	7524	7524	7524	7.500
Panjang Jalan Dilalui Roda 4 (Km)	737.935	689	689,492	689,492	689,492
Rasio Jalan Dalam Kondisi Baik (%)	27	25,32	30,24	33,63	34,65
Rasio Jembatan Dalam Kondisi Baik (%)	6	7	8,5/40,63 %	26,38	9,21
Jumlah Desa Yang Terhubung Dengan Kecamatan	3 desa	3 Desa	3 Desa	3	3
Jumlah Desa yang Dialiri Air Bersih	3 desa	3 Desa	6 Desa	3	3
Persentase Sarana Penerangan Jalan Umum (PJU) Dalam Kondisi Baik (%)	20	25%	78,91	83	84,20
Persentase desa yg terhubung dg jalan pusat kecamatan dalam kondisi baik	55	60	65	70	75
Rasio elektrifikasi	77,19	76,97%	76,1	88,43	95,55
<b>4. Perumahan dan Pemukiman</b>					



Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Realisasi				
	2020	2021	2022	2023	2024
Rumah Tangga Pengguna Air Bersih (jiwa)	14.844	18.000	18.076	19.100	20.460
Rumah Tangga mempunyai akses sanitasi Layak (%)	39	82,2	57,12	57,97	58,65
Rumah Tangga mempunyai akses sanitasi Aman (%)	1,8	2	2	2	2
Rumah Layak Huni (unit)	26.241	61	74,97/22. 233	27.220	27.296
Persentase Desa yang memiliki Perumahan dan Kawasan Permukiman yang layak Huni (%)	27,50	32,50	33,00	35,00	37,50
Rasio Bangunan ber-IMB per satuan Bangunan (%)	0,81	0,01	0,01	0,01	0,01
Ruang Terbuka Hijau (RTH) (%)	0,98	0,03	0,03	0,03	0,03
Persentase Taman/RTH Kota Dengan Kriteria Terbaik	15	15	15	15	15
RT mempunyai akses air minum jaringan perpipaan (%)	19,65	19,83	34,77	35,07	36,21
RT mempunyai akses air minum bukan jaringan perpipaan (%)	55,08	67,54	65,23	58,61	58,61
<b>5. Ketertiban dan Ketentraman Umum</b>					
Kegiatan Pembinaan terhadap LSM, Ormas, dan OKP (kegiatan)	2 kegiatan	2 KEGIATAN (98,34%)	1 KEGIATAN (50%)	2 kegiatan	1 kegiatan
Kegiatan Pembinaan politik daerah (kegiatan)	1 kegiatan	3 KEGIATAN (97,92%)	1 KEGIATAN (33,33%)	1 kegiatan	1 kegiatan
Persentase penurunan jumlah pelanggaran perda (%)	50	4,00%	16,66%		
Persentase penyelesaian tindak pidana (%)	91,2	43,03%	107,89%	84,76 %	72,41%
Jumlah tindak pidana	55	91	124	151	174
<b>6. Sosial</b>					
PMKS yang memperoleh bantuan sosial (%)	58,13	78,81%	78,34	99,79	100
Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial (%)	2,5	2,6%	4,5	100,00	81,42
<b>B. Fokus Layanan Urusan Wajib Non-Dasar</b>					
<b>1. Ketenagakerjaan</b>					
Tingkat partisipasi angkatan kerja (%)	90	69,70%	69,53	71,60	68,72
Tingkat pengangguran terbuka (%)	1,11	3,11/1,13	2,96	3,24	3,12
Jumlah lulusan S1/S2/S3 (orang)	1.402	1.412	1.084	864	2.496
Rasio lulusan S1/S2/S3 (%)	98,92	98,93	76,17	98,92	98,93
<b>2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak</b>					



Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Realisasi				
	2020	2021	2022	2023	2024
Indek Pemberdayaan Gender (IDG) (%)	89,33	88,2	89,15	89,29	
Indeks Pembangunan Gender (IPG) (%)	92,34	92,09	92,18	92,61	
iBangga	na	51	data belum publish	59,76	62
Persentase Perangkat Daerah yang melaksanakan Perencanaan dan Penganggaran yang responsif Gender (%)	na	39	2,58	68,42	100,00
Indeks Perlindungan Anak (IPA) (%)	na	60	59,78	59,78	
Capaian Kabupaten Layak Anak (skor)	na	283,30	214,55		
Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO mendapatkan Layanan Komprehensif (%)	na	100	100	100	100
Rasio KDRT (%)	na	0,015	0,005	0,007	0,006
Persentase anak memerlukan perlindungan khusus yang mendapatkan layanan komprehensif (%)	100	100	100	100	100
<b>3. Ketahanan Pangan</b>					
Regulasi Ketahanan Pangan (Dokumen)	1	1	0	1	0
<b>4. Pertanahan</b>					
Persentase pembebasan tanah yang diselesaikan tepat waktu	65	0	33,33	100	85
Jumlah Pengusulan Sertifikat Milik Pemerintah Daerah Pertahun (sertifikat)	29	61	38	35	14
Jumlah sertifikat yang diterbitkan pertahun bagi masyarakat miskin tepat waktu (sertifikat)	28	0	0	0	5250
Jumlah desa lokasi Prona (desa)	20	27	11	14	16
<b>5. Lingkungan Hidup</b>					
Jumlah duta lingkungan (orang)	2	0	0	0	-
Jumlah adiwiyata (sekolah)	11	0	9	9	0
Pencemaran status mutu air (%)	32,5	43,33	46,67	50	Indeks kualitas air (ika) 42.86
Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan amdal (%)	85	240	22	100	100
Penegakan Hukum Lingkungan (%)	100	100	Tidak ada Kasus Lingkungan (100)	100	Tidak ada Kasus Lingkungan (100)
Persentase perusahaan/wajib usaha yang menerapkan aturan penanganan limbah (%)	80	47,39	14	95	14



Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Realisasi				
	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase Standar Baku Mutu Udara (%)	85	89,45	87,85	89,64	92,82
Status pencemaran air sungai (Indeks Kualitas Air)	65	50	46,67	50	42,86
Status pencemaran udara (Indeks Kualitas Udara)	93,25	87,53%	87,85%	89,64	92,82
Tutupan Lahan (Indeks Kualitas Tutupan Lahan)	66,5	71%	71,25%	70,66	71,31
<b>6. Kependudukan dan Catatan Sipil</b>					
Ketersediaan data base kependudukan skala Kabupaten	Tersedia	tersedia (Aplikasi SIAK)	tersedia (Aplikasi SIAK)	tersedia (Aplikasi SIAK)	tersedia (Aplikasi SIAK)
Persentase keluarga yang memiliki akta perkawinan (%)	26,39	8,60%	45,24%	25,58	27,79%
persentase jumlah penduduk dengan KK Nasional	65,43	61%	99,71%	98,84	98,30%
Persentase jumlah penduduk yang memiliki KTP Elektronik (e-KTP) (%)	78,56	96%	90,65%	94,27	96,40%
<b>7. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa</b>					
Jumlah desa yang diperbaharui profil desanya	114	114	114	114	114
Jumlah musyawarah pembangunan Desa/Kelurahan yang dapat difasilitasi	72	12	72	72	72
Terlaksananya bulan bakti gotong royong masyarakat	1	0 (tidak dilaksanakan terkait PPKM/ Covid -19)	0 (tidak dilaksanakan terkait PPKM/ Covid -19)	1	0
Jumlah kader pemberdayaan masyarakat desa yang terlatih	373	0	373	373	373
Jumlah Desa/Kelurahan yang mendapat akses TTG	5	0	5	7	8
<b>8. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera</b>					
Total Fertility Rate (TFR) (%)		2,57	2,42	2,34	2,34
Modern Contraceptive Prevalence Rate (mCPR) (%)		84	57,85	73,37	72,03
Unmet Need (%)		8,57	17,13	6,50	5,25
Peserta pengguna MKJP (%)		16	8,8	29,60	23,20
Cakupan keluarga punya balita dan anak memahami dan melaksanakan pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang (PKB) (%)		50	15,8	30,78	114
Prevalensi Stunting (%)		20	18,34	16,37	12,90



Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Realisasi				
	2020	2021	2022	2023	2024
Cakupan Remaja dalam pusat Informasi dan Konseling (BKR dan PIK-R) (%)		30	30 (30/12*100=250)	3,91	30
kelompok BKL yang terbina		1	40	51	52
Cakupan Akseptor KB Anggota kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKA) (%)		49	70	82	74
Persentase ARG pada belanja langsung APBD (%)		2	2,58	1,93	2,265
<b>9. Perhubungan</b>					
Jumlah Bandara (buah)	1	1	1	1	1
<b>10. Komunikasi dan Informatika</b>					
Cakupan pengembangan dan pemberdayaan kelompok Informasi masyarakat di tingkat kecamatan (%)	17	0	20	25	25
Cakupan layanan telekomunikasi (Km2)	4.508	55	5.000	9.744	9.900
Persentase penduduk yang menggunakan HP/telepon (%)	75,57	83,69	78,41	82,38	81,76
Proporsi rumah tangga dengan akses internet (%)	42,86	53,87	62,44	75,42	74,32
Proporsi rumah tangga yang memiliki komputer pribadi (%)	72,57	7%	9,88%	17,97	17,97
<b>11. Koperasi dan UMKM</b>					
Koperasi aktif (%)	65	90	88	89	89,24
Jumlah UMKM (unit)	2.985	3.059	3.227	3.663	5.237
Jumlah Industri (industri)	325	325	371	439	417
Jumlah pasar Desa/Kecamatan (desa/kelurahan)	4	4	4	3	3
Persentase koperasi yang modal dan SHU Meningkatkan (%)	36	8	8,08	6,18	6,02
Persentase UMKM yang modal dan omzet meningkat (%)	67,5	67,5	70	73	73,2
<b>12. Penanaman Modal</b>					
Jumlah Investor PMDN dan PMA (investor)	55	60	62	62	62
Persentase pengajuan perizinan dan non perizinan yang diselesaikan tepat waktu (%)	80	80	80	100	100
Lamanya hari proses perizinan (hari)	9	9	9	8	7
Indeks Kepuasan Masyarakat (%)	83	81,24	85	85,25	83,93
Persentase penyelesaian penanganan pengaduan (%)	100	100	100	100	100
Nilai Investasi Daerah (Triliun Rp)	5,2	5,3	0,267	1,172	1,208
Tingkat Pertumbuhan Nilai Investasi (%)	15	10%	25%	33,78	5,86
<b>13. Kepemudaan dan Olahraga</b>					
Jumlah klub olahraga (buah)	2	31	14	2	2



Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Realisasi				
	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah gedung olahraga (Unit)	1	-	3	10	10
Jumlah organisasi pemuda (buah)	86	68	43	116	116
Jumlah organisasi olahraga (buah)	1	-	1	18	17
Jumlah Gelanggang/balai remaja (selain milik swasta) (unit)	1	-	-	-	-
Jumlah lapangan olahraga (buah)	211	-	148	291	291
Jumlah mendali (buah)	98	94	0	32	8
<b>14. Statistik</b>					
Buku "Gunung Mas dalam Angka"	ada	Ada	Ada (BPS)	Ada	Ada
Buku "PDRB Kabupaten Gunung Mas"	ada	Ada	Ada (BPS)	Ada	Ada
Tersedianya Sistem data dan Statistik yang terintegrasi	ada	Ada	Ada (SIDAT)	Ada (sidat)	Ada (sidat)
<b>15. Persandian</b>					
Persentase Perangkat Daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi perangkat daerah (%)			12,11	77	60,83
<b>16. Kebudayaan</b>					
Jumlah Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya (kali)	3	1	3	5	5
Jumlah Sarana Penyelenggaraan Seni dan Budaya (buah)	1	1	1	1	1
Jumlah Benda, Situs dan Kawasan Budaya yang dilestarikan (buah)	25	25	25	25	25
Jumlah Grup Kesenian (buah)	26	28	33	26	26
Jumlah Gedung Kesenian (Unit)	1	1	1	1	1
Jumlah penghargaan kebudayaan (buah)	3	0	0	4	4
<b>17. Perpustakaan</b>					
Jumlah perpustakaan daerah	1	1	1	1	1
Jumlah Perpustakaan umum	40	40	1	1	1
Jumlah perpustakaan sekolah :					
-SD/MI	166		77	104	104
-SMP/MTs	56		38	52	52
-SMA/MA	13		13	15	15
Jumlah perpustakaan desa/kelurahan	50	50	50	50	50
Jumlah perpustakaan rumah ibadah	1	0	--	0	0
Jumlah anggota	1.600	143	52	460	309
Jumlah pengunjung	4.500	365	2.072	2.199	4
Jumlah koleksi bahan perpustakaan	32.000	36.554	30.424	31.324	33.024
<b>18. Kearsipan</b>					
Pengelolaan arsip secara baku :					
a. Umum	110	120	120	130	130



Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Realisasi				
	2020	2021	2022	2023	2024
b. Pemerintahan	110	120	110	125	125
c. Politik	75	85	75	95	95
d. Keamanan dan ketertiban	75	85	75	90	90
e. Kesejahteraan rakyat	65	75	95	90	90
f. Perekonomian	85	95	85	100	100
g. Pekerjaan umum	95	105	115	110	110
h. Pengawasan	105	115	100	120	120
i. Kepegawaian	105	105	115	120	120
j. Keuangan	120	135	130	140	140
<b>C.Fokus Layanan Urusan Pilihan</b>					
<b>1. Pariwisata</b>					
Kunjungan Wisata (Jiwa)	11.000	10.524	19.689	14.000	14.000
Jumlah objek wisata daerah (buah)	27	28	20	29	29
PDRB Sektor Pariwisata (%)	14,5%	1	6,48	18,5	18,5
PDRB Sektor Pariwisata (Milyar Rp)	30	1	1,17		
<b>2. Pertanian</b>					
Persentase PDRB Sektor Pertanian (%)	33,5	30,88	29,56	31,69	33,05
PDRB Sektor Pertanian (dalam Milyar Rp)	1.982,68	2 215,3	2.404,5	2.731,100	3.226,100
<b>Produksi komoditi Tanaman Pangan dan Hortikultura:</b>					
a. Padi (ton)	2.775	2.540	3.064	560,7	756,93
-Padi Sawah (Ton)	1.556	1.240	340	237,6	159,43
-Padi Ladang (Ton)	1.219	1.300	2.724	323,1	597,50
b. Jagung (Ton)	1.470	895	400	258	321,00
c. Ubi Kayu (ton)	156,00	2.090	177	137,5	194,81
<b>Tanaman Hortikultura:</b>					
a. Cabe Rawit (Ton)	16	207,4	42,0	23,4	5,89
b. Kacang Panjang (ton)	6	176	50	30,88	10,25
c. Durian (Ton)	255	355	395	223	220,00
d. Pisang (Ton)	6	450	20	26	30,00
e. Rambutan (Ton)	10	75	18	20	22,00
f. Nenas (Ton)	11	500	40	44	46,00
<b>Produktivitas Komoditi Tanaman Pangan Pangan Dan Hortikultura</b>					
a. Padi (Kwintal/Ha)	23	33	52	52	
-Padi Sawah (Kwintal/Ha)	25	31	32	32	35,00
-Padi Ladang (Kwintal/Ha)	21	2	20	20	20,00
b. Jagung (Kwintal/Ha)	30	32	35	40	40,00
c. Ubi Kayu (Kwintal/Ha)	32	38	39	39	39,00
<b>Tanaman Hortikultura:</b>					
a. Cabe Rawit (Kwintal/Ha)	5	6,1	6,0	11,0	9,00
b. Kacang Panjang (Kwintal/Ha)	1	3	1	11	9,00
c. Durian (Kwintal/Ha)	44	48	68	11	12,00
d. Pisang (Kwintal/Ha)	29	30	125	6	7,00
e. Rambutan (Kwintal/Ha)	5	6	60	80	26,00
f. Nenas (Kwintal/Ha)	76	100	230	0,2	0,28



Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Realisasi				
	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Luas Pengembangan Komoditi Tanaman Pangan dan Hortikultura</b>					
a. Padi (Ha)	1.059	1.225	302	200,3	387,25
-Padi Sawah (Ha)	457	570	109	38,3	22,50
-Padi Ladang (Ha)	602	655	193	162	364,75
b. Jagung (Ha)	500	300	100	208,8	80,25
c. Ubi Kayu (Ha)	50	57	46	43	49,95
Tanaman Hortikultura:					
a. Cabe Rawit (Ha)	33	37	30	20,1	16,80
b. Kacang Panjang (Ha)	61	69	50	40,45	24,80
c. Durian (Ha)	59	74	95	165	5,27
d. Pisang (Ha)	2	15	11	375 (Rumpun)	0,33
e. Rambutan (Ha)	19	25	30	120 (Pohon)	1,02
f. Nenas (Ha)	2	5	6	52 (Rumpun)	0,34
<b>Populasi Ternak</b>					
Sapi (Ekor)	4.919	4.960	4.340	4.386	4.471
Kerbau (Ekor)	198	176	196	193	278
Kambing (Ekor)	530	539	551	554	554
Babi (Ekor)	39.463	14.807	15.205	15.375	18.651
Ayam Buras (Ekor)	86.894	86.186	87.429	88.561	88.784
Ayam Ras Pedaging (Ekor)	101.485	102.439	108.642	109.740	112.546
Ayam Ras Petelur (Ekor)	8.510	18.998	24.746	25.020	28.758
Itik (Ekor)	3.241	3.479	3.940	4.485	5.693
<b>Produksi Ternak</b>					
Sapi (Ton)	98	108	110	110,310	111,56
Kerbau (Ton)	5	5,3	6	6,995	5,69
Kambing (Ton)	1,1	1,1	1	1,300	1,25
Babi (Ton)	255	377,899	380	417,327	410,33
Ayam Buras (Ton)	49	50	55	55,693	58,74
Ayam Ras Pedaging (Ton)	426	459	461	462,410	488,78
Itik (Ton)	2	3	4	4,182	1,34
<b>Produksi Telur</b>					
Ayam Buras (Ton)	31	31	33,10	33,388	35,46
Ayam Petelur (Ton)	16,55	65,83	69,73	43,877	71,78
<b>Pengembangan/ Perluasan Area Perkebunan</b>					
Karet (Ha)	68,378	68,388	68,38	68	68,422
Kelapa Sawit (Ha)	72.760	72.780	72,78	75	72,961
<b>Produksi Komoditi Perkebunan</b>					
Karet (Ton)	20,263	20,276	20,28	20,32	20,330
Kelapa Sawit tbs (Ton)	100,334	102,127	107,87	108,93	102,614



Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Realisasi				
	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Produktivitas Komoditi Perkebunan</b>					
Karet (Ton/Ha)	0,30	0,30	0,48	0,32	0,33
Kelapa Sawit (Ton/Ha)	1,45	1,65	1,44	1,59	1,64
<b>3. Kehutanan</b>					
Hutan Rakyat dan Lahan Terbuka Hijau (Ha)	2750	0	urusan provinsi	urusan provinsi	urusan provinsi
Pembangunan KPHP (Unit)	1	0	urusan provinsi	urusan provinsi	urusan provinsi
Pembangunan TAHURA	1	1	1	1	1
Pembangunan Hutan Desa dan HKM (Unit)	1	0	urusan provinsi	urusan provinsi	urusan provinsi
Pembangunan Hutan Tanaman Rakyat/HTR (unit)	1	0	urusan provinsi	urusan provinsi	urusan provinsi
Luas kawasan tahura yang tertata dan terjaga kelestariannya (Ha)	12	103,03	103,03	37,65	30 Ha
<b>5. Perdagangan</b>					
Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB (%)	8,95	9,59*	9,93**	10,20	9,98
<b>6. Perindustrian</b>					
Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB (%)	10,50	8,24	8,20	8,52	8,28
Pertumbuhan Industri (%)	50	70	-0,02		8,95
Cakupan Bina Kelompok Pengrajin (jumlah)	300	140	12 KELOMPOK		50
<b>7. Kelautan dan Perikanan</b>					
Peningkatan produksi perikanan budidaya (Ton)	5.200,63	1.022,70	1.320,98	1.255,17	1.312,95
Peningkatan tingkat konsumsi ikan masyarakat (Kg)	41,4	29,30	31,40	32,00	34,30
Peningkatan produksi benih ikan (ribek ) ekor	165.757	87.539	173.240	141.517	105.800
Peningkatan produksi hasil pengolahan (Ton)	30,1	20,66	28,3	27	33,018
<b>8. Transmigrasi</b>					
Persentase ketersediaan dan terkelolanya prasarana dan sarana di kawasan transmigrasi (%)	93,22	75,7	75	75	75
<b>9. Penanggulangan Bencana</b>					
Terbangunnya budaya sadar bencana (kelompok)	4	4	15	25	25



Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Realisasi				
	2020	2021	2022	2023	2024
Meningkatnya rapid respon (waktu kecepatan ke tempat bencana/jam) (Jam)	2	2	1,5	2	2
Meningkatnya tingkat pemulihan pasca bencana non manusia (%)	100	100	100	100	100
<b>10. Energi dan Sumber Daya Mineral</b>					
Kontribusi sektor pertambangan dari PNB dan PAD (Rp)	658.350.000.000	381.200.000.000		746	
Persentase rumah tangga yang menggunakan listrik (%)	79,54	97,64	91,29	88,43	<b>99,22</b>
Jumlah Desa Berlistrik (desa)	108	127	104	111	<b>127</b>
<b>D. Urusan Penunjang</b>					
<b>1. Perencanaan Pembangunan</b>					
Tersedianya Dokumen Perencanaan RTRW yang telah ditetapkan dengan PERDA (Dokumen)	Ada	Ada	ADA	Ada	Ada
Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA (Dokumen)	Ada	Ada	ADA	Ada	Ada
Tersedianya Dokumen Perencanaan RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA (Dokumen)	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD (Dokumen)	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
Persentase kesesuaian antara muatan Renstra SKPD dengan RPJMD	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
Persentase kesesuaian antara muatan RKPD dengan muatan RPJMD (%)	100	98	100	100	100
Persentase kesesuaian perencanaan pembangunan daerah dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten (RTRWK) dan turunannya (%)	100	100	100	100	100
<b>2. Keuangan</b>					
Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	
Indeks Persepsi Korupsi	NA	Data Belum Tersedia	34	2,9	
Survei Penilaian Integritas (%)		74,5	71,34	71,34	
<b>3. Reformasi Birokrasi</b>					
Nilai Reformasi Birokrasi	62,5	50,01	51,66 (CC)	54,77 (CC)	
Nilai SAKIP	--	---	61,78 (B = baik)	62,14	B (61,63)
Level Kapabilitas	Level 3	Level 2	Level 2 (2,43)	level 3	level 3



Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Realisasi				
	2020	2021	2022	2023	2024
Level Maturitas	Level 3	Level 2	Level 3 (3,019)	level 3	level 3
IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)	82,45 (baik)	84,25 (baik)	81,06 (baik)	81,66 (baik)	83,93 (sangat Baik)
Predikat Akuntabilitas Kinerja	BB	B	B	B	B

Sumber: Dikutip dari berbagai sumber di lingkup pemerintahan Kabupaten Gunung Mas, 202

## 2.2 Gambaran Umum Keuangan Daerah

Keuangan daerah merupakan bagian integral dari sistem pemerintahan yang memainkan peran penting dalam menyediakan layanan dasar kepada penduduknya dan mendorong pembangunan ekonomi di tingkat lokal.

Pemerintah daerah membuat rencana keuangan jangka menengah dan anggaran tahunan untuk mengatur pendapatan dan pengeluaran. Proses perencanaan dan anggaran ini penting untuk memastikan bahwa sumber daya keuangan dimanfaatkan dengan efisien dan efektif. Untuk itu prinsip transparansi dan akuntabilitas sangat penting dalam pengelolaan keuangan daerah. Pemerintah daerah diharapkan untuk memberikan laporan keuangan yang jelas dan terbuka kepada publik, serta memastikan bahwa dana publik digunakan dengan tepat dan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan. Dengan kata lain keuangan daerah tidak hanya merupakan aspek administratif, tetapi juga memiliki dampak langsung terhadap kesejahteraan dan pembangunan masyarakat di tingkat lokal. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah daerah untuk mengelola keuangan mereka dengan hati-hati dan efisien untuk mencapai tujuan-tujuan pembangunan yang diinginkan.

Dalam mengelola keuangan daerah kita perlu memperhatikan berbagai kondisi yang mampu mempengaruhi keuangan daerah khususnya perkembangan kondisi ekonomi global yang dapat berdampak pada perekonomian nasional dan daerah.

Gejolak global yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir menjadi tantangan berat di hampir semua negara. Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) menciptakan krisis multidimensi dan menyebabkan kontraksi ekonomi global sebesar 2,8% di tahun 2020 yang merupakan resesi terburuk sejak *the Great Depression* 1930-an. Memasuki tahun 2021, ekonomi global mengalami pemulihan, namun menguatnya permintaan yang tidak diimbangi dengan kenaikan sisi suplai akibat gangguan rantai pasok menyebabkan peningkatan tekanan inflasi yang direspons dengan kebijakan pengetatan moneter di sejumlah negara maju. Konflik antara Rusia dan Ukraina di awal tahun 2022 semakin memperparah disrupsi sisi suplai, terutama pangan dan energi. Harga-harga komoditas global melonjak tajam sehingga menyebabkan semakin tingginya inflasi di banyak negara hingga mencapai rekor tertinggi dalam 40 tahun terakhir. Risiko kerawanan pangan dan energi juga meningkat di banyak negara khususnya negara berpendapatan rendah. Pengetatan kebijakan moneter menjadi semakin agresif, khususnya di Amerika Serikat (AS), yang menyebabkan semakin ketatnya likuiditas global, meningkatnya biaya utang serta gejolak pasar keuangan di banyak negara berkembang. Sebagai akibatnya, pemulihan ekonomi global mengalami perlambatan di tahun 2022 yang diperkirakan hanya tumbuh 3,4%, jauh dari perkiraan awal (Januari tahun 2022) yang sebesar 4,4%. Lebih parah lagi dalam laporan WEO edisi Januari tahun 2024, IMF memperkirakan pertumbuhan ekonomi global hanya sebesar 3,1% pada tahun 2023 dan 2024. Sedangkan *World Bank* memprediksi perekonomian global tahun 2024 hanya tumbuh 2,4% di mana meskipun inflasi mengalami moderasi atau penurunan, namun belum serta merta menurunkan suku bunga yang melonjak cukup tinggi dalam 18 bulan terakhir.

Dari sisi domestik, inflasi yang diperkirakan relatif stabil, dampak dari penyelenggaraan Pemilu tahun 2024 terhadap konsumsi masyarakat maupun

konsumsi Pemerintah, serta kebijakan sektor perumahan yang sudah digulirkan Pemerintah pada triwulan IV-2023 akan menjadi faktor pendorong pertumbuhan tahun 2024. Perekonomian domestik diperkirakan masih tumbuh kuat pada tahun 2024 sebesar 5,2%.

### 2.2.1 Kinerja Keuangan Masa Lalu

Kinerja keuangan masa lalu menggambarkan performa keuangan Daerah selama periode 5 (lima) tahun sebelumnya. Analisisnya mencakup berbagai aspek dari laporan keuangan daerah yang digunakan untuk mengevaluasi kesehatan finansial dan kinerja entitas keuangan daerah tersebut selama periode waktu 5 (lima) tahun. Kinerja keuangan masa lalu dievaluasi dengan menganalisis data-data historis seperti laporan realisasi keuangan, neraca, laporan laba rugi, dan laporan arus kas. Dari data tersebut, berbagai matriks keuangan dapat dihitung dan dianalisis untuk memberikan gambaran tentang kinerja finansial entitas selama periode waktu 5 (lima) tahun.

Sebagai tahap awal dalam menganalisis kinerja keuangan daerah pada masa-masa lalu perlu diketahui kemampuan kemandirian pendanaan pembangunan pemerintahan daerah selama ini. Derajat kemandirian fiskal mengacu pada tingkat kemandirian atau independensi pemerintahan daerah dalam mengelola keuangan dan anggarannya tanpa terlalu bergantung pada sumber pendapatan dari luar khususnya Provinsi dan Nasional. Dalam konteks pemerintahan daerah, ini sering kali mengacu pada kemampuan suatu pemerintah untuk menghasilkan pendapatan yang cukup dari sumber-sumber dalam daerah seperti pajak, cukai, dan sumber-sumber lainnya, sehingga tidak perlu terlalu bergantung pada bantuan atau transfer dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi atau sumber pendapatan luar lainnya.

Semakin tinggi derajat kemandirian fiskal maka semakin mandiri atau independen keuangan mereka. Hal ini dianggap penting karena tingkat kemandirian fiskal yang tinggi dapat memberikan stabilitas dan keberlanjutan finansial bagi pemerintahan daerah, mengurangi risiko ketergantungan pada pihak lain yang mungkin memiliki kepentingan politik atau ekonomi yang berbeda. Adapun klasifikasi DOFD dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel II.33**  
**Skala interval Otonomi Fiskal**

No	Derajat Otonomi Fiskal (DOF) (%)	Kemampuan Keuangan Daerah
1	0,00-10,00	Sangat Kurang
2	10,01-20,00	Kurang
3	20,01-30,00	Sedang
4	30,01-40,00	Cukup
5	40,01-50,00	Baik
6	>50	Sangat Baik

Sumber: Litbang Mendagri, 1991; Wulandari, 2001

Kondisi kemandirian keuangan daerah Kabupaten Gunung Mas berdasarkan DOFD terjadi peningkatan dari 6,67% (2020) menjadi 7,89% (2021), kemudian dalam 3 (tiga) tahun terakhir (2022-2024) relatif mengalami tren negatif yang menunjukkan tingkat kemandirian fiskal daerah menurun cukup signifikan. Di tahun 2022 DOFD Kabupaten Gunung Mas mencapai 7,12% dan terus menurun hingga mencapai 3,06% di tahun 2023 lalu mengalami peningkatan kembali pada tahun 2024 yaitu 4,07%. Dinamika fluktuasi peningkatan DOFD tersebut dipengaruhi oleh peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam kurun waktu tahun 2020-2024 yang kurang signifikan. Walaupun dapat dikatakan bahwa kemandirian fiskal Daerah Kabupaten Gunung Mas terus bergerak tetapi dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir (2020-2024) masih berada di kategori 'sangat kurang'. Agar tingkat kemandirian fiskal kedepan bisa terus meningkat maka Pemerintah Kabupaten Gunung Mas perlu menjaga konsistensi tumbuhnya PAD dengan terus menggali sumber-sumber potensi keuangan daerahnya dan menekankan kebijakan belanja yang berorientasi peningkatan PAD. Adapun perkembangan DOFD Kabupaten Gunung Mas periode tahun 2020-2024, dapat dilihat pada Tabel berikut ini.

**Tabel II.34****Derajat Otonomi Fiskal Daerah Kabupaten Gunung Mas, Tahun 2020-2024**

No.	Tahun	Pendapatan Asli Daerah	Total Pendapatan	Persentase
1	2020	66.064.355.509	990.638.486.554	6,67
2	2021	85.105.385.510	1.078.818.220.819	7,89
3	2022	77.246.690.077	1.085.423.818.762	7,12
4	2023	35.992.250.833	1.176.119.496.935	3,06
5	2024	58.708.141.585	1.441.537.904.960	4,07
	Rata-Rata	64.623.364.703	1.154.507.585.606	5,60

Sumber: BKAD Kabupaten Gunung Mas, 2025 (diolah)

**2.2.1.1 Kinerja Pelaksanaan APBD**

Kinerja keuangan daerah diukur dari kinerja pelaksanaan APBD. Kinerja pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) mengacu pada sejauh mana pemerintah daerah berhasil menjalankan anggaran yang telah disetujui dalam APBD. Kinerja ini dapat dinilai dari beberapa aspek, termasuk efisiensi, efektivitas, akuntabilitas, dan transparansi dalam penggunaan dana publik. Kinerja pelaksanaan APBD yang baik menunjukkan bahwa pemerintah daerah memiliki kemampuan manajerial yang baik dalam mengelola keuangan publik, serta mampu memenuhi kebutuhan dan aspirasi masyarakat secara efektif dan efisien. Untuk itu kinerja pelaksanaan APBD Kabupaten Gunung Mas akan dilihat dari kinerja pendapatan daerah, kinerja belanja daerah, dan kinerja pembiayaan daerah.

Pendapatan daerah merupakan hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Belanja daerah adalah kewajiban pemerintah

daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Sementara itu pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya.

### **1. Pendapatan Daerah**

Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran.

Kebijakan pendapatan daerah perlu diterjemahkan melalui serangkaian langkah atau strategi yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mengelola pendapatan yang diperolehnya dari berbagai sumber, termasuk pajak, retribusi, dana perimbangan dari pemerintah pusat, hasil investasi, dan lain sebagainya.

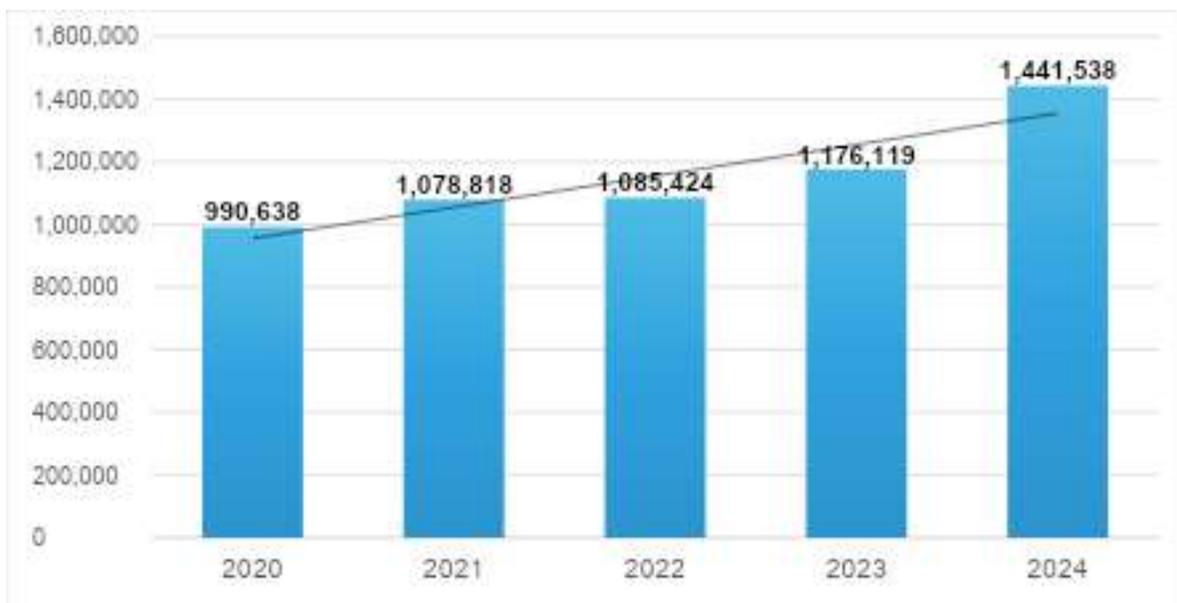
Berdasarkan PP No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, struktur pendapatan daerah terdiri dari:

- (1) Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri dari Pendapatan Pajak Daerah, Pendapatan Retribusi Daerah, Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan, Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah;
- (2) Pendapatan Transfer yang terdiri dari Transfer Pemerintah Pusat (Dana Perimbangan, Dana Insentif Daerah, Dana Otonomi Khusus, dan Dana Desa); dan Transfer Antar Daerah (Pendapatan Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan);
- (3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah meliputi Pendapatan Hibah, Dana Darurat, Pendapatan Lainnya.

Dalam kurun 5 (lima) tahun terakhir perkembangan Pendapatan Kabupaten Gunung Mas terus mengalami peningkatan cukup signifikan dengan rata-rata pertumbuhan mencapai 16,16% per tahun di mana Pendapatan tahun 2020 mencapai Rp990 miliar menjadi Rp1,441 triliun di tahun 2024 yang terutama didorong oleh meningkatnya pendapatan transfer yang cukup signifikan.

### **Gambar II.35**

#### **Perkembangan Pendapatan Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2020-2024 (dalam jutaan)**



Sumber: BKAD Kabupaten Gunung Mas, 2025 (diolah)

Jika dilihat lebih dalam pada komponen pendapatan daerah dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir (2020-2024), terlihat bahwa baik Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Pendapatan Transfer mengalami rata-rata pertumbuhan positif dimana pertumbuhannya secara berurutan sebesar 13,71% per tahun dan 16,90% per tahun. Sementara Lain-lain Pendapatan yang sah mengalami kontraksi sampai -100% dari Rp16,132 miliar menjadi Rp0 yang disebabkan tidak adanya penerimaan pendapatan yang bersumber dari pendapatan hibah di tahun 2023.

**Gambar II.36**

**Perkembangan Struktur Pendapatan Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2020-2024**



Sumber: BKAD Kabupaten Gunung Mas, 2025 (diolah)

**a. Pendapatan Asli Daerah**

Pendapatan asli daerah merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Pendapatan asli daerah dipisahkan menjadi 4 (empat) yaitu Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Sah, dan Lain-lain PAD yang Sah.

1) Pajak daerah



Sebagaimana diatur Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, jenis pajak yang menjadi sumber pendapatan pemerintah kabupaten meliputi: pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang burung walet dan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan. Perkembangan pajak daerah mengalami tren negatif dengan rata-rata pertumbuhan sebesar -11,30% per tahun dari Rp31,303 miliar (2020) menjadi Rp19,377 miliar (2024). Peningkatan paling signifikan terjadi di tahun 2023 khususnya dari pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Hal ini juga menunjukkan adanya akselerasi penggalan pungutan pajak daerah yang berkualitas. Meskipun begitu dengan melihat nilainya yang relatif masih kecil, untuk lebih mengoptimalkan PAD dari Pajak Daerah ke depan perlu dilakukan optimalisasi pemungutan pajak lainnya seperti pajak properti, pajak penjualan, pajak restoran, dan sebagainya.

## 2) Retribusi Daerah

Retribusi daerah terdiri dari retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu. Pemerintah Daerah Kabupaten Gunung Mas memungut retribusi jasa umum yang terdiri atas retribusi pelayanan kesehatan, retribusi pelayanan persampahan/kebersihan, retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum, retribusi pengujian kendaraan bermotor, retribusi dan/atau penyedotan kakus, retribusi pelayanan tera/tera ulang serta retribusi pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi.

Retribusi daerah yang termasuk retribusi jasa usaha yaitu retribusi pemakaian kekayaan daerah, retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan, retribusi tempat pelelangan, retribusi terminal, retribusi tempat khusus parkir, retribusi rumah potong hewan, retribusi tempat rekreasi dan olahraga, serta retribusi penjualan produksi usaha daerah. retribusi perizinan tertentu terdiri atas retribusi izin mendirikan bangunan, retribusi izin trayek serta retribusi perpanjangan izin mempekerjakan tenaga kerja asing (MTA).

Pendapatan retribusi di Kabupaten Gunung Mas mengalami tren positif dengan rata-rata kenaikan sebesar 6,65% per tahun dari Rp3,821 miliar (2020) menjadi Rp4,943 miliar (2024). Nilai retribusi ini terbilang masih sangat kecil jika dibandingkan dengan biaya operasional pemungutan retribusi yang ada. Untuk lebih mengoptimalkan PAD retribusi ke depan, selain melalui penegakan perda pajak dan retribusi juga masih perlu dilakukan optimalisasi sumber retribusi bisa berupa biaya layanan seperti parkir, izin usaha, atau pelayanan lainnya yang diberikan oleh pemerintah daerah.

## 3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Perkembangan pendapatan dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan mengalami tren menurun dengan rata-rata pertumbuhan sebesar -15,52% dari Rp7,738 miliar (2020) menjadi Rp3,942 miliar (2024). Pertumbuhan ini berasal dari dividen Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kabupaten Gunung Mas pada lembaga keuangan, aneka usaha dan bidang air minum. BUMD yang memberikan deviden. Untuk meningkatkannya maka kinerja BUMD perlu dikuatkan agar mampu menghasilkan laba yang meningkat secara signifikan.

## 4) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Pertumbuhan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah dalam 5 (lima) tahun terakhir mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan yaitu sebesar 7,03% dari Rp23,201 miliar (2020) menjadi Rp30,444 miliar (2024). Tumbuhnya Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah di antaranya didorong oleh Jasa Giro, Pendapatan Bunga, dan Pendapatan BLUD. Secara nominal, keseluruhan komposisi struktur PAD dapat dilihat pada gambar berikut:

**Gambar II.37**  
**Perkembangan Komposisi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2020-2024 (%)**



Sumber: BKAD Kabupaten Gunung Mas, 2025 (diolah)

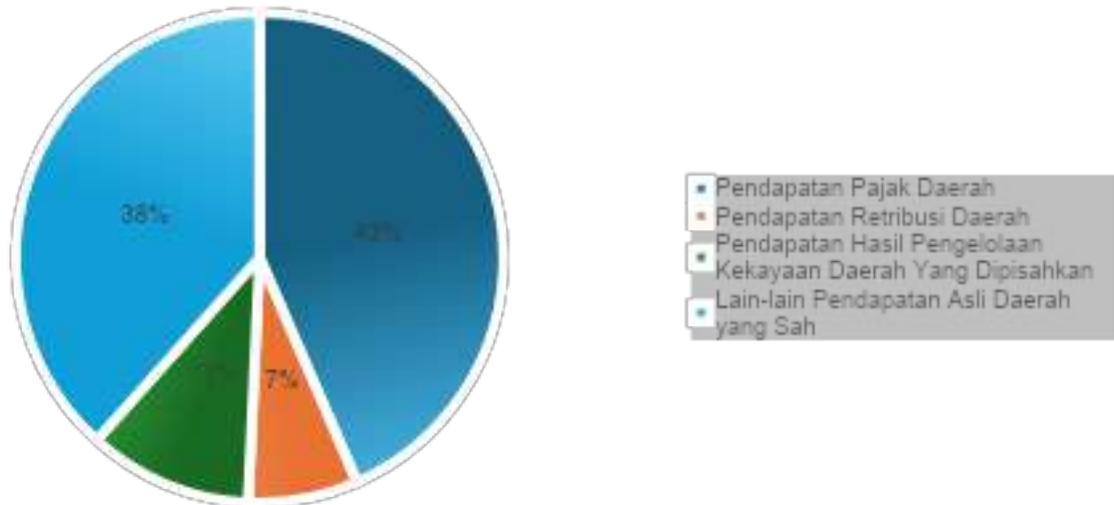
Jika dilihat berdasarkan kontribusinya, seperti kita ketahui bahwa pendapatan pajak daerah memiliki kontribusi terbesar dalam pembentukan PAD Kabupaten Gunung Mas. Secara rata-rata kontribusi pendapatan pajak daerah dalam 5 (lima) tahun terakhir mencapai 41% per tahun, kemudian lain-lain pendapatan asli daerah yang sah berkontribusi rata-rata 40% per tahun, berikutnya pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan berkontribusi rata-rata 9,5% per tahun dan terakhir retribusi daerah kontribusinya sebesar 8,3% per tahun. Berdasarkan hal tersebut, untuk menguatkan kemandirian daerah maka penerimaan lain-lain PAD yang sah, hasil

**GAMBARAN UMUM DAERAH II-7**



pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan pendapatan pajak daerah perlu lebih dikuatkan dengan penggalan sumber-sumber potensial untuk mengakselerasi penerimaan dari hasil retribusi dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.

**Gambar II.38**  
**Rata-Rata Kontribusi Komponen Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2020-2024 (%)**



Sumber: BKAD Kabupaten Gunung Mas, 2025 (diolah)

### b. Pendapatan Transfer

Pendapatan transfer terdiri dari transfer pemerintah pusat dan transfer antar daerah. transfer pemerintah pusat terdiri dari: dana perimbangan, dana insentif daerah, dana otonomi khusus, dana keistimewaan dan dana desa. Sementara transfer antar daerah terdiri dari pendapatan bagi hasil dan bantuan keuangan.

**Gambar II.39**  
**Komponen Komponen Pendapatan Transfer Kabupaten Gunung Mas Tahun 2019-2023 (%)**



Sumber: BKAD Kabupaten Gunung Mas, 2025 (diolah)

Dalam 5 (lima) tahun terakhir pendapatan transfer Kabupaten Gunung Mas mengalami tren meningkat dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 6,17% per tahun dari Rp896 miliar (2020) menjadi Rp1,139 triliun (2024). Pendapatan transfer tertinggi diterima pada tahun 2024 karena relatif tingginya Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dari sumber Dana Perimbangan pada tahun tersebut

dibandingkan tahun lainnya. Jika dilihat rata-rata kontribusinya maka rata-rata 96% Pendapatan transfer disumbang oleh transfer pemerintah pusat. Jika melihat komponen utama pendapatan transfer pemerintah pusat dalam 5 (lima) tahun terakhir maka rata-rata 92,5% adalah disumbang oleh dana perimbangan sisanya dari transfer pemerintah pusat lainnya dari pos dana penyesuaian dan dana desa.

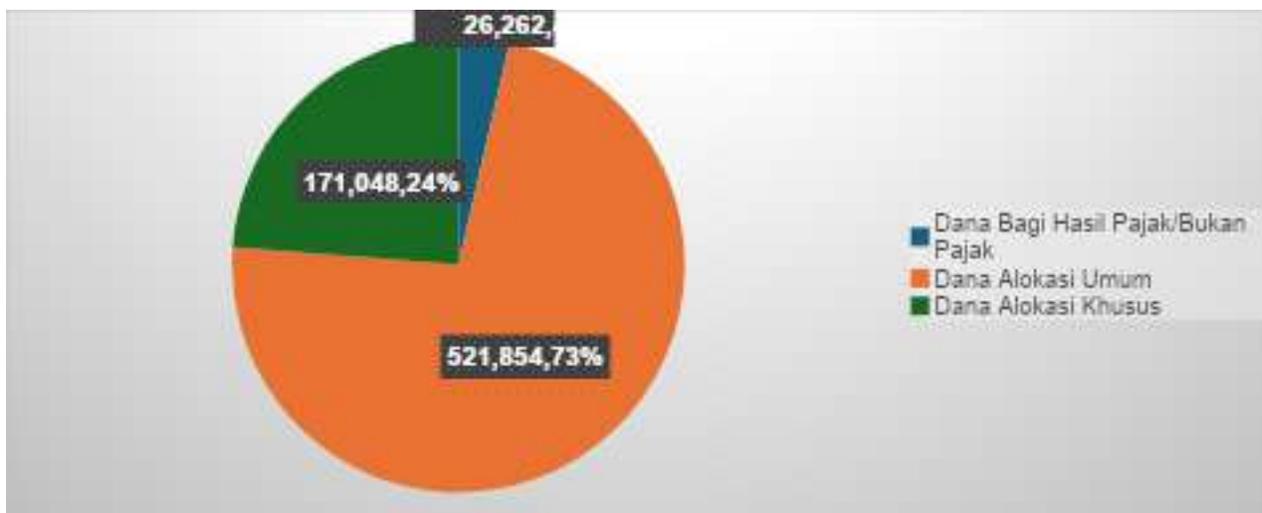
**Gambar II.40**  
**Kontribusi Komponen Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Kabupaten Gunung Mas Tahun 2020-2024 (%)**



Sumber: BKAD Kabupaten Gunung Mas, 2025 (diolah)

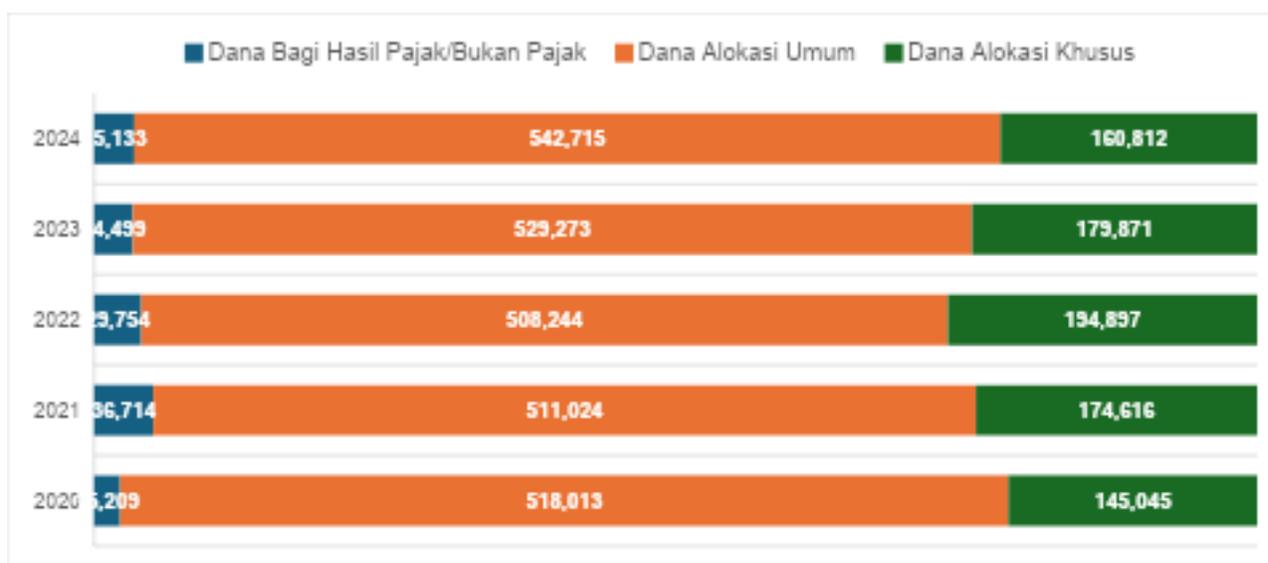
Perkembangan dana perimbangan sendiri dalam 5 (lima) tahun terakhir telah tumbuh dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 7,72% dari Rp729 miliar di tahun 2020 menjadi Rp981 miliar di tahun 2024. Dari komponen pembentuk dana perimbangan itu sendiri tren Dana Bagi Hasil (DBH) pajak/bukan pajak dan Dana Alokasi Umum (DAU) serta Dana Alokasi Khusus (DAK) semua mengalami tren naik di mana secara berturut-turut tren kenaikannya sebesar 13,38% per tahun dari Rp15 miliar (2020) menjadi Rp25 miliar (2023), 1,17% per tahun dari Rp518 miliar (2020) menjadi Rp542 miliar (2024) dan 2,61% per tahun dari Rp145 miliar (2020) menjadi Rp160 miliar (2024). DAU masih menjadi kontributor terbesar pendapatan transfer pemerintah pusat dengan rata-rata kontribusi sebesar 60% kemudian DBH pajak/bukan pajak sebesar 34% dan sisanya DAK sebesar 6%.

**Gambar II.41**  
**Rata-Rata Kontribusi Komponen Dana Perimbangan Kabupaten Gunung Mas Tahun 2020-2024 (%)**



Sumber: BKAD Kabupaten Gunung Mas, 2025 (diolah)

**Gambar II.42**  
**Perkembangan Komposisi Dana Perimbangan Kabupaten Gunung Mas Tahun 2020-2024**



Sumber: BKAD Kabupaten Gunung Mas, 2025 (diolah)

**c. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah**

Lain-lain pendapatan daerah yang sah merupakan seluruh pendapatan daerah selain PAD dan dana perimbangan, yang meliputi hibah, dana darurat, dan lain-lain pendapatan yang ditetapkan pemerintah.

Dalam 5 (lima) tahun terakhir (2020-2024) perkembangan lain-lain pendapatan daerah yang sah mencatatkan nilai yang terus meningkat dengan pertumbuhan rata-rata sebesar 72,21% dari Rp27,635 miliar (2020) menjadi Rp243,064 (2024). Pencapaian Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah tertinggi diperoleh pada tahun 2019 yang sebesar Rp16,132 miliar.

**Gambar II.43**  
**Perkembangan Struktur Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2020-2024**



Sumber: BKAD Kabupaten Gunung Mas, 2025 (diolah)

Jika dilihat dari perkembangan pendapat daerah dalam 5 (lima) tahun terakhir maka beberapa kebijakan yang bisa diimplementasikan dalam mengelola pendapatan daerah:

- Peningkatan efisiensi: pemerintah daerah dapat mengimplementasikan kebijakan untuk meningkatkan efisiensi dalam penggunaan sumber daya yang dimilikinya, sehingga dapat menghasilkan lebih banyak pendapatan dengan biaya yang lebih rendah.
- Diversifikasi pendapatan: upaya untuk mencari sumber pendapatan tambahan di luar pajak dan retribusi, seperti pengembangan aset daerah, kerja sama dengan sektor swasta, atau pendapatan dari investasi.
- Pembangunan infrastruktur: investasi dalam infrastruktur yang meningkatkan pertumbuhan ekonomi di daerah dapat menghasilkan pendapatan tambahan dalam jangka panjang melalui peningkatan aktivitas ekonomi dan nilai properti.
- Pengelolaan utang: manajemen utang yang baik dapat membantu pemerintah daerah memperoleh sumber pendapatan tambahan melalui pinjaman yang diinvestasikan dalam proyek-proyek yang menghasilkan pendapatan.
- Optimalisasi Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK): memastikan penggunaan dana perimbangan dari pemerintah pusat sesuai dengan peruntukannya, serta mengoptimalkan penggunaan dana tersebut untuk mendukung pembangunan dan pelayanan publik di daerah.
- Pengembangan Sektor Ekonomi: mendorong pertumbuhan sektor ekonomi yang potensial di daerah, seperti pariwisata, pertanian, atau industri lokal, yang dapat meningkatkan pendapatan daerah melalui pajak dan penerimaan lainnya.
- Transparansi dan akuntabilitas: memastikan transparansi dalam pengelolaan pendapatan daerah serta akuntabilitas dalam penggunaannya agar masyarakat dapat memonitor dan mengawasi penggunaan pendapatan tersebut secara efektif.
- Kebijakan pendapatan daerah haruslah seimbang antara memastikan keberlanjutan keuangan pemerintah daerah dan memperhatikan keadilan



serta kepentingan masyarakat dalam penggunaan dan penyaluran pendapatan tersebut.

Secara keseluruhan perkembangan pendapatan daerah dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel II.35**  
**Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Gunung Mas**  
**Tahun 2020-2024 (dalam juta rupiah)**

No	Uraian	REALISASI					Rata-rata Pertumbuhan (%)
		2020	2021	2022	2023	2024	
1	<b>PENDAPATAN</b>	<b>990.638</b>	<b>1.078.818</b>	<b>1.085.424</b>	<b>1.176.119</b>	<b>1.441.538</b>	<b>9,83</b>
1.1	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	<b>66.064</b>	<b>85.105</b>	<b>77.247</b>	<b>35.992</b>	<b>58.708</b>	<b>-2,91</b>
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	31.304	46.896	30.960	11.889	19.378	-11,30
1.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah	3.821	4.483	4.511	5.824	4.943	6,65
1.1.3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	7.738	10.723	12.684	81	3.942	-15,52
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	23.202	23.004	29.093	18.198	30.445	7,03
1.2	<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	<b>896.939</b>	<b>964.971</b>	<b>1.006.688</b>	<b>1.135.525</b>	<b>1.139.766</b>	<b>6,17</b>
1.2.1	<b>TRANSFER PEMERINTAH PUSAT</b>	<b>870.946</b>	<b>932.042</b>	<b>958.722</b>	<b>1.078.210</b>	<b>1.087.918</b>	<b>5,72</b>
1.2.1.1	<b>Dana Perimbangan</b>	<b>729.019</b>	<b>786.961</b>	<b>864.685</b>	<b>967.710</b>	<b>981.644</b>	<b>7,72</b>
1.2.1.1.1	Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak	15.209	36.714	29.754	24.499	25.133	13,38
1.2.1.1.3	Dana Alokasi Umum	518.013	511.024	508.244	529.273	542.715	1,17
1.2.1.1.4	Dana Alokasi Khusus	145.045	174.616	194.897	179.871	160.812	2,61
1.2.1.2	<b>Dana Insentif Daerah</b>	<b>39.388</b>	<b>40.135</b>	<b>3.821</b>	<b>15.456</b>	<b>11.358</b>	<b>-26,72</b>
1.2.1.3	<b>Transfer Pemerintah Pusat Lainnya</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>
1.2.1.3.1	Dana Otonomi Khusus	-	-	-	-	-	0,00
1.2.1.3.2	Dana Penyesuaian	-	-	-	-	-	0,00
1.2.1.3	<b>Dana Desa</b>	<b>102.540</b>	<b>104.946</b>	<b>90.215</b>	<b>95.043</b>	<b>94.917</b>	<b>-1,91</b>
1.2.2	<b>TRANSFER ANTAR DAERAH</b>	<b>25.994</b>	<b>32.930</b>	<b>47.966</b>	<b>57.315</b>	<b>51.848</b>	<b>18,84</b>
1.2.2.1	<b>Pendapatan Bagi Hasil</b>	<b>25.994</b>	<b>32.930</b>	<b>47.966</b>	<b>57.315</b>	<b>51.848</b>	<b>18,84</b>



No	Uraian	REALISASI					Rata-rata Pertumbuhan (%)
		2020	2021	2022	2023	2024	
<b>1.2.2.2</b>	<b>Bantuan Keuangan</b>	-	-	-	-	-	<b>0,00</b>
1.2.2.2.1	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi	-	-	-	-	-	0,00
1.2.2.2.2	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Kab/Kota	-	-	-	-	-	0,00
<b>1.3</b>	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH</b>	<b>27.635</b>	<b>28.741</b>	<b>1.490</b>	<b>4.603</b>	<b>243.064</b>	<b>72,21</b>
<b>1.3.1</b>	<b>Pendapatan Hibah</b>	-	-	<b>6</b>	-	-	<b>0,00</b>
<b>1.3.2</b>	<b>Pendatanan Dana Darurat</b>	-	-	-	-	-	<b>0,00</b>
<b>1.3.3</b>	<b>Pendapatan Lainnya</b>	<b>27.635</b>	<b>28.741</b>	<b>1.484</b>	<b>4.603</b>	<b>243.064</b>	<b>72,21</b>

Sumber: BKAD Kabupaten Gunung Mas, 2025 (diolah)

## 2. Belanja Daerah

Belanja secara umum adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dan merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah.

Belanja Daerah dipergunakan dalam rangka mendanai dalam pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama dengan pemerintah provinsi dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan. Selain itu belanja daerah diprioritaskan untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk penyelenggaraan pembangunan berdasarkan pembagian kewenangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Bahkan sesuai amanat Pasal 50 ayat (2) jika daerah tidak memenuhi alokasi belanja sesuai kewenangannya maka dapat ditunda dan/atau dipotong dana transfer umum dari pemerintah pusat.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, belanja daerah terdiri dari:

1) Belanja operasi

Merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek.

2) Belanja modal

Merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi.

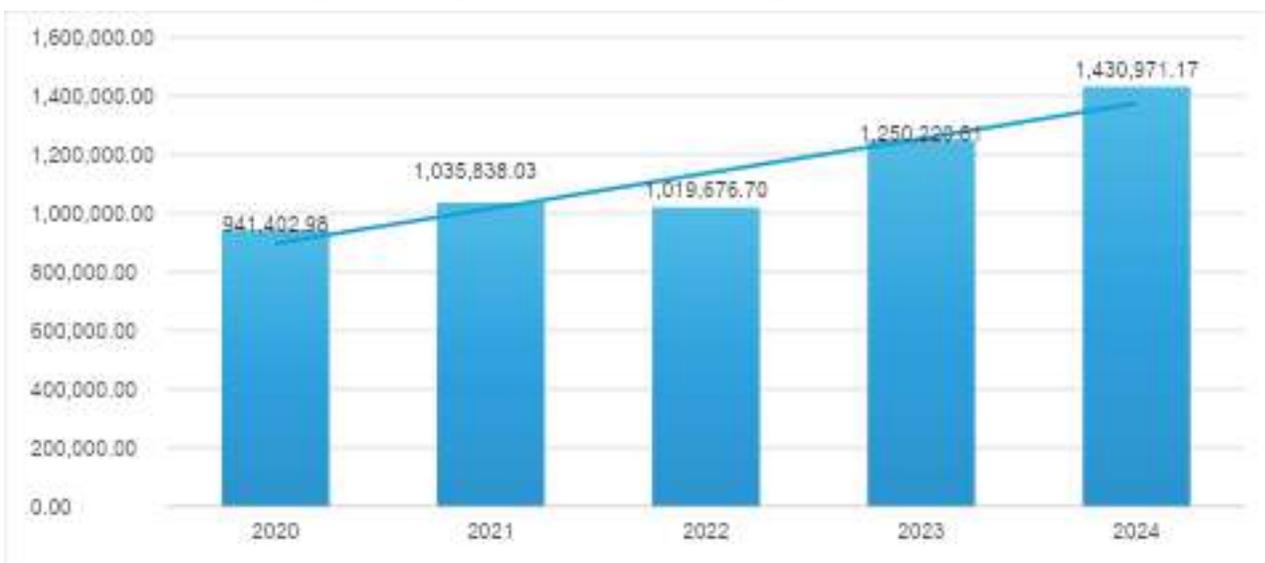
3) Belanja tidak terduga

Merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.

## 4) Belanja transfer

Merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa.

Perkembangan belanja daerah Kabupaten Gunung Mas dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir (2020-2024) mengalami fluktuasi namun trennya meningkat dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 11,04% per tahun. Fluktuasi belanja daerah terjadi di tahun 2022 di mana realisasi Belanja Daerah di tahun 2021 mencapai Rp1.035 triliun namun menurun di tahun 2022 menjadi sebesar Rp1.019 triliun dan kemudian terus meningkat hingga mencapai Rp1.430 triliun di tahun 2024. Adapun peningkatan secara signifikan di tahun 2024 akibat peningkatan pendapatan daerah yang juga signifikan sehingga kemampuan belanjanya juga meningkat.

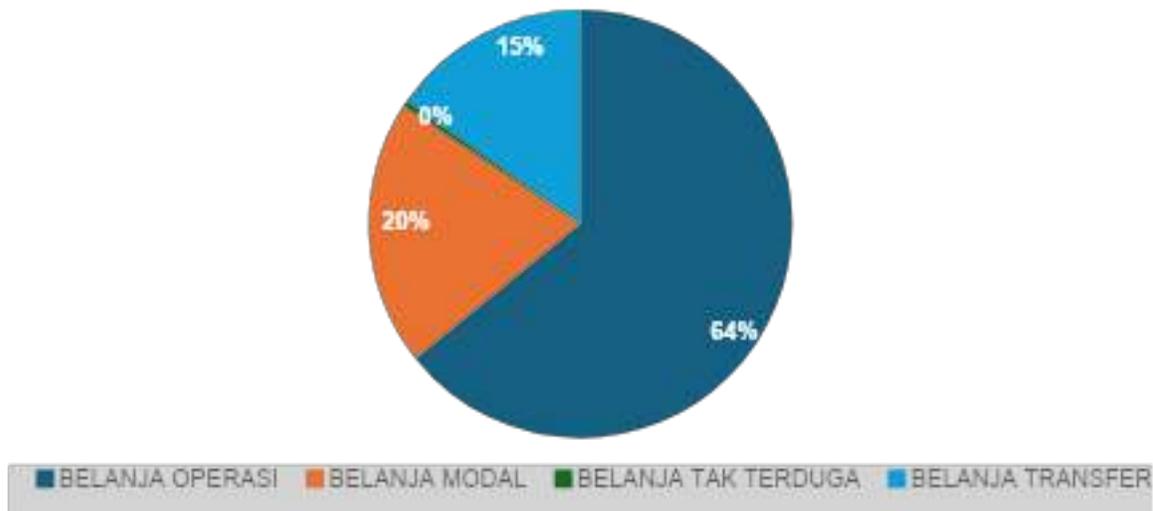
**Gambar II.44****Perkembangan Belanja Kabupaten Gunung Mas Tahun 2020-2024**

Sumber: BKAD Kabupaten Gunung Mas, 2024 (diolah)

Jika dilihat lebih rinci, semua jenis belanja daerah mengalami tren naik dengan pertumbuhan rata-rata 63,94% per tahun (Belanja Operasi), 20,14% per tahun (Belanja Modal), 0,53% (Belanja Tak Terduga), dan 15,39% per tahun (Belanja Transfer). Jika dilihat dari komposisinya dalam 5 (lima) tahun terakhir maka terlihat bahwa rata-rata 67% belanja daerah digunakan untuk belanja operasi, kemudian 18% digunakan untuk belanja modal, 14% digunakan untuk belanja transfer dan kurang dari 1% untuk belanja tak terduga. Melihat komposisi tersebut dengan tingginya ketergantungan fiskal daerah, maka kebijakan belanja daerahnya perlu bergeser ke arah yang mampu meningkatkan PAD. Belanja modal infrastruktur perlu ditingkatkan untuk menarik investasi dan memutar roda perekonomian dengan lebih cepat.

**Gambar II.45****Rata-rata Struktur Belanja Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2020-2024**

N



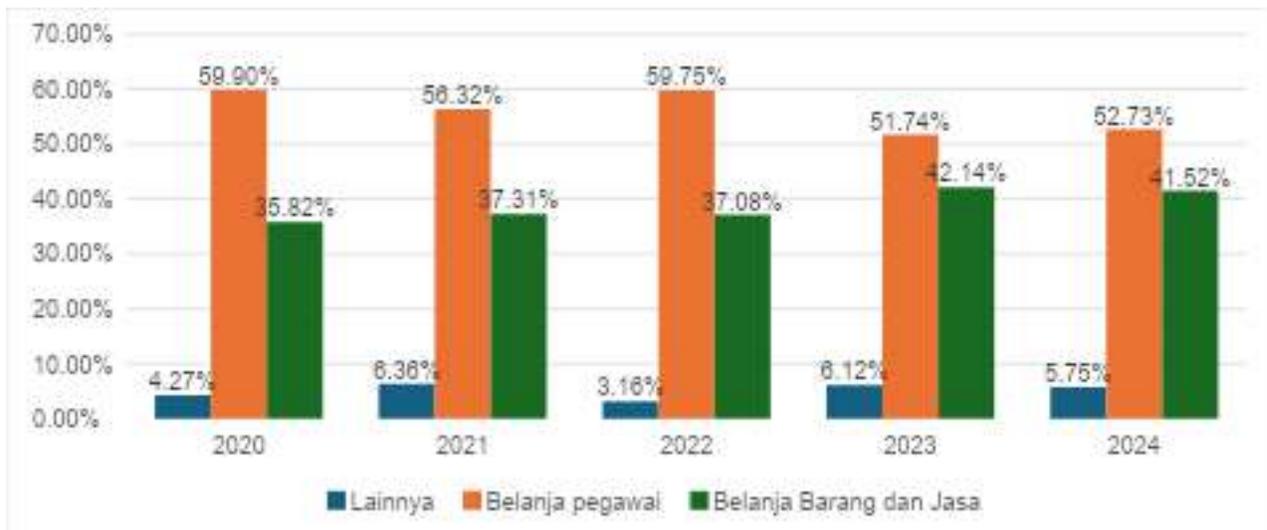
Sumber: BKAD Kabupaten Gunung Mas, 2025 (diolah)

a. Belanja Operasi

Dalam 5 (lima) tahun terakhir belanja operasi Kabupaten Gunung Mas telah tumbuh 13,35% per tahun dari Rp581 miliar (2020) menjadi Rp959 miliar (2024). Sebagian besar atau hampir separuh belanja operasi yang ada digunakan untuk belanja pegawai kemudian digunakan untuk belanja barang dan jasa. Jika dilihat perkembangannya, proporsi belanja pegawai terbesar terjadi di tahun 2024 yaitu sebesar 52,73% dari total belanja operasi yang ada. Sebaliknya proporsi belanja barang dan jasa proporsinya secara rata-rata meningkat setiap tahun dari 35,82% (2020) menjadi 41,52% (2024). Sementara belanja operasi lainnya (belanja hibah dan bantuan sosial) proporsinya tidak pernah lebih dari 7% dan tertinggi terjadi di tahun 2021 yang mencapai 6,36%.

Gambar II.46

## Rata-rata Struktur Belanja Operasi Kabupaten Gunung Mas Tahun 2020-2024



Sumber: BKAD Kabupaten Gunung Mas, 2025 (diolah)

Secara proporsi belanja pegawai mengalami tren meningkat dan secara nominal nilainya terus mengalami peningkatan dari Rp348 miliar (2020) menjadi Rp506 miliar (2024). Peningkatan nominal belanja pegawai ini perlu menjadi perhatian agar kedepan tidak mengganggu alokasi proporsi dan kualitas belanja publik khususnya yang bisa dirasakan langsung oleh masyarakat.

Gambar II.47

## Perkembangan Struktur Belanja Operasi Kabupaten Gunung Mas Tahun 2020-2024



Sumber: BPKAD Kabupaten Gunung Mas, 2024 (diolah)

## b. Belanja Modal

Dalam 5 (lima) tahun terakhir belanja modal Kabupaten Gunung Mas mengalami tren naik cukup signifikan 10,28% per tahun dari Rp175 miliar (2020) menjadi Rp260 miliar (2024). Naiknya belanja modal tersebut disebabkan oleh naiknya hampir semua komponen belanja modal yaitu seperti Belanja Tanah (22,29% per tahun), Belanja Peralatan dan Mesin (2,74% per tahun), Belanja Bangunan dan Gedung (4,37% per tahun), Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan (17,79%), dan Aset lainnya (43,47% per

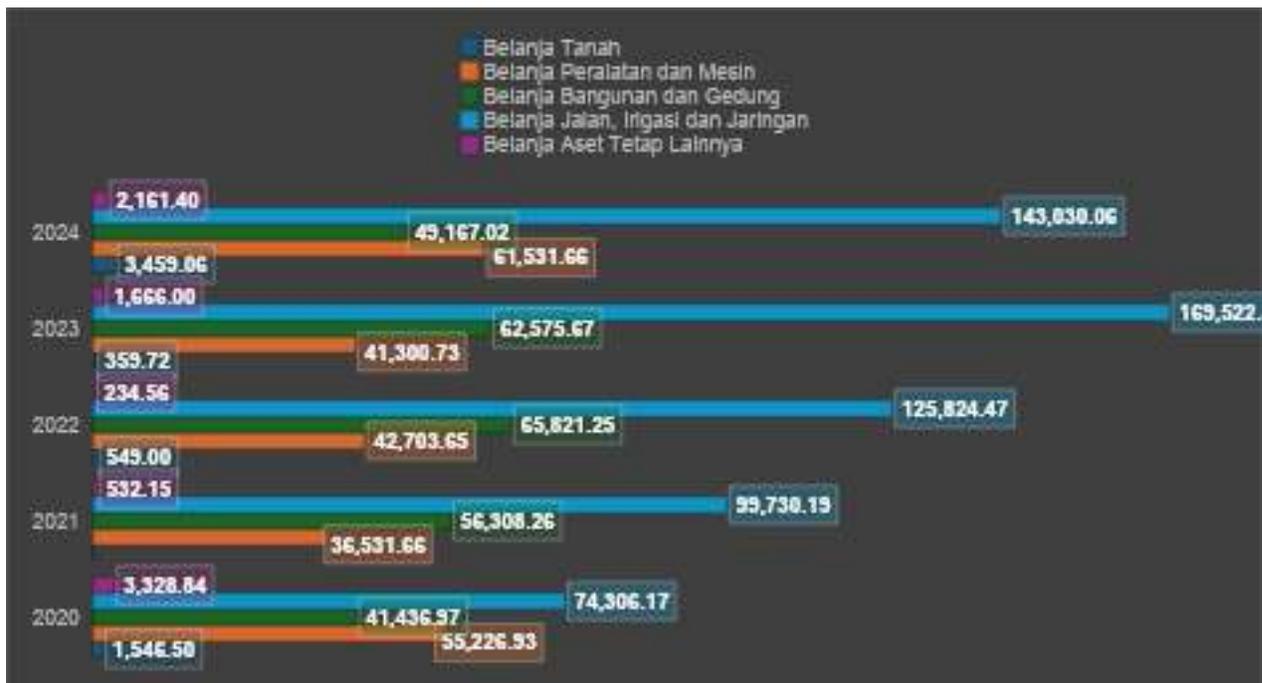
GAMBARAN UMUM DAERAH II-17

tahun) sementara Belanja Aset Tetap Lainnya mengalami kontraksi di mana rata-rata pertumbuhan -10,23% per tahun.

Dalam rangka mendorong perekonomian daerah maka struktur alokasi belanja modal masih perlu mendapatkan penguatan dari sisi besaran anggaran khususnya belanja modal untuk pembangunan infrastruktur seperti jalan, jembatan, air minum, dan sistem transportasi umum yang dapat meningkatkan konektivitas dan efisiensi logistik, serta membuka peluang investasi dan perdagangan. Begitu juga dengan belanja peralatan dan mesin dalam rangka peningkatan produktivitas melalui teknologi dan inovasi yang dapat meningkatkan produktivitas di berbagai sektor ekonomi, memungkinkan untuk lebih efisien dan bersaing di pasar global. Selain itu belanja modal dapat diarahkan ke daerah tertentu untuk mengurangi kesenjangan pembangunan antar wilayah, mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah yang kurang berkembang.

**Gambar II.48**

**Perkembangan Struktur Belanja Modal Kabupaten Gunung Mas  
Tahun 2020-2024**



Sumber: BKAD Kabupaten Gunung Mas, 2025 (diolah)

c. Belanja Tak Terduga

Dalam 5 (lima) tahun terakhir realisasi belanja tak terduga Kabupaten Gunung Mas mengalami penurunan sangat signifikan yaitu sebesar -69,21% per tahun di mana tahun 2020 sebesar 21 miliar turun menjadi 196 juta pada tahun 2024. Belanja tak terduga ini dialokasikan untuk belanja yang sifatnya darurat sesuai peraturan perundang-undangan seperti bencana dan sejenisnya. Oleh karena itu belanja tak terduga tahun 2021 tersebut dialokasikan untuk penanganan dan *recovery* Covid-19.

d. Belanja Transfer

Dalam 5 (lima) tahun terakhir belanja transfer Kabupaten Gunung Mas relatif naik sekitar 6,78% per tahun dari Rp162 miliar (2020) menjadi Rp210 miliar (2024). Kenaikan tersebut didorong oleh relatif meningkatnya belanja transfer bantuan keuangan dari Rp162 miliar (2020) menjadi Rp203 miliar

**GAMBARAN UMUM DAERAH II-18**

(2024). Jika dilihat dari proporsinya maka rata-rata lebih dari 94% alokasi belanja transfer adalah untuk belanja transfer bantuan keuangan ke desa, dan sisanya untuk belanja transfer bantuan ke provinsi, transfer bantuan keuangan ke pemda lainnya dan transfer bantuan keuangan lainnya.

**Gambar II.49**  
**Perkembangan Komposisi Belanja Transfer Kabupaten Gunung Mas Tahun 2020-2024**



Sumber: BKAD Kabupaten Gunung Mas, 2025 (diolah)

Jika dilihat dari aspek surplus/defisit belanja, maka dalam 5 (lima) tahun terakhir defisit belanja hanya terjadi di tahun 2023 yang nilai defisitnya sebesar Rp74,101 miliar, disbanding dengan tahun-tahun yang lain yang mengalami surplus anggaran.

Dengan melihat kinerja belanja daerah 5 (lima) tahun terakhir maka masih diperlukan strategi untuk memastikan pengeluaran yang efisien dan efektif, serta mengoptimalkan manfaat yang diperoleh dari anggaran belanja yang tersedia. Beberapa strategi yang dapat diadopsi untuk tujuan tersebut antara lain:

- 1) Perencanaan anggaran yang cermat: Melakukan analisis mendalam terhadap kebutuhan dan prioritas daerah, serta menyusun anggaran dengan cermat berdasarkan hal tersebut. Ini termasuk mengidentifikasi area-area penting seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan layanan masyarakat lainnya.
- 2) Transparansi dan akuntabilitas: Meningkatkan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah dengan mengadopsi praktik akuntabilitas yang kuat. Ini mencakup publikasi anggaran secara terbuka, pelaporan keuangan yang jelas, dan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan anggaran.
- 3) Pengadaan barang dan jasa yang efisien: Memastikan bahwa proses pengadaan barang dan jasa dilakukan secara transparan, kompetitif, dan efisien. Ini dapat mencakup penggunaan sistem lelang terbuka, kerja sama dengan pihak swasta, dan penggunaan teknologi untuk meningkatkan efisiensi proses pengadaan.
- 4) Pengelolaan utang yang bijaksana: Mengelola utang daerah dengan bijaksana, termasuk pemantauan tingkat bunga dan jangka waktu, serta



memastikan bahwa pinjaman digunakan untuk proyek-proyek yang menghasilkan manfaat jangka panjang bagi masyarakat.

- 5) Pengembangan pendapatan alternatif: Mencari sumber pendapatan alternatif untuk mengurangi ketergantungan pada pendapatan dari sumber-sumber konvensional seperti pajak dan dana pemerintah pusat. Ini bisa meliputi pengembangan sektor pariwisata, pengembangan kawasan industri, atau kemitraan dengan sektor swasta untuk proyek-proyek investasi.
- 6) Peningkatan efisiensi operasional: Mengidentifikasi area-area di mana efisiensi operasional dapat ditingkatkan, termasuk pengurangan biaya administratif, penggunaan teknologi untuk otomatisasi proses, dan peningkatan produktivitas pegawai.
- 7) Pemantauan dan evaluasi yang berkelanjutan: Melakukan pemantauan dan evaluasi secara terus-menerus terhadap pelaksanaan anggaran dan proyek-proyek yang didanai oleh belanja daerah. Ini membantu dalam mengidentifikasi area-area di mana perbaikan dapat dilakukan dan memastikan bahwa dana digunakan secara efektif.

Secara keseluruhan perkembangan belanja daerah Kabupaten Gunung Mas tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel berikut:



Tabel II.36

## Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2019-2023 (dalam juta)

No	Uraian	REALISASI					Rata-rata Pertumbuhan (%)
		2020	2021	2022	2023	2024	
2	<b>BELANJA</b>	941.402,98	1.035.838,03	1.019.676,70	1.250.220,81	1.430.971,17	11,04
2.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	581.357,37	674.464,66	633.097,03	796.281,12	959.681,37	13,35
2.1.1	Belanja Pegawai	348.256,06	379.873,96	378.302,95	412.033,31	506.018,20	9,79
2.1.2	Belanja Barang dan Jasa	208.251,20	251.675,65	234.761,47	335.529,74	398.461,38	17,61
2.1.2	Belanja Bunga	-	-	-	-	-	0,00
2.1.4	Belanja Subsidi	-	-	-	-	19,45	
2.1.5	Belanja Hibah	20.720,60	42.304,05	19.168,80	48.514,56	54.903,25	27,58
2.1.6	Belanja Bantuan Sosial	4.129,51	611,00	863,81	203,50	279,10	-49,01
2.1.7	Belanja Keuangan	-	-	-	-	-	0,00
2.2	<b>BELANJA MODAL</b>	175.845,41	193.102,26	235.510,76	276.129,60	260.126,93	10,28
2.2.1	Belanja Tanah	1.546,50	-	549,00	359,72	3.459,06	22,29
2.2.2	Belanja Peralatan dan Mesin	55.226,93	36.531,66	42.703,65	41.300,73	61.531,66	2,74
2.2.3	Belanja Bangunan dan Gedung	41.436,97	56.308,26	65.821,25	62.575,67	49.167,02	4,37
2.2.4	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	74.306,17	99.730,19	125.824,47	169.522,43	143.030,06	17,79
2.2.5	Belanja Aset Tetap Lainnya	3.328,84	532,15	234,56	1.666,00	2.161,40	-10,23



No	Uraian	REALISASI					Rata-rata Pertumbuhan (%)
		2020	2021	2022	2023	2024	
2.2.6	Belanja Aset Lainnya	-	-	377,84	705,06	777,73	43,47
2.3	<b>BELANJA TAK TERDUGA</b>	<b>21.915,34</b>	<b>2.738,08</b>	<b>219,93</b>	<b>212,50</b>	<b>196,97</b>	<b>-69,21</b>
2.3.1	Belanja Tak Terduga	21.915,34	2.738,08	219,93	212,50	196,97	-69,21
2.4	<b>BELANJA TRANSFER</b>	<b>162.284,85</b>	<b>165.533,02</b>	<b>150.848,98</b>	<b>177.597,59</b>	<b>210.965,90</b>	<b>6,78</b>
2.4.1	Belanja Transfer Bagi Hasil	-	3.303,10	-	5.391,90	7.054,64	28,78
2.4.1.1	Bagi Hasil Pajak	-	2.820,09	-	4.952,49	6.114,42	29,43
2.4.1.2	Bagi Hasil Retribusi	-	-	-	439,41	940,22	113,97
2.4.1.3	Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	-	483,01	-	-	-	-100,00
2.4.2	<b>Belanja Transfer Bantuan Keuangan</b>	<b>162.284,85</b>	<b>162.229,92</b>	<b>150.848,98</b>	<b>172.205,69</b>	<b>203.911,26</b>	<b>5,87</b>
2.4.2.1	Transfer Bantuan Keuangan Ke Provinsi	-	245,00	-	485,00	245,00	-
2.4.2.2	Transfer Bantuan Keuangan Ke Pemda Lainnya	-	-	-	-	-	0,00
2.4.2.3	Transfer Bantuan Keuangan Ke Desa	161.497,01	161.984,92	150.848,98	171.720,69	203.666,26	5,97
2.4.2.4	Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	787,85	-	-	-	-	-100,00
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>49.235,50</b>	<b>42.980,19</b>	<b>65.747,12</b>	<b>(74.101,31)</b>	<b>10.566,74</b>	<b>-31,94</b>

Sumber: BKAD Kabupaten Gunung Mas, 2025 (diolah)

### 3. Pembiayaan

Perkembangan pembiayaan netto dalam 5 (lima) tahun terakhir relatif mengalami pertumbuhan rata-rata yang cukup signifikan yaitu 10,62% per tahun dari Rp25,813 miliar (2020) menjadi Rp38,657 miliar (2024). Naiknya pembiayaan tersebut dipengaruhi oleh naiknya penerimaan pembiayaan dari sumber SiLPA dari khususnya dari tahun 2022 ke tahun 2023. Sebenarnya jika dilihat lebih mendalam terlihat bahwa SiLPA tahun 2020-2024 relatif mengalami peningkatan. Hal itu menunjukkan adanya penurunan efektivitas penyerapan anggaran kegiatan. Sementara dari pos pengeluaran pembiayaan selama 5 (lima) tahun terakhir tidak terdapat alokasi pengeluaran pembiayaan apapun.

**Gambar II.50**

**Perkembangan Komposisi Pembiayaan Kabupaten Gunung Mas Tahun 2020-2024**



Sumber: BKAD Kabupaten Gunung Mas, 2025 (diolah)

Secara keseluruhan perkembangan realisasi APBD Kabupaten Gunung Mas tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel berikut:



Tabel II.37

## Rata-Rata Pertumbuhan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2020-2024 (Dalam Jutaan)

No	Uraian	REALISASI					Rata-rata Pertumbuhan (%)
		2020	2021	2022	2023	2024	
1	<b>PENDAPATAN</b>	<b>990.638,49</b>	<b>1.078.818,22</b>	<b>1.085.423,82</b>	<b>1.176.119,50</b>	<b>1.441.537,90</b>	<b>9,83</b>
1.1	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	<b>66.064,36</b>	<b>85.105,39</b>	<b>77.246,69</b>	<b>35.992,25</b>	<b>58.708,14</b>	<b>-2,91</b>
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	31.303,50	46.896,17	30.959,64	11.888,73	19.377,83	-11,30
1.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah	3.821,07	4.482,56	4.510,62	5.824,28	4.943,16	6,65
1.1.3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	7.738,22	10.722,71	12.683,80	81,15	3.942,20	-15,52
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	23.201,56	23.003,95	29.092,64	18.198,09	30.444,95	7,03
1.2	<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	<b>896.939,32</b>	<b>964.971,47</b>	<b>1.006.687,56</b>	<b>1.135.524,59</b>	<b>1.139.766,16</b>	<b>6,17</b>
1.2.1	<b>TRANSFER PEMERINTAH PUSAT</b>	<b>870.945,71</b>	<b>932.041,76</b>	<b>958.721,57</b>	<b>1.078.209,70</b>	<b>1.087.918,41</b>	<b>5,72</b>
1.2.1.1	<b>Dana Perimbangan</b>	<b>729.018,57</b>	<b>786.960,82</b>	<b>864.685,34</b>	<b>967.710,34</b>	<b>981.644,02</b>	<b>7,72</b>
1.2.1.1.1	Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak	15.208,74	36.713,88	29.753,96	24.499,23	25.132,73	13,38
1.2.1.1.3	Dana Alokasi Umum	518.013,42	511.024,20	508.244,45	529.272,77	542.715,33	1,17
1.2.1.1.4	Dana Alokasi Khusus	145.044,65	174.616,33	194.897,10	179.871,10	160.812,39	2,61
1.2.1.2	<b>Dana Insentif Daerah</b>	<b>39.387,60</b>	<b>40.134,80</b>	<b>3.821,04</b>	<b>15.456,20</b>	<b>11.357,59</b>	<b>-26,72</b>
1.2.1.3	<b>Transfer Pemerintah Pusat Lainnya</b>	-	-	-	-	-	<b>0,00</b>
1.2.1.3.1	Dana Otonomi Khusus	-	-	-	-	-	<b>0,00</b>



No	Uraian	REALISASI					Rata-rata Pertumbuhan (%)
		2020	2021	2022	2023	2024	
1.2.1.3. 2	Dana Penyesuaian	-	-	-	-	-	0,00
<b>1.2.1.3</b>	<b>Dana Desa</b>	<b>102.539,54</b>	<b>104.946,14</b>	<b>90.215,18</b>	<b>95.043,16</b>	<b>94.916,80</b>	<b>-1,91</b>
<b>1.2.2</b>	<b>TRANSFER ANTAR DAERAH</b>	<b>25.993,61</b>	<b>32.929,71</b>	<b>47.965,99</b>	<b>57.314,89</b>	<b>51.847,74</b>	<b>18,84</b>
<b>1.2.2.1</b>	<b>Pendapatan Bagi Hasil</b>	25.993,61	32.929,71	47.965,99	57.314,89	51.847,74	18,84
<b>1.2.2.2</b>	<b>Bantuan Keuangan</b>	-	-	-	-	-	<b>0,00</b>
1.2.2.2. 1	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi	-	-	-	-	-	0,00
1.2.2.2. 2	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Kab/Kota	-	-	-	-	-	0,00
<b>1.3</b>	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH</b>	<b>27.634,81</b>	<b>28.741,37</b>	<b>1.489,57</b>	<b>4.602,66</b>	<b>243.063,61</b>	<b>72,21</b>
<b>1.3.1</b>	<b>Pendapatan Hibah</b>	-	-	5,66	-	-	<b>0,00</b>
<b>1.3.2</b>	<b>Pendatan Dana Darurat</b>	-	-	-	-	-	<b>0,00</b>
<b>1.3.3</b>	<b>Pendapatan Lainnya</b>	<b>27.634,81</b>	<b>28.741,37</b>	<b>1.483,90</b>	<b>4.602,66</b>	<b>243.063,61</b>	<b>72,21</b>
<b>2</b>	<b>BELANJA</b>	<b>941.402,98</b>	<b>1.035.838,03</b>	<b>1.019.676,70</b>	<b>1.250.220,81</b>	<b>1.430.971,17</b>	<b>11,04</b>
<b>2.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>581.357,37</b>	<b>674.464,66</b>	<b>633.097,03</b>	<b>796.281,12</b>	<b>959.681,37</b>	<b>13,35</b>
<b>2.1.1</b>	<b>Belanja Pegawai</b>	<b>348.256,06</b>	<b>379.873,96</b>	<b>378.302,95</b>	<b>412.033,31</b>	<b>506.018,20</b>	<b>9,79</b>
<b>2.1.2</b>	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>208.251,20</b>	<b>251.675,65</b>	<b>234.761,47</b>	<b>335.529,74</b>	<b>398.461,38</b>	<b>17,61</b>
<b>2.1.2</b>	<b>Belanja Bunga</b>	-	-	-	-	-	<b>0,00</b>
<b>2.1.4</b>	<b>Belanja Subsidi</b>	-	-	-	-	19,45	<b>#DIV/0!</b>
<b>2.1.5</b>	<b>Belanja Hibah</b>	<b>20.720,60</b>	<b>42.304,05</b>	<b>19.168,80</b>	<b>48.514,56</b>	<b>54.903,25</b>	<b>27,58</b>



No	Uraian	REALISASI					Rata-rata Pertumbuhan (%)
		2020	2021	2022	2023	2024	
2.1.6	Belanja Bantuan Sosial	4.129,51	611,00	863,81	203,50	279,10	-49,01
2.1.7	Belanja keuangan	-	-	-	-	-	0,00
2.2	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>175.845,41</b>	<b>193.102,26</b>	<b>235.510,76</b>	<b>276.129,60</b>	<b>260.126,93</b>	<b>10,28</b>
2.2.1	Belanja Tanah	1.546,50	-	549,00	359,72	3.459,06	22,29
2.2.2	Belanja Peralatan dan Mesin	55.226,93	36.531,66	42.703,65	41.300,73	61.531,66	2,74
2.2.3	Belanja Bangunan dan Gedung	41.436,97	56.308,26	65.821,25	62.575,67	49.167,02	4,37
2.2.4	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	74.306,17	99.730,19	125.824,47	169.522,43	143.030,06	17,79
2.2.5	Belanja Aset Tetap Lainnya	3.328,84	532,15	234,56	1.666,00	2.161,40	-10,23
2.2.6	Belanja Aset Lainnya	-	-	377,84	705,06	777,73	43,47
2.3	<b>BELANJA TAK TERDUGA</b>	<b>21.915,34</b>	<b>2.738,08</b>	<b>219,93</b>	<b>212,50</b>	<b>196,97</b>	
2.3.1	Belanja Tak Terduga	21.915,34	2.738,08	219,93	212,50	196,97	
2.4	<b>BELANJA TRANSFER</b>	<b>162.284,85</b>	<b>165.533,02</b>	<b>150.848,98</b>	<b>177.597,59</b>	<b>210.965,90</b>	<b>6,78</b>
2.4.1	<b>Belanja Transfer Bagi Hasil</b>	-	<b>3.303,10</b>	-	<b>5.391,90</b>	<b>7.054,64</b>	<b>28,78</b>
2.4.1.1	Bagi Hasil Pajak	-	2.820,09	-	4.952,49	6.114,42	29,43
2.4.1.2	Bagi Hasil Retribusi	-	-	-	439,41	940,22	113,97
2.4.1.3	Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	-	483,01	-	-	-	-100,00
2.4.2	<b>Belanja Transfer Bantuan Keuangan</b>	<b>162.284,85</b>	<b>162.229,92</b>	<b>150.848,98</b>	<b>172.205,69</b>	<b>203.911,26</b>	<b>5,87</b>
2.4.2.1	Transfer Bantuan Keuangan Ke Provinsi	-	<b>245,00</b>	-	<b>485,00</b>	<b>245,00</b>	-
2.4.2.2	Transfer Bantuan Keuangan Ke Pemda Lainnya	-	-	-	-	-	0,00



No	Uraian	REALISASI					Rata-rata Pertumbuhan (%)
		2020	2021	2022	2023	2024	
2.4.2.3	Transfer Bantuan Keuangan Ke Desa	161.497,01	161.984,92	150.848,98	171.720,69	203.666,26	5,97
2.4.2.4	Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	787,85	-	-	-	-	-100,00
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>49.235,50</b>	<b>42.980,19</b>	<b>65.747,12</b>	<b>(74.101,31)</b>	<b>10.566,74</b>	<b>-31,94</b>
<b>3</b>	<b>PEMBIAYAAN</b>	<b>25.813,28</b>	<b>62.155,15</b>	<b>94.763,52</b>	<b>123.579,38</b>	<b>38.657,82</b>	<b>10,62</b>
<b>3.1</b>	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>	<b>37.361,48</b>	<b>74.814,15</b>	<b>105.113,52</b>	<b>135.547,38</b>	<b>49.816,82</b>	<b>7,46</b>
<b>3.1.1</b>	<b>Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)</b>	<b>37.360,48</b>	<b>74.814,15</b>	<b>105.113,52</b>	<b>135.547,38</b>	<b>49.816,82</b>	<b>7,46</b>
<b>3.1.2</b>	<b>Pencairan Dana Cadangan</b>	-	-	-	-	-	<b>0,00</b>
<b>3.1.3</b>	<b>Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan;</b>	-	-	-	-	-	<b>0,00</b>
<b>3.1.4</b>	<b>Penerimaan Pinjaman Daerah;</b>	-	-	-	-	-	<b>0,00</b>
<b>3.1.5</b>	<b>Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah</b>	<b>1,00</b>	-	-	-	-	<b>-100,00</b>
<b>3.1.6</b>	<b>Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.</b>	-	-	-	-	-	<b>0,00</b>
<b>3.2</b>	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>	<b>11.548,20</b>	<b>12.659,00</b>	<b>10.350,00</b>	<b>11.968,00</b>	<b>11.159,00</b>	<b>-0,85</b>
<b>3.2.1</b>	<b>Pembayaran Cicilan Pokok Utang Yang Jatuh Tempo</b>	-	-	-	-	-	<b>0,00</b>
<b>3.2.2</b>	<b>Penyertaan Modal Daerah;</b>	<b>11.548,20</b>	<b>12.659,00</b>	<b>10.350,00</b>	<b>11.968,00</b>	<b>11.159,00</b>	<b>-0,85</b>
<b>3.2.3</b>	<b>Pembentukan Dana Cadangan;</b>	-	-	-	-	-	<b>0,00</b>



No	Uraian	REALISASI					Rata-rata Pertumbuhan (%)
		2020	2021	2022	2023	2024	
3.2.4	Pemberian Pinjaman Daerah;	-	-	-	-	-	0,00
3.2.5	Pengeluaran Pembiayaan Lainnya Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	-	-	-	-	-	0,00
	<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>	<b>25.813,28</b>	<b>62.155,15</b>	<b>94.763,52</b>	<b>123.579,38</b>	<b>38.657,82</b>	<b>10,62</b>

Sumber: BKAD Kabupaten Gunung Mas, 2025 (diolah)

### 2.2.1.2 Neraca Daerah

Neraca adalah laporan yang menggambarkan posisi keuangan suatu entitas (perusahaan, pemerintah pusat, pemerintah daerah) yang meliputi aset, kewajiban dan ekuitas dana pada suatu saat tertentu. Laporan Neraca daerah akan memberikan informasi penting kepada manajemen pemerintahan daerah (seperti Kepala daerah dan Kepala Bagian Keuangan serta Kepala Dinas), pihak legislatif daerah maupun para kreditur/pemberi pinjaman kepada daerah serta masyarakat luas lainnya tentang posisi atau keadaan kekayaan atau aset daerah dan kewajibannya serta ekuitas dana pada waktu tertentu. Elemen utama neraca pemerintah daerah meliputi aset, kewajiban, dan ekuitas dana. Setiap elemen utama neraca tersebut diturunkan dalam sub-sub rekening yang lebih terinci.

#### 1) Aset

Aset memberikan informasi tentang sumber daya yang dimiliki dan dikuasai oleh pemerintah daerah yang dapat memberikan manfaat ekonomi dan sosial bagi pemerintah daerah maupun masyarakat di masa datang sebagai akibat dari peristiwa masa lalu, serta dapat diukur dalam satuan moneter. Aset terdiri dari (i) aset lancar, (ii) investasi jangka panjang, (iii) aset tetap, (iv) dana cadangan, dan (v) aset lainnya.

Secara agregat nilai aset Kabupaten Gunung Mas dari tahun 2020-2024 relatif mengalami kenaikan dengan rata-rata kenaikan mencapai 0,96% per tahun dari Rp2,008 triliun (2020) menjadi Rp2,086 triliun (2024). Adapun jenis aset yang rata-rata pertumbuhannya positif dalam 5 (lima) tahun terakhir adalah aset tetap (0,12% per tahun), investasi jangka panjang (8,59% per tahun) dan Aset Lainnya (26,94% per tahun). Adapun jenis aset lancar justru mengalami penurunan nilai dengan rata-rata penurunan sebesar -2,20% per tahun. Jika dilihat proporsinya maka rata-rata lebih dari 84% nilai total aset yang ada berasal dari jenis aset tetap khususnya berupa gedung dan bangunan dan jalan, irigasi. dan jaringan.

#### 2) Kewajiban

Kewajiban umumnya timbul karena konsekuensi pelaksanaan tugas atau tanggungjawab untuk bertindak di masa lalu. Kewajiban memberikan informasi tentang utang pemerintah daerah kepada pihak ketiga atau klaim pihak ketiga terhadap arus kas pemerintah daerah. Kewajiban dapat diklasifikasikan menjadi dua yaitu kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Jenis kewajiban yang harus dilaksanakan oleh Kabupaten Gunung Mas dalam kurun waktu tahun 2020-2024 berupa kewajiban jangka pendek. Nilai kewajiban jangka pendek tersebut cukup berfluktuatif namun relatif mengalami tren menurun cukup signifikan sebesar -2,92% per tahun dari Rp3,2 miliar (2020) menjadi Rp2,8 miliar (2024). Jika dilihat lebih dalam maka nilai kewajiban jangka pendek terbesar disumbangkan oleh utang jangka pendek lainnya yang trennya juga relatif menurun cukup signifikan sebesar dari Rp2,033 miliar (2020) menjadi Rp79,35 juta (2023).

#### 3) Ekuitas Dana

Ekuitas dana merupakan selisih antara aset dengan kewajiban pemerintah daerah. Ekuitas dana cadangan merupakan kekayaan pemerintah daerah yang



diinvestasikan dalam dana cadangan untuk tujuan tertentu di masa mendatang. Semakin besar nilai ekuitas dana maka akan semakin bagus juga kondisi keuangan suatu daerah. Ekuitas dana terbagi menjadi tiga kategori yakni ekuitas dana lancar, ekuitas dana investasi, dan ekuitas dana cadangan. Kategori dana tersebut sekaligus menunjukkan kemampuan modal sendiri yang dimiliki pemerintah daerah, sehingga tidak terlalu tergantung pada utang dalam kegiatan investasinya.

Nilai ekuitas dana Kabupaten Gunung Mas mengalami kenaikan dengan rata-rata kenaikan sebesar 0,96% per tahun dimana pada tahun 2020 sebesar Rp2,005 triliun menjadi Rp2,083 Triliun di tahun 2024. Ekuitas dari tahun 2020 ke tahun 2021 sempat mengalami penurunan kemudian mulai naik secara konsisten tiap tahun dari tahun 2022-2024. Penurunan nilai ekuitas dapat memiliki dampak signifikan pada kesehatan keuangan suatu entitas, mengurangi kemampuannya untuk memperoleh pembiayaan tambahan, berinvestasi dalam proyek-proyek baru, atau bahkan mempertahankan keseimbangan keuangan yang sehat. Oleh karena itu, manajemen risiko dan pengelolaan keuangan yang hati-hati penting untuk memitigasi risiko penurunan nilai ekuitas. Ada beberapa strategi untuk menekan penurunan nilai ekuitas antara lain: mencegah dan menekan kerugian investasi, mencegah dan menekan penurunan nilai aset, mencegah dan menekan kerugian operasional di mana pendapatan menurun atau biaya meningkat, serta membatasi pinjaman baru atau peningkatan utang lainnya.

Secara keseluruhan Neraca Kabupaten Gunung Mas disajikan pada tabel berikut ini:





**Tabel II.38**  
**Pertumbuhan Neraca Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2020-2024**

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024	Rata-Rata Pertumbuhan
<b>ASET</b>						
<b>ASET LANCAR</b>						
Kas di Kas Daerah	67.630.319.375	95.287.867.372	124.159.056.220	38.395.026.101	40.943.078.910	(11,79)
Kas di Bendahara Penerimaan	2.400.559	8.348.500	5.030.500	35.530.428	2.041.500	(5,26)
Kas di Bendahara Pengeluaran	259.523.480	16.281.135				(100,00)
Kas di BLUD	4.450.930.230	7.501.105.918	10.659.694.173	6.952.304.799	5.040.676.316	3,16
Kas di Bendahara FKTP	2.318.323.776	2.116.959.998	722.808.950	4.070.787.115	364.888.475	(37,01)
Kas di Bendahara BOS	387.283.968	207.585.221	789.401	24.420.000	69.420.000	(34,93)
Kas Dana BOK Puskesmas					2.804.445.634	
Kas Lainnya		6.000	6.000	75.712	6.000	
Setara Kas						
Investasi Jangka Pendek			10.234.288.235			(100,00)
Piutang Pendapatan	16.063.308.379					(100,00)
Piutang Pajak		1.786.738.168	1.425.180.896	1.729.550.343	2.358.719.653	9,70
<i>Penyisihan Piutang Pajak</i>						
Piutang Retribusi		402.446.000	500.714.000	645.114.000	593.964.000	13,85
<i>Penyisihan Piutang Retribusi</i>						
Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan						
<i>Penyisihan Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan</i>						
Piutang Lain-lain PAD yang Sah		14.347.484.456	2.281.074.041	2.775.305.849	1.866.093.553	(49,33)



Uraian	2020	2021	2022	2023	2024	Rata-Rata Pertumbuhan
<i>Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah</i>						
Piutang Transfer Pemerintah Pusat		52.800.000	71.050.000			(100,00)
<i>Penyisihan Piutang Transfer Pemerintah Pusat</i>						
Piutang Transfer Antar Daerah		13.906.778.436		7.506.010.211	15.246.603.720	3,11
Piutang Lainnya	22.026.189.063	16.511.606.569	1.662.884.576	134.417.040	9.931.450	(85,43)
<i>Penyisihan Piutang</i>	(1.278.667.068)	(1.649.397.052)	(1.211.715.937)	(1.412.775.852)	(1.458.947.733)	3,35
Beban Dibayar Di Muka						
Persediaan	34.614.460.534	14.790.179.091	16.773.614.157	40.227.366.882	66.154.501.007	17,58
Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi				9.931.450		
<b>Jumlah Aset Lancar</b>	<b>146.474.072.296</b>	<b>165.286.789.813</b>	<b>167.284.475.211</b>	<b>101.093.064.078</b>	<b>133.995.422.485</b>	<b>(2,20)</b>
<b>INVESTASI JANGKA PANJANG</b>						
Investasi Non Permanen	-	-	-	-	-	
Investasi Non Permanen Lainnya	-	-	-	-	-	
Dana Bergulir						
<i>Penyisihan Investasi Jangka Panjang</i>						
<b>Jumlah Investasi Non Permanen</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
Investasi Permanen						
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	80.282.221.262	89.357.063.103	96.757.484.738	104.734.137.906	111.611.133.251	8,59
<b>Jumlah Investasi Permanen</b>	<b>80.282.221.262</b>	<b>89.357.063.103</b>	<b>96.757.484.738</b>	<b>104.734.137.906</b>	<b>111.611.133.251</b>	<b>8,59</b>
<b>Jumlah Investasi Jangka Panjang</b>	<b>80.282.221.262</b>	<b>89.357.063.103</b>	<b>96.757.484.738</b>	<b>104.734.137.906</b>	<b>111.611.133.251</b>	<b>8,59</b>



Uraian	2020	2021	2022	2023	2024	Rata-Rata Pertumbuhan
<b>ASET TETAP</b>						
Tanah	423.042.227.543	422.033.686.720	421.678.467.720	420.540.504.720	423.275.696.720	0,01
Peralatan dan Mesin	330.705.316.116	368.196.153.663	403.789.220.780	436.571.297.073	484.605.035.193	10,02
Gedung dan Bangunan	793.725.283.484	840.484.168.411	909.506.934.291	960.100.012.622	1.006.412.413.028	6,11
Jalan, Irigasi dan Jaringan	1.831.477.316.680	1.893.815.761.580	2.113.453.245.616	2.286.908.977.381	2.392.278.632.049	6,91
Aset Tetap Lainnya	34.540.004.179	35.483.616.825	36.656.365.379	38.179.968.034	40.547.904.964	4,09
Konstruksi dalam Pengerjaan	18.598.993.787	82.877.227.879	58.136.212.299	12.370.552.658	9.008.890.097	(16,58)
Akumulasi Penyusutan	(1.681.865.512.137)	(1.904.732.804.910)	(2.161.247.375.266)	(2.396.943.059.038)	(2,597,651,554,832)	11,48
<b>Jumlah Aset Tetap</b>	<b>1.750.223.629.652</b>	<b>1.738.157.810.167</b>	<b>1.781.973.070.819</b>	<b>1.757.728.253.449</b>	<b>1.758.477.017.219</b>	<b>0,12</b>
<b>DANA CADANGAN</b>						
Dana Cadangan	-	-	-	-	-	
<b>Jumlah Dana Cadangan</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
<b>ASET LAINNYA</b>						
Tagihan Penjualan Angsuran						
Tuntutan Ganti Kerugian Daerah						
Kemitraan dengan Pihak Ketiga						
Aset Tak Berwujud	3.105.957.235	15.473.895.100,01	15.823.784.900	16.579.778.402	20.528.298.297	60,34
<i>Amortisasi Aset Tak Berwujud</i>		(12.561.284.560)	(13.297.490.390)		(16.689.656.525)	7,36
Aset Lain-Lain	28.706.534.949	14.546.233.385	14.286.116.493	14.671.501.449	108.380.394.750	39,39
<i>Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain</i>				(13.847.689.210)	(93.570.918.151)	61,23
Tagihan Jangka Panjang	9.931.450	78.000.000				



Uraian	2020	2021	2022	2023	2024	Rata-Rata Pertumbuhan
Kas yang Dibatasi Penggunaannya					63.984.972.000	795,91
Dana Transfer <i>Treasury Deposit Facility</i>				236.938.772.000		(100,00)
<b>Jumlah Aset Lainnya</b>	<b>31.822.423.634</b>	<b>17.536.843.925</b>	<b>16.812.411.003</b>	<b>254.342.362.641</b>	<b>82.633.090.371</b>	<b>26,94</b>
<b>JUMLAH ASET</b>	<b>2.008.802.346.843</b>	<b>2.010.338.507.007</b>	<b>2.062.827.441.771</b>	<b>2.217.897.818.074</b>	<b>2.086.716.663.326</b>	<b>0,96</b>
<b>KEWAJIBAN</b>						
<b>KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>						
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)		2.814.697	2.042	71.556		
Pendapatan Diterima Di Muka	304.175.532	262.891.604	196.727.942	195.876.541	44.824.889	(30,91)
Utang Beban	878.487.431					(100,00)
Utang Belanja		11.654.046.242	45.294.588.644	2.824.509.634	2.811.085.936	(37,75)
Utang Bunga						
Utang Jangka Pendek Lainnya	2.033.101.400	2.033.101.400		79.350.000		(100,00)
Pendapatan Lain - Lain PAD yang Sah di terima di Muka						
<b>Jumlah Kewajiban Jangka Pendek</b>	<b>3.215.764.363</b>	<b>13.952.853.943</b>	<b>45.491.318.628</b>	<b>3.099.807.731</b>	<b>2.855.910.825</b>	<b>(2,92)</b>
<b>KEWAJIBAN JANGKA PANJANG</b>						
Utang Dalam Negeri - Pemerintah Pusat	-	-	-	-	-	
Utang Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya	-	-	-	-	-	
Utang Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank	-	-	-	-	-	
Utang Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank	-	-	-	-	-	
Utang Dalam Negeri - Obligasi	-	-	-	-	-	
Utang Jangka Panjang Lainnya	-	-	-	-	-	



Uraian	2020	2021	2022	2023	2024	Rata-Rata Pertumbuhan
Jumlah Kewajiban Jangka Panjang	-	-	-	-	-	
<b>JUMLAH KEWAJIBAN</b>	<b>3.215.764.363</b>	<b>13.952.853.943</b>	<b>45.491.318.628</b>	<b>3.099.807.731</b>	<b>2.855.910.825</b>	<b>(2,92)</b>
<b>EKUITAS</b>						
<b>EKUITAS</b>						
Ekuitas	2.005.586.582.480	1.996.385.653.065	2.017.336.123.143	<b>2.214.798.010.343</b>	<b>2.083.860.752.501</b>	0,96
Sisa Kas BLUD						
Sisa Kas JKN						
<b>JUMLAH EKUITAS</b>	<b>2.005.586.582.480</b>	<b>1.996.385.653.065</b>	<b>2.017.336.123.143</b>	<b>2.214.798.010.343</b>	<b>2.083.860.752.501</b>	<b>0,96</b>
<b>JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS</b>	<b>2.008.802.346.843</b>	<b>2.010.338.507.007</b>	<b>2.062.827.441.771</b>	<b>2.217.897.818.074</b>	<b>2.086.716.663.326</b>	<b>0,96</b>

Sumber: BKAD Kabupaten Gunung Mas, 2025 (diolah)

#### 4) Rasio Keuangan

Untuk menganalisis kondisi keuangan Kabupaten Gunung Mas periode tahun 2020-2024 digunakanlah beberapa analisis rasio keuangan. Rasio keuangan pemerintah daerah diukur dengan menggunakan analisis terhadap rasio likuiditas, solvabilitas dan aktivitas dapat dijelaskan sebagai berikut:

##### 1. Rasio Likuiditas

Rasio likuiditas adalah rasio yang menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam memenuhi kewajiban atau membayar utang jangka pendeknya. Rasio inilah yang dapat digunakan untuk mengukur seberapa likuidnya suatu pemerintah daerah. Jika pemerintah daerah mampu memenuhi kewajibannya berarti pemerintah daerah tersebut likuid, sedangkan jika pemerintah daerah tidak mampu memenuhi kewajibannya berarti pemerintah daerah tersebut tidak likuid. Ada beberapa rasio likuiditas yang dapat digunakan untuk menganalisis namun di sini pendekatan yang dipakai adalah rasio lancar (*current ratio*). Rasio ini juga dikenal sebagai rasio aset cepat atau rasio *acid-test*. Rasio ini mengukur kemampuan pemerintah daerah untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya tanpa harus menjual persediaan. Pada umumnya, rasio lancar di atas 2 (dua) telah dianggap baik.

Rasio lancar Pemerintah Kabupaten Gunung Mas tahun 2020-2024 sedikit berfluktuatif namun trennya semakin meningkat dari nilai 45,55 (2020) menjadi 46,92 (2024). Dari nilai rasio lancar 5 (lima) tahun terakhir menunjukkan bahwa Kabupaten Gunung Mas memiliki tingkat likuiditas yang cukup tinggi dan semakin membaik. Untuk itu yang perlu dijaga adalah membatasi jumlah kewajiban lancarnya agar tidak membesar atau bahkan tidak melebihi nilai aset lancar yang ada

Berikut ini terlihat fluktuatifnya rasio lancar Kabupaten Gunung Mas Tahun 2020-2024.

**Tabel II.39**  
**Rasio Lancar Kabupaten Gunung Mas Tahun 2020-2024**

URAIAN	2020	2021	2022	2023	2024
ASET LANCAR	146.474.072.296	165.286.789.813	167.284.475.211	101.093.064.078	133.995.422.485
KEWAJIBAN LANCAR	3.215.764.363	13.952.853.943	45.491.318.628	3.099.807.731	2.855.910.825
<b>RASIO LANCAR</b>	45,55	11,85	3,68	32,61	46,92

Sumber: BKAD Kabupaten Gunung Mas, 2025 (diolah)

##### 2. Rasio Solvabilitas

Solvabilitas merupakan kemampuan pemerintah daerah untuk melunasi seluruh utang dengan memakai semua aset. Dengan kata lain aset menjadi penjamin utang yang menjadi konsep dasar akuntansinya. Solvabilitas pemerintah daerah penting untuk diketahui supaya tahu kemampuan pemerintah daerah dalam melunasi atau membayar semua pinjaman melalui jumlah aktiva yang dimiliki yang mempengaruhi jenis-jenis laporan keuangan. Atau secara singkat bisa dimaknai kemampuan perusahaan dalam membayar seluruh kewajibannya apabila perusahaan dilikuidasi.

##### a) Rasio Hutang terhadap Ekuitas (*Total Debt to Equity Ratio*)

Kesehatan pengelolaan keuangan pemerintah daerah bisa diukur dari perspektif keuangan internal. Salah satunya dengan pengukuran rasio utang terhadap modal atau dengan istilah yang lebih dikenal sebagai *debt to equity ratio*. *Debt to Equity Ratio* (rasio utang terhadap modal) atau yang bisa disingkat DER adalah rasio hutang terhadap ekuitas. Bisa juga disebut dengan rasio hutang modal. Pengertian dari *Debt to Equity Ratio* (DER) adalah sebuah rasio keuangan yang membandingkan jumlah hutang dengan ekuitas yang menunjukkan kemampuan modal sendiri dari entitas tersebut untuk memenuhi seluruh kewajibannya. Semakin rendah rasio ini, semakin sedikit ketergantungan perusahaan pada utang dan semakin stabil keuangannya.

Jika dilihat dari data yang ada, rasio hutang terhadap ekuitas Kabupaten Gunung Mas dari tahun 2020-2024 berfluktuatif tapi cenderung naik secara agregat. Nilai rasio terendah terjadi di tahun 2020 yaitu sebesar 0,002 dan yang tertinggi terjadi di tahun 2022 sebesar 0,023. Hal ini menunjukkan bahwa nilai rasio terbaik (terendah) terjadi di tahun 2023-2024 di mana nilai kewajiban yang ada jumlahnya hanya sekitar 0,14% dari total ekuitas yang ada. Sementara nilai rasio tertinggi (terburuk) terjadi di tahun 2022 di mana jumlah total kewajiban yang ada jumlahnya hanya sekitar 2,26% dari total ekuitas yang ada. Adapun capaian rasio terakhir tahun 2024 senilai 0,001 atau nilai kewajiban yang ada sebesar 0,14% dari total ekuitas yang ada.

Berdasarkan hal tersebut dapat dikatakan bahwa jumlah kewajiban kurun waktu tahun 2020-2024 nilainya jauh lebih kecil dibandingkan ekuitas yang dimiliki sehingga dapat dikatakan kemampuan Kabupaten Gunung Mas cukup untuk menjamin pembayaran hutang yang ada masih sangat baik.

**Tabel II.40**

**Rasio Hutang Kabupaten Gunung Mas Tahun 2020-2024**

URAIAN	2020	2021	2022	2023	2024
KEWAJIBAN	3.215.764.363	13.952.853.943	45.491.318.628	3.099.807.731	2.855.910.825
EKUITAS	2.005.586.582.480	1.996.385.653.065	2.017.336.123.143	2.214.798.010.343	2.083.860.752.501
TOTAL DEBT TO EQUITY RATIO	0,002	0,007	0,023	0,001	0,001

Sumber: BKAD Kabupaten Gunung Mas, 2025 (diolah)

**b) Rasio Hutang terhadap Total Aktiva (*Total Debt to Total Asset Ratio*)**

Rasio ini merupakan perbandingan antara hutang (baik hutang lancar maupun hutang jangka panjang) dengan jumlah seluruh aktiva (aset). Secara akuntansi rasio ini menunjukkan berapa bagian dari keseluruhan aktiva yang dibelanjai oleh hutang. Atau menunjukkan proporsi total aset yang dibiayai oleh utang. Semakin rendah rasio ini, semakin sedikit risiko perusahaan terhadap perubahan suku bunga dan pembayaran bunga.

Pada dasarnya rasio ini tidak berbeda dengan rasio sebelumnya. Bedanya rasio ini yang menjadi perbandingan total hutang ialah nilai total aset tanpa dikurangi kewajiban yang ada. Oleh karena itu rasionya akan sedikit lebih kecil.

Jika dilihat dari data yang ada, rasio hutang terhadap total aktiva (total aset) Kabupaten Gunung Mas dari tahun 2020-2024 sedikit mengalami fluktuasi di mana angka rasio tertinggi (terburuk) terjadi di tahun 2022 dengan nilai rasio

0,0221 dan yang terendah (terbaik) terjadi di tahun 2023-2024 dengan nilai rasio 0,0014. Oleh karena itu secara keseluruhan Kabupaten Gunung Mas tidak memiliki risiko gagal bayar kewajiban yang ada. Artinya secara keseluruhan nilai total aset daerah nilainya jauh lebih besar daripada jumlah hutang yang ada di Kabupaten Gunung Mas.

**Tabel II.41**  
**Rasio Hutang Terhadap Total Aktiva Kabupaten Gunung Mas Tahun 2020-2024**

URAIAN	2020	2021	2022	2023	2024
KEWAJIBAN	3.215.764.363	13.952.853.943	45.491.318.628	3.099.807.731	2.855.910.825
AKTIVA	2.008.802.346.843	2.010.338.507.007	2.062.827.441.771	2.217.897.818.074	2.086.716.663.326
TOTAL DEBT TO ASSET RATIO	0,0016	0,0069	0,0221	0,0014	0,0014

Sumber: BKAD Kabupaten Gunung Mas, 2025 (diolah)

### 3. Rasio Aktivitas

Secara akuntansi rasio ini digunakan untuk mengukur efektifitas manajemen dalam menggunakan sumber daya ekonomis untuk menghasilkan penjualan yang menguntungkan.

#### a) Perputaran Aktiva Tetap (*Fixed Assets Turn Over*)

Adalah rasio antara penjualan dengan aktiva tetap yang mengukur efisiensi penggunaan aktiva tetap atau perputaran aktiva tetap. Rasio ini menunjukkan bagaimana perusahaan dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Gunung Mas menggunakan aktiva tetapnya seperti tanah, gedung, jalan, kendaraan, mesin-mesin, perlengkapan kantor dll. untuk menghasilkan keuntungan atau dalam lingkup pemerintah daerah keuntungan tersebut berbentuk Penerimaan Asli Daerah (PAD). Semakin besar rasionya maka semakin baik pula manajemen sumberdaya ekonomis tersebut dalam memperoleh keuntungan/penerimaan daerah.

Perkembangan rasio perputaran aktiva tetap Kabupaten Gunung Mas dalam kurun waktu 2020-2024 memiliki tren sedikit berfluktuasi. Rasio tahun 2020 mencapai 0,038 dan menurun hingga 0,033 di tahun 2024. Itu artinya kinerja Pemerintah Kabupaten Gunung Mas dalam memanfaatkan aset tetapnya sedikit mengalami penurunan di mana pada tahun 2020 dari Rp1,750 triliun nilai aset yang hanya mampu mendorong dan menghasilkan keuntungan (PAD) sebesar Rp66,064 miliar atau 3,77% dari nilai aset tetap dan pada tahun 2024 berkinerja sedikit menurun di mana ada peningkatan aset senilai Rp1,758 triliun mampu mendorong dan menghasilkan keuntungan (PAD) sebesar Rp58,708 miliar atau 3,34% dari nilai aset. Jika dilihat kinerjanya, maka secara umum perbandingan pemanfaatan aset tetap terhadap perolehan PAD masih sangat kecil bahkan cenderung menurun. Oleh karena itu efektifitas pendayagunaan aset masih perlu dioptimalkan.

**Tabel II.42**  
**Rasio Perputaran Aktiva Tetap Kabupaten Gunung Mas Tahun 2020-2024**

URAIAN	2020	2021	2022	2023	2024
PAD	66.064.355.509	85.105.385.510	77.246.690.077	35.992.250.833	58.708.141.585
AKTIVA TETAP (Aset Tetap)	1.750.223.629.652	1.738.157.810.167	1.781.973.070.819	1.757.728.253.449	1.758.477.017.219
TRASIO PERPUTARAN AKTIVA TETAP	0,038	0,049	0,043	0,020	0,033

Sumber: BKAD Kabupaten Gunung Mas, 2025 (diolah)

### b) Perputaran Total Aktiva (*Total Assets Turn Over*)

Hampir mirip dengan perputaran aktiva tetap, perputaran total aktiva juga digunakan untuk mengukur efisiensi penggunaan total aset daerah untuk menghasilkan keuntungan atau dalam lingkup pemerintah daerah keuntungan tersebut berbentuk Penerimaan Asli Daerah (PAD). Dengan kata lain semakin tinggi rasionya semakin efisien pemerintah daerah dalam menggunakan asetnya untuk menghasilkan PAD. Sebaliknya rasio perputaran aset yang rendah menandakan kurang efisiennya manajemen dalam menggunakan asetnya dan kemungkinan besar adanya masalah manajemen ataupun produksinya.

Rasio perputaran total aktiva Kabupaten Gunung Mas dalam kurun waktu 2020-2024 mengalami perkembangan negatif di mana rasio dari nilai rasio 0,033 di tahun 2020 menjadi 0,028 di tahun 2024. Dari hal ini dapat disimpulkan bahwa efektivitas pemanfaatan total aset di tahun 2020 mampu memberikan keuntungan PAD sebesar 3,29% nilai nilai total aset itu sendiri. Kinerja pemanfaatan total aset di tahun 2024 mengalami penurunan sehingga menghasilkan 2,81% keuntungan dari nilai total aset yang ada.

Secara keseluruhan dari tahun 2020-2024 rata-rata nilai total aset daerah terbilang memiliki kinerja semakin membaik namun ke depan masih perlu ditingkatkan melalui beberapa strategi antara lain:

- Pengembangan Aset Komersial: Menggunakan aset tetap seperti tanah kosong, bangunan tidak terpakai, atau properti komersial untuk dikembangkan menjadi pusat perbelanjaan, pusat hiburan, atau kompleks perkantoran yang bisa disewakan kepada pihak swasta. Dengan cara ini, pemerintah daerah dapat menghasilkan pendapatan sewa yang signifikan.
- Penyediaan Infrastruktur: Membangun infrastruktur seperti jalan, jembatan, tol, atau pusat logistik yang dapat menarik investasi dan meningkatkan aktivitas ekonomi di daerah tersebut. Pemerintah daerah dapat memberikan izin operasi atau kontrak kepada pihak swasta yang akan membayar sejumlah uang kepada pemerintah daerah sebagai imbalan.
- Pemanfaatan Sumber Daya Alam: Jika daerah memiliki sumber daya alam seperti hutan, tambang, atau lahan pertanian yang luas, pemerintah daerah dapat menjual hak pengelolaannya kepada pihak swasta dengan cara lelang atau kontrak konsesi. Pendapatan dari penjualan hak pengelolaan ini dapat menjadi sumber PAD yang signifikan.
- Pembangunan Properti Publik: Membangun properti publik seperti gedung perkantoran, pusat pemerintahan, atau fasilitas publik lainnya yang dapat disewakan kepada pihak swasta atau digunakan untuk kegiatan komersial.

Pendapatan sewa dari properti ini dapat menjadi sumber pendapatan tetap bagi pemerintah daerah.

- e) Kemitraan Publik-Privat (KPP): Melakukan kemitraan dengan pihak swasta untuk mengembangkan atau mengelola aset tetap. Dalam kemitraan ini, pemerintah daerah dapat memberikan izin pengelolaan atau kontrak kepada pihak swasta dengan imbalan bagi hasil atau pembayaran sewa.
- f) Peningkatan Efisiensi Operasional: Memastikan aset tetap yang dimiliki oleh pemerintah daerah dikelola dengan efisien dan optimal. Hal ini mencakup pemeliharaan rutin, penggunaan energi yang efisien, dan manajemen biaya operasional secara keseluruhan.
- g) Pengembangan Wisata: Pemerintah daerah dapat mengembangkan aset tetap seperti pantai, bukit/gunung, benda sejarah dan lainnya menjadi destinasi wisata yang menarik. Pendapatan dari sektor pariwisata dapat menjadi sumber PAD yang signifikan.
- h) Pengelolaan Aset Digital: Memanfaatkan teknologi informasi untuk mengoptimalkan pengelolaan aset tetap, termasuk pemantauan dan pemeliharaan, serta menghasilkan data yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan yang lebih baik.

**Tabel II.43**

**Rasio Perputaran Total Aktiva Kabupaten Gunung Mas Tahun 2020-2024**

URAIAN	2020	2021	2022	2023	2024
PAD	66,064,355,509	85,105,385,510	77,246,690,077	35,992,250,833	58,708,141,585
TOTAL AKTIVA (Jumlah Aset)	2,008,802,346,843	2,010,338,507,007	2,062,827,441,771	2,217,897,818,074	2,086,716,663,326
RASIO PERPUTARAN TOTAL AKTIVA	0.033	0.042	0.037	0.016	0.028

Sumber: BKAD Kabupaten Gunung Mas, 2025 (diolah)

### 2.2.2 Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu

Analisis kebijakan pengelolaan keuangan masa lalu bertujuan untuk memperoleh gambaran realisasi dari kebijakan penggunaan anggaran dan baik untuk belanja maupun pengeluaran pembiayaan pada periode tahun anggaran sebelumnya. Analisis ini digunakan sebagai bahan untuk menentukan kebijakan pembelanjaan dan pengeluaran pembiayaan di masa datang dalam rangka peningkatan kapasitas pendanaan pembangunan daerah.

Kebijakan pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Gunung Mas 2020-2024 tergambar pada dua aspek penting yaitu proporsi penggunaan anggaran dan analisis pembiayaan. Fokus analisis dilakukan pada orientasi alokasi belanja daerah dan pembiayaan daerah pada kebijakan program dan kegiatan pembangunan daerah yang dijalankan. Oleh karena itu berbagai belanja aparatur perlu ditekan seefisien mungkin agar dapat meningkatkan belanja publik.

#### 2.2.2.1 Proporsi Penggunaan Anggaran

Proporsi penggunaan anggaran menguraikan sekurang-kurangnya mengenai proporsi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur dan realisasi belanja. Oleh

karena itu analisis proporsi penggunaan anggaran dilakukan melalui analisis sebagai berikut:

- Analisis proporsi belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur;
- Analisis belanja periodik dan pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat serta prioritas utama.

Belanja pemenuhan aparatur terdiri dari belanja pegawai meliputi gaji dan tunjangan dan belanja pegawai lainnya. Sedangkan pengeluaran pembiayaan wajib dan mengikat serta prioritas utama terdiri dari seluruh biaya yang harus dikeluarkan baik itu berupa belanja maupun pengeluaran pembiayaan yang wajib untuk dibayarkan.

Proporsi belanja pemenuhan untuk pemenuhan aparatur terhadap total pengeluaran dalam 5 (lima) tahun terakhir menunjukkan tren fluktuatif dengan rata-rata persentasenya sebesar 35,30%. Proporsi belanja aparatur terbesar terjadi di tahun 2021 yang mencapai 36,73% sedangkan capaian terakhir tahun 2024 sebesar 35,09%. Jika dilihat dari keseluruhan perkembangan proporsinya yang tidak pernah lebih dari 37% bisa dikatakan proporsi belanjanya masih cukup sehat. Meskipun begitu pemerintah daerah tetap harus memperhatikan proporsi belanja aparatur agar tidak melebihi batas yang dapat memengaruhi keseimbangan anggaran dan keberlanjutan keuangan jangka panjang. Dalam beberapa kasus, peningkatan belanja pegawai yang signifikan tanpa pertumbuhan yang sesuai dalam pendapatan bisa menjadi beban fiskal yang besar bagi pemerintah, sehingga memerlukan pengelolaan dan perencanaan yang cermat agar belanja publiknya bisa dijaga kualitas maupun kuantitasnya.

Rincian proporsi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur Kabupaten Gunung Mas dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel II.44**  
**Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kabupaten Gunung Mas**  
**Tahun 2020-2024 (dalam Jutaan)**

No.	Tahun	Total belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur	Total pengeluaran (Belanja + Pembiayaan Pengeluaran)	Persentase (%)
1	2019	348.256,06	952.951,18	36,55%
2	2020	379.873,96	1.048.497,03	36,23%
3	2021	378.302,95	1.030.026,70	36,73%
4	2022	412.033,31	1.262.188,81	32,64%
5	2023	506.018,20	1.442.130,17	35,09%
<b>Rata-Rata</b>		<b>404.896,90</b>	<b>1.147.158,78</b>	<b>35,30%</b>

Sumber: BKAD Kabupaten Gunung Mas, 2025 (diolah)

Untuk menghitung kemampuan belanja daerah, maka diperlukan analisis terhadap pengeluaran periodik dan pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat serta prioritas utama. Pada dasarnya analisis terhadap realisasi pengeluaran periodik dan pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat serta prioritas utama bertujuan untuk menghitung kebutuhan pendanaan belanja dan pengeluaran pembiayaan yang tidak dapat dihindari dan ditunda sehingga harus dibayar dalam suatu tahun anggaran pemerintah daerah seperti:

gaji dan tunjangan pegawai serta anggota dewan, bunga, sewa kantor yang telah ada kontrak jangka panjang atau belanja sejenis lainnya serta pengeluaran pembiayaan yang wajib dibayarkan. Total belanja periodik dan pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat serta prioritas utama menjadi dasar untuk menentukan kebutuhan anggaran belanja dalam rangka penghitungan kapasitas riil keuangan daerah dan analisis kerangka pendanaan.

Realisasi belanja periodik dan pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat serta prioritas utama selama tahun 2020-2024 meningkat signifikan dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 8,33% per tahun dari Rp568 miliar (2020) menjadi Rp783 miliar (2024). Kenaikan tersebut terutama dipengaruhi oleh naiknya belanja pegawai dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 9,79% dan belanja hibah sebesar 27,58%. Hal ini masih perlu mendapatkan perhatian pemerintah daerah agar ruang fiskal untuk belanja publik ke depan bisa ditingkatkan kembali. Oleh karena itu diperlukan strategi khususnya untuk menekan biaya aparatur antara lain:

- 1) **Evaluasi Kebutuhan Pegawai:** Melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebutuhan pegawai di setiap unit organisasi. Ini termasuk peninjauan terhadap struktur organisasi, tugas dan tanggung jawab, serta kinerja pegawai yang sudah ada. Dengan memahami kebutuhan yang sebenarnya, pemerintah dapat menghindari pengadaan pegawai yang tidak perlu.
- 2) **Optimalisasi Produktivitas:** Mendorong produktivitas pegawai dengan memberikan pelatihan dan pengembangan keterampilan, menggunakan teknologi informasi dan sistem manajemen kinerja yang efisien, serta menerapkan praktik kerja yang efektif. Dengan meningkatkan produktivitas, pemerintah daerah dapat mencapai hasil yang lebih baik dengan jumlah pegawai yang lebih sedikit.
- 3) **Pengendalian Pengadaan Pegawai Baru:** Mengendalikan pengadaan pegawai baru dengan membatasi jumlah penerimaan pegawai baru atau memperlambat proses rekrutmen. Pemerintah dapat memprioritaskan pengisian posisi yang kritis atau strategis, sambil mempertimbangkan opsi untuk menutup atau menggabungkan posisi yang tidak terlalu penting.
- 4) **Peningkatan Efisiensi Administrasi:** Mengurangi birokrasi dan proses administrasi yang berlebihan yang dapat menghambat efisiensi pelayanan publik. Memperkenalkan inovasi dalam sistem administrasi seperti penggunaan teknologi informasi untuk mengotomatisasi tugas-tugas rutin atau integrasi layanan online dapat membantu mengurangi belanja pegawai.
- 5) **Pengendalian Tunjangan dan Insentif:** Mengkaji ulang dan menyesuaikan tunjangan dan insentif yang diberikan kepada pegawai, seperti tunjangan kinerja atau bonus. Memastikan bahwa insentif tersebut sesuai dengan kinerja dan kontribusi yang sebenarnya, serta terkait dengan pencapaian tujuan organisasi.
- 6) **Penghapusan atau Penyederhanaan Jabatan:** Melakukan peninjauan terhadap struktur jabatan dan mempertimbangkan untuk menghapus atau menyederhanakan jabatan yang tidak lagi relevan atau diperlukan. Ini dapat membantu mengurangi jumlah pegawai secara keseluruhan.

Secara keseluruhan perkembangan pengeluaran periodik dan pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat serta prioritas utama dapat dilihat pada tabel berikut:



Tabel II.45

**Realisasi Pengeluaran Belanja Periodik dan Pengeluaran Pembiayaan Yang Wajib Dan Mengikat Serta Prioritas Utama Kabupaten Gunung Mas Tahun 2020-2024 (dalam Jutaan)**

Uraian	Realisasi					Rata-Rata Pertumbuhan
	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>Belanja Operasi Wajib dan Mengikat</b>	<b>373.106,17</b>	<b>422.789,01</b>	<b>398.335,55</b>	<b>460.751,38</b>	<b>561.219,99</b>	<b>10,75</b>
Belanja Pegawai	348.256,06	379.873,96	378.302,95	412.033,31	506.018,20	9,79
Belanja Bunga	-	-	-	-	-	-
Belanja Subsidi	-	-	-	-	19,45	-
Belanja Hibah	20.720,60	42.304,05	19.168,80	48.514,56	54.903,25	27,58
Belanja Bantuan Sosial	4.129,51	611,00	863,81	203,50	279,10	(49,01)
Belanja Keuangan	-	-	-	-	-	-
<b>Belanja Transfer</b>	<b>162.284,85</b>	<b>165.533,02</b>	<b>150.848,98</b>	<b>177.597,59</b>	<b>210.965,90</b>	<b>8,42</b>
Belanja Transfer Bagi Hasil	-	3.303,10	-	5.391,90	7.054,64	-
Belanja Transfer Bantuan Keuangan	162.284,85	162.229,92	150.848,98	172.205,69	203.911,26	7,92
<b>Belanja Tak Terduga</b>	<b>21.915,34</b>	<b>2.738,08</b>	<b>219,93</b>	<b>212,50</b>	<b>196,97</b>	<b>(69,21)</b>
<b>Pengeluaran Pembiayaan</b>	<b>11.548,20</b>	<b>12.659,00</b>	<b>10.350,00</b>	<b>11.968,00</b>	<b>11.159,00</b>	<b>(0,85)</b>
Pembayaran Cicilan Pokok Utang Yang Jatuh Tempo	-	-	-	-	-	-
Penyertaan Modal Daerah;	11.548,20	12.659,00	10.350,00	11.968,00	11.159,00	(0,85)
Pembentukan Dana Cadangan;	-	-	-	-	-	-
Pemberian Pinjaman Daerah;	-	-	-	-	-	-



Pengeluaran Pembiayaan Lainnya Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	-	-	-	-	-	-
<b>Total Belanja Periodik Dan Pengeluaran Pembiayaan Yang Wajib Dan Mengikat Serta Prioritas</b>	<b>568.854,56</b>	<b>603.719,12</b>	<b>559.754,47</b>	<b>650.529,47</b>	<b>783.541,86</b>	<b>8,33</b>

Sumber: BKAD Kabupaten Gunung Mas, 2025 (diolah)

### 2.2.2.2 Analisis Pembiayaan

Analisis pembiayaan menguraikan sekurang-kurangnya mengenai besaran nilai penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan yang digunakan untuk menutup defisit riil anggaran daerah. Defisit riil anggaran terjadi jika pendapatan yang ada tidak sebanding dengan nilai belanja dan pengeluaran pembiayaan yang ada pada tahun yang sama. Oleh karena itu besaran defisit riil anggaran daerah juga harus memperhatikan besaran nilai pembiayaan netto yang dapat digunakan untuk menutupnya yang bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran sebelumnya (SiLPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman, serta penerimaan piutang daerah.

Dalam 5 (lima) tahun terakhir (2020-2024) defisit riil anggaran hanya terjadi pada tahun 2023-2024 di mana defisit riil pada tahun tersebut sebesar Rp-86 miliar dan Rp-592 juta. Sementara pada tahun 2020-2022 terjadi surplus anggaran.

**Tabel II.46**

**Defisit Riil Anggaran Kabupaten Gunung Mas Tahun 2019-2023 (dalam Jutaan)**

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Realisasi Pendapatan Daerah	990.638,49	1.078.818,22	1.085.423,82	1.176.119,50	1.441.537,90
Dikurangi Realisasi:					
Belanja Daerah	941.402,98	1.035.838,03	1.019.676,70	1.250.220,81	1.430.971,17
Pengeluaran Pembiayaan	11.548,20	12.659,00	10.350,00	11.968,00	11.159,00
<b>(Defisit Riil)</b>	<b>37.687,30</b>	<b>30.321,19</b>	<b>55.397,12</b>	<b>-86.069,31</b>	<b>-592,26</b>

Sumber: Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gunung Mas, 2025 (diolah)

Jika dibandingkan antara defisit riil anggaran daerah dan komponen penutupnya diketahui bahwa defisit riil anggaran yang terjadi di tahun 2023 dapat ditutup oleh SiLPA pada tahun 2023 yaitu sebesar Rp135 miliar dan 2024 sebesar Rp49 miliar. Dari hal ini dapat dikatakan bahwa target defisit riil yang ditetapkan masih sangat aman bahkan masih bisa dimaksimalkan selama tidak melebihi target SiLPA atau komponen penutup lainnya yang ditetapkan.

**Tabel II.47**

**Nilai Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran Kabupaten Gunung Mas Tahun 2020-2024 (dalam Jutaan)**

URAIAN	2020	2021	2022	2023	2024
Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)	37.360,48	74.814,15	105.113,52	135.547,38	49.816,82
Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-	-
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan;	-	-	-	-	-
Penerimaan Pinjaman Daerah;	-	-	-	-	-
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-

Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	-	-	-	-	-
<b>Total Komposisi Penutup Defisit</b>	<b>37.360,48</b>	<b>74.814,15</b>	<b>105.113,52</b>	<b>135.547,38</b>	<b>49.816,82</b>

Sumber: Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gunung Mas, 2024 (diolah)

Jika dilihat dari sumber SiLPA di Kabupaten Gunung Mas dari tahun 2020-2024 terlihat bahwa nilai SiLPA tersebut berasal dari sisa penghematan belanja atau akibat lainnya. Oleh karena itu bisa dikatakan bahwa sisa penghematan belanja atau akibat lainnya merupakan komponen utama penutup defisit riil anggaran yang ada di Kabupaten Gunung Mas.

### 2.2.3 Kerangka Pendanaan

Kerangka Pendanaan adalah bagian dari kerangka keuangan yang mempunyai keterkaitan dengan kemampuan untuk membiayai belanja pemerintah. Penyusunan kerangka pendanaan ini dimaksudkan untuk mendukung efisiensi dan efektivitas proses penyusunan rencana kinerja daerah. Analisis kerangka pendanaan bertujuan untuk menghitung kapasitas riil keuangan daerah yang akan dialokasikan untuk pendanaan program pembangunan RPJMD hingga tahun 2029. Dalam konteks kemandirian fiskal, kemungkinan besar penerimaan dana transfer akan semakin berkurang. Oleh karena itu penggunaan ruang fiskal daerah ke depan harus lebih mengedepankan asas efektifitas dan efisiensi.

Pada bagian kerangka pendanaan ini akan diberikan gambaran tentang proyeksi pendapatan, proyeksi Sisa Lebih Riil Perhitungan Anggaran (SiLPA), dan Proyeksi belanja wajib dan mengikat yang kemudian akan dihitung seberapa besar kapasitas riil daerah untuk pendanaan indikatif pada tahun 2025 hingga 2029.

#### 2.2.3.1 Proyeksi Pendapatan dan Belanja Daerah

##### a. Proyeksi Pendapatan

Proyeksi pendapatan daerah adalah perkiraan atau estimasi pendapatan yang akan diperoleh pemerintah daerah dalam periode tahun 2025-2030. Proyeksi ini penting untuk perencanaan keuangan serta untuk memastikan keberlanjutan keuangan pemerintah daerah dalam menunjang pembangunan daerah. Ada beberapa acuan yang dipakai dalam rangka memproyeksikan pendapatan daerah antara lain:

- 1) Analisis Historis: Melakukan analisis terhadap data historis pendapatan daerah untuk menentukan tren dan pola pengeluaran. Ini dapat melibatkan peninjauan data pendapatan tahun sebelumnya serta faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan pendapatan dari waktu ke waktu.
- 2) Analisis Ekonomi: Mengkaji kondisi ekonomi baik di tingkat lokal, nasional, maupun global. Faktor-faktor seperti pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran, inflasi, dan kebijakan fiskal dapat berpengaruh pada pendapatan daerah.
- 3) Perkiraan Pertumbuhan Pendapatan: Berdasarkan data historis dan analisis ekonomi, membuat proyeksi tentang pertumbuhan pendapatan masa depan

khususnya mencakup pendapatan pajak, pendapatan dari investasi, dan sumber-sumber pendapatan lainnya.

- 4) Analisis Demografi: Memahami demografi penduduk daerah dan bagaimana hal itu dapat memengaruhi permintaan layanan publik dan ketersediaan sumber daya. Misalnya, pertumbuhan populasi dapat menghasilkan peningkatan pendapatan dari pajak properti dan pajak penjualan.
- 5) Perencanaan Sensitivitas: Mengidentifikasi risiko-risiko potensial dan mengembangkan skenario alternatif berdasarkan variabel-variabel yang mungkin berubah, seperti perubahan kebijakan pajak atau fluktuasi ekonomi dan apakah proyeksi tersebut realistis dan konservatif.
- 6) Evaluasi Kinerja: Melakukan evaluasi berkala terhadap proyeksi pendapatan dengan pendapatan yang sebenarnya untuk mengetahui keberhasilan proyeksi dan mengidentifikasi area-area di mana penyesuaian mungkin diperlukan.
- 7) Peningkatan Pengelolaan Keuangan: Mengimplementasikan praktik-praktik pengelolaan keuangan yang baik, seperti pengendalian biaya dan diversifikasi sumber pendapatan, untuk meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam menghadapi ketidakpastian ekonomi.
- 8) Tahun dasar proyeksi yang digunakan adalah angka realisasi APBD tahun 2023 dan/atau target APBD tahun 2024.

Berdasarkan data beberapa tahun sebelumnya, anggaran pendapatan daerah dalam APBD Kabupaten Gunung Mas masih bertumpu pada dana transfer pemerintah pusat khususnya dari sumber dana perimbangan. Kenyataan ini membuat Pemerintah Kabupaten Gunung Mas masih sangat tergantung pada Pemerintah Pusat dalam membiayai pembangunannya, sehingga dalam merumuskan kebijakan yang terkait langsung dengan pos-pos pendapatan dalam APBD benar-benar memperhatikan penetapan arah kebijakan berkaitan dengan target pendapatan daerah dan upaya-upaya yang ditempuh dalam mencapai target tersebut serta dasar hukum penerimaannya. Dalam memproyeksi pendapatan, proyeksi lebih difokuskan pada penerimaan yang bersumber dari daerah sendiri (PAD) dengan melihat berbagai variabel yang berkaitan dengannya.

Pertumbuhan pendapatan daerah Kabupaten Gunung Mas tahun 2025-2030 diproyeksikan hanya tumbuh  $\pm 2,67\%$  per tahun dari Rp1,28 triliun (2025) menjadi Rp1,46 triliun (2030). Nilai proyeksinya relatif sangat kecil mengingat ketergantungan fiskal daerah terhadap dana transfer khususnya dana Perimbangan masih sangat tinggi. Sehingga proyeksi pendapatannya ditargetkan agak rendah yang fokusnya di PAD. Oleh karena itu, untuk menjaga kualitas perencanaan anggaran yang lebih realistis maka fokus pertumbuhan Pendapatan Daerah ini akan didongkrak oleh target tumbuhnya PAD. Sementara untuk sumber pendapatan seperti pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan yang sah akan diproyeksikan dengan tingkat pertumbuhan 0% atau flat sama nilai dengan angka realisasi tahun terakhir yaitu realisasi tahun 2023 ataupun tahun 2024.

Untuk PAD sendiri dengan mempertimbangkan realisasi pertumbuhan rata-rata dalam 5 (lima) tahun terakhir yang sebesar  $-2,91\%$  per tahun, maka proyeksi PAD tahun 2025-2030 juga diproyeksikan tumbuh  $\pm 5\%$  per tahun dari Rp111,7 miliar (2025) menjadi Rp142,56 miliar (2030). Berikut ini target seluruh

komponen sumber PAD yaitu Pendapatan Pajak Daerah tumbuh 5% per tahun, Pendapatan Retribusi Daerah tumbuh 5%, Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan tumbuh 5%, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah ditargetkan tumbuh 5% per tahun.

Proyeksi pertumbuhan Pajak Daerah yang sebesar  $\pm 5\%$  per tahun dari Rp82,243 miliar (2025) menjadi Rp104,965 miliar (2030) juga mempertimbangkan pada rata-rata realisasi pertumbuhan pajak daerah dalam 5 (lima) tahun terakhir yang tumbuh  $-11,30\%$  per tahun. Adapun target minimal proyeksi pertumbuhan pajak daerah tersebut dilakukan melalui serangkaian kebijakan utama yaitu:

- 1) Penilaian Properti yang Akurat: Memastikan penilaian properti yang akurat dapat membantu pemerintah daerah mengenakan pajak properti khususnya NJOP yang sesuai dengan nilai aktualnya. Ini dapat dilakukan dengan melakukan pembaruan teratur terhadap data properti dan menggunakan teknologi seperti Sistem Informasi Geografis (SIG) untuk membantu dalam proses penilaian.
- 2) Peningkatan Kepatuhan: Meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak terhadap kewajiban mereka dapat menjadi langkah penting. Pemberian informasi yang jelas dan mudah dimengerti tentang kewajiban pajak, serta penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran, dapat membantu meningkatkan tingkat kepatuhan.
- 3) Diversifikasi Sumber Pajak: Selain pajak properti, pemerintah daerah dapat mengembangkan sumber-sumber pendapatan lainnya seperti pajak penjualan, pajak hotel, atau bahkan pajak atas industri tertentu yang signifikan di Kabupaten Gunung Mas. Diversifikasi ini dapat membantu mengurangi ketergantungan pada satu jenis pajak saja.
- 4) Inisiatif Peningkatan Layanan: Meningkatkan kualitas layanan publik seperti infrastruktur, fasilitas kesehatan, pendidikan, dan transportasi dapat membuat masyarakat lebih rela membayar pajak jika mereka melihat manfaat yang diterima dari pajak yang mereka bayar.
- 5) Kemitraan Publik-Swasta: Bermitra dengan sektor swasta untuk mengembangkan proyek-proyek infrastruktur atau pengembangan properti yang dapat meningkatkan nilai properti dan pendapatan pajak daerah.
- 6) Peninjauan Kembali Insentif Pajak: Meninjau kembali insentif pajak kepada industri atau pemilik properti tertentu untuk mendorong investasi atau pengembangan. Namun, jika insentif ini tidak memberikan manfaat yang diharapkan, maka perlu dievaluasi kembali untuk memastikan bahwa pajak yang diterima oleh pemerintah daerah sebanding dengan manfaat yang diberikan.
- 7) Evaluasi Kebijakan Pajak: Melakukan evaluasi terhadap kebijakan pajak yang ada secara berkala untuk memastikan kebijakan pajak masih relevan dan efektif dalam menghasilkan pendapatan yang dibutuhkan.
- 8) Peningkatan Pengawasan dan Transparansi: Membangun sistem pengawasan yang kuat dan meningkatkan transparansi dalam pengelolaan pajak daerah yang dapat membantu mencegah kebocoran dan penyalahgunaan potensi pajak daerah, sehingga memastikan bahwa semua potensi pendapatan pajak yang ada dapat dipungut dengan efisien dan efektif.

Proyeksi pertumbuhan retribusi daerah tahun 2025-2030 ditargetkan tumbuh  $\pm$  5% per tahun dari Rp19,165 miliar (2025) menjadi Rp24,46 miliar (2030) sementara realisasi rata-rata pertumbuhan retribusi daerah 5 (lima) tahun terakhir sebesar 6,65% per tahun dengan capaian tertinggi ada di tahun 2023 yang sebesar Rp5,824 miliar dan sedikit menurun pada tahun 2024. Penurunan tersebut merupakan imbas dari ditetapkannya Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 di mana terdapat sejumlah objek retribusi yang sudah tidak boleh dilakukan pemungutan. Untuk itu diperlukan strategi untuk memaksimalkan kembali pendapatan retribusi daerah agar dapat mencapai target yang telah ditetapkan melalui:

- 1) Analisis Potensi Sektor dan Layanan: Identifikasi sektor dan layanan yang memiliki potensi besar untuk menghasilkan retribusi. Ini bisa termasuk sektor pariwisata, terminal, perizinan usaha, parkir, pasar, pelayanan persampahan dan sebagainya.
- 2) Perbaiki Sistem Pungutan Retribusi: Memastikan bahwa sistem pungutan berjalan efisien dan transparan. Meminimalkan birokrasi, mempercepat proses, dan memperbarui peraturan serta tarif yang sesuai dengan kondisi ekonomi saat ini.
- 3) Pengawasan dan Penegakan Hukum: Memastikan pengawasan dan penegakan hukum yang ketat terhadap pelanggaran retribusi. Ini mencakup pemeriksaan secara rutin, sanksi yang tegas terhadap pelanggar, dan penggunaan teknologi untuk mendeteksi kecurangan.
- 4) Pengembangan Infrastruktur: Meningkatkan infrastruktur yang mendukung pengumpulan retribusi, seperti sistem pembayaran online, terminal parkir yang canggih, atau perangkat lunak manajemen pajak yang efisien.
- 5) Promosi dan Pemasaran: Melakukan promosi aktif terhadap layanan dan fasilitas yang dikenakan retribusi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan menarik lebih banyak pengguna atau pelanggan.
- 6) Kemitraan Swasta: Membangun kemitraan dengan sektor swasta untuk mengelola beberapa layanan atau fasilitas, dengan mempertimbangkan kontrak yang menguntungkan pihak daerah dalam hal pendapatan retribusi.
- 7) Diversifikasi Pendapatan: Tidak hanya mengandalkan satu sumber pendapatan, tapi mencari cara untuk mendiversifikasi pendapatan daerah, termasuk eksplorasi potensi baru dan inovasi dalam pengumpulan retribusi.
- 8) Evaluasi dan Penyesuaian: Melakukan evaluasi secara berkala terhadap sistem pengumpulan retribusi, mengevaluasi keberhasilan strategi yang diterapkan, dan melakukan penyesuaian sesuai kebutuhan.
- 9) Peningkatan Kualitas Layanan: Menawarkan layanan yang berkualitas kepada pelanggan, sehingga mereka merasa nilai yang mereka bayarkan sebanding dengan layanan yang mereka terima.
- 10) Edukasi Masyarakat: Mengedukasi masyarakat tentang pentingnya membayar retribusi dan dampak positifnya bagi pembangunan dan penyediaan layanan publik.

Pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan tahun 2025-2030 diproyeksikan tumbuh  $\pm$  5% per tahun dari Rp3,136 miliar (2025) menjadi Rp4,003 miliar (2030). Untuk mencapai target pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan maka perlu didorong BUMD dan

swasta yang terdapat penyertaan modal di dalamnya agar dapat lebih produktif melalui:

- 1) Mendorong Penyusunan Rencana Bisnis yang Komprehensif: BUMD dan swasta yang terkait harus menyusun rencana bisnis yang jelas dan komprehensif yang mencakup target keuangan jangka pendek dan jangka panjang, strategi pemasaran, pengelolaan risiko, dan lain-lain.
- 2) Mendorong Pengelolaan Efisiensi Operasional: Memastikan operasional khususnya BUMD berjalan dengan efisien, termasuk pengelolaan biaya yang efektif, optimalisasi proses produksi, dan manajemen rantai pasok yang baik.
- 3) Mendorong Inovasi Produk dan Layanan: Mengembangkan produk dan layanan baru yang memenuhi kebutuhan pasar dan memberikan nilai tambah bagi pelanggan. Inovasi dapat mencakup peningkatan kualitas, fitur baru, atau pendekatan yang berbeda dalam pemasaran.
- 4) Mendorong Peningkatan Kualitas Produk dan Layanan: Fokus pada peningkatan kualitas produk dan layanan yang ditawarkan khususnya oleh BUMD untuk mempertahankan pelanggan yang sudah ada dan menarik pelanggan baru.
- 5) Mendorong Ekspansi Pasar: Mencari peluang untuk memperluas pasar khususnya BUMD, baik secara regional maupun nasional. Ini bisa melalui ekspansi geografis, diversifikasi produk, atau penetrasi pasar yang lebih dalam.
- 6) Mendorong Kemitraan Strategis: Membangun kemitraan strategis dengan perusahaan swasta atau entitas lain yang dapat mendukung pertumbuhan dan pengembangan BUMD, seperti dalam hal teknologi, distribusi, atau pemasaran.
- 7) Mendorong Manajemen Risiko yang Efektif: Mengelola risiko dengan baik untuk menghindari kerugian yang tidak perlu dan memastikan keberlanjutan operasional. Ini termasuk manajemen risiko finansial, operasional, dan reputasi.
- 8) Mendorong Pengembangan Sumber Daya Manusia: Melakukan investasi dalam pengembangan karyawan untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan mereka, sehingga dapat memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap kesuksesan BUMD.
- 9) Pemantauan dan Evaluasi Berkala: Melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap kinerja keuangan dan operasional BUMD, serta melakukan penyesuaian strategis jika diperlukan.
- 10) Mendorong Transparansi dan Akuntabilitas: Menjaga transparansi dalam pengelolaan keuangan dan operasional BUMD, serta memastikan akuntabilitas kepada pemegang saham dan pihak yang berkepentingan lainnya.

Proyeksi lain-lain pendapatan asli daerah yang sah kurun waktu tahun 2025-2030 ditargetkan naik  $\pm 5\%$  per tahun dari Rp7,155 miliar (2025) menjadi Rp9,131 miliar (2030). Target ini masih realistis jika mempertimbangkan capaian rata-rata pertumbuhan 5 (lima) tahun terakhir yang sebesar  $\pm 7,03\%$  per tahun. Strategi umum untuk mencapai target pertumbuhan ini adalah dengan memaksimalkan dan mengefektifkan hasil pemanfaatan atau pendayagunaan kekayaan daerah yang dapat meningkatkan penerimaan jasa giro dan pendapatan bunga.



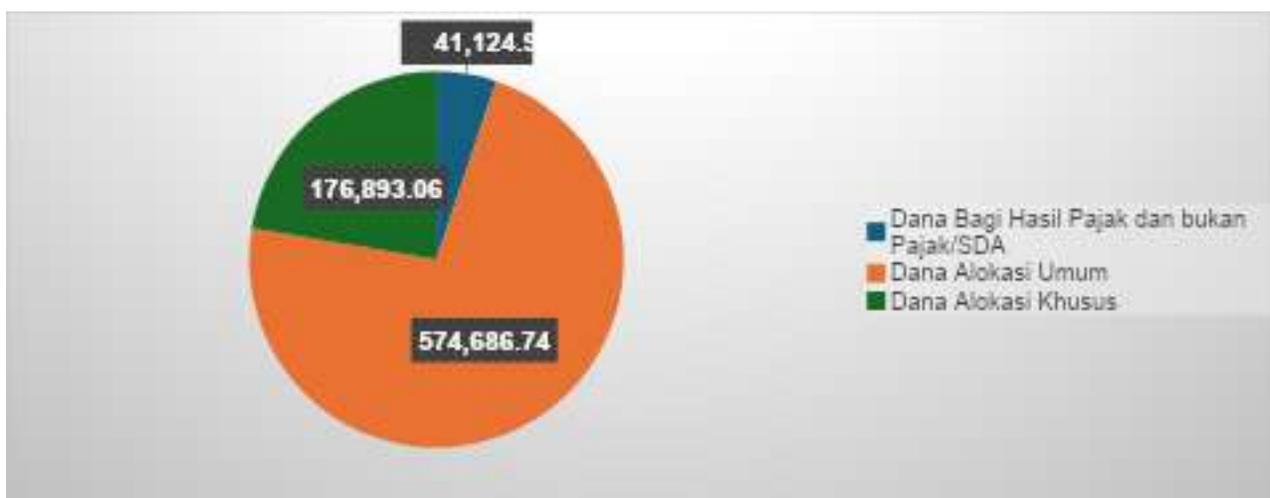
**Gambar II.51**  
**Target Komposisi PAD Kabupaten Gunung Mas Tahun 2025-2030**



Sumber: Bappeda Kabupaten Gunung Mas, 2025 (diolah)

Pendapatan daerah Kabupaten Gunung Mas masih didominasi oleh sumber pendapatan transfer yang besar kecilnya terutama sangat dipengaruhi oleh kemampuan keuangan negara. Untuk menjaga kualitas perencanaan keuangan daerah agar tidak terlalu dinamis sebagai dasar menyusun penganggaran pembangunan, maka pendekatan proyeksi pendapatan transfer khususnya transfer pemerintah pusat menggunakan pendekatan konstan sesuai pendapatan transfer yang diperoleh (realisasi) pada tahun 2024. Dengan kata lain pertumbuhan transfer pemerintah pusat pertumbuhannya 0%. Komponen pendapatan transfer yang ditargetkan sedikit mengalami pertumbuhan adalah dari pendapatan transfer antar daerah dengan target pertumbuhan sebesar  $\pm 10,5\%$  per tahun yang berasal dari sumber bagi hasil pajak. Berdasarkan beberapa asumsi tersebut maka secara keseluruhan pendapatan transfer ditargetkan hanya tumbuh sangat kecil yaitu sebesar  $\pm 2,49\%$  per tahun dari Rp1,206 triliun (2025) menjadi Rp1,364 triliun (2030).

**Gambar II.52**  
**Target Komposisi Dana Perimbangan Kabupaten Gunung Mas Tahun 2025-2029**



Sumber: Bapperida Kabupaten Gunung Mas, 2025 (diolah)

Adapun rincian proyeksi pendapatan Kabupaten Gunung Mas tahun 2025-2030 dapat dilihat pada tabel berikut ini:



**Tabel II.48**  
**Proyeksi Pendapatan Kabupaten Gunung Mas Tahun 2025-2030 (dalam jutaan)**

No	Uraian	Realisasi	Proyeksi					
		2023	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	<b>PENDAPATAN</b>	<b>1,176,119.50</b>	<b>1,282,689.31</b>	<b>1,319,113.77</b>	<b>1,352,966.90</b>	<b>1,388,273.96</b>	<b>1,425,104.85</b>	<b>1,463,532.95</b>
1.1	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	<b>35,992.25</b>	<b>111,700.00</b>	<b>117,285.00</b>	<b>123,149.25</b>	<b>129,306.71</b>	<b>135,772.04</b>	<b>142,560.65</b>
1.1.1	<b>Pendapatan Pajak Daerah</b>	11,888.73	82,243.11	86,355.26	90,673.02	95,206.68	99,967.01	104,965.36
1.1.2	<b>Pendapatan Retribusi Daerah</b>	5,824.28	19,165.08	20,123.33	21,129.50	22,185.98	23,295.27	24,460.04
1.1.3	<b>Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan</b>	81.15	3,136.74	3,293.58	3,458.25	3,631.17	3,812.73	4,003.36
1.1.4	<b>Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah</b>	18,198.09	7,155.07	7,512.83	7,888.47	8,282.89	8,697.03	9,131.89
1.2	<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	<b>1,135,524.59</b>	<b>1,138,368.90</b>	<b>1,169,208.36</b>	<b>1,197,197.24</b>	<b>1,226,346.83</b>	<b>1,256,712.39</b>	<b>1,288,351.89</b>
1.2.1	<b>TRANSFER PEMERINTAH PUSAT</b>	<b>1,078,209.70</b>	<b>1,098,193.90</b>	<b>1,114,768.23</b>	<b>1,140,035.10</b>	<b>1,166,326.59</b>	<b>1,193,691.14</b>	<b>1,222,179.57</b>
1.2.1.1	<b>Dana Perimbangan</b>	<b>967,710.34</b>	<b>998,162.29</b>	<b>1,006,106.25</b>	<b>1,026,507.91</b>	<b>1,047,690.92</b>	<b>1,069,691.56</b>	<b>1,092,547.89</b>
1.2.1.1.1	Dana Bagi Hasil Pajak dan bukan Pajak/SDA	24,499.23	41,124.99	42,153.11	43,206.94	44,287.11	45,394.29	46,529.15
1.2.1.1.3	Dana Alokasi Umum	529,272.77	525,714.34	530,971.49	536,281.20	541,644.01	547,060.45	552,531.06



No	Uraian	Realisasi	Proyeksi					
		2023	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1.2.1.1.4	Dana Alokasi Khusus	179,871.10	152,219.33	152,219.33	152,219.33	152,219.33	152,219.33	152,219.33
<b>1.2.1.2</b>	<b>Dana Insentif Daerah</b>	15,456.20	#REF!	11,357.59	11,357.59	11,357.59	11,357.59	11,357.59
<b>1.2.1.3</b>	<b>Transfer Pemerintah Pusat Lainnya</b>	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1.3.1	Dana Otonomi Khusus	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1.3.2	Dana Penyesuaian	-	-	-	-	-	-	-
<b>1.2.1.4</b>	<b>Dana Desa</b>	<b>95,043.16</b>	<b>92,670.85</b>	<b>97,304.39</b>	<b>102,169.61</b>	<b>107,278.09</b>	<b>112,641.99</b>	<b>118,274.09</b>
<b>1.2.2</b>	<b>TRANSFER ANTAR DAERAH</b>	<b>57,314.89</b>	<b>40,175.00</b>	<b>54,440.13</b>	<b>57,162.14</b>	<b>60,020.24</b>	<b>63,021.25</b>	<b>66,172.32</b>
<b>1.2.2.1</b>	<b>Pendapatan Bagi Hasil</b>	<b>57,314.89</b>	40,175.00	54,440.13	57,162.14	60,020.24	63,021.25	66,172.32
<b>1.2.2.2</b>	<b>Bantuan Keuangan</b>	-	-	-	-	-	-	-
1.2.2.2.1	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi	-	-	-	-	-	-	-
1.2.2.2.2	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Kab/Kota	-	-	-	-	-	-	-
<b>1.3</b>	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH</b>	<b>4,602.66</b>	<b>32,620.42</b>	<b>32,620.42</b>	<b>32,620.42</b>	<b>32,620.42</b>	<b>32,620.42</b>	<b>32,620.42</b>
<b>1.3.1</b>	<b>Pendapatan Hibah</b>	-	-	-	-	-	-	-
<b>1.3.2</b>	<b>Pendatan Dana Darurat</b>	-	-	-	-	-	-	-



No	Uraian	Realisasi	Proyeksi					
		2023	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1.3.3	Pendapatan Lainnya	4,602.66	32,620.42	32,620.42	32,620.42	32,620.42	32,620.42	32,620.42

Sumber: Bapperida Kabupaten Gunung Mas, 2025 (diolah)

## **b. Proyeksi Belanja Daerah**

Belanja daerah mengacu pada pendekatan yang direncanakan dan diimplementasikan oleh pemerintah daerah untuk mengelola anggaran belanja dengan mengedepankan prinsip efektivitas, efisiensi, transparansi, akuntabilitas serta asas kepatutan dan kewajiban. Untuk itu pemerintah daerah harus memiliki rencana anggaran yang matang yang mencakup identifikasi kebutuhan, prioritas, dan alokasi dana yang tepat untuk setiap program pembangunan. Diharapkan dapat menjamin seluruh urusan penyelenggaraan pemerintahan dan prioritas pembangunan yang dialokasikan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi OPD dapat dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Kebijakan pengalokasian belanja daerah yang pertama adalah menetapkan pada belanja yang wajib di luar Pagu OPD antara lain belanja transfer, belanja tidak terduga dan pengeluaran pembiayaan yang wajib dikeluarkan pada tahun yang bersangkutan. Selisih antara perkiraan dana yang tersedia (penerimaan) dengan jumlah belanja yang wajib dikeluarkan merupakan potensi dana yang dapat dialokasikan untuk pagu indikatif setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Adapun kebijakan perencanaan pagu indikatif OPD diarahkan pada:

1. Belanja daerah diprioritaskan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Gunung Mas yang terdiri dari urusan wajib pelayanan dasar, urusan wajib bukan pelayanan dasar, urusan pilihan dan urusan pemerintahan fungsi penunjang yang ditetapkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
2. Belanja penyelenggaraan urusan wajib digunakan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial dan penanggulangan kemiskinan.
3. Belanja daerah disusun berdasarkan pendekatan prestasi kerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta memperjelas efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran.
4. Mengalokasikan kebutuhan belanja secara terukur dan terarah yaitu:
  - a. Mengalokasikan kebutuhan belanja kegiatan yang bersifat rutin sebagai pelaksanaan tugas pokok fungsi OPD.
  - b. Mengalokasikan kebutuhan belanja kegiatan yang mendukung program pembangunan yang menjadi prioritas dan unggulan OPD dan program/kegiatan prioritas yang telah menjadi komitmen Pemerintah Kabupaten Gunung Mas.
5. Dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, Pemerintah Kabupaten Gunung Mas akan memberikan perhatian yang maksimal terhadap upaya peningkatan investasi di Kabupaten Gunung Mas, termasuk investasi bidang pendidikan, keuangan persewaan dan jasa perusahaan, perdagangan, hotel & restoran.

Belanja daerah Kabupaten Gunung Mas dalam 5 (lima) tahun ke depan diproyeksikan meningkat dengan rata-rata pertumbuhan  $\pm 1,98\%$  per tahun dari Rp1,410 triliun (2025) menjadi Rp1,555 triliun (2030). Target pertumbuhan

Belanja daerah ini relatif lebih rendah dibandingkan rata-rata realisasi belanja daerah dalam 5 (lima) tahun sebelumnya yang tumbuh  $\pm 11,04\%$  per tahun.

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa untuk meningkatkan kualitas belanja publik serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah khususnya dari sisi PAD, maka proporsi belanja modal khususnya yang memberikan pelayanan kepada masyarakat dan investasi akan ditingkatkan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Sedangkan jenis belanja lainnya terus ditekan atau diminimalkan.

Untuk belanja operasi secara agregat juga ditekan/diturunkan bahkan lebih kecil dibandingkan target APBD tahun 2024 namun lebih tinggi dari realisasi tahun 2023. Adapun belanja operasi mulai tahun 2025 akan ditargetkan sedikit menurun  $-0,37\%$  per tahun dari Rp1,027 triliun (2025) menjadi Rp992,722 miliar (2030).

**Gambar II.53**  
**Target Belanja Operasi Kabupaten Gunung Mas Tahun 2025-2030**  
**(dalam juta)**



Sumber: Bappeda Kabupaten Gunung Mas, 2025 (diolah)

Dalam meningkatkan layanan infrastruktur publik serta menarik investasi daerah, porsi belanja modal akan ditingkatkan cukup signifikan dengan rata-rata pertumbuhan  $\pm 11,70\%$  per tahun sebesar Rp276 miliar (2025) menjadi Rp308 miliar (2030). Porsi Belanja Modal terbesar diarahkan untuk meningkatkan kualitas layanan jalanan, irigasi dan jaringan (51%), kemudian belanja bangunan dan Gedung (24%), kemudian belanja peralatan dan mesin (22%), dan sisanya belanja aset tetap lainnya (2%). Arah pembangunan jalan, irigasi dan jaringan difokuskan/diprioritaskan pada wilayah yang berpotensi mendorong pertumbuhan ekonomi dan investasi wilayah. Untuk itu sasaran pembangunan juga harus jelas dan spesifik. Sedangkan belanja peralatan dan mesin diarahkan untuk mendorong inovasi yang dapat mempercepat/mengakselerasi proses produksi yang ada di masyarakat. harapannya dapat meningkatkan produktivitas masyarakat dan produktivitas wilayah secara bersamaan. Untuk belanja bangunan dan gedung diarahkan pada bangunan dan gedung pelayanan publik seperti perkantoran, fasilitas umum, dan sejenisnya.

Secara rinci target tahunan komponen belanja modal dapat dilihat pada grafik berikut:

**Gambar II.54**  
**Rata-rata Proporsi Komponen Belanja Modal Kabupaten Gunung Mas Tahun 2025-2030**



Sumber: Bapperida Kabupaten Gunung Mas, 2025 (diolah)

**Gambar II.55**  
**Target Alokasi Komponen Belanja Modal Kabupaten Gunung Mas Tahun 2025-2030 (dalam juta)**



Sumber: Bapperida Kabupaten Gunung Mas, 2025 (diolah)

Untuk belanja tak terduga tahun 2005-2030 ditargetkan konstan yaitu sebesar Rp1 miliar per tahun. Penggunaan belanja tak terduga ini dialokasikan untuk kejadian mendesak dan darurat seperti penanganan bencana banjir yang butuh waktu respon cepat dan sejenisnya.

Untuk belanja transfer ditargetkan dengan pertumbuhan yang relatif konstan berdasarkan realisasi tahun 2023 yaitu konstan dari tahun 2025-2030 sebesar Rp11,25 miliar. Proyeksi peningkatan belanja transfer disebabkan oleh meningkatnya belanja transfer bantuan keuangan yang diproyeksikan naik dari

**GAMBARAN UMUM DAERAH II-59**

Rp185 miliar (2025) menjadi Rp217 miliar (2030) yang didasarkan pada formula minimal dana transfer ke desa dengan mempertimbangkan target pendapatan transfer yang juga konstan yaitu DAU, DBH Pajak dan Non Pajak/SDA, serta Pendapatan Dana Desa.

Dengan melihat semakin tertekannya ruang fiskal daerah maka kualitas belanja daerah perlu menjadi prinsip utama. Untuk itu diperlukan kebijakan strategis untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas belanja daerah melalui:

- 1) **Pengelolaan Anggaran yang Teliti:** Pemerintah daerah harus membuat anggaran yang realistis dan teliti, dengan memprioritaskan pengeluaran yang penting dan memberikan manfaat maksimal kepada masyarakat. Hal ini melibatkan peninjauan secara menyeluruh terhadap setiap pos anggaran, mengidentifikasi area-area di mana penghematan dapat dicapai, dan memastikan bahwa dana dialokasikan sesuai dengan kebutuhan yang mendesak.
- 2) **Transparansi dan Akuntabilitas:** Meningkatkan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah dapat membantu mencegah penyalahgunaan dan memungkinkan partisipasi publik dalam pengawasan pengeluaran. Pemerintah daerah harus memberikan laporan keuangan yang jelas dan mudah dipahami kepada masyarakat serta memperkuat sistem akuntabilitas untuk memastikan bahwa dana publik digunakan secara bertanggung jawab.
- 3) **Pengadaan Barang dan Jasa yang Efisien:** Proses pengadaan barang dan jasa merupakan area penting untuk mencapai efisiensi belanja daerah. Pemerintah daerah harus menggunakan mekanisme pengadaan yang transparan dan kompetitif, serta melakukan negosiasi harga yang baik dengan pemasok untuk memastikan bahwa dana publik digunakan secara efisien.
- 4) **Penggunaan Teknologi Informasi:** Pemanfaatan teknologi informasi dapat membantu meningkatkan efisiensi dalam berbagai aspek pengelolaan keuangan daerah, termasuk dalam pengelolaan anggaran, pemantauan pengeluaran, dan pelaporan keuangan. Sistem informasi keuangan yang canggih dapat membantu mengurangi birokrasi, meningkatkan akurasi, dan mempercepat proses pengambilan keputusan.
- 5) **Kebijakan Penghematan Biaya:** Pemerintah daerah dapat mengadopsi kebijakan penghematan biaya, seperti pengurangan pengeluaran yang tidak penting, efisiensi dalam penggunaan energi dan sumber daya lainnya, serta restrukturisasi program-program yang kurang efisien atau tidak memberikan manfaat yang signifikan kepada masyarakat.
- 6) **Kolaborasi dan Konsolidasi:** Kolaborasi antar pemerintah daerah atau konsolidasi layanan publik dapat membantu mengurangi biaya administratif dan meningkatkan efisiensi dalam penyediaan layanan. Misalnya, berbagi sumber daya dengan pemerintah daerah lain atau menggabungkan layanan yang serupa untuk mencapai skala ekonomis.
- 7) **Pengembangan Sumber Daya Manusia:** Investasi dalam pengembangan SDM yang berkualitas dapat membantu meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan keuangan daerah. Pelatihan dan pengembangan pegawai pemerintah yang kompeten dalam manajemen keuangan dan pengadaan dapat membantu mengoptimalkan penggunaan dana publik.



- 8) Evaluasi dan Pemantauan Berkelanjutan: Pemerintah daerah harus secara teratur mengevaluasi efektivitas dan efisiensi dari kebijakan dan praktik pengelolaan keuangan yang diterapkan, serta melakukan pemantauan secara berkelanjutan terhadap pengeluaran dan kinerja keuangan daerah untuk mengidentifikasi area-area di mana perbaikan lebih lanjut dapat dilakukan.

Secara keseluruhan proyeksi anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Gunung Mas tahun 2025-2030 dapat dilihat pada tabel berikut:



**Tabel II.49**  
**Proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2025-2029 (dalam juta)**

No	Uraian	Realisasi	Proyeksi					
		2023	2025	2026	2027	2028	2029	2030
<b>2</b>	<b>BELANJA</b>	<b>1,250,220.81</b>	<b>1,351,791.99</b>	<b>1,370,590.11</b>	<b>1,401,364.04</b>	<b>1,433,668.44</b>	<b>1,467,564.87</b>	<b>1,503,118.53</b>
<b>2.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>796,281.12</b>	<b>907,038.73</b>	<b>922,689.33</b>	<b>919,339.83</b>	<b>933,594.95</b>	<b>949,012.21</b>	<b>965,556.55</b>
<b>2.1.1</b>	<b>Belanja Pegawai</b>	<b>412,033.31</b>	569,483.09	575,177.92	580,929.70	586,739.00	592,606.39	598,532.45
<b>2.1.2</b>	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>335,529.74</b>	319,820.97	300,564.55	298,463.44	312,859.40	327,466.89	342,384.14
<b>2.1.5</b>	<b>Belanja Hibah</b>	<b>48,514.56</b>	17,345.68	46,667.76	39,667.60	33,717.46	28,659.84	24,360.86
<b>2.1.6</b>	<b>Belanja Bantuan Sosial</b>	<b>203.50</b>	353.00	279.10	279.10	279.10	279.10	279.10
<b>2.2</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>276,129.60</b>	<b>243,917.29</b>	<b>245,916.45</b>	<b>275,504.72</b>	<b>288,793.29</b>	<b>302,277.13</b>	<b>316,046.90</b>
<b>2.2.1</b>	<b>Belanja Modal (Tanah)</b>	<b>359.72</b>	230.94	232.83	260.85	273.43	286.19	299.23
<b>2.2.2</b>	<b>Belanja Peralatan dan Mesin</b>	41,300.73	44,810.15	35,340.76	39,592.90	41,502.60	43,440.37	45,419.23
<b>2.2.3</b>	<b>Belanja Bangunan dan Gedung</b>	62,575.67	35,538.55	35,829.83	40,140.82	42,076.95	44,041.53	46,047.78
<b>2.2.4</b>	<b>Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan</b>	169,522.43	158,466.93	169,602.40	190,008.68	199,173.47	208,472.94	217,969.60
<b>2.2.5</b>	<b>Belanja Aset Tetap Lainnya</b>	1,666.00	3,560.48	3,589.66	4,021.56	4,215.54	4,412.36	4,613.36
<b>2.2.6</b>	<b>Belanja Aset Lainnya (Belanja Modal BLUD)</b>	705.06	1,310.24	1,320.98	1,479.92	1,551.30	1,623.73	1,697.69
<b>2.3</b>	<b>BELANJA TAK TERDUGA</b>	<b>212.50</b>	<b>11,250.00</b>	<b>11,312.30</b>	<b>11,566.29</b>	<b>11,832.92</b>	<b>12,112.69</b>	<b>12,406.14</b>
<b>2.3.1</b>	<b>Belanja Tak Terduga</b>	212.50	11,250.00	11,312.30	11,566.29	11,832.92	12,112.69	12,406.14
<b>2.4</b>	<b>BELANJA TRANSFER</b>	<b>177,597.59</b>	<b>189,585.96</b>	<b>190,672.03</b>	<b>194,953.20</b>	<b>199,447.28</b>	<b>204,162.84</b>	<b>209,108.95</b>



No	Uraian	Realisasi	Proyeksi					
		2023	2025	2026	2027	2028	2029	2030
<b>2.4.1</b>	<b>Belanja Transfer Bagi Hasil</b>	<b>5,391.90</b>	<b>8,655.82</b>	<b>8,553.28</b>	<b>8,895.41</b>	<b>9,251.23</b>	<b>9,621.28</b>	<b>10,006.13</b>
2.4.1.1	Bagi Hasil Pajak	<b>4,952.49</b>	8,224.31	8,553.28	8,895.41	9,251.23	9,621.28	10,006.13
2.4.1.2	Bagi Hasil Retribusi	<b>439.41</b>	431.51	-	-	-	-	-
2.4.1.3	Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	-	-	-	-	-	-	-
<b>2.4.2</b>	<b>Belanja Transfer Bantuan Keuangan</b>	<b>172,205.69</b>	<b>180,930.14</b>	<b>182,118.75</b>	<b>186,057.78</b>	<b>190,196.05</b>	<b>194,541.56</b>	<b>199,102.82</b>
2.4.2.1	Transfer Bantuan Keuangan Ke Provinsi	<b>485.00</b>	-	-	-	-	-	-
2.4.2.2	Transfer Bantuan Keuangan Ke Pemda Lainnya	-	-	-	-	-	-	-
2.4.2.3	Transfer Bantuan Keuangan Ke Desa	<b>171,720.69</b>	180,930.14	182,118.75	186,057.78	190,196.05	194,541.56	199,102.82
2.4.2.4	Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	-	-	-	-	-	-	-
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	(74,101.31)	(69,102.67)	(51,476.34)	(48,397.14)	(45,394.48)	(42,460.01)	(39,585.58)

Sumber: Bapperida Kabupaten Gunung Mas, 2024 (diolah)

### 2.2.3.2 Proyeksi Pembiayaan

Arah kebijakan pembiayaan daerah pada proyeksi pembiayaan Kabupaten Gunung Mas tahun 2025-2030 adalah dengan menekan dan menurunkan SiLPA sebagai sumber penerimaan Daerah sekaligus menekan seluruh bentuk pengeluaran pembiayaan. Hasil yang ingin dicapai adalah bagaimana menciptakan pembiayaan netto bernilai positif agar dapat menutup defisit anggaran yang ada.

Pada proyeksi penerimaan pembiayaan yang paling berkontribusi adalah besaran SiLPA. Nilai SiLPA kurun waktu 2025-2030 terus ditekan hingga tiap tahun mengalami penurunan -5% per tahun dari Rp69,102 miliar (2025) menjadi Rp40,725 miliar (2030).

Secara keseluruhan terdapat beberapa arah kebijakan pembiayaan terkait kondisi surplus atau defisit anggaran. Kebijakan pembiayaan daerah adalah sebagai berikut:

1. Apabila anggaran pendapatan dan belanja daerah dalam keadaan surplus maka akan dilakukan pemberdayaan kas sebagai investasi jangka pendek dalam bentuk deposito sehingga akan dapat meningkatkan pendapatan asli daerah dari pendapatan bunga deposito
2. Apabila anggaran pendapatan dan belanja daerah dalam keadaan defisit maka akan dilakukan pemanfaatan sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya untuk menutup defisit. Untuk menutup defisit maka akan dilakukan rasionalisasi belanja program dan kegiatan yang diusulkan oleh OPD.

Adapun proyeksi pembiayaan dan keseluruhan APBD Kabupaten Gunung Mas tahun 2025-2030 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:



**Tabel II.50**  
**Proyeksi APBD Kabupaten Gunung Mas Tahun 2025-2030 (dalam juta)**

No	Uraian	Realisasi	Proyeksi					
		2023	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	<b>PENDAPATAN</b>	<b>1,176,119.50</b>	<b>1,282,689.31</b>	<b>1,319,113.77</b>	<b>1,352,966.90</b>	<b>1,388,273.96</b>	<b>1,425,104.85</b>	<b>1,463,532.95</b>
1.1	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	<b>35,992.25</b>	<b>111,700.00</b>	<b>117,285.00</b>	<b>123,149.25</b>	<b>129,306.71</b>	<b>135,772.04</b>	<b>142,560.65</b>
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	11,888.73	82,243.11	86,355.26	90,673.02	95,206.68	99,967.01	104,965.36
1.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah	5,824.28	19,165.08	20,123.33	21,129.50	22,185.98	23,295.27	24,460.04
1.1.3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	81.15	3,136.74	3,293.58	3,458.25	3,631.17	3,812.73	4,003.36
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	18,198.09	7,155.07	7,512.83	7,888.47	8,282.89	8,697.03	9,131.89
1.2	<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	<b>1,135,524.59</b>	<b>1,138,368.90</b>	<b>1,169,208.36</b>	<b>1,197,197.24</b>	<b>1,226,346.83</b>	<b>1,256,712.39</b>	<b>1,288,351.89</b>
1.2.1	<b>TRANSFER PEMERINTAH PUSAT</b>	<b>1,078,209.70</b>	<b>1,098,193.90</b>	<b>1,114,768.23</b>	<b>1,140,035.10</b>	<b>1,166,326.59</b>	<b>1,193,691.14</b>	<b>1,222,179.57</b>
1.2.1.1	<b>Dana Perimbangan</b>	<b>967,710.34</b>	<b>998,162.29</b>	<b>1,006,106.25</b>	<b>1,026,507.91</b>	<b>1,047,690.92</b>	<b>1,069,691.56</b>	<b>1,092,547.89</b>
1.2.1.1.1	Dana Bagi Hasil Pajak dan bukan Pajak/SDA	24,499.23	41,124.99	42,153.11	43,206.94	44,287.11	45,394.29	46,529.15
1.2.1.1.3	Dana Alokasi Umum	529,272.77	525,714.34	530,971.49	536,281.20	541,644.01	547,060.45	552,531.06
1.2.1.1.4	Dana Alokasi Khusus	179,871.10	152,219.33	152,219.33	152,219.33	152,219.33	152,219.33	152,219.33
1.2.1.2	<b>Dana Insentif Daerah</b>	15,456.20	#REF!	11,357.59	11,357.59	11,357.59	11,357.59	11,357.59
1.2.1.3	<b>Transfer Pemerintah Pusat Lainnya</b>	-	-	-	-	-	-	-



No	Uraian	Realisasi	Proyeksi					
		2023	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1.2.1.3.1	Dana Otonomi Khusus	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1.3.2	Dana Penyesuaian	-	-	-	-	-	-	-
<b>1.2.1.4</b>	<b>Dana Desa</b>	<b>95,043.16</b>	<b>92,670.85</b>	<b>97,304.39</b>	<b>102,169.61</b>	<b>107,278.09</b>	<b>112,641.99</b>	<b>118,274.09</b>
<b>1.2.2</b>	<b>TRANSFER ANTAR DAERAH</b>	<b>57,314.89</b>	<b>40,175.00</b>	<b>54,440.13</b>	<b>57,162.14</b>	<b>60,020.24</b>	<b>63,021.25</b>	<b>66,172.32</b>
<b>1.2.2.1</b>	<b>Pendapatan Bagi Hasil</b>	<b>57,314.89</b>	40,175.00	54,440.13	57,162.14	60,020.24	63,021.25	66,172.32
<b>1.2.2.2</b>	<b>Bantuan Keuangan</b>	-	-	-	-	-	-	-
1.2.2.2.1	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi	-	-	-	-	-	-	-
1.2.2.2.2	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Kab/Kota	-	-	-	-	-	-	-
<b>1.3</b>	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH</b>	<b>4,602.66</b>	<b>32,620.42</b>	<b>32,620.42</b>	<b>32,620.42</b>	<b>32,620.42</b>	<b>32,620.42</b>	<b>32,620.42</b>
<b>1.3.1</b>	<b>Pendapatan Hibah</b>	-	-	-	-	-	-	-
<b>1.3.2</b>	<b>Pendapatan Dana Darurat</b>	-	-	-	-	-	-	-
<b>1.3.3</b>	<b>Pendapatan Lainnya</b>	<b>4,602.66</b>	32,620.42	32,620.42	32,620.42	32,620.42	32,620.42	32,620.42
<b>2</b>	<b>BELANJA</b>	<b>1,250,220.81</b>	<b>1,351,791.99</b>	<b>1,370,590.11</b>	<b>1,401,364.04</b>	<b>1,433,668.44</b>	<b>1,467,564.87</b>	<b>1,503,118.53</b>
<b>2.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>796,281.12</b>	<b>907,038.73</b>	<b>922,689.33</b>	<b>919,339.83</b>	<b>933,594.95</b>	<b>949,012.21</b>	<b>965,556.55</b>
<b>2.1.1</b>	<b>Belanja Pegawai</b>	<b>412,033.31</b>	569,483.09	575,177.92	580,929.70	586,739.00	592,606.39	598,532.45
<b>2.1.2</b>	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>335,529.74</b>	319,820.97	300,564.55	298,463.44	312,859.40	327,466.89	342,384.14
<b>2.1.5</b>	<b>Belanja Hibah</b>	<b>48,514.56</b>	17,345.68	46,667.76	39,667.60	33,717.46	28,659.84	24,360.86
<b>2.1.6</b>	<b>Belanja Bantuan Sosial</b>	<b>203.50</b>	353.00	279.10	279.10	279.10	279.10	279.10



No	Uraian	Realisasi	Proyeksi					
		2023	2025	2026	2027	2028	2029	2030
<b>2.2</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>276,129.60</b>	<b>243,917.29</b>	<b>245,916.45</b>	<b>275,504.72</b>	<b>288,793.29</b>	<b>302,277.13</b>	<b>316,046.90</b>
2.2.1	Belanja Modal (Tanah)	359.72	230.94	232.83	260.85	273.43	286.19	299.23
2.2.2	Belanja Peralatan dan Mesin	41,300.73	44,810.15	35,340.76	39,592.90	41,502.60	43,440.37	45,419.23
2.2.3	Belanja Bangunan dan Gedung	62,575.67	35,538.55	35,829.83	40,140.82	42,076.95	44,041.53	46,047.78
2.2.4	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	169,522.43	158,466.93	169,602.40	190,008.68	199,173.47	208,472.94	217,969.60
2.2.5	Belanja Aset Tetap Lainnya	1,666.00	3,560.48	3,589.66	4,021.56	4,215.54	4,412.36	4,613.36
2.2.6	Belanja Aset Lainnya (Belanja Modal BLUD)	705.06	1,310.24	1,320.98	1,479.92	1,551.30	1,623.73	1,697.69
<b>2.3</b>	<b>BELANJA TAK TERDUGA</b>	<b>212.50</b>	<b>11,250.00</b>	<b>11,312.30</b>	<b>11,566.29</b>	<b>11,832.92</b>	<b>12,112.69</b>	<b>12,406.14</b>
2.3.1	Belanja Tak Terduga	212.50	11,250.00	11,312.30	11,566.29	11,832.92	12,112.69	12,406.14
<b>2.4</b>	<b>BELANJA TRANSFER</b>	<b>177,597.59</b>	<b>189,585.96</b>	<b>190,672.03</b>	<b>194,953.20</b>	<b>199,447.28</b>	<b>204,162.84</b>	<b>209,108.95</b>
<b>2.4.1</b>	<b>Belanja Transfer Bagi Hasil</b>	<b>5,391.90</b>	<b>8,655.82</b>	<b>8,553.28</b>	<b>8,895.41</b>	<b>9,251.23</b>	<b>9,621.28</b>	<b>10,006.13</b>
2.4.1.1	Bagi Hasil Pajak	4,952.49	8,224.31	8,553.28	8,895.41	9,251.23	9,621.28	10,006.13
2.4.1.2	Bagi Hasil Retribusi	439.41	431.51	-	-	-	-	-
2.4.1.3	Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	-	-	-	-	-	-	-
<b>2.4.2</b>	<b>Belanja Transfer Bantuan Keuangan</b>	<b>172,205.69</b>	<b>180,930.14</b>	<b>182,118.75</b>	<b>186,057.78</b>	<b>190,196.05</b>	<b>194,541.56</b>	<b>199,102.82</b>
2.4.2.1	Transfer Bantuan Keuangan Ke Provinsi	485.00	-	-	-	-	-	-
2.4.2.2	Transfer Bantuan Keuangan Ke Pemda Lainnya	-	-	-	-	-	-	-
2.4.2.3	Transfer Bantuan Keuangan Ke Desa	171,720.69	180,930.14	182,118.75	186,057.78	190,196.05	194,541.56	199,102.82



No	Uraian	Realisasi	Proyeksi					
		2023	2025	2026	2027	2028	2029	2030
2.4.2.4	Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	-	-	-	-	-	-	-
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	(74,101.31)	(69,102.67)	(51,476.34)	(48,397.14)	(45,394.48)	(42,460.01)	(39,585.58)
<b>3</b>	<b>PEMBIAYAAN</b>	<b>123,579.38</b>	<b>69,102.67</b>	<b>51,476.34</b>	<b>48,397.14</b>	<b>45,394.48</b>	<b>42,460.01</b>	<b>39,585.58</b>
<b>3.1</b>	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>	<b>135,547.38</b>	<b>69,102.67</b>	<b>61,476.34</b>	<b>58,397.14</b>	<b>55,394.48</b>	<b>52,460.01</b>	<b>49,585.58</b>
3.1.1	Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)	135,547.38	69,102.67	61,476.34	58,397.14	55,394.48	52,460.01	49,585.58
3.1.2	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-	-	-	-
3.1.3	Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;	-	-	-	-	-	-	-
3.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah;	-	-	-	-	-	-	-
3.1.5	penerimaan kembali Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-	-	-
3.1.6	Penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	-	-	-	-	-	-	-
<b>3.2</b>	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>	<b>11,968.00</b>	<b>-</b>	<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>
3.2.1	Pembayaran cicilan pokok Utang yang jatuh tempo	-	-	-	-	-	-	-
3.2.2	Penyertaan modal daerah;	11,968.00	-	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
3.2.3	Pembentukan Dana Cadangan;	-	-	-	-	-	-	-
3.2.4	Pemberian Pinjaman Daerah;	-	-	-	-	-	-	-
3.2.5	Pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	-	-	-	-	-	-	-



No	Uraian	Realisasi	Proyeksi					
		2023	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>	123,579.38	69,102.67	51,476.34	48,397.14	45,394.48	42,460.01	39,585.58
	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA) TAHUN BERKENAAN</b>	49,478.07	-	-	-	0.00	-	(0.00)

Sumber: Bapperida Kabupaten Gunung Mas, 2025 (diolah)

### 2.2.3.3 Perhitungan Kerangka Pendanaan

Perhitungan kerangka pendanaan bertujuan untuk memperoleh kapasitas riil yang digunakan untuk mengetahui kemampuan pendanaan prioritas program dan kegiatan pembangunan. Pada dasarnya proyeksi kapasitas riil keuangan daerah diperoleh dari proyeksi penerimaan dikurangi dengan proyeksi belanja periodik dan pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat serta prioritas. Untuk itu, maka perlu diidentifikasi terlebih dahulu belanja periodik dan pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat serta prioritas.

Dalam melakukan proyeksi belanja periodik dan pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat serta prioritas utama, maka yang harus dihitung di awal ialah proyeksi besaran belanja periodik dan pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat serta prioritas utama dari komponen belanja operasi (belanja pegawai, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial), belanja transfer (belanja transfer bagi hasil dan belanja transfer bantuan keuangan), dan belanja tak terduga serta pengeluaran pembiayaan yang ada.

Sebagaimana hasil analisis masing-masing pos belanja daerah dan Pembiayaan yang telah dijelaskan sebelumnya maka diproyeksikan Belanja Periodik Dan Pengeluaran Pembiayaan Yang Wajib Dan Mengikat Serta Prioritas tahun 2025-2030 akan mengalami rata-rata pertumbuhan sebesar  $\pm 1,78\%$  per tahun dari Rp850,530 miliar (2025) menjadi Rp923,231 miliar (2030).

Adapun rincian proyeksi belanja periodik dan pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat serta prioritas Kabupaten Gunung Mas tahun 2025-2030 dapat dilihat pada tabel berikut ini:



Tabel II.51

**Proyeksi Belanja Periodik Dan Pengeluaran Pembiayaan Yang Wajib Dan Mengikat Serta Prioritas Kabupaten Gunung Mas Tahun 2025-2030 (dalam Jutaan)**

No	Uraian	2024	Proyeksi					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
<b>1</b>	<b>Belanja Operasi</b>	<b>561,219.99</b>	<b>587,217.77</b>	<b>622,124.77</b>	<b>620,876.39</b>	<b>620,735.55</b>	<b>621,545.32</b>	<b>623,172.41</b>
1.1	Belanja Pegawai	506,018.20	569,483.09	575,177.92	580,929.70	586,739.00	592,606.39	598,532.45
1.2	Belanja Bunga	-	-	-	-	-	-	-
1.3	Belanja Subsidi	19.45	36.00	-	-	-	-	-
1.4	Belanja Hibah	54,903.25	17,345.68	46,667.76	39,667.60	33,717.46	28,659.84	24,360.86
1.5	Belanja Bantuan Sosial	279.10	353.00	279.10	279.10	279.10	279.10	279.10
<b>2</b>	<b>Belanja Transfer</b>	<b>210,965.90</b>	<b>189,585.96</b>	<b>190,672.03</b>	<b>194,953.20</b>	<b>199,447.28</b>	<b>204,162.84</b>	<b>209,108.95</b>
2.1	Belanja Transfer Bagi Hasil	7,054.64	8,655.82	8,553.28	8,895.41	9,251.23	9,621.28	10,006.13
2.2	Belanja Transfer Bantuan Keuangan	203,911.26	180,930.14	182,118.75	186,057.78	190,196.05	194,541.56	199,102.82
<b>3</b>	<b>Belanja Tak Terduga</b>	<b>196.97</b>	<b>11,250.00</b>	<b>11,312.30</b>	<b>11,566.29</b>	<b>11,832.92</b>	<b>12,112.69</b>	<b>12,406.14</b>
2.3.1	Belanja Tak Terduga 1	196.97	11,250.00	11,312.30	11,566.29	11,832.92	12,112.69	12,406.14
<b>4</b>	<b>Pengeluaran Pembiayaan</b>	<b>11,159.00</b>	<b>-</b>	<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>
4.1.	pembayaran cicilan pokok Utang yang jatuh tempo	-	-	-	-	-	-	-
4.2	penyertaan modal daerah;	11,159.00	-	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
4.3.	pembentukan Dana Cadangan;	-	-	-	-	-	-	-
4.4	Pemberian Pinjaman Daerah;	-	-	-	-	-	-	-
4.5.	pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Total Belanja Periodik Dan Pengeluaran Pembiayaan Yang Wajib Dan Mengikat Serta Prioritas</b>	<b>783,541.86</b>	<b>788,053.73</b>	<b>834,109.10</b>	<b>837,395.88</b>	<b>842,015.75</b>	<b>847,820.85</b>	<b>854,687.49</b>



*Sumber: Bapperida Kabupaten Gunung Mas, 2025 (diolah)*

Analisis kapasitas riil keuangan daerah diperlukan untuk mengetahui kemampuan pendanaan prioritas pembangunan yang dihitung dengan mengurangi total penerimaan daerah dengan pengeluaran pembiayaan dan belanja tidak langsung. Namun perlu dipahami bahwa dengan adanya PP 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta Permendagri 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Nomenklatur yang kemudian dimutakhirkan melalui Kepmendagri 050-3708 tahun 2020 tentang Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, maka kapasitas riil perlu dimaknai berbeda. Sebelum beberapa aturan tersebut, kapasitas riil dapat dimaknai secara sederhana sebagai alokasi anggaran riil untuk belanja langsung program/kegiatan pembangunan. Namun dengan adanya PP 12 tahun 2019, Permendagri 90 tahun 2019 dan Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023, sebagian besar belanja periodik yang wajib dan mengikat serta prioritas seperti belanja pegawai (gaji, tunjangan, dll), bansos dan belanja hibah masuk dalam komponen belanja program/kegiatan/sub kegiatan. Berdasarkan hal tersebut maka kapasitas riil perlu didefinisikan dengan dua metode berbeda Untuk itu agar tidak bias maka dalam dokumen ini akan dirumuskan kapasitas riil keuangan daerah dan kapasitas riil pagu belanja program/kegiatan/sub kegiatan OPD.

Hasil analisis kapasitas riil keuangan daerah menunjukkan tren menurun meskipun tidak terlalu signifikan. Kemampuan belanja pembangunan dan/atau belanja publik untuk masyarakat di tahun 2025 sebesar Rp850,530 miliar, Rp888,913 miliar (2026), Rp895,455 miliar (2027), Rp903,445 miliar (2028), Rp912,742 miliar (2029) dan Rp923,231 miliar (2030). Dengan kemampuan belanja pembangunan/publik yang terbatas maka efisiensi dan efektivitas belanja pembangunan/publik harus dilandasi prinsip efektifitas, efisiensi, prioritas dan kinerja dampak yang dihasilkan.

Sedangkan hasil analisis kapasitas riil pagu belanja OPD menunjukkan tren yang menurun juga tiap tahun di mana perkembangan kemampuan pagu belanja OPD untuk tahun 2025 hingga tahun 2030 secara berturut-turut sebesar Rp1,199 triliun, Rp1,210 triliun, Rp1,235 triliun, Rp1,261 triliun, Rp1,288 triliun, dan Rp1,316 triliun.

Dari proyeksi kapasitas riil pagu OPD tersebut kemudian perlu didistribusikan berdasarkan prioritas pemanfaatannya antara lain:

- a. Prioritas I. digunakan untuk alokasi pembangunan untuk membiayai belanja langsung wajib dan mengikat serta pemenuhan penerapan pelayanan dasar.
- b. Prioritas II. digunakan untuk dialokasikan untuk membiayai belanja pemenuhan visi dan misi Kepala Daerah.
- c. Prioritas III. digunakan untuk membiayai belanja penyelenggaraan urusan pemerintahan lainnya

Pembagian pendanaan untuk program prioritas di atas secara lebih lanjut dapat dilihat dalam tabel berikut:



**Tabel II.52**  
**Proyeksi Kapasitas Riil Keuangan Daerah Kabupaten Gunung Mas**  
**Tahun 2025-2030 (dalam Jutaan)**

No	Uraian	Proyeksi					
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
1.	Pendapatan	1,282,689.3 1	1,319,113.7 7	1,352,966.9 0	1,388,273.9 6	1,425,104.8 5	1,463,532.9 5
2.	Penerimaan Pembiayaan	69,102.67	61,476.34	58,397.14	55,394.48	52,460.01	49,585.58
	<b>TOTAL PENERIMAAN</b>						
	<b>(Dikurangi):</b>						
3.	Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan yang Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama	788,053.73	834,109.10	837,395.88	842,015.75	847,820.85	854,687.49
	Kapasitas riil kemampuan keuangan	563,738.26	546,481.01	573,968.16	601,652.69	629,744.02	658,431.04

Sumber: Bapperida Kabupaten Gunung Mas, 2025 (diolah)

**Tabel II.53**  
**Proyeksi Kapasitas Riil Pagu OPD Kabupaten Gunung Mas Tahun 2025-2030 (dalam Jutaan)**

No.	Uraian	Proyeksi					
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
1.	Pendapatan	1.336.312,00	1.378.415,35	1.412.763,10	1.448.569,73	1.485.905,18	1.524.842,89
2.	Penerimaan Pembiayaan	69.102,67	50.000,00	47.500,00	45.125,00	42.868,75	40.725,31
	<b>TOTAL PENERIMAAN</b>	1.405.414,68	1.428.415,35	1.460.263,10	1.493.694,73	1.528.773,93	1.565.568,20
	<b>(Dikurangi):</b>						
3	Belanja Transfer	194.483,20	196.192,57	203.489,55	211.122,11	219.106,58	227.460,13
4	Belanja Tak Terduga	11.250,00	11.250,00	11.250,00	11.250,00	11.250,00	11.250,00



5	Pengeluaran Pembiayaan	-	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	<b>Kapasitas Riil Pagu OPD</b>	<b>1.199.681,48</b>	<b>1.210.972,77</b>	<b>1.235.523,55</b>	<b>1.261.322,62</b>	<b>1.288.417,35</b>	<b>1.316.858,08</b>

Sumber: Bapperida Kabupaten Gunung Mas, 2025 (diolah)

**Tabel II.54**

**Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kabupaten Gunung Mas Tahun 2025-2030**

No	Uraian	Proyeksi Kapasitas Pagu OPD					
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Kapasitas riil kemampuan keuangan OPD	1,150,956.0 <sub>3</sub>	1,168,605.78	1,194,844.5 <sub>5</sub>	1,222,388.2 <sub>4</sub>	1,251,289.3 <sub>4</sub>	1,281,603.4 <sub>5</sub>
2	Prioritas I	640,161.74	649,978.54	664,572.54	679,892.34	695,967.13	712,827.84
3	Prioritas II	345,286.81	350,581.73	358,453.36	366,716.47	375,386.80	384,481.03
4	Prioritas III	165,507.48	168,045.51	171,818.65	175,779.43	179,935.41	184,294.58
	<b>JUMLAH</b>	1,150,956.0 <sub>3</sub>	1,168,605.78	1,194,844.5 <sub>5</sub>	1,222,388.2 <sub>4</sub>	1,251,289.3 <sub>4</sub>	1,281,603.4 <sub>5</sub>

Sumber: Bapperida Kabupaten Gunung Mas, 2025 (diolah)

## 2.3 Permasalahan Dan Isu Strategis

Permasalahan dan isu strategis memegang peranan krusial dalam menentukan arah pembangunan suatu daerah. Identifikasi yang tepat terhadap tantangan yang dihadapi, baik yang bersifat internal maupun eksternal, menjadi landasan utama dalam merumuskan kebijakan dan program yang efektif. Memahami hal tersebut dalam pembangunan Kabupaten Gunung Mas, perlu adanya pemahaman mendalam terhadap permasalahan pembangunan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Hal ini menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa pembangunan yang dilaksanakan dapat memberikan manfaat yang optimal bagi seluruh lapisan masyarakat. Dalam penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gunung Mas Tahun 2025-2029, permasalahan dan isu strategis tersebut harus diterjemahkan ke dalam tujuan, sasaran, dan strategi pembangunan yang jelas dan terukur. RPJMD sebagai dokumen perencanaan pembangunan daerah selama 5 (lima) tahun ke depan, harus mampu menjawab tantangan dan memanfaatkan peluang yang ada, sehingga dapat mewujudkan visi dan misi pembangunan Kabupaten Gunung Mas. Proses penyusunan RPJMD yang partisipatif dan inklusif, dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan, menjadi kunci untuk memastikan bahwa dokumen tersebut benar-benar mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

Memahami dinamika permasalahan dan gejala pembangunan dengan memperhatikan isu yang berpotensi akan dihadapi oleh Kabupaten Gunung Mas, maka perlu mengidentifikasi isu strategis pembangunan. Dalam mengidentifikasi isu strategis perlu menelaah isu internasional/global, nasional, regional dan isu dalam lingkup Kabupaten Gunung Mas, serta masukan dari masyarakat sebagai satu kesatuan utuh dalam penyelenggaraan pembangunan. Dengan memperhatikan dari seluruh aspek, maka diharapkan pembangunan bisa lebih responsif dan adaptif. Dengan ini diharapkan permasalahan dan isu strategis mampu menjadi pijakan yang tepat dalam merumuskan kebijakan dan menentukan tujuan dan sasaran pembangunan.

### 2.3.1 Permasalahan Pembangunan Daerah

Dengan berbagai analisis yang telah dijabarkan pada bab gambaran umum daerah maka dalam perumusan permasalahan pembangunan daerah, dapat identifikasi faktor-faktor yang memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keberhasilan atau kegagalan kinerja pembangunan daerah. Setelah menelaah kajian data dan informasi pada gambaran umum kondisi daerah serta menelaah hasil analisis permasalahan pembangunan daerah pada masing-masing bidang urusan sesuai dengan kondisi objektif daerah, maka diidentifikasi permasalahan pokok yang dijabarkan sebagai berikut:

#### 1. **Belum meratanya pembangunan dan pemenuhan infrastruktur dan aksesibilitas antar wilayah**

Pembangunan infrastruktur di Kabupaten Gunung Mas masih belum merata, sehingga mempengaruhi kualitas hidup masyarakat di beberapa wilayah. Beberapa daerah di pusat kota dan wilayah yang lebih mudah diakses cenderung mendapatkan perhatian lebih dalam hal pembangunan infrastruktur, sementara daerah-daerah di pedalaman dan pegunungan

seringkali terabaikan. Hal ini berdampak pada ketimpangan dalam akses terhadap fasilitas dasar seperti pembangunan infrastruktur jalan, jembatan akses terhadap pelayanan Pendidikan dan kesehatan serta perhubungan. Berdasarkan data tahun 2024, kondisi panjang jalan di Kabupaten Gunung Mas didominasi oleh jalan yang berada dalam kondisi rusak berat, yaitu sebesar 65% dari total panjang jalan. Sementara itu, jalan yang berada dalam kondisi baik hanya mencakup 33%, dan sisanya sebanyak 2% berada dalam kondisi sedang. Persentase ini menunjukkan bahwa sebagian besar infrastruktur jalan di daerah ini masih memerlukan perhatian serius dan peningkatan kualitas, khususnya untuk memperbaiki jalan yang rusak berat demi mendukung konektivitas dan mobilitas masyarakat secara optimal.

Kemudian berdasarkan data Badan Pusat Statistik pada tahun 2024, panjang jalan di Kabupaten Gunung Mas didominasi oleh jalan dengan permukaan tanah, yaitu sepanjang 331.560 kilometer, yang menunjukkan bahwa sebagian besar infrastruktur jalan masih berupa jalan tidak beraspal. Jalan dengan permukaan aspal menempati urutan kedua dengan panjang 283.339 kilometer, mencerminkan adanya pembangunan jalan permanen yang cukup signifikan. Sementara itu, jalan berpermukaan kerikil memiliki panjang 119.078 kilometer, dan jenis permukaan lainnya hanya mencakup 5.015 kilometer. Data ini menggambarkan bahwa meskipun ada kemajuan dalam pembangunan jalan beraspal, masih banyak jalan yang perlu ditingkatkan kualitas permukaannya untuk mendukung aksesibilitas dan mobilitas masyarakat secara berkelanjutan.

Selain itu, aksesibilitas antar wilayah kabupaten juga menjadi salah satu masalah utama yang perlu segera diselesaikan. Beberapa ruas jalan yang menghubungkan antar desa atau kecamatan masih dalam kondisi yang kurang memadai, bahkan sebagian di antaranya terputus saat musim hujan. Hal ini menghambat mobilitas penduduk dan distribusi barang serta jasa, yang berkontribusi pada ketimpangan ekonomi di wilayah-wilayah yang lebih sulit dijangkau. Dalam jangka panjang, masalah aksesibilitas ini dapat memperburuk kesenjangan sosial dan ekonomi antar wilayah di Kabupaten Gunung Mas. Untuk itu, diperlukan upaya yang lebih terfokus dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan infrastruktur secara lebih adil dan merata. Pemerintah daerah perlu memperhatikan kebutuhan infrastruktur di daerah-daerah yang kurang berkembang, dengan mengutamakan pembangunan jalan, jembatan, dan fasilitas umum yang dapat menghubungkan wilayah yang terisolasi. Dengan peningkatan infrastruktur dan aksesibilitas yang lebih baik, diharapkan dapat tercipta pemerataan pembangunan dan peningkatan kualitas hidup yang lebih adil bagi seluruh masyarakat Kabupaten Gunung Mas.

## **2. Belum optimalnya pengelolaan dan pelestarian lingkungan hidup**

Pengelolaan dan pelestarian lingkungan hidup di Kabupaten Gunung Mas hingga saat ini masih belum optimal. Meskipun memiliki potensi alam yang melimpah, baik dalam sektor kehutanan, pertanian, maupun pariwisata, pengelolaannya sering kali tidak mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap kelestarian alam. Aktivitas eksploitasi sumber daya alam yang tidak terkendali, seperti pembalakan liar dan konversi lahan, turut memperburuk kualitas lingkungan. Hal ini menyebabkan kerusakan ekosistem,

berkurangnya daya dukung alam, dan berisiko pada bencana alam seperti longsor dan banjir. Di sisi lain, pengelolaan sampah dan limbah juga menjadi masalah serius di Kabupaten Gunung Mas. Masyarakat yang masih belum sepenuhnya sadar akan pentingnya pengelolaan sampah yang ramah lingkungan, ditambah dengan keterbatasan sarana dan prasarana pengelolaan limbah yang memadai, memperburuk kondisi kebersihan dan kesehatan lingkungan. Pengelolaan sampah yang tidak terstruktur ini mencemari sungai, tanah, dan udara, serta merusak kualitas hidup masyarakat sekitar. Tanpa adanya sistem yang baik dalam pengelolaan sampah, masalah lingkungan ini akan terus berkembang dan semakin sulit untuk diatasi. Hal ini terlihat pada Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten Gunung Mas pada tahun 2024 (69,33) yang mengalami penurunan jika dibandingkan capaian tahun 2023 sebesar 70,58. Melihat lebih dalam penurunan IKLH ini disebabkan adanya penurunan pada indeks kualitas air di tahun 2024 yang menurun menjadi 42,86 jika dibandingkan capaian tahun 2023 (50) dan indeks kualitas udara di tahun 2024 menjadi 82,82 padahal pada tahun 2023 mencapai 89,64.

Dengan permasalahan ini, ke depannya perlu adanya upaya kolaboratif antara pemerintah daerah, masyarakat, dan sektor swasta dalam mengimplementasikan kebijakan pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan. Program edukasi lingkungan yang lebih intensif, peningkatan fasilitas pengelolaan sampah, serta penegakan hukum terhadap perusakan lingkungan adalah langkah-langkah yang sangat penting. Dengan pengelolaan yang lebih baik dan kesadaran yang tinggi akan pentingnya pelestarian alam, Kabupaten Gunung Mas bisa mengoptimalkan potensi sumber daya alamnya tanpa merusak lingkungan untuk generasi yang akan datang.

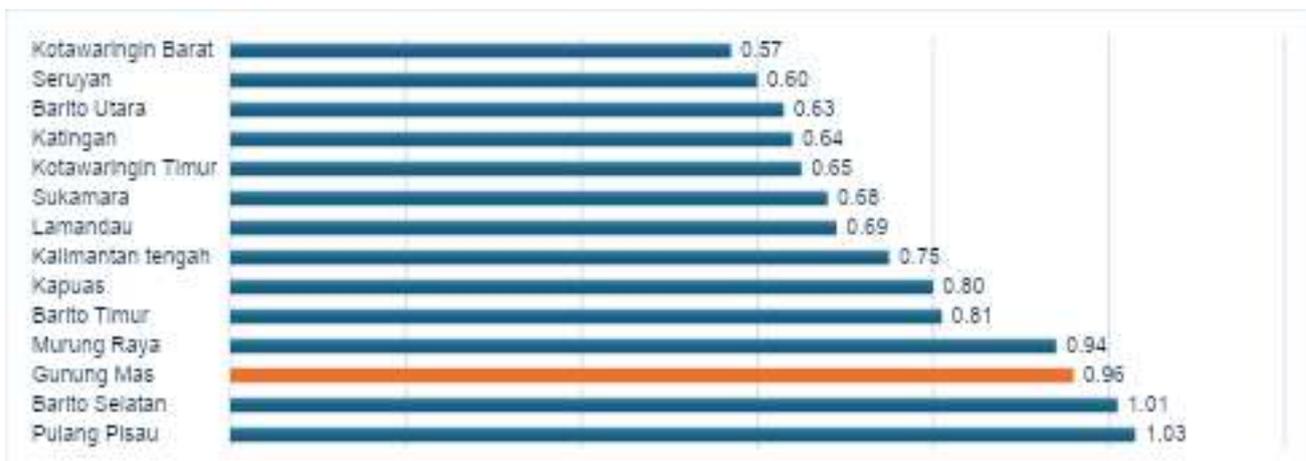
### **3. Belum optimalnya pengembangan kualitas SDM**

Pengembangan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) di Kabupaten Gunung Mas masih menghadapi berbagai kendala yang menyebabkan hasilnya belum optimal. Meskipun sejumlah program pendidikan dan pelatihan telah dilaksanakan, masih banyak warga yang tidak memiliki keterampilan yang memadai untuk bersaing di dunia kerja yang semakin kompetitif. Hal ini disebabkan oleh terbatasnya fasilitas pendidikan yang berkualitas, kurangnya akses ke pelatihan keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja, serta rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam program-program tersebut. Akibatnya, banyak generasi muda yang terhambat untuk mengembangkan potensi diri secara maksimal. Pada tahun 2024, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Gunung Mas mencapai angka 73,88, menempatkannya di posisi menengah dibandingkan dengan kabupaten/kota lain di Provinsi Kalimantan Tengah. Nilai IPM ini menunjukkan bahwa kualitas pembangunan manusia di Gunung Mas cukup baik, mencakup aspek pendidikan, kesehatan, dan standar hidup. Meskipun masih berada di bawah beberapa kabupaten seperti Kotawaringin Barat (75,35) dan Barito Timur (74,81), IPM Kabupaten se-Provinsi Kalimantan Tengah ditahun 2024 dapat dilihat pada gambar sebagai berikut:

**Gambar II.35****IPM Kabupaten se-Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024**

Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025

Pada tahun 2024, laju pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Gunung Mas tercatat sebesar 0,96%, jika dibandingkan dengan rata-rata provinsi maupun kabupaten lain, Kabupaten Gunung Mas menempati posisi ketiga tertinggi setelah Kabupaten Barito Selatan (1,01%) dan Kabupaten Pulang Pisau (1,03%). Hal ini mengindikasikan masih perlu adanya peningkatan pertumbuhan IPM Kabupaten Gunung Mas dengan peningkatan pada bidang pendidikan, kesehatan dan standar hidup layak masyarakat Kabupaten Gunung Mas.

**Gambar II.36****Pertumbuhan IPM Kabupaten se-Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024**

Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025

Berdasarkan data capaian salah satu indikator komposit IPM yaitu rata-rata lama sekolah pada tahun 2024 Kabupaten Gunung Mas mencapai 9,37 tahun, yang menunjukkan angka ini mengindikasikan bahwa secara rata-rata, penduduk Kabupaten Gunung Mas telah mengenyam pendidikan selama 9,37 tahun, setara dengan kelas 3 SMP semester 1. Hal ini mengindikasikan kualitas tingkat pendidikan masyarakat Kabupaten Gunung Mas relatif masih rendah.

Kemudian pada bidang kesehatan, pada tahun 2024 usia harapan hidup di Kabupaten Gunung Mas tercatat sebesar 73,58 tahun, capaian ini menempatkan Kabupaten Gunung Mas pada posisi menengah di antara kabupaten lainnya di Provinsi Kalimantan Tengah, masih di bawah rata-rata provinsi yang berada di angka 73,73 tahun dan masih di bawah capaian Kabupaten Lamandau, seperti yang terlihat pada gambar sebagai berikut:

**Gambar II.37**

**Usia harapan Hidup Kabupaten se-Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024**



Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025

Belum optimalnya kualitas kesehatan masyarakat Kabupaten Gunung Mas dapat dilihat juga dari angka gizi buruk yang mengalami peningkatan di tahun 2023 dan tahun 2024. Hal ini menunjukkan bahwa penanganan gizi buruk di Kabupaten Gunung mas masih belum optimal, yang pastinya hal ini mempengaruhi kualitas dan daya saing Masyarakat terutama terkait dengan kesehatan. Kemudian penilaian indeks daya saing daerah Kabupaten Gunung Mas pada pilar kesehatan di tahun 2024 (3,83) juga mengalami penurunan jika dibandingkan dengan capaian 2023 (3,89). Selanjutnya kondisi kesehatan yang belum optimal juga terlihat pada angka kematian umum di tahun 2024 mengalami peningkatan hingga mencapai 22,94 jika dibandingkan tahun 2023 yang mencapai 21,66. Kemudian pada angka kematian murni juga mengalami peningkatan ditahun 2024 yang mencapai 7,82 jika dibandingkan capaian tahun 2023 yang mencapai 7,09. Selain itu capaian SPM pada bidang kesehatan juga beberapa belum mencapai 100%.

Menindaklanjuti permasalahan pembangunan SDM di bidang pendidikan dan kesehatan di Kabupaten Gunung Mas, diperlukan serangkaian kebijakan dan program yang terintegrasi dan berkelanjutan. Di sektor pendidikan, fokus utama adalah pemerataan kualitas melalui peningkatan kompetensi tenaga pendidik dan ketersediaan fasilitas belajar yang memadai di seluruh wilayah, termasuk daerah terpencil. Program afirmasi untuk menarik dan mempertahankan guru berkualitas di daerah sulit, pelatihan berkelanjutan yang relevan dengan perkembangan zaman, serta pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran dapat menjadi prioritas. Selain itu, perluasan akses pendidikan berkualitas pada jenjang menengah dan kejuruan yang sesuai

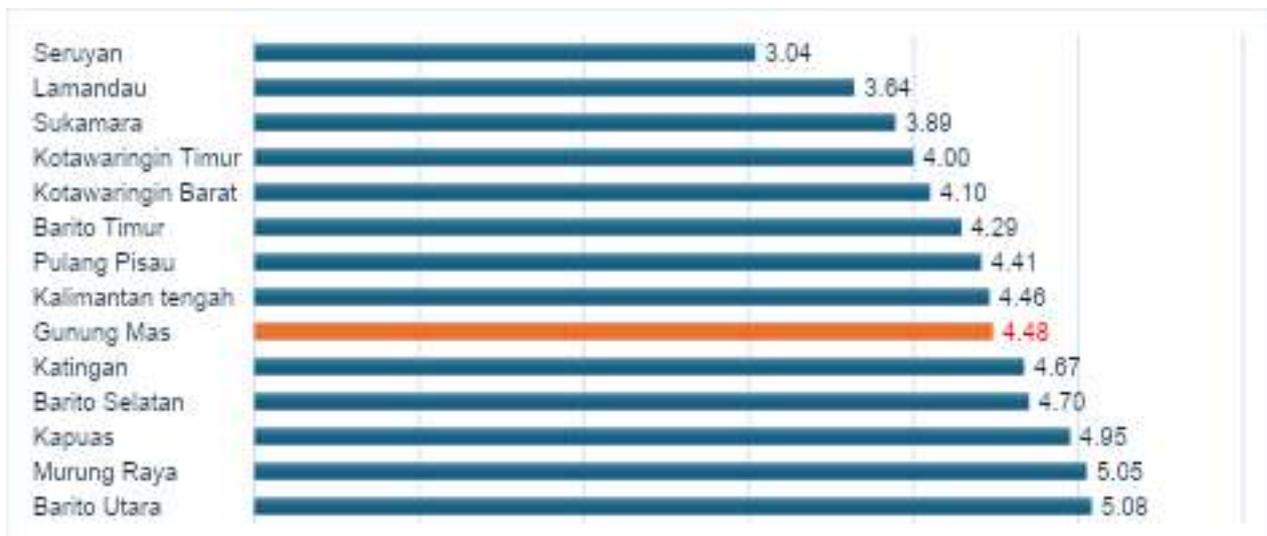
dengan potensi daerah juga krusial. Di sektor kesehatan, upaya tindak lanjut meliputi peningkatan akses terhadap layanan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau, terutama di wilayah yang sulit dijangkau, melalui penguatan fasilitas kesehatan primer dan penambahan tenaga kesehatan yang kompeten dan merata distribusinya. Program pencegahan penyakit dan promosi kesehatan yang efektif, peningkatan gizi masyarakat, serta pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan kesehatan juga menjadi bagian penting dari solusi. Sinergi lintas sektor, termasuk dengan pihak swasta dan organisasi masyarakat, serta alokasi anggaran yang memadai dan tepat sasaran menjadi kunci keberhasilan tindak lanjut permasalahan pembangunan SDM di Kabupaten Gunung Mas.

#### 4. Belum optimalnya pengembangan perekonomian pada sektor unggulan daerah

Pengembangan perekonomian di sektor unggulan Kabupaten Gunung Mas masih belum berjalan optimal meskipun daerah ini memiliki potensi alam yang cukup besar. Sektor-sektor seperti pertanian, perkebunan, dan pariwisata seharusnya dapat menjadi penggerak utama ekonomi lokal, namun belum dikelola secara maksimal.

**Gambar II.38**

#### **Laju pertumbuhan PDRB Kabupaten se-Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024**

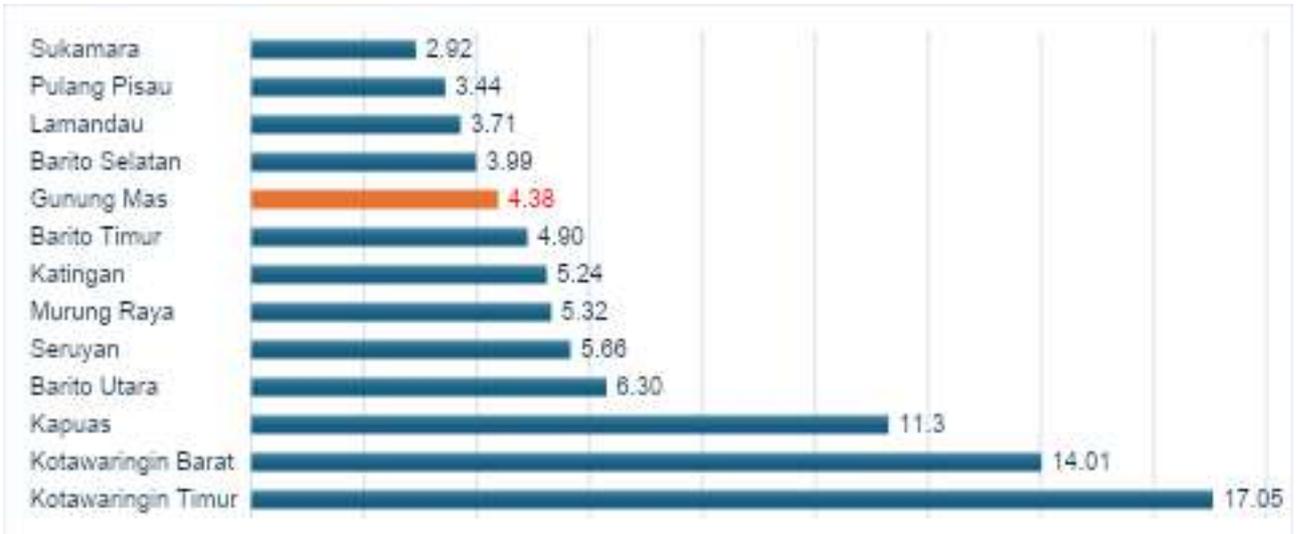


Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025

Pada tahun 2024, laju pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Gunung Mas mencapai 4,48%, pertumbuhan ekonomi ini menempatkan Kabupaten Gunung Mas pada posisi menengah jika dibandingkan dengan kabupaten di provinsi Kalimantan Tengah. Capaian ini mencerminkan adanya pergerakan ekonomi yang cukup stabil, yang kemungkinan didorong oleh sektor-sektor unggulan daerah seperti pertanian, kehutanan, atau pertambangan. Meskipun belum termasuk daerah dengan pertumbuhan tertinggi seperti Kabupaten Barito Utara dan Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Gunung Mas menunjukkan potensi positif untuk terus berkembang melalui peningkatan investasi, produktivitas, dan daya saing ekonomi daerah.

Gambar II.39

## Kontribusi PDRB Kabupaten se-Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024



Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025

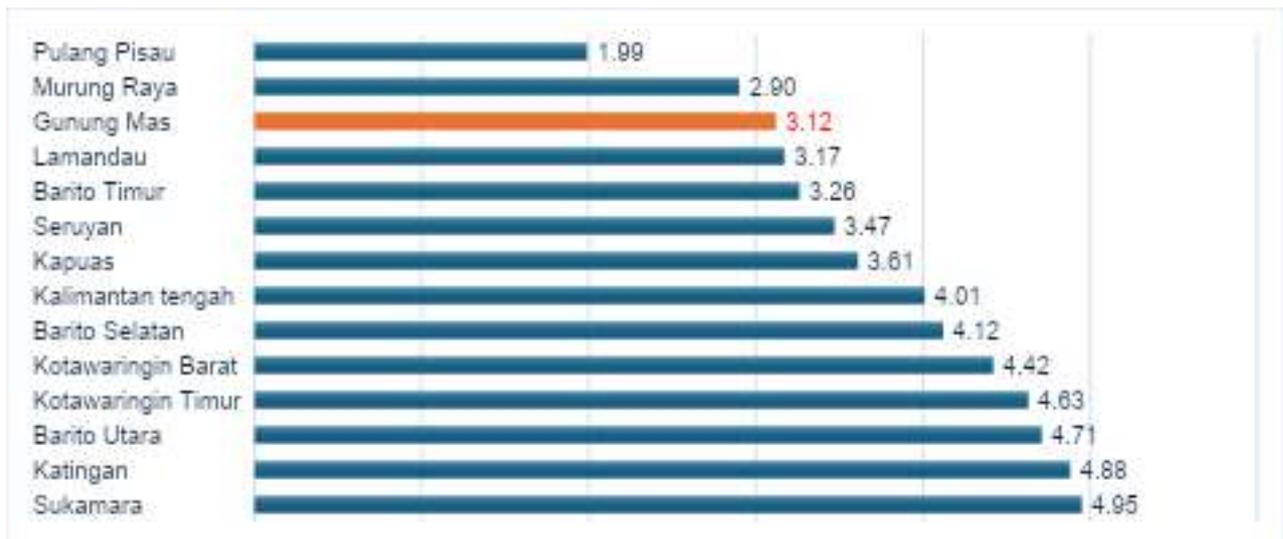
Pada tahun 2024, kontribusi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Gunung Mas terhadap total PDRB Provinsi Kalimantan Tengah tercatat sebesar 4,38%. Angka ini menempatkan Kabupaten Gunung Mas di posisi menengah ke bawah dibandingkan kabupaten lain di Provinsi Kalimantan Tengah. Meskipun belum menjadi kontributor utama seperti Kabupaten Kotawaringin Timur (17,05%) atau Kabupaten Kotawaringin Barat (14,01%), kontribusi Kabupaten Gunung Mas tetap signifikan dan menunjukkan adanya peran aktif dalam mendorong perekonomian daerah. Hal ini mencerminkan potensi ekonomi yang dimiliki, terutama dari sektor-sektor sumber daya alam dan kegiatan ekonomi lokal yang terus berkembang. Dengan penguatan sektor strategis dan peningkatan investasi, kontribusi PDRB Kabupaten Gunung Mas ke depannya masih berpeluang untuk ditingkatkan.

Potensi hasil bumi seperti kopi, karet, dan rempah-rempah yang bisa menjadi komoditas unggulan daerah belum diolah secara efisien, sehingga belum memberikan dampak ekonomi yang signifikan. Begitu juga dengan sektor pariwisata yang memiliki berbagai destinasi alam menarik, namun belum terkelola dengan baik sehingga tidak bisa menarik banyak wisatawan yang berdampak pada peningkatan pendapatan daerah. Selain itu, kurangnya akses terhadap teknologi dan pelatihan bagi para pelaku usaha kecil dan menengah (UKM) di Kabupaten Gunung Mas juga menjadi penghambat dalam mengembangkan sektor-sektor unggulan. Banyak petani dan pelaku usaha yang masih mengandalkan cara-cara tradisional dalam menjalankan usaha, yang menyebabkan hasil yang diperoleh tidak maksimal. Ditambah lagi, terbatasnya jaringan distribusi dan pemasaran yang menghubungkan produk-produk unggulan dengan pasar yang lebih luas, membuat produk-produk lokal sulit bersaing dengan produk dari daerah lain. Hal ini menyebabkan potensi ekonomi daerah belum bisa memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten secara keseluruhan.

Untuk mendorong pengembangan perekonomian sektor unggulan, diperlukan upaya yang lebih terencana dan terintegrasi antara pemerintah,

sektor swasta, dan masyarakat. Program-program peningkatan kapasitas bagi para pelaku usaha, seperti pelatihan manajemen, teknologi pertanian, dan pengembangan produk olahan, sangat penting untuk meningkatkan daya saing produk lokal. Pemerintah juga perlu membangun infrastruktur yang mendukung distribusi hasil produk unggulan, serta mempromosikan potensi pariwisata dengan lebih agresif untuk menarik investor dan wisatawan. Dengan langkah-langkah tersebut, sektor unggulan Kabupaten Gunung Mas bisa berkembang lebih optimal, memberikan peluang ekonomi bagi masyarakat, dan turut berkontribusi pada kesejahteraan daerah.

**Gambar II.40**  
**Tingkat pengangguran Terbuka Kabupaten se-Provinsi Kalimantan**  
**Tengah Tahun 2024**



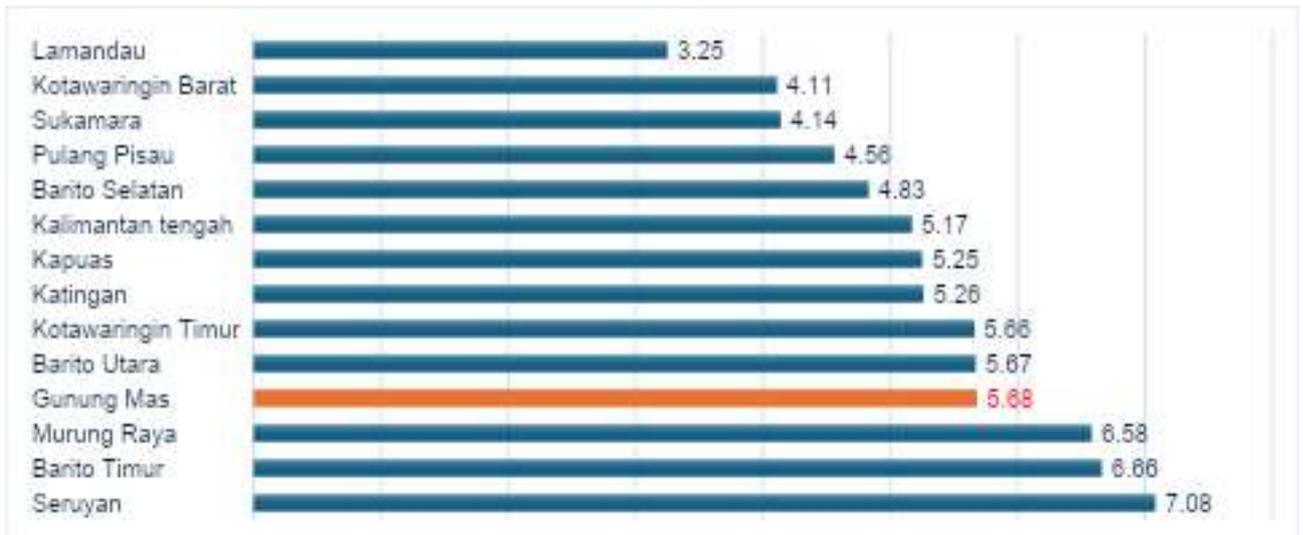
Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025

Pada tahun 2024, tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Gunung Mas tercatat sebesar 3,12%, menempatkan daerah ini dalam kategori menengah jika dibandingkan dengan kabupaten sekitar di Provinsi Kalimantan Tengah. Angka ini menunjukkan bahwa masih terdapat tantangan dalam penyediaan lapangan kerja. Hal ini mencerminkan perlunya upaya yang berkelanjutan dari pemerintah daerah dalam mendorong penciptaan lapangan kerja baru, pelatihan keterampilan tenaga kerja, serta peningkatan daya saing ekonomi lokal guna menekan angka pengangguran.

## **5. Belum optimalnya kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan berkeadilan**

Kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Gunung Mas masih jauh dari optimal, meskipun berbagai program pembangunan telah dilaksanakan. ketimpangan sosial dan ekonomi antara daerah perkotaan dan pedesaan sangat terlihat, di mana sebagian besar penduduk di daerah terpencil masih hidup dalam kondisi kurang memadai. Keterbatasan akses terhadap layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan perumahan layak menjadikan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat belum sepenuhnya berhasil. Selain itu, rendahnya pendapatan masyarakat akibat terbatasnya lapangan pekerjaan yang memadai turut memperburuk keadaan ini.

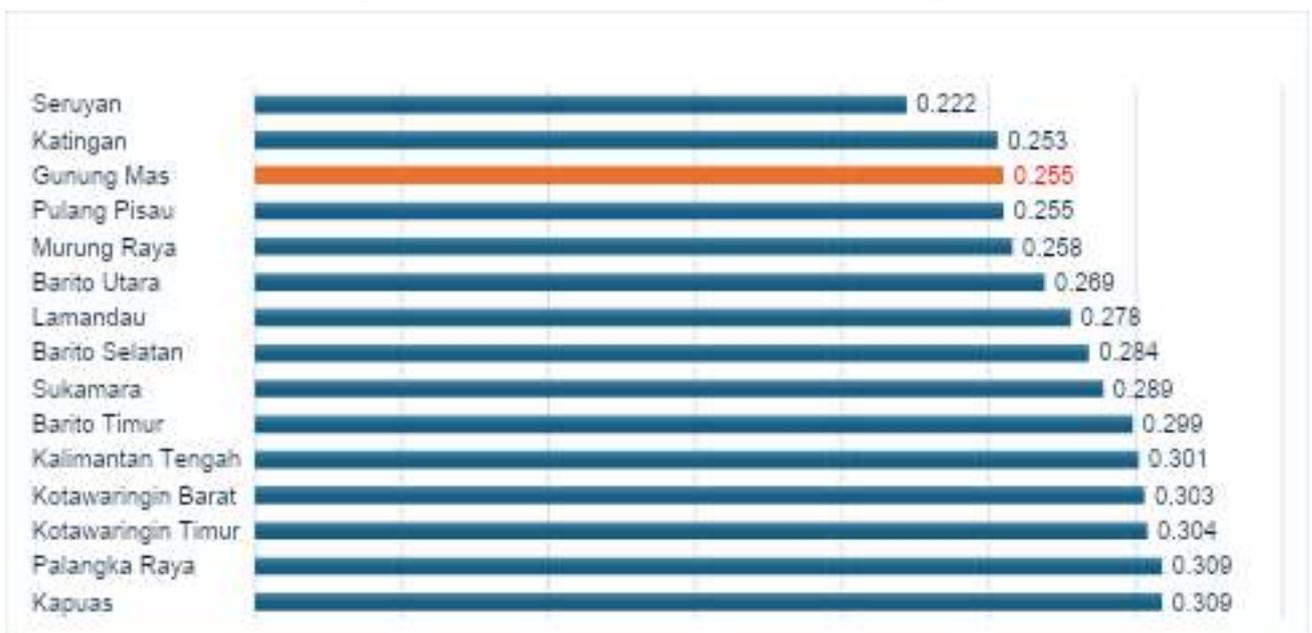
Gambar II.41

**Tingkat Kemiskinan Kabupaten se-Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024**

Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025

Pada tahun 2024, persentase penduduk miskin di Kabupaten Gunung Mas tercatat sebesar 5,68%, menempatkannya di posisi menengah ke atas dibandingkan dengan kabupaten sekitar di Provinsi Kalimantan Tengah. Angka ini sedikit lebih tinggi dibandingkan rata-rata provinsi yang berada di kisaran 5,17%, dan juga lebih tinggi dibanding beberapa daerah seperti Kabupaten Lamandau (3,25%) dan Kabupaten Kotawaringin Barat (4,11%). Hal ini mencerminkan bahwa meskipun telah terjadi berbagai upaya penanggulangan kemiskinan, Kabupaten Gunung Mas masih menghadapi tantangan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata. Diperlukan kebijakan yang lebih terarah, seperti penguatan program bantuan sosial, pemberdayaan ekonomi masyarakat, dan peningkatan akses terhadap layanan dasar untuk menurunkan angka kemiskinan di tahun-tahun mendatang.

Gambar II.42

**Indeks Gini Kabupaten se-Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024**

Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025

Pada tahun 2024, nilai Indeks Gini di Kabupaten Gunung Mas tercatat sebesar 0,255, menunjukkan tingkat ketimpangan pendapatan yang relatif rendah. Namun jika dibandingkan dengan Kabupaten Katingan yang memiliki Indeks Gini sebesar 0,253, Kabupaten Gunung Mas masih menunjukkan ketimpangan yang sedikit lebih tinggi. Angka ini mengindikasikan bahwa kesenjangan ekonomi di Gunung Mas masih perlu diturunkan, sehingga diperlukan penguatan kebijakan inklusif agar pemerataan kesejahteraan dapat terus ditingkatkan dan ketimpangan sosial-ekonomi dapat diminimalkan.

Permasalahan kesenjangan/ketimpangan ini disebabkan oleh pekerja lokal yang belum mendapatkan harga yang adil untuk produknya, sementara akses ke pasar yang lebih luas terbatas. Selain itu, tingginya biaya produksi dan keterbatasan dalam teknologi pertanian membuat masyarakat kesulitan untuk meningkatkan hasil pertanian secara signifikan. Oleh karena itu, kesenjangan pendapatan antar kelompok masyarakat semakin lebar, sehingga menciptakan ketidaksetaraan dalam kualitas hidup. Untuk mencapai kesejahteraan yang berkualitas dan berkeadilan, dibutuhkan kebijakan pembangunan yang lebih merata dan inklusif. Pemerintah Kabupaten Gunung Mas harus lebih fokus pada pemberdayaan masyarakat, baik melalui peningkatan akses terhadap pendidikan yang lebih berkualitas, layanan kesehatan yang lebih terjangkau, maupun penyediaan lapangan pekerjaan yang lebih luas. Selain itu, program-program yang mendukung ekonomi lokal, seperti bantuan untuk pengembangan UMKM dan peningkatan kualitas produk lokal, perlu diperkuat. Dengan pendekatan yang lebih holistik dan berkeadilan, diharapkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Gunung Mas dapat tercapai secara lebih merata dan berkelanjutan.

## **6. Belum optimalnya penyelenggaraan dan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik**

Penyelenggaraan dan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik di Kabupaten Gunung Mas masih belum optimal, meskipun berbagai upaya telah dilakukan untuk memperbaiki sistem pemerintahan. Salah satu masalah utama adalah kurangnya transparansi dalam pengelolaan anggaran dan pengambilan keputusan yang melibatkan masyarakat. Banyak kebijakan yang diterapkan tanpa melibatkan partisipasi publik secara luas, sehingga masyarakat merasa kurang dilibatkan dalam proses perencanaan dan evaluasi program pembangunan. Permasalahan ini dapat dilihat pada nilai akuntabilitas Kabupaten Gunung Mas di tahun 2024 yang mencapai 61,63 (B) mengalami penurunan jika dibandingkan tahun 2023 yang mencapai 62,14 dengan kategori B. Kemudian pada indeks reformasi birokrasi pada tahun 2023 mencapai 54,77 yang terpantau menurun jika dibandingkan dengan capaian tahun 2020 sebesar 60. Selain itu, masih terdapat permasalahan dalam hal akuntabilitas dan efisiensi birokrasi pemerintahan. Proses administratif yang lambat dan tumpang tindihnya regulasi sering kali menghambat kelancaran pelayanan publik. Kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) yang kurang maksimal juga menjadi kendala dalam menjalankan program-program yang telah ditetapkan. Beberapa pejabat daerah kurang memiliki pemahaman yang memadai tentang prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, sehingga menyebabkan pemborosan anggaran dan rendahnya kualitas pelayanan publik. Untuk memperbaiki tata kelola

pemerintahan di Kabupaten Gunung Mas, perlu ada reformasi birokrasi yang lebih komprehensif, termasuk peningkatan kapasitas dan integritas ASN. Selanjutnya pada sisi keamanan, berdasarkan data angka kriminalitas yang ditangani data tahun 2024 mencapai 72,41, capaian ini mengalami penurunan jika dibandingkan capaian di tahun 2023 sebesar 84,76. Dengan ini pemerintah daerah harus mengutamakan transparansi dan akuntabilitas dalam setiap tahapan pemerintahan, serta memastikan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan evaluasi program. Selain itu, penggunaan teknologi informasi dalam sistem pelayanan publik harus lebih ditingkatkan agar lebih efisien dan mudah diakses oleh masyarakat. Dengan demikian, tata kelola pemerintahan yang baik akan tercapai, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat dan mendukung tercapainya tujuan pembangunan daerah.

### **2.3.2 Isu Strategis**

Isu-isu strategis mencakup berbagai urgensi dalam pembangunan yang menjadi perbincangan di tingkat internasional, nasional, dan regional karena relevansinya terhadap kondisi dan perihal yang sangat penting dalam pembangunan daerah, baik pada masa kini maupun masa mendatang. Isu strategis melibatkan identifikasi isu global, isu nasional, isu regional dan isu daerah yang saling terkait dan terintegrasi. Memahami pentingnya isu-isu strategis, kita dapat meminimalkan risiko kegagalan dan mengambil peluang untuk mendorong kemajuan yang berkelanjutan dalam pembangunan daerah.

#### **2.3.2.1 Isu Global**

Isu strategis internasional menjadi isu global dari RPJMN yang penting dalam pembangunan nasional yang dapat memberikan pengaruh pada pembangunan Kabupaten Gunung Mas. Isu global ini akan menjadi *warning action* dalam pembangunan secara menyeluruh, yang dijabarkan sebagai berikut:

##### **a. Geopolitik Dan Geoekonomi**

Geopolitik dan geoekonomi Kabupaten Gunung Mas memiliki peran yang signifikan dalam menentukan arah pembangunan dan kesejahteraan masyarakatnya. Terletak di Provinsi Kalimantan Tengah, Kabupaten Gunung Mas berada di posisi strategis dengan sumber daya alam yang melimpah, terutama di sektor kehutanan, pertanian, dan perkebunan. Keberadaan wilayah ini sebagai penghubung antara pusat provinsi dan daerah-daerah lainnya menjadikannya penting dalam peta politik dan ekonomi regional. Namun, tantangan geopolitik muncul ketika pembangunan infrastruktur dan kebijakan pemerintah pusat tidak selalu mempertimbangkan kepentingan lokal, yang menyebabkan ketimpangan dalam pemanfaatan sumber daya alam dan distribusi hasil pembangunan. Dalam konteks geopolitik dan geoekonomi yang lebih luas, Kabupaten Gunung Mas memiliki peluang untuk meningkatkan posisinya dengan penguatan pembangunan infrastruktur yang lebih merata, serta pengelolaan sumber daya alam yang lebih berkelanjutan. Kolaborasi antara pemerintah daerah, sektor swasta, dan masyarakat perlu diperkuat untuk menciptakan sinergi dalam memanfaatkan potensi ekonomi

yang ada. Selain itu, pengembangan sektor pariwisata yang berbasis pada kekayaan alam dan budaya daerah juga bisa menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

#### **b. Dampak Perubahan Iklim Global**

Dampak perubahan iklim global mulai dirasakan di Kabupaten Gunung Mas, yang memiliki wilayah yang kaya akan hutan dan sumber daya alam. Perubahan pola cuaca yang semakin ekstrem, seperti curah hujan yang tinggi pada musim tertentu dan musim kemarau yang lebih panjang, berpotensi merusak ekosistem dan mengganggu sektor pertanian yang menjadi mata pencaharian utama masyarakat. Petani, khususnya di daerah pedesaan, sering kali kesulitan menyesuaikan diri dengan perubahan tersebut, yang mengakibatkan kegagalan panen dan penurunan kualitas hasil pertanian. Selain itu, ketergantungan pada sumber daya alam yang rentan terhadap perubahan iklim memperburuk ketahanan pangan dan ekonomi masyarakat. Selain sektor pertanian, perubahan iklim juga berdampak pada kualitas dan keberlanjutan sumber daya air di Kabupaten Gunung Mas. Perubahan curah hujan yang tidak menentu dapat menyebabkan banjir di musim hujan dan kekeringan di musim kemarau, yang mempengaruhi pasokan air bersih dan irigasi untuk pertanian. Kondisi ini memperburuk akses masyarakat terhadap air bersih, terutama di daerah-daerah terpencil yang belum memiliki infrastruktur yang memadai. Dengan berkurangnya pasokan air, kualitas hidup masyarakat juga terganggu, sementara kebutuhan air untuk kegiatan ekonomi dan rumah tangga terus meningkat. Dalam rangka mengurangi dampak perubahan iklim, Kabupaten Gunung Mas perlu mengambil langkah-langkah mitigasi dan adaptasi yang lebih serius. Pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan, seperti perlindungan hutan dan pengelolaan air yang efisien, harus menjadi prioritas. Selain itu, peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya adaptasi terhadap perubahan iklim, seperti melalui penggunaan teknologi pertanian yang ramah lingkungan dan perbaikan sistem irigasi, juga sangat penting. Pemerintah daerah bersama dengan masyarakat dan sektor swasta harus berkolaborasi untuk mengembangkan kebijakan yang mendukung keberlanjutan lingkungan dan ketahanan terhadap dampak perubahan iklim, demi menciptakan masa depan yang lebih aman dan sejahtera bagi Kabupaten Gunung Mas.

#### **c. Perkembangan Teknologi**

Perkembangan teknologi di Kabupaten Gunung Mas masih tergolong lambat, meskipun teknologi memiliki potensi besar untuk mendukung pembangunan daerah ini. Akses terhadap Teknologi Informasi Dan Komunikasi (TIK) di sebagian besar wilayah masih terbatas, terutama di daerah-daerah pedalaman. Infrastruktur internet yang belum merata dan kualitas sinyal yang buruk menghambat masyarakat, terutama di desa-desa terpencil, untuk memanfaatkan berbagai platform digital yang bisa mendukung kegiatan ekonomi, pendidikan, dan sosial. Hal ini menyebabkan ketertinggalan dalam hal akses informasi dan keterbatasan peluang untuk mengembangkan potensi daerah. Teknologi dalam pengolahan hasil pertanian dan pemasaran produk juga masih sangat terbatas, padahal ini bisa meningkatkan daya saing produk lokal di pasar yang lebih luas. Untuk mendorong perkembangan teknologi di Kabupaten Gunung Mas, diperlukan

investasi yang lebih besar dalam pembangunan infrastruktur digital, termasuk penyediaan akses internet yang lebih luas dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat. Pemerintah daerah perlu berkolaborasi dengan sektor swasta dan lembaga pendidikan untuk menyelenggarakan pelatihan bagi para petani, pelaku UMKM, serta masyarakat umum dalam memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan. Selain itu, pengembangan teknologi ramah lingkungan yang mendukung sektor pertanian dan pengelolaan sumber daya alam dapat menjadi kunci untuk meningkatkan keberlanjutan ekonomi dan kualitas hidup di Kabupaten Gunung Mas.

#### **d. Industri 5.0**

Industri 5.0 merupakan tahap lanjutan dari revolusi industri yang berfokus pada integrasi teknologi canggih dengan sentuhan manusiawi. Berbeda dengan Industri 4.0 yang menekankan pada otomatisasi dan kecerdasan buatan, Industri 5.0 lebih menekankan pada kolaborasi antara manusia dan mesin, dengan tujuan untuk menciptakan produk yang lebih personal, berkelanjutan, dan ramah lingkungan. Dalam konteks Kabupaten Gunung Mas, penerapan konsep Industri 5.0 dapat membuka peluang baru untuk mengoptimalkan potensi sektor-sektor unggulan seperti pertanian, perkebunan, dan kerajinan lokal, dengan memanfaatkan teknologi tinggi yang mendukung kreativitas dan keterampilan masyarakat. Di sektor pertanian, misalnya, Industri 5.0 dapat diimplementasikan melalui penggunaan teknologi canggih yang dikendalikan oleh petani itu sendiri, seperti penggunaan robot pertanian yang bekerja bersama petani untuk meningkatkan efisiensi dan hasil panen. Teknologi ini memungkinkan pemantauan kondisi tanaman, analisis tanah, dan pengelolaan sumber daya alam secara lebih presisi dan berkelanjutan. Dengan adanya kolaborasi antara keahlian manusia dan teknologi, para petani di Kabupaten Gunung Mas dapat mengakses teknik pertanian yang lebih efisien, ramah lingkungan, dan menghasilkan produk dengan kualitas yang lebih tinggi.

#### **e. Adanya Pergeseran Budaya Dampak Dari Teknologi Informasi**

Pergeseran budaya akibat perkembangan teknologi informasi di Kabupaten Gunung Mas mulai terlihat dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat. Teknologi informasi, terutama melalui internet dan media sosial, telah mengubah cara masyarakat berinteraksi, berkomunikasi, dan mengakses informasi. Dulu, informasi sering kali disampaikan secara tatap muka atau melalui media tradisional seperti radio dan surat kabar, namun kini masyarakat lebih cenderung mengakses informasi secara langsung dan cepat melalui perangkat digital. Hal ini mengubah pola pikir dan cara pandang masyarakat terhadap berbagai isu, baik itu politik, ekonomi, maupun sosial, yang pada akhirnya mempengaruhi perilaku dan pola kehidupan masyarakat.

### **2.3.2.2 Isu Strategis Nasional**

Isu-isu strategis nasional merupakan isu-isu yang memiliki potensi untuk menghambat pembangunan nasional sehingga perlu adanya antisipasi khusus dalam menghadapinya. Isu jangka menengah Nasional yang tertuang dalam RPJMN dijabarkan sebagai berikut:

#### **a. Resiliensi dan Prospek Perekonomian yang Positif**

Resiliensi dan prospek perekonomian Kabupaten Gunung Mas memiliki potensi yang positif meskipun menghadapi berbagai tantangan. Kabupaten Gunung Mas, yang kaya akan sumber daya alam, terutama dalam sektor pertanian, perkebunan, dan kehutanan, memiliki daya tahan yang baik dalam menghadapi fluktuasi pasar dan bencana alam. Masyarakatnya, yang sebagian besar bergantung pada sektor-sektor ini, telah terbiasa beradaptasi dengan perubahan cuaca dan kondisi pasar. Melalui penerapan praktik-praktik pertanian yang lebih modern dan berbasis pada teknologi, serta upaya untuk menjaga kelestarian lingkungan, perekonomian Kabupaten Gunung Mas dapat bertahan dan berkembang meskipun kondisi eksternal sering berubah.

Prospek perekonomian Kabupaten Gunung Mas ke depan juga cukup positif, terutama dengan adanya potensi pengembangan sektor-sektor unggulan yang belum sepenuhnya dimaksimalkan. Sektor pertanian dan perkebunan, seperti kopi, karet, dan produk rempah-rempah, dapat lebih berkembang jika ada peningkatan kualitas produk dan akses pasar yang lebih luas. Selain itu, sektor pariwisata alam yang kaya juga dapat menjadi sumber pendapatan yang menjanjikan, dengan adanya potensi untuk menarik lebih banyak wisatawan lokal maupun internasional. Dengan kebijakan yang tepat, kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat, serta peningkatan infrastruktur, Kabupaten Gunung Mas dapat membuka peluang baru untuk memperkuat perekonomiannya.

Keberlanjutan dan kemajuan perekonomian Kabupaten Gunung Mas sangat bergantung pada kemampuan untuk beradaptasi dengan perkembangan global dan lokal. Diversifikasi ekonomi yang mencakup pengembangan sektor-sektor baru seperti industri kreatif dan teknologi dapat membantu mengurangi ketergantungan pada satu sektor saja. Investasi dalam infrastruktur, pendidikan, dan pelatihan keterampilan akan semakin meningkatkan daya saing masyarakat. Dengan menerapkan prinsip-prinsip pembangunan yang inklusif, berkelanjutan, dan berbasis pada pemberdayaan masyarakat, Kabupaten Gunung Mas memiliki potensi untuk menjadi daerah yang lebih tangguh dan maju di masa depan.

#### **b. Keanekaragaman Hayati dan Potensi Lingkungan**

Keanekaragaman hayati di Kabupaten Gunung Mas merupakan salah satu aset terbesar yang dimiliki daerah ini, dengan beragam flora dan fauna yang tersebar di hutan tropisnya. Kabupaten ini merupakan bagian dari kawasan yang kaya akan keanekaragaman spesies, baik itu tumbuhan, hewan, maupun ekosistem yang mendukung kehidupan. Hutan yang luas, sungai-sungai yang mengalir jernih, serta berbagai jenis tanaman obat dan rempah-rempah memberikan potensi besar dalam bidang penelitian dan pengembangan produk alami. Keanekaragaman hayati ini tidak hanya penting untuk keseimbangan ekosistem, tetapi juga berpotensi menjadi sumber daya yang mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, seperti dalam pengembangan pariwisata alam, pertanian organik, dan produk berbasis alam. Selain itu, potensi lingkungan Kabupaten Gunung Mas juga terletak pada kemampuannya untuk menyediakan berbagai layanan ekosistem yang sangat berguna bagi kehidupan masyarakat. Hutan-hutan yang ada di daerah ini berperan penting dalam menyerap karbon, mengatur siklus air, serta menyediakan habitat bagi berbagai spesies. Sungai-sungai dan danau yang

ada juga menyediakan sumber daya air yang esensial bagi kehidupan manusia dan kegiatan pertanian. Namun, potensi ini sangat rentan terhadap kerusakan akibat aktivitas manusia yang tidak ramah lingkungan, seperti pembalakan liar, perusakan habitat, dan konversi lahan yang tidak terkendali.

Untuk menjaga dan memanfaatkan keanekaragaman hayati serta potensi lingkungan secara berkelanjutan, diperlukan kebijakan konservasi yang tegas dan upaya bersama antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta. Pengelolaan hutan yang berbasis pada prinsip keberlanjutan, pengembangan ekowisata, serta pemanfaatan sumber daya alam dengan tetap menjaga keseimbangan ekosistem adalah langkah penting yang perlu diambil. Pendidikan dan kesadaran lingkungan kepada masyarakat setempat juga sangat penting untuk mendorong pelestarian alam dan pemanfaatan sumber daya yang bertanggung jawab. Dengan pendekatan yang tepat, Kabupaten Gunung Mas dapat mengoptimalkan potensi alamnya untuk mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat tanpa merusak lingkungan.

### **c. Potensi Sumber Daya Manusia dan Modal Manusia**

Potensi sumber daya manusia (SDM) di Kabupaten Gunung Mas memiliki peluang besar untuk dikembangkan, mengingat mayoritas penduduknya masih tergantung pada sektor pertanian dan perkebunan. Sebagian besar masyarakat memiliki keterampilan dalam bidang pertanian, perkebunan, dan kerajinan tradisional yang sudah diwariskan turun-temurun. Potensi ini dapat dioptimalkan dengan pemberian pelatihan dan pendidikan yang relevan untuk meningkatkan keterampilan teknis dan kewirausahaan. Selain itu, dengan meningkatnya akses terhadap pendidikan dan teknologi, masyarakat di Kabupaten Gunung Mas dapat mengembangkan kemampuan baru yang sesuai dengan kebutuhan pasar global, sehingga dapat mempercepat proses transisi dari ekonomi berbasis sumber daya alam menjadi ekonomi berbasis pengetahuan dan teknologi.

Modal manusia di Kabupaten Gunung Mas juga merupakan salah satu aspek penting untuk memajukan pembangunan daerah. Masyarakat yang terdidik dan terampil akan lebih mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman, serta berkontribusi dalam sektor-sektor ekonomi yang lebih beragam dan lebih bernilai tambah. Oleh karena itu, penguatan sistem pendidikan yang lebih merata dan berkualitas, terutama di daerah pedesaan, menjadi hal yang krusial. Pelatihan keterampilan yang lebih berfokus pada teknologi digital, pengelolaan usaha, dan pengembangan kapasitas di sektor industri kreatif dapat memberikan dorongan bagi pembangunan ekonomi daerah dan menciptakan lapangan kerja yang lebih luas.

Pentingnya investasi pada pengembangan modal manusia juga terlihat dalam kebutuhan untuk meningkatkan kemampuan manajerial dan kepemimpinan di tingkat lokal. Agar pembangunan berkelanjutan dapat tercapai, diperlukan para pemimpin daerah yang memiliki kapasitas untuk merencanakan dan mengelola pembangunan dengan pendekatan yang strategis dan berbasis data. Selain itu, kerjasama antara pemerintah, lembaga pendidikan, dan sektor swasta dalam menciptakan peluang pelatihan dan pengembangan keterampilan akan semakin memperkuat modal manusia di Kabupaten Gunung Mas. Dengan mengembangkan potensi SDM yang ada,

Kabupaten Gunung Mas dapat memanfaatkan sumber daya manusia sebagai kekuatan utama untuk mencapai kesejahteraan dan kemajuan yang berkelanjutan.

#### **d. Pergeseran Struktur Kelas Masyarakat**

Pergeseran struktur kelas masyarakat di Kabupaten Gunung Mas dapat terlihat seiring dengan perubahan dalam ekonomi, pendidikan, dan akses terhadap teknologi. Sebagian besar masyarakat di daerah ini sebelumnya tergolong dalam kelas bawah dengan ketergantungan utama pada sektor pertanian dan perkebunan tradisional. Namun, dengan adanya perubahan dalam sektor ekonomi, terutama melalui urbanisasi dan perkembangan sektor-sektor ekonomi non-pertanian seperti perdagangan, pariwisata, dan industri kecil, mulai muncul kelas menengah yang lebih terdidik dan memiliki keterampilan di luar bidang pertanian. Perubahan ini secara tidak langsung memengaruhi cara pandang masyarakat terhadap peluang ekonomi dan kehidupan sosial.

#### **e. Tata Kelola Dan Akuntabilitas Pemerintah**

Tata kelola dan akuntabilitas pemerintah di Kabupaten Gunung Mas merupakan aspek krusial dalam memastikan tercapainya pembangunan yang transparan, efektif, dan berkelanjutan. Seiring dengan upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, tata kelola yang baik harus menjadi prioritas utama. Hal ini mencakup proses pengambilan keputusan yang melibatkan partisipasi masyarakat, transparansi dalam penggunaan anggaran, serta kejelasan dalam pelaksanaan program-program pembangunan. Namun, masih ada tantangan terkait dengan implementasi tata kelola yang baik, terutama di tingkat pemerintahan desa dan kecamatan, di mana pengawasan dan pemantauan terhadap penggunaan anggaran dan pelaksanaan kebijakan sering kali kurang optimal. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan kapasitas Aparatur Sipil Negara (ASN) melalui pelatihan yang berkelanjutan tentang manajemen keuangan, pengawasan, dan transparansi. Dalam rangka memperbaiki tata kelola dan akuntabilitas pemerintahan, kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan lembaga-lembaga independen seperti lembaga pengawas dan media sangat diperlukan. Penguatan sistem pelaporan berbasis teknologi dan penyusunan anggaran yang lebih terbuka serta dapat diakses publik akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah. Selain itu, pembentukan mekanisme pengawasan yang melibatkan masyarakat, seperti forum musyawarah atau konsultasi publik, juga akan mempermudah proses evaluasi dan perbaikan kebijakan. Dengan demikian, tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabilitas yang tinggi dapat tercapai, yang pada gilirannya akan mendorong keberhasilan pembangunan yang lebih adil dan merata di Kabupaten Gunung Mas.

#### **f. Rendahnya Produktivitas**

Rendahnya produktivitas di Kabupaten Gunung Mas merupakan salah satu tantangan utama yang menghambat kemajuan ekonomi daerah ini. Sebagian besar masyarakat masih mengandalkan sektor pertanian tradisional yang belum sepenuhnya efisien. Meskipun potensi alam di Kabupaten Gunung Mas sangat besar, seperti hasil pertanian, perkebunan, dan kehutanan,

penerapan teknologi yang tepat untuk meningkatkan produktivitas masih terbatas. Sebagian besar petani dan pelaku usaha kecil di daerah ini masih menggunakan metode yang sudah usang, yang tidak hanya mengurangi hasil produksi tetapi juga meningkatkan biaya operasional. Keterbatasan akses terhadap teknologi pertanian modern, keterampilan yang belum berkembang, serta keterbatasan infrastruktur juga menjadi faktor yang memperburuk rendahnya tingkat produktivitas. Selain itu, rendahnya kualitas sumber daya manusia (SDM) juga menjadi salah satu penyebab utama rendahnya produktivitas. Banyak tenaga kerja di Kabupaten Gunung Mas yang belum memiliki keterampilan atau pengetahuan yang cukup untuk menjalankan usaha secara lebih efisien. Kurangnya pelatihan keterampilan teknis dan akses terhadap pendidikan yang berkualitas membuat sebagian besar masyarakat kesulitan untuk berinovasi dalam mengelola sumber daya yang ada. Hal ini berakibat pada rendahnya daya saing produk lokal di pasar yang lebih luas. Di sektor pertanian, misalnya, penggunaan pupuk dan pestisida yang tidak efisien serta kurangnya pemahaman tentang manajemen sumber daya alam yang berkelanjutan juga mengurangi hasil yang optimal.

Untuk mengatasi rendahnya produktivitas, Pemerintah Kabupaten Gunung Mas perlu meningkatkan investasi dalam pendidikan dan pelatihan yang relevan dengan kebutuhan pasar. Penyuluhan pertanian berbasis teknologi dan pemanfaatan sistem pertanian modern yang lebih efisien harus menjadi fokus utama. Selain itu, penguatan infrastruktur dan sistem distribusi produk akan membantu petani dan pelaku usaha dalam meningkatkan kualitas dan daya saing produk. Dengan memperbaiki akses terhadap teknologi, meningkatkan keterampilan SDM, serta membangun infrastruktur yang mendukung, Kabupaten Gunung Mas dapat meningkatkan produktivitas dan mempercepat pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

### **2.3.2.3 Isu Strategis Regional**

RPJMD Kabupaten Gunung Mas, penting untuk melakukan telaahan isu regional secara menyeluruh. Telaah ini meliputi telaahan arahan RPJMN terhadap wilayah Provinsi, dan telaah RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah, RPJPD Kabupaten Gunung Mas, dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) agar mampu menjadi satu kesatuan yang terintegrasi. Integrasi semua aspek ini akan memastikan bahwa RPJMD Kabupaten Gunung Mas dirumuskan secara komprehensif dan berkelanjutan, mendukung pengembangan daerah yang sesuai dengan potensi dan kebutuhan daerah.

#### **A. Telaah Arahan RPJMN terhadap Pembangunan Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah**

Dalam RPJMN tahun 2025-2029 memberikan arahan kebijakan kewilayahan pada tiap provinsi di Indonesia, khususnya pada Provinsi Kalimantan Tengah beberapa hal yang menjadi intervensi dalam pembangunan Kabupaten Gunung Mas adalah sebagai berikut:

#### **Gambar II.43**

#### **Arah Pengembangan Kewilayahan Provinsi Kalimantan Tengah**

<p><b>A. Kawasan Pertumbuhan</b></p> <p><b>Kawasan Agro Industri Kalimantan Tengah</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kabupaten Kotawaringin Barat</li> <li>2. Kabupaten Kotawaringin Timur</li> </ol>	<p><b>C. Kawasan Swasembada Pangan, Air, Energi</b></p> <p><b>Kawasan Sentra Produksi Pangan (KSPP) Kalimantan Tengah</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kabupaten Pulang Pisau</li> <li>2. Kabupaten Kapuas</li> </ol>	<p><b>E. Kawasan Konservasi</b></p> <p><b>Kawasan Konservasi Kalimantan Tengah</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Taman Nasional Tanjung Puting, Kabupaten Kotawaringin Barat</li> <li>2. Taman Nasional Sebangau, Kota Palangkaraya</li> </ol> <p><b>Kawasan Strategis Heart of Borneo</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>3. Kabupaten Katingan</li> <li>4. Kabupaten Gunung Mas</li> <li>5. Kabupaten Murung Raya</li> <li>6. Kabupaten Barito Utara</li> </ol>
<p><b>B. Kawasan Komoditas Unggulan</b></p> <p><b>Kawasan Sentra Perikanan Kalimantan Tengah</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kota Palangkaraya</li> <li>2. Kabupaten Barito Utara</li> <li>3. Kabupaten Kapuas</li> </ol>	<p><b>D. Kawasan Afirmasi</b></p> <p><b>Kawasan Transmigrasi (KT)</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. KT Lamunti-Dadahup, Kabupaten Kapuas</li> <li>2. KT Jelai (Pulau Nibung), Kabupaten Sukamara</li> <li>3. KT Arut Selatan dan Kotawaringin Lama, Kabupaten Kotawaringin Barat</li> </ol>	

Berdasarkan arahan pembangunan kewilayahan maka *Highlight* intervensi kebijakan secara umum dan khususnya pada Kabupaten Gunung Mas disajikan pada tabel sebagai berikut:

**Tabel II.50**  
**Highlight Intervensi dan lokasi Prioritas Kalimantan Tengah**

Lokasi Prioritas	Highlight Indikasi Intervensi
Kawasan Strategis Nasional Jantung Kalimantan ( <i>Heart of Borneo</i> ):	Pengelolaan wilayah berbasis kesatuan ekologi/ekosistem termasuk <i>Heart of Borneo</i> di Wilayah Kalimantan Tengah disertai peningkatan upaya mitigasi dalam penanggulangan bencana, melalui:
<ul style="list-style-type: none"> <li>● Kabupaten Katingan</li> <li>● Kabupaten Gunung Mas</li> <li>● Kabupaten Murung Raya</li> <li>● Kabupaten Barito Utara</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Pengendalian kebakaran serta rehabilitasi hutan dan lahan, dengan output: penanganan dampak perubahan iklim dan pencegahan kebakaran lahan dan kebun serta operasi modifikasi cuaca untuk aksi dini bencana kebakaran hutan dan lahan (karhutla)</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Peningkatan kualitas ekosistem gambut, dengan output: pemulihan dan restorasi lahan gambut, pengelolaan data informasi Kesatuan Hidrologis Gambut (KHG), dan peningkatan layanan penilaian kinerja lingkungan untuk pengelolaan ekosistem gambut</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Rehabilitasi ekosistem mangrove, dengan output: pemulihan dan rehabilitasi ekosistem mangrove</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Pelaksanaan penataan aset reforma agraria, dengan output: inventarisasi dan verifikasi penguasaan tanah dalam kawasan hutan</li> </ul>



Lokasi Prioritas	Highlight Indikasi Intervensi
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengembangan energi terbarukan berbasis bioenergi</li> </ul>
Provinsi Kalimantan Tengah	<p>Pengembangan hilirisasi industri berbasis sumber daya mineral seperti bauksit dan tembaga sesuai potensi daerah, melalui:</p>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tata kelola industri dan ketersediaan bahan baku industri, dengan output: rekomendasi keprospeekan sumber daya mineral dan rekomendasi kebijakan rencana produksi dan pemanfaatan mineral</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengembangan industri hilir/antara olahan sumber daya mineral, dengan output: riset dan inovasi hilirisasi sumber daya alam tidak terbarukan, kebijakan penguatan industri logam, monitoring dan evaluasi perkembangan industri smelter/pemurnian/ pengolahan logam dasar beserta turunannya</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dekarbonisasi industri dan ekonomi sirkular, dengan output: fasilitasi industri pengolahan sisa hasil produksi industri smelter logam bukan besi dan turunannya dan peningkatan manajemen energi dan air serta pemanfaatan EBT (<i>Renewable Energy</i>) dalam rangka efisiensi sumberdaya industri</li> </ul>
Provinsi Kalimantan Tengah	<p>Penguatan infrastruktur konektivitas (konektivitas jalan, konektivitas darat, konektivitas laut, serta konektivitas udara) dan sarana penunjang logistik untuk mendukung pertumbuhan dan pemerataan pembangunan, melalui:</p>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penguatan konektivitas jalan, udara, darat, dan laut, dengan output: pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan jalan nasional, pembangunan dan pengembangan bandara termasuk Bandara Murung Raya, pembangunan dan pengembangan pelabuhan laut</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penguatan infrastruktur konektivitas penunjang logistik, dengan output:</li> </ul>

Lokasi Prioritas	Highlight Indikasi Intervensi
	pembangunan jalan akses simpul transportasi, pembangunan jalan koridor logistik, dan pembangunan jembatan koridor logistik
Provinsi Kalimantan Tengah	<p>Penguatan kualitas pendidikan secara merata dan berdaya saing disertai peningkatan akses, kualitas, dan relevansi pendidikan vokasi sesuai dengan potensi ekonomi lokal untuk mendukung produktivitas tenaga kerja, melalui:</p> <ul style="list-style-type: none"><li data-bbox="762 700 1426 879">• Pembangunan dan penyelenggaraan sekolah unggul, dengan output: pembangunan unit sekolah baru dan penyelenggaraan sekolah unggul</li><li data-bbox="762 879 1426 1059">• Revitalisasi prasarana pendidikan, dengan output: pembangunan, rehabilitasi, dan renovasi sekolah dasar, menengah, dan madrasah</li><li data-bbox="762 1059 1426 1191">• Pelatihan vokasi di sektor strategis, dengan output: pelatihan vokasi di Provinsi Kalimantan Tengah</li><li data-bbox="762 1191 1426 1465">• Peningkatan peran dan kerja sama industri dalam pendidikan dan pelatihan vokasi, dengan output: peningkatan kemitraan antara satuan pendidikan vokasi dengan dunia usaha dan dunia industri</li><li data-bbox="762 1465 1426 1876">• Penguatan pendidikan menengah vokasi, dengan output: pengembangan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) menjadi pusat keunggulan, pengembangan proyek kreatif dan kewirausahaan, pendampingan peningkatan mutu, dan pengembangan pengajaran berbasis pabrik (<i>teaching factory</i>)</li></ul>
Provinsi Kalimantan Tengah	<p>Penyediaan pasokan air berkelanjutan untuk mendukung ketahanan pangan lokal, melalui:</p> <ul style="list-style-type: none"><li data-bbox="762 2038 1426 2252">• Penyediaan air baku kawasan sulit air, bencana kekeringan, dan kawasan terpencil, dengan output: pembangunan tampungan air dan prasarana air baku</li></ul>



Lokasi Prioritas	Highlight Indikasi Intervensi
	<ul style="list-style-type: none"><li>• Pengembangan dan pengelolaan irigasi untuk mendukung ketahanan pangan lokal, dengan output: pengembangan dan pengelolaan irigasi dan rehabilitasi/peningkatan prasarana irigasi untuk mendukung ketahanan pangan lokal</li></ul>
Provinsi Kalimantan Tengah	Peningkatan konektivitas tenaga listrik disertai pemanfaatan energi baru terbarukan dan peningkatan digitalisasi, melalui:
	<ul style="list-style-type: none"><li>• Pembangunan jaringan distribusi dan listrik pedesaan, dengan output: pemasangan sambungan baru listrik bagi rumah tangga belum berlistrik yang tidak mampu</li></ul>
	<ul style="list-style-type: none"><li>• Pembangunan dan peningkatan kapasitas terpasang pembangkit listrik energi terbarukan, dengan output: pembangkit listrik tenaga surya (PLTS)</li></ul>
	<ul style="list-style-type: none"><li>• Perluasan jaringan telekomunikasi, akses internet cepat, dan layanan penyiaran digital disertai pengembangan SDM TIK dan digitalisasi masyarakat</li></ul>
Provinsi Kalimantan Tengah	Penguatan kapasitas ketahanan, pelayanan kesehatan, dan tata kelola pelayanan kesehatan, melalui:
	<ul style="list-style-type: none"><li>• Pengembangan layanan unggulan berbasis kompetensi, dengan output: peningkatan kompetensi Rumah Sakit (RS) dalam layanan Kanker, Jantung, Stroke, dan Uro-Nefrologi (KJSU) dan layanan Kesehatan Ibu dan Anak; pemenuhan Sarana, Prasarana Dan Alat Kesehatan (SPA) untuk pelayanan Ibu-Anak, Kanker, Jantung, Stroke, Ginjal di RS sesuai standar; pengadaan peralatan kesehatan dan pendukungnya untuk RS</li></ul>
	<ul style="list-style-type: none"><li>• Pengembangan unit pelayanan kesehatan di tingkat desa/kelurahan dan peningkatan peran kader kesehatan, dengan output: pemenuhan alat kesehatan di unit</li></ul>



Lokasi Prioritas	Highlight Indikasi Intervensi
	<p>pelayanan kesehatan tingkat desa/kelurahan sesuai standar, peningkatan ketrampilan kader kesehatan, pemantauan keaktifan posyandu sesuai standar, pengadaan alat kesehatan di posyandu sesuai standar, dan revitalisasi posyandu dan pemberdayaan masyarakat di puskesmas pembantu</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Peningkatan pendayagunaan SDM kesehatan, dengan output: penugasan khusus tenaga medis dan tenaga kesehatan pada fasyankes primer</li> <li>● Penguatan pemeriksaan kesehatan gratis, dengan output: pembinaan puskesmas penyelenggara pemeriksaan kesehatan gratis, pelaksanaan tindak lanjut kasus kesehatan hasil pemeriksaan kesehatan gratis, dan peningkatan kapasitas SDM untuk menunjang pemeriksaan kesehatan gratis</li> </ul>
Provinsi Kalimantan Tengah	<p>Pengembangan permukiman dan pemenuhan akses air minum, sanitasi aman, serta pengelolaan sampah terpadu dari hulu ke hilir secara berkelanjutan dan inklusif, melalui:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Minum (SPAM) terintegrasi hulu ke hilir, dengan output: pengembangan dan pengelolaan SPAM</li> <li>● Peningkatan utilitas dasar perdesaan, dengan output: peningkatan sistem pengelolaan persampahan berbasis masyarakat dan setempat skala individu</li> <li>● Penyediaan dan optimalisasi fasilitas pengolahan sampah, dengan output: pembinaan dan pengawasan pengembangan sanitasi, sistem pengelolaan persampahan skala regional, skala kota, skala kawasan, dan berbasis masyarakat</li> <li>● Fasilitasi pembangunan rumah baru, dengan output: bantuan pembangunan rumah swadaya dan</li> </ul>

Lokasi Prioritas	Highlight Indikasi Intervensi
Provinsi Kalimantan Tengah	bantuan rehabilitasi rumah keluarga penerima manfaat (KPM)
	Penguatan pencegahan dan percepatan penurunan stunting serta perbaikan gizi lainnya dan pengendalian penyakit menular, melalui:
	<ul style="list-style-type: none"><li data-bbox="762 500 1433 854">• Pengendalian penyakit malaria, dengan output: pemberian alat dan bahan kesehatan pencegahan dan pengendalian malaria; pembinaan tenaga kesehatan terlatih pencegahan dan pengendalian malaria; fasilitasi dan pembinaan pencegahan dan pengendalian malaria</li><li data-bbox="762 862 1433 1121">• Penguatan intervensi spesifik dan sensitif stunting, dengan output: Ibu hamil dan balita yang mendapat makanan tambahan dari Buffer Stock dan layanan imunisasi mendukung pencapaian stunting</li></ul>
Provinsi Kalimantan Tengah	Pengentasan kemiskinan, integrasi bantuan sosial, jaminan sosial, pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat yang adaptif dengan perwujudan satu sistem Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek), melalui:
	<ul style="list-style-type: none"><li data-bbox="762 1430 1433 2006">• Tata kelola dan pemanfaatan data registrasi sosial ekonomi, dengan output: sistem dan teknologi informasi kesejahteraan sosial, data terpadu kesejahteraan sosial, data dan informasi ketersediaan pangan, data pengadaan tanah, data dan informasi pendidikan dan kebudayaan, pengendalian PSE (Pengawasan Penyelenggara Sistem Elektronik) dan PSrE (Penyelenggara Sertifikasi Elektronik Induk) dan pengelolaan layanan pusat kesejahteraan sosial</li></ul>
	<ul style="list-style-type: none"><li data-bbox="762 2021 1433 2312">• Perlindungan sosial adaptif dan penguatan JKN, dengan output: penduduk Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI JKN), koordinasi pelaksanaan optimalisasi jaminan sosial kesehatan pusat dan daerah, keluarga yang</li></ul>

Lokasi Prioritas	Highlight Indikasi Intervensi
	mendapat bantuan sosial bersyarat, Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang memperoleh bantuan sosial sembako, korban bencana sosial dan non alam yang mendapat bantuan, penyaluran cadangan pangan pemerintah, penyediaan elpiji 3 kg yang tepat sasaran

## B. Telaah RPJPD Kabupaten Gunung Mas Tahun 2025-2045

Memahami bahwa RPJMD Tahun 2025-2029 merupakan pelaksanaan RPJPD pada tahap I maka beberapa poin penting yang harus diperhatikan dalam penyusunan RPJMD adalah sebagai berikut:

- a) Visi RPJPD, Visi Kabupaten Gunung Mas 2045:

### **GUNUNG MAS Be SMART**

#### **(Berkelanjutan, Sejahtera dan Maju Berbasis *Agro Resources* dan *Tourism*)**

Gunung Mas Be SMART (Berkelanjutan, Sejahtera dan Maju Berbasis *Agro Resources* dan *Tourism*) terdiri atas 5 (lima) pokok visi utama, yakni Berkelanjutan, Maju, Pembangunan Sektor Pertanian, Pembangunan Sektor Pariwisata, dan Sejahtera. Kabupaten Gunung Mas yang **maju** dapat diupayakan melalui peningkatan infrastruktur berkelanjutan termasuk di dalamnya akses pendidikan dan kesehatan yang berkualitas sehingga akan menghasilkan generasi dengan kualitas SDM unggulan. Topografi Kabupaten Gunung Mas yang meliputi daerah perbukitan membuat Kabupaten Gunung Mas memiliki potensi sumber daya alam yang dapat dioptimalkan melalui daya tarik **pariwisata** dan peningkatan sektor **pertanian**, hal tersebut akan meningkatkan perekonomian kreatif masyarakat dan iklim investasi di Kabupaten Gunung Mas semakin menguat yang mampu menciptakan **kesejahteraan** bagi masyarakat. Kabupaten Gunung Mas yang **berkelanjutan** dapat ditandai dengan pembangunan dan pengelolaan kota yang memprioritaskan keberlanjutan lingkungan, sosial, dan ekonomi. Peran pemerintah Kabupaten Gunung Mas untuk bersinergi mengupayakan sistem tata kelola yang baik dan bersih akan menjadikan Kabupaten Gunung Mas dapat mencapai pokok visi yang dicita-citakan.

- b) Misi RPJPD, misi Pembangunan Kabupaten Gunung Mas Tahun 2025-2045 sebagai berikut :
- 1) Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas dan Modern
  - 2) Mewujudkan Transformasi Ekonomi yang Inklusif, Maju, Kreatif, dan Berkelanjutan Berbasis Keanekaragaman Potensi Daerah
  - 3) Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Adaptif dan Inovatif
  - 4) Mewujudkan Keharmonisan dan Stabilitas Daerah
  - 5) Mewujudkan Ketahanan Sosial Budaya
  - 6) Mewujudkan Pembangunan Wilayah yang Merata
  - 7) Mewujudkan Infrastruktur yang Berkelanjutan
  - 8) Mewujudkan Kesyukuran Pembangunan Daerah

- c) Arah Pembangunan Tahap I (Periode 2025-2029) Peningkatan Infrastruktur Pembangunan Sosial Ekonomi yang Berkualitas dan Merata (2025–2029)

Pembangunan infrastruktur mengacu pada upaya untuk meningkatkan distribusi pembangunan yang lebih merata mejadi landasan penting dalam pertumbuhan ekonomi dan memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat memberikan akses masyarakat ke layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan lapangan kerja. Dengan infrastruktur yang baik maka dapat menciptakan **Smart City/Regency**, wilayah dapat menarik investasi, mengurangi ketimpangan, meningkatkan kualitas hidup penduduk.

Pemerintah dan pemangku kepentingan terkait harus mengambil langkah-langkah konkret untuk membangun atau meningkatkan infrastruktur di Kabupaten Gunung Mas secara lebih cepat daripada sebelumnya tidak hanya mencakup proyek-proyek konstruksi, perbaikan jalan namun juga pembangunan sarana air bersih, pembangunan pusat kesehatan, jaringan listrik dan upaya peningkatan infrastruktur digital dan telekomunikasi.

Untuk itu, dalam upaya mewujudkan Kabupaten Gunung Mas untuk meningkatkan infrastuktur pembangunan yang berkeadilan dan berkualitas, memberikan dampak yang luas dari pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan, meningkatkan kualitas hidup masyarakat, menciptakan lingkungan yang lebih kondusif dan lain-lain. Pembangunan Kabupaten Gunung Mas dapat di arahkan pada **“PENINGKATAN KAPASITAS INFRASTRUKTUR SOSIAL EKONOMI YANG MEMADAI SEBAGAI PERCEPATAN AKSESIBILITAS WILAYAH”** yang dalam implementasinya perlu diperhatikan betul karena jika perencanaan sudah baik harus diikuti eksekusi yang matang juga agar dampaknya bisa dirasakan semua orang.

Dari arah kebijakan di atas, maka sasaran pokok sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kualitas infrastruktur berkelanjutan dengan indeks kepuasan layanan infrastruktur.
- b. Terwujudnya ketahanan dan mitigasi bencana daerah dengan indeks ketahanan daerah.

### C. Telaah KLHS RPJMD Kabupaten Gunung Mas

Berdasarkan hasil analisis KLHS RPJMD Kabupaten Gunung Mas, menyimpulkan bahwa pendekatan holistik dan integratif diperlukan untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan, inklusif, dan berwawasan lingkungan. Studi pertanian berkelanjutan menunjukkan potensi signifikan untuk mengoptimalkan pemanfaatan lahan melalui inovasi teknologi, praktik ramah lingkungan, dan pemberdayaan petani.

Berikut adalah poin-poin kesimpulan dari analisa yang dilakukan dalam KLHS ini:

#### 1. Identifikasi Isu Strategis Pembangunan Berkelanjutan

Kabupaten Gunung Mas menghadapi sejumlah isu prioritas, meliputi:

- Kerusakan hutan dan kehilangan biodiversitas akibat konversi lahan dan aktivitas tambang ilegal.

- Pertanian tidak berkelanjutan yang memicu degradasi lahan dan rendahnya produktivitas pertanian.
  - Pencemaran lingkungan akibat limbah domestik, industri, dan aktivitas ekstraktif ilegal.
  - Ketimpangan sosial ekonomi, rendahnya kapasitas masyarakat, dan akses layanan dasar.
  - Dampak perubahan iklim seperti banjir, kekeringan, dan penurunan daya dukung lingkungan.
2. Analisis Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup (DDDTLH)
- Pemulihan Ekosistem: Rehabilitasi lahan kritis melalui pendekatan agroforestri dan Konservasi.
  - Optimalisasi Sumber Daya Air: Manajemen irigasi dan perlindungan daerah tangkapan air.
  - Kualitas Lingkungan: Penegakan hukum terhadap pencemaran tambang ilegal serta pengelolaan sampah terpadu.
3. Studi Pertanian Berkelanjutan di Kabupaten Gunung Mas
- Berdasarkan karakteristik 14 jenis tanah di Kabupaten Gunung Mas, studi menunjukkan potensi pengembangan sistem pertanian berkelanjutan yang adaptif terhadap kondisi lingkungan setempat. Beberapa poin penting meliputi:
- Jenis tanah dominan seperti *Typic Dystrudepts*, *Psammentic Dystrudepts*, dan *Typic Hapludults* cocok untuk tanaman pangan, hortikultura, dan tanaman keras seperti karet dan kelapa sawit.
  - Praktik agroforestri dan konservasi tanah direkomendasikan untuk memperbaiki lahan terdegradasi.
  - Teknologi hemat air seperti irigasi tetes dan penggunaan PGPR (*Plant Growth Promoting Rhizobacteria*) dapat meningkatkan efisiensi lahan dan produktivitas pertanian.
  - Penggunaan biochar dan pupuk organik: Teknologi ini mampu memperbaiki struktur tanah, meningkatkan kandungan bahan organik, dan menyimpan karbon.
  - Diversifikasi tanaman berupa penanaman tanaman tahan iklim seperti sorgum, millet, dan padi tahan salinitas dapat mendukung ketahanan pangan.
4. Rekomendasi Kebijakan Strategis
- Melalui analisis *Driving Forces, Pressure, States, Impacts, Responses* (DPSIR) dan *Analytical Hierachy Process* (AHP), 8 (delapan) kebijakan strategis prioritas dirumuskan, antara lain:
1. Rehabilitasi Lahan dan Pengelolaan Hutan Berkelanjutan
  2. Penguatan Sistem Pertanian Berkelanjutan
  3. Pengembangan Ekowisata Berbasis Komunitas
  4. Infrastruktur Berkelanjutan dan Transportasi Hijau
  5. Manajemen Sampah dan Limbah Terpadu
  6. Pengembangan Teknologi Hijau dan Digitalisasi
  7. Konservasi Biodiversitas
  8. Pendidikan dan Kesadaran Lingkungan

5. Strategi Implementasi Tahapan 5 (lima) tahun  
Implementasi kebijakan dan program dilakukan dalam tiga tahapan:
  - Tahun 1-2: Pembangunan regulasi, kelembagaan, dan infrastruktur dasar.
  - Tahun 3-4: Pelaksanaan program intensif di lapangan dengan evaluasi pertengahan jalan.
  - Tahun 5: Konsolidasi hasil, evaluasi akhir, dan rencana keberlanjutan program.
6. Dampak Ekonomi dan Lingkungan
  - Dampak ekonomi berupa peningkatan pendapatan masyarakat melalui pertanian berkelanjutan, ekowisata, dan teknologi hijau.
  - Dampak lingkungan berupa penurunan laju deforestasi, pemulihan keanekaragaman hayati, dan peningkatan daya dukung lingkungan.
  - Dampak sosial berupa peningkatan kualitas hidup masyarakat melalui pendidikan lingkungan dan program berbasis komunitas.

#### **D. Telaah RTRW Kabupaten Gunung Mas**

Pemerintah Kabupaten Gunung Mas menetapkan peraturan terkait Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2014–2034 melalui Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomer 8 tahun 2014 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Gunung Mas Tahun 2014–2034. Penetapan perda ini bertujuan untuk terbukanya isolasi daerah menuju percepatan peningkatan kesejahteraan, kemandirian dan daya saing yang bermartabat untuk mewujudkan Kabupaten Gunung Mas yang maju berbasis pertanian dan pertambangan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan.

- I. RTRW Kabupaten Gunung Mas memiliki berbagai kebijakan penataan ruang yang terdiri atas:
  - a. Pemerataan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat memiliki strategi kebijakan ini adalah:
    - Membuka isolasi ke daerah yang belum terlayani sarana dan prasarana transportasi secara baik;
    - Mengembangkan lapangan pekerjaan terhadap masyarakat;
    - Mengembangkan potensi sumber daya lahan;
    - Mendorong peningkatan produktivitas wilayah melalui intensifikasi lahan dan modernisasi pertanian dengan pengelolaan yang ramah lingkungan; dan
    - Mendorong bertumbuhnya sektor ekonomi sekunder dan tersier berbasis pertanian dan pertambangan sesuai keunggulan kawasan yang bernilai ekonomi tinggi, dikelola secara berhasil guna, terpadu dan ramah lingkungan.
  - b. Peningkatan peluang investasi memiliki strategi kebijakan ini adalah:
    - Memberikan insentif penanaman modal di kawasan potensial untuk investasi;
    - Meningkatkan kuantitas dan kualitas sistem jaringan prasarana dan sarana yang terkait dengan investasi; dan
    - Memberikan kepastian hukum untuk berusaha/menanamkan modal di tiap bidang usaha;

- c. Pemerataan tingkat pertumbuhan ekonomi memiliki strategi kebijakan adalah:
    - Membentuk pola ruang dan sistem perkotaan yang menunjang penyebaran investasi;
    - Menciptakan iklim ekonomi komplementer antara kawasan perkotaan dengan kawasan pedesaan;
    - Mendorong pertumbuhan lapangan kerja; dan
    - Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pemerataan penyediaan sarana prasarana sosial dan ekonomi
  - d. Menjaga keseimbangan lingkungan memiliki strategi kebijakan ini adalah:
    - Mengoptimalkan pemanfaatan ruang budidaya.
    - Mengendalikan kegiatan yang berpotensi merusak lingkungan.
    - Melakukan konservasi pada daerah resapan air dan kawasan lindung.
    - Membangun prasarana dan sarana wilayah yang berkualitas untuk pemenuhan hak dasar dan dalam rangka pewujudan tujuan penataan ruang yang berimbang dan berbasis konservasi.
  - e. Peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan memiliki strategi kebijakan ini adalah:
    - Mendukung penetapan kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan;
    - Mengembangkan budidaya secara selektif di dalam dan di sekitar kawasan untuk menjaga fungsi pertahanan dan keamanan;
    - Mengembangkan kawasan lindung dan/atau kawasan budidaya tidak terbangun di sekitar kawasan pertahanan dan keamanan negara sebagai zona penyangga; dan
    - Turut serta memelihara dan menjaga aset-aset pertahanan dan keamanan.
- II. Rencana struktur ruang wilayah Kabupaten Gunung Mas tersusun atas konstelasi pusat-pusat kegiatan yang berhieraki satu sama lain yang dihubungkan oleh sistem jaringan prasarana wilayah kabupaten.
- a. Sistem pusat pelayanan Kabupaten Gunung Mas, meliputi:
    - o PKL yang ditetapkan dalam RTRW Provinsi yaitu Kota Kuala Kurun sebagai PKL
    - o Sistem perkotaan Kabupaten Gunung Mas yaitu:
      - 1. PPK dan PPL yang ditetapkan kabupaten, yaitu terdiri dari:
        - PPK meliputi:
          - 1) Kelurahan Tewah;
          - 2) Kelurahan Tumbang Talaken;
          - 3) Kelurahan Sepang Simin;
          - 4) Kelurahan Jakatan Raya;
          - 5) Kelurahan Tumbang Rahuyan;
          - 6) Kelurahan Tehang;
          - 7) Kelurahan Kampuri; dan
          - 8) Kelurahan Rabambang.
        - PPL meliputi:
          - 1) Kelurahan Tumbang Miri;

- 2) Kelurahan Tumbang Marikoi; dan
  - 3) Kelurahan Tumbang Napoi.
- b. Rencana Sistem jaringan prasarana utama kabupaten meliputi:
- o Sistem jaringan prasarana transportasi.
    1. Sistem transportasi darat;
    2. Sistem transportasi udara; dan
    3. Sistem transportasi perkereta apian.
  - o Sistem jaringan prasarana energi.
    1. Pembangkit tenaga listrik; dan
    2. Jaringan prasarana energi.
  - o Sistem jaringan prasarana telekomunikasi.
    1. Penyelenggaraan jaringan terestrial; dan
    2. Penyelenggaraan jaringan satelit.
  - o Sistem jaringan prasarana sumber daya air.
    1. Wilayah sungai;
    2. Danau/waduk;
    3. Daerah irigasi;
    4. Prasarana air baku untuk air bersih; dan
    5. Prasarana dan jaringan air bersih ke kelompok pengguna.
  - o Sistem jaringan prasarana lingkungan.
    1. Sistem jaringan air limbah; dan
    2. Sistem jaringan persampahan.
- III. Rencana pola ruang wilayah Kabupaten Gunung Mas meliputi:
- a. Rencana kawasan lindung.
- Kawasan lindung ditetapkan dengan memperhatikan kawasan lindung yang telah ditetapkan secara nasional dan kawasan lindung yang ditetapkan oleh provinsi serta kawasan lindung sesuai perkembangan yang terdapat di wilayah Kabupaten. Kawasan lindung tersebut meliputi:
1. Kawasan hutan lindung terdiri dari:
    - Kecamatan Damang Batu;
    - Kecamatan Miri Manasa; dan
    - Kecamatan Kahayan Hulu Utara
  2. Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya terdiri dari:
    - Kawasan bergambut di daerah hulu sungai Rungan, sungai Miri dan sungai Manuhing yang telah menjadi hutan lindung; dan
    - Kawasan resapan air terdapat di kawasan hutan
  3. Kawasan perlindungan setempat terdiri dari;
    - Kawasan sempadan sungai; dan
    - Kawasan ruang terbuka hijau perkotaan.
  4. Kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya terdiri dari:
    - Kawasan taman hutan raya berada di kawasan hutan lindung;
    - Kawasan wisata alam;
    - Kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan kabupaten yaitu Rumah Adat Betang di Desa Tumbang Anoi; dan

- Koridor satwa dan dataran tinggi di Kecamatan Damang Batu dan Kecamatan Miri Manasa.
5. Kawasan rawan bencana alam.
  - b. Rencana kawasan budidaya.  
Kawasan Budidaya tersebut terdiri atas:
    1. Kawasan peruntukan hutan produksi;
    2. Kawasan peruntukan pertanian;
    3. Kawasan peruntukan pertambangan;
    4. Kawasan peruntukan permukiman;
    5. Kawasan peruntukan industri;
    6. Kawasan peruntukan wisata; dan
    7. Kawasan peruntukan lainnya.
- IV. Rencana pengembangan kawasan strategis yang ada di Kabupaten Gunung Mas meliputi:
- a. Kawasan Strategis Provinsi.
    1. Rumah Adat Betang di Tumbang Anoi; dan
    2. Kawasan berpotensi pengembangan sumber daya energi.
  - b. Kawasan Strategis Kabupaten.
    1. Kawasan strategis kepentingan ekonomi;
    2. Kawasan strategis peningkatan fungsi dan daya dukung lingkungan; dan
    3. Kawasan strategis kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi.
- V. Arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten memuat :
- a. Arahan perwujudan rencana struktur ruang;
  - b. Arahan perwujudan rencana pola ruang; dan
  - c. Arahan perwujudan rencana tata ruang kawasan strategis kabupaten.

#### **2.3.2.4 Isu Strategis Kabupaten Gunung Mas**

Isu strategis memberikan gambaran tentang hal-hal yang menjadi fokus dan urgensi dalam pembangunan di Kabupaten Gunung Mas. Isu strategis menjadi hal krusial karena pengaruh yang besar, luas, dan signifikan terhadap tantangan dan peluang pembangunan masa mendatang. Berdasarkan identifikasi dari berbagai isu baik internasional, nasional maupun daerah, dapat ditentukan isu strategis untuk Kabupaten Gunung Mas yang akan ditangani dalam 5 (lima) tahun ke depan yang dijabarkan sebagai berikut:

##### **1) Percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan aksesibilitas wilayah**

Percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan aksesibilitas wilayah di Kabupaten Gunung Mas menjadi kunci untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih merata dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Saat ini, banyak wilayah, terutama di daerah pedalaman, yang masih mengalami kesulitan dalam mengakses fasilitas dasar seperti jalan yang layak, air bersih, listrik, dan jaringan komunikasi. Keterbatasan infrastruktur ini tidak hanya menghambat mobilitas barang dan orang, tetapi juga membatasi kesempatan bagi masyarakat untuk mengakses layanan pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Oleh karena itu, percepatan pembangunan

infrastruktur dasar menjadi langkah strategis untuk mengatasi ketimpangan pembangunan antar wilayah.

Salah satu sektor yang membutuhkan perhatian khusus adalah pembangunan infrastruktur transportasi, seperti jalan, jembatan, dan sarana transportasi lainnya, yang menghubungkan daerah-daerah terpencil dengan pusat-pusat kegiatan ekonomi. Infrastruktur yang baik akan memudahkan distribusi hasil pertanian dan produk lokal lainnya ke pasar yang lebih luas, meningkatkan konektivitas antara wilayah, dan membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat. Selain itu, penyediaan akses listrik dan air bersih yang merata akan memperbaiki kualitas hidup masyarakat dan mendukung kegiatan rumah tangga maupun usaha kecil dan menengah. Infrastruktur telekomunikasi dan internet yang lebih baik juga penting untuk meningkatkan akses informasi dan membuka peluang baru dalam bidang pendidikan dan bisnis. Namun, untuk memastikan keberlanjutan pembangunan infrastruktur, penting bagi pemerintah Kabupaten Gunung Mas untuk mengintegrasikan perencanaan infrastruktur dengan pendekatan yang berbasis pada kebutuhan lokal dan berkelanjutan. Partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan juga sangat penting untuk memastikan bahwa infrastruktur yang dibangun benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan kondisi setempat. Dengan pengelolaan yang baik dan kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat, percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan aksesibilitas wilayah di Kabupaten Gunung Mas dapat mempercepat proses pembangunan dan menciptakan kesejahteraan yang lebih merata bagi seluruh masyarakat.

## **2) Pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan**

Pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan di Kabupaten Gunung Mas merupakan tantangan yang harus dihadapi dalam rangka menciptakan pembangunan yang tidak hanya menguntungkan secara ekonomi tetapi juga menjaga kelestarian alam untuk generasi yang akan datang. Kabupaten ini memiliki kekayaan alam yang melimpah, seperti hutan tropis, sungai, dan berbagai ekosistem lainnya, yang berperan penting dalam kehidupan masyarakat serta keberlanjutan sektor-sektor ekonomi seperti pertanian, perkebunan, dan pariwisata. Namun, tanpa pengelolaan yang baik, sumber daya alam bisa mengalami kerusakan yang mengancam keseimbangan ekologis dan mengurangi kualitas hidup masyarakat.

Salah satu aspek penting dalam pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan adalah perlindungan terhadap hutan dan kawasan konservasi. Deforestasi yang disebabkan oleh pembalakan liar, konversi lahan untuk pertanian, dan pembukaan lahan untuk perkebunan sering kali mengancam keberlanjutan ekosistem. Oleh karena itu, pemerintah Kabupaten Gunung Mas perlu meningkatkan penegakan hukum terkait perlindungan hutan, mengembangkan program reboisasi, dan mendorong penerapan sistem pertanian yang ramah lingkungan. Selain itu, penting juga untuk mendorong masyarakat untuk beralih ke praktik pertanian yang berkelanjutan, seperti pertanian organik dan agroforestry, yang dapat meningkatkan hasil pertanian tanpa merusak lingkungan.

Selain perlindungan terhadap hutan, pengelolaan sumber daya air dan pengelolaan sampah juga menjadi fokus utama dalam menjaga kelestarian

lingkungan. Pencemaran sungai dan danau akibat limbah industri dan rumah tangga, serta buruknya pengelolaan sampah, dapat merusak ekosistem perairan dan mengancam kesehatan masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu mengimplementasikan kebijakan pengelolaan sampah yang lebih efektif, seperti program pengurangan sampah plastik dan peningkatan sistem daur ulang, serta memperbaiki sistem sanitasi dan pengelolaan air. Melalui upaya-upaya tersebut, Kabupaten Gunung Mas dapat menciptakan keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan pelestarian lingkungan, yang pada gilirannya akan mendukung kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Kondisi lingkungan hidup dan potensi bencana alam memiliki keterkaitan yang erat dan menjadi isu krusial yang perlu mendapatkan perhatian serius. Kerusakan lingkungan, seperti deforestasi, pencemaran air dan udara, serta degradasi lahan, secara signifikan dapat meningkatkan risiko dan dampak bencana alam. Hilangnya tutupan hutan mengurangi kemampuan tanah dalam menyerap air, memperbesar potensi banjir dan tanah longsor. Pencemaran lingkungan dapat memperburuk kualitas air dan tanah, mengancam kesehatan masyarakat dan ekosistem, serta melemahkan ketahanan terhadap dampak perubahan iklim.

Berdasarkan kajian risiko bencana Kabupaten Gunung Mas, bencana yang berpotensi di Kabupaten Gunung Mas, yakni banjir, banjir bandang, kebakaran hutan dan lahan, tanah longsor, kekeringan dan cuaca ekstrim. Oleh karena itu, perangkat daerah bersama masyarakat sepakat menjadikan bencana dengan risiko tinggi tersebut sebagai prioritas dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kabupaten Gunung Mas. Hasil pengkajian risiko bencana tersebut merupakan langkah untuk menentukan arahan kebijakan penanggulangan bencana di Kabupaten Gunung Mas yang lebih terfokus dan terarah untuk ke depannya. Berdasarkan hasil prioritas tersebut, maka dirumuskan rekomendasi kebijakan penanggulangan bencana untuk pemerintah Kabupaten Gunung Mas yang ditujukan untuk memperkecil tingkat bahaya dan mengurangi kerentanan penduduk terpapar. Rekomendasi kebijakan penanggulangan bencana yang bertujuan untuk peningkatan kapasitas pemerintah daerah maupun masyarakat dapat mengacu pada kajian kapasitas yang dihasilkan dari analisis kajian ketahanan daerah. Indeks ketahanan daerah Kabupaten Gunung Mas sebesar 0,42. Hal ini menunjukkan Kabupaten Gunung Mas memiliki tingkat kapasitas sedang. Upaya peningkatan kapasitas dapat dilakukan pemerintah melalui kebijakan kelembagaan serta pengembangan sistem penanggulangan bencana untuk meminimalisir risiko bencana alam yang berpotensi terjadi di Kabupaten Gunung Mas.

### **3) Peningkatan pembangunan manusia sesuai mutu pelayanan dasar**

Peningkatan pembangunan manusia di Kabupaten Gunung Mas, yang berfokus pada mutu pelayanan dasar, merupakan langkah penting untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan mendukung pembangunan yang berkelanjutan. Pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, air bersih, serta infrastruktur dan fasilitas umum lainnya sangat berperan dalam

menciptakan masyarakat yang produktif dan sejahtera. Untuk itu, pemerintah daerah harus memastikan bahwa seluruh lapisan masyarakat, terutama yang tinggal di daerah terpencil, dapat mengakses pelayanan dasar dengan kualitas yang memadai. Hal ini juga akan berkontribusi pada peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), yang merupakan indikator penting dalam menilai keberhasilan pembangunan daerah. Di sektor pendidikan, peningkatan kualitas dan akses pendidikan harus menjadi prioritas utama. Meskipun pendidikan telah tersedia di sebagian besar wilayah Kabupaten Gunung Mas, masih banyak daerah yang kekurangan tenaga pengajar berkualitas, fasilitas yang memadai, serta akses terhadap pendidikan tinggi. Untuk itu, pemerintah daerah perlu mengoptimalkan distribusi guru terlatih dan meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendidikan, baik di tingkat dasar maupun menengah. Selain itu, program-program pendidikan yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja, seperti pelatihan keterampilan dan pengembangan teknologi, dapat memberikan peluang bagi generasi muda untuk mengakses pekerjaan yang lebih baik dan lebih berkelanjutan.

Di sektor kesehatan, perbaikan mutu pelayanan kesehatan sangat diperlukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kabupaten Gunung Mas masih menghadapi tantangan dalam hal aksesibilitas dan kualitas layanan kesehatan, terutama di daerah terpencil. Oleh karena itu, pembangunan puskesmas dan rumah sakit dengan fasilitas yang lebih lengkap serta peningkatan jumlah tenaga medis yang profesional akan sangat mendukung peningkatan kualitas hidup masyarakat. Selain itu, upaya pencegahan penyakit melalui program kesehatan masyarakat, seperti imunisasi, sanitasi, dan edukasi hidup sehat, harus dilakukan secara masif untuk menurunkan angka kemiskinan dan meningkatkan produktivitas masyarakat. Untuk mencapai tujuan tersebut, kolaborasi antara pemerintah daerah, masyarakat, dan sektor swasta sangat penting. Peningkatan kualitas pelayanan dasar harus disertai dengan pengelolaan yang efisien dan transparan agar pembangunan manusia di Kabupaten Gunung Mas bisa berjalan dengan maksimal. Dengan memperbaiki mutu pelayanan dasar, Kabupaten Gunung Mas dapat menciptakan masyarakat yang lebih sehat, terdidik, dan produktif, yang pada akhirnya akan mendorong kemajuan ekonomi dan sosial yang lebih berkelanjutan.

#### **4) Pemanfaatan potensi ekonomi unggulan dalam akselerasi pertumbuhan ekonomi**

Pemanfaatan potensi ekonomi unggulan di Kabupaten Gunung Mas dalam akselerasi pertumbuhan ekonomi merupakan langkah strategis untuk memacu perkembangan daerah yang berkelanjutan. Kabupaten ini memiliki sejumlah potensi unggulan yang belum dimaksimalkan secara optimal, seperti sektor pertanian, perkebunan, kehutanan, serta pariwisata alam. Salah satu contohnya adalah hasil pertanian seperti kopi, karet, dan rempah-rempah yang menjadi komoditas unggulan dengan pasar yang cukup besar. Untuk itu, penting bagi pemerintah daerah untuk mendorong pengembangan sektor-sektor ini melalui peningkatan produktivitas, kualitas produk, dan diversifikasi pasar. Melalui penerapan teknologi pertanian yang modern, serta peningkatan kapasitas petani dan pelaku usaha, sektor ini dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian daerah.

Selain sektor pertanian dan perkebunan, sektor pariwisata juga memiliki potensi besar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Kabupaten Gunung Mas. Keindahan alam dengan hutan tropis, danau, serta keberagaman budaya yang dimiliki daerah ini dapat dikembangkan menjadi daya tarik wisata yang mengundang pengunjung dari dalam maupun luar negeri. Untuk memanfaatkan potensi pariwisata, diperlukan pembangunan infrastruktur yang memadai, seperti akses transportasi yang lebih baik, fasilitas akomodasi yang nyaman, serta promosi yang gencar. Dengan pengelolaan yang baik dan berbasis pada keberlanjutan, pariwisata dapat menjadi sumber pendapatan utama yang mempercepat pertumbuhan ekonomi lokal, menciptakan lapangan kerja, dan mendorong peningkatan pendapatan masyarakat.

Namun, untuk mempercepat akselerasi pertumbuhan ekonomi melalui pemanfaatan potensi unggulan ini, dibutuhkan sinergi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat. Pemerintah daerah perlu menciptakan iklim investasi yang kondusif, memberikan pelatihan dan pendampingan kepada pelaku usaha lokal, serta mengembangkan kebijakan yang mendukung keberlanjutan ekonomi daerah. Di sisi lain, masyarakat juga harus diberdayakan dengan keterampilan dan pengetahuan yang sesuai dengan kebutuhan pasar. Melalui pemanfaatan potensi ekonomi unggulan secara optimal, Kabupaten Gunung Mas memiliki peluang untuk mempercepat pertumbuhan ekonominya dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Berdasarkan hasil analisa *Location Quotient* (LQ) dan pembahasan potensi sektor pertanian, peternakan, perikanan, ekonomi dan wisata Kabupaten Gunung Mas dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai bahan rekomendasi kepada Pemerintah Kabupaten Gunung Mas dalam rangka peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Adapun beberapa kesimpulan tersebut antara lain adalah:

1. Sektor yang menjadi potensi unggulan di Kabupaten Gunung Mas, yaitu: sektor pertanian (tanaman pangan, tanaman buah dan perkebunan), peternakan, perikanan dan ekowisata.
2. Tanaman pangan yang menjadi potensi unggulan daerah Kabupaten Gunung Mas yaitu: ubi kayu dan jagung.
3. Tanaman buah yang menjadi potensi unggulan adalah pisang.
4. Tanaman perkebunan potensi unggulan yaitu perkebunan kelapa sawit dan karet.
5. Sektor peternakan, potensinya adalah ternak babi, sapi potong, ayam pedaging dan ayam petelur.
6. Sektor perikanan, potensinya adalah budidaya ikan patin dan nila.
7. Sektor ekonomi ditandai dengan jumlah UMKM yang terus berkembang terutama usaha mikro.
8. Potensi pariwisata di Kabupaten Gunung Mas cukup besar, namun belum banyak yang dikelola dengan baik.

Berdasarkan analisa di atas, beberapa rekomendasi kebijakan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas dalam pengembangan potensi ekonomi daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yaitu:

1. Mendirikan *Science Techno Park* untuk mendorong inovasi dan diversifikasi produk unggulan daerah.
2. Diperlukan kebijakan pemerintah daerah untuk melakukan deregulasi dan kemudahan izin serta membangun sistem informasi pelayanan terpadu.
3. Diperlukan pelatihan, pendampingan, seminar, lokakarya dan studi banding terhadap aparaturnya daerah dan masyarakat/pelaku usaha untuk meningkatkan kapasitas kepemimpinan dan keterampilan serta kreativitas.
4. Diperlukannya perbaikan infrastruktur jalan, irigasi dan pasar untuk menunjang dan mempelancar aktivitas ekonomi masyarakat dan menggali potensi pariwisata.
5. Memfasilitasi sumber pembiayaan melalui pembentukan lembaga penjamin perkreditan daerah (Jamkrida).
6. Mengembangkan sistem informasi dan komunikasi mengenai kondisi dan lokasi potensi daerah.
7. Meningkatkan promosi dan pemasaran terkait melalui kegiatan expo, website, media sosial maupun kerjasama lintas daerah.

#### **5) Optimalisasi penanggulangan kemiskinan yang terstruktur**

Optimalisasi penanggulangan kemiskinan yang terstruktur di Kabupaten Gunung Mas merupakan hal yang sangat penting untuk mencapai kesejahteraan sosial yang merata bagi seluruh lapisan masyarakat. Kemiskinan seringkali disebabkan oleh kombinasi faktor, termasuk rendahnya akses terhadap pendidikan, layanan kesehatan, pekerjaan yang layak, serta ketergantungan pada sektor ekonomi yang terbatas. Oleh karena itu, penanggulangan kemiskinan harus dilakukan melalui pendekatan yang terintegrasi dan menyeluruh, dengan melibatkan berbagai sektor, mulai dari pendidikan, kesehatan, infrastruktur, hingga pemberdayaan ekonomi masyarakat. Salah satu langkah yang dapat dilakukan adalah dengan meningkatkan kualitas pendidikan dan pelatihan keterampilan, sehingga masyarakat memiliki kemampuan untuk mengakses peluang kerja yang lebih baik dan meningkatkan taraf hidup masyarakat. Selain itu, pemberdayaan ekonomi masyarakat juga menjadi kunci penting dalam mengatasi kemiskinan. Kabupaten Gunung Mas perlu mengembangkan program-program yang mendukung Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM) yang berorientasi pada sektor-sektor unggulan lokal, seperti pertanian, perkebunan, dan kerajinan tradisional. Penyediaan akses permodalan, pelatihan keterampilan manajerial, dan peningkatan akses pasar menjadi hal yang sangat penting untuk membantu pelaku UMKM berkembang dan memperbaiki taraf hidup masyarakat. Pemerintah daerah juga perlu bekerja sama dengan sektor swasta dalam menciptakan lapangan kerja yang berkualitas serta mengurangi ketimpangan ekonomi antar wilayah, terutama di daerah terpencil.

Selanjutnya, penanggulangan kemiskinan yang terstruktur juga memerlukan pemantauan dan evaluasi yang berkelanjutan untuk memastikan efektivitas program-program yang dijalankan. Program bantuan sosial harus tepat sasaran dan disertai dengan upaya untuk mengurangi ketergantungan pada bantuan dengan mendorong masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam

proses pembangunan. Implementasi kebijakan yang berbasis pada data yang akurat, serta kolaborasi antara pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan sektor swasta, akan mempercepat tercapainya tujuan pengentasan kemiskinan di Kabupaten Gunung Mas. Dengan pendekatan yang terstruktur dan berkelanjutan, kemiskinan dapat ditanggulangi secara lebih efektif dan masyarakat dapat memperoleh peluang yang setara untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

## **6) Percepatan implementasi reformasi birokrasi**

Percepatan implementasi reformasi birokrasi di Kabupaten Gunung Mas sangat penting untuk menciptakan pemerintahan yang lebih efisien, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Reformasi birokrasi bertujuan untuk mengurangi birokrasi yang berbelit-belit, meningkatkan kualitas layanan publik, serta memperkuat akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan anggaran dan sumber daya pemerintah. Di Kabupaten Gunung Mas, implementasi reformasi birokrasi dapat menjadi kunci untuk meningkatkan kinerja pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan yang lebih cepat dan berkualitas kepada masyarakat, serta mengurangi potensi korupsi dan penyalahgunaan wewenang.

Salah satu langkah penting dalam percepatan reformasi birokrasi adalah dengan memperbaiki sistem manajemen Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Sipil Negara (ASN). Pemerintah daerah perlu melakukan seleksi yang lebih ketat untuk memastikan bahwa pegawai negeri yang diangkat memiliki kompetensi dan integritas yang sesuai dengan tuntutan tugas dan pelayanan publik. Selain itu, pelatihan dan pengembangan profesionalisme ASN perlu dilakukan secara berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan keterampilan dalam menggunakan teknologi informasi. Pemanfaatan teknologi dalam administrasi pemerintahan juga sangat penting untuk mempercepat proses pelayanan kepada masyarakat dan mengurangi praktik-praktik birokrasi yang tidak efisien.

Di samping itu, percepatan implementasi reformasi birokrasi juga memerlukan perbaikan dalam sistem pengawasan dan evaluasi kinerja pemerintah. Pemerintah daerah harus memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil dapat dipertanggungjawabkan kepada publik dengan cara yang transparan dan terbuka. Salah satu langkah yang dapat dilakukan adalah dengan memperkenalkan sistem pengaduan publik dan mekanisme partisipasi masyarakat dalam pengawasan kebijakan pemerintah. Dengan melibatkan masyarakat dalam proses evaluasi dan pengawasan, maka akuntabilitas pemerintah akan semakin terjaga. Percepatan reformasi birokrasi ini, jika dilaksanakan dengan baik, akan membantu memperbaiki tata kelola pemerintahan dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah Kabupaten Gunung Mas.

## BAB III

### VISI, MISI DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN

#### 3.1 Visi, Misi, Tujuan Dan Sasaran

Visi, misi, tujuan dan sasaran yang termuat dalam RPJMD Kabupaten Gunung Mas Tahun 2025–2029 merupakan kerangka strategis untuk mengoptimalkan pengelolaan potensi sumber daya Kabupaten Gunung Mas. Kabupaten Gunung Mas memiliki sumber daya alam yang melimpah, termasuk potensi pertambangan, pertanian, dan pariwisata yang memberikan landasan kuat dalam mendukung pembangunan daerah. Dengan konteks ini, visi dan misi RPJMD diharapkan mampu menjawab kebutuhan dan tantangan pembangunan Kabupaten Gunung Mas dalam menyejahterakan masyarakat. Upaya pencapaian visi dan misi pembangunan ditindaklanjuti dengan perumusan tujuan dan sasaran dalam RPJMD. Tujuan dan sasaran pembangunan memiliki peran krusial dalam mengoperasionalkan visi dan misi ke dalam program pembangunan yang konkret. Penyusunan tujuan yang spesifik dan terukur akan memungkinkan pemangku kepentingan untuk mengevaluasi efektivitas kebijakan yang diterapkan, sekaligus memastikan bahwa pembangunan daerah berjalan sesuai dengan prioritas yang telah ditetapkan.

##### 3.1.1 Visi

Visi merupakan kondisi yang ingin dicapai pada akhir periode perencanaan, di mana visi mengenai pembangunan daerah dalam RPJMD merupakan visi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih yang disampaikan pada waktu Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Visi pembangunan daerah dalam RPJMD Kabupaten Gunung Mas Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran dari visi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Visi menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai (*desired future*) dalam masa jabatan selama 5 (lima) tahun.

Dengan mempertimbangkan hasil capaian pelaksanaan pembangunan periode sebelumnya, potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang yang ada di Kabupaten Gunung Mas, visi yang hendak dicapai dalam periode tahun 2025–2029 adalah:

**“MEWUJUDKAN GUNUNG MAS MAJU, BERKELANJUTAN, BERDAYA SAING, SEJAHTERA, DAN MANDIRI”**

Dalam rumusan visi ini terkandung empat rumusan pokok visi yang ingin dicapai oleh pemerintah Kabupaten Gunung Mas di tahun 2029. Keempat rumusan pokok visi ini merupakan satu kesatuan pernyataan tentang kondisi ideal yang hendak diwujudkan dalam 5 (lima) tahun kedepan, maka penjabaran makna pokok visi RPJMD Kabupaten Gunung Mas dijelaskan sebagai berikut:

1. **Maju**, terwujudnya pembangunan Kabupaten Gunung Mas yang maju melalui peningkatan perekonomian daerah secara adil dan inklusif melalui penguatan sektor unggulan dan hilirisasi.
2. **Berkelanjutan**, pokok visi ini sebagai bentuk komitmen pemerintah Kabupaten Gunung Mas untuk mewujudkan pembangunan infrastruktur daerah yang handal dan berkualitas dengan memperhatikan kelestarian

lingkungan hidup agar pembangunan yang berjalan dapat selaras dengan konsep pembangunan yang berkelanjutan.

3. **Berdaya Saing**, pokok visi ini memiliki arti bahwa pembangunan ditujukan untuk mewujudkan Kabupaten Gunung Mas yang memiliki daya saing dalam pembangunan sumber daya manusia dan pengembangan budaya local.
4. **Sejahtera**, terwujudnya pengentasan kemiskinan dalam rangka pemenuhan kebutuhan sosial masyarakat secara adil dan merata.
5. **Mandiri**, fokus pada visi ini adalah untuk menciptakan pemerintahan Kabupaten Gunung Mas yang bersih dan profesional.

### 3.1.2 Misi

Misi adalah langkah strategis yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi pembangunan. Rumusan misi yang baik membantu menggambarkan secara jelas visi yang ingin dicapai dan menguraikan upaya-upaya apa yang harus dilakukan. Dalam suatu dokumen perencanaan, rumusan misi penting untuk memberikan kerangka bagi tujuan dan sasaran serta arah kebijakan yang ingin dicapai dan menentukan jalan yang akan ditempuh untuk mencapai visi. Dengan memerhatikan visi serta perubahan paradigma dan kondisi yang akan dihadapi pada masa yang akan datang maka dalam upaya mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Gunung Mas Tahun 2025-2029, misi pembangunan sebagai berikut:

- 1) **MISI 1: Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Wilayah yang Terintegrasi dan Berkelanjutan**, Membangun dan meningkatkan infrastruktur dasar, seperti jalan, jembatan, irigasi, air bersih, listrik, telekomunikasi, perumahan permukiman dan sanitasi untuk mendukung aktivitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat serta peningkatan sarana prasarana pembangunan desa.
- 2) **MISI 2: Peningkatan Kualitas Pembangunan SDM yang Unggul, Berbudaya dan Berdaya Saing**, Mengembangkan kompetensi dan kapasitas sumber daya manusia agar semakin berdaya saing melalui pendidikan dan pelatihan yang berkualitas, serta memastikan akses pelayanan pendidikan dan kesehatan yang merata, terjangkau dan berkualitas bagi seluruh masyarakat Kabupaten Gunung Mas.
- 3) **MISI 3: Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif**, Mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis potensi daerah dengan fokus pada sektor pertanian, perikanan, dan industri pengolahan yang dapat mendukung daya saing perekonomian daerah.
- 4) **MISI 4: Peningkatan Reformasi Birokrasi**, Misi ini bertujuan untuk mengoptimalkan kapasitas birokrasi pemerintahan Kabupaten Gunung Mas dalam memberikan pelayanan publik secara profesional, bersih, dan akuntabel.

### 3.1.3 TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan dan sasaran merupakan hasil perumusan capaian strategi yang menunjukkan tingkat kinerja pembangunan tertinggi sebagai dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Sasaran RPJMD dapat diterjemahkan sebagai sasaran tahunan melalui arah kebijakan yang



menjadi pedoman dalam penyusunan prioritas dan sasaran tahunan (prioritas dan sasaran pembangunan RKPD).

Perumusan tujuan dan sasaran dari visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah akan menjadi landasan perumusan tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Tujuan adalah pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Tujuan juga merupakan suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sasaran untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Kriteria rumusan tujuan pembangunan sebagai berikut: (1) Diturunkan secara lebih operasional dari masing-masing misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan dengan memperhatikan visi; (2) Untuk mewujudkan misi dapat dicapai melalui beberapa tujuan; (3) Disusun dengan memperhatikan permasalahan dan isu-isu strategis pembangunan daerah; (4) Dapat diukur dalam jangka waktu 5 (lima) tahun; dan (5) Disusun dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah/perangkat daerah yang diperoleh dari pencapaian outcome program perangkat daerah. Kriteria sasaran memperhatikan hal-hal sebagai berikut: (1) Dirumuskan untuk mencapai atau menjelaskan tujuan; (2) Untuk mencapai satu tujuan dapat dicapai melalui beberapa sasaran; (3) Disusun dengan memperhatikan permasalahan dan isu-isu strategis pembangunan daerah; dan memenuhi kriteria *SMART-C*. Merujuk dari berbagai penjelasan di atas dan untuk mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Gunung Mas Tahun 2025-2029 maka dirumuskan tujuan dan indikator beserta target sebagai berikut:

Tabel III.1

## Rumusan Tujuan dan Indikator Tujuan RPJMD Tahun 2025-2030

VISI: "MEWUJUDKAN GUNUNG MAS YANG MAJU, BERKELANJUTAN, BERDAYA SAING, SEJAHTERA, DAN MANDIRI".				
MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	TARGET PEMBANGUNAN	
			2025	2030
<b>MISI 1: Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Wilayah yang Terintegrasi dan Berkelanjutan</b>	Tujuan 1: Menyediakan Infrastruktur Dasar yang Berkualitas	Indeks Infrastruktur	60,0	62,5
	Tujuan 2: Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup	Penurunan Intensitas Emisi GRK	10,00	15,00

VISI: “MEWUJUDKAN GUNUNG MAS YANG MAJU, BERKELANJUTAN, BERDAYA SAING, SEJAHTERA, DAN MANDIRI”.				
MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	TARGET PEMBANGUNAN	
			2025	2030
<b>MISI 2: Peningkatan Kualitas Pembangunan SDM yang Unggul, Berbudaya dan Berdaya Saing</b>	Tujuan 3: Meningkatkan Kualitas SDM yang Unggul, Berbudaya dan Berdaya Saing	Indeks Pembangunan Manusia	74,17	76,53
	Tujuan 4: Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat	Tingkat Kemiskinan	4,61	3,60
<b>MISI 3: Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif</b>	Tujuan 5: Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Wilayah Yang Berkeadilan Dalam Rangka Mendukung Transformasi Ekonomi	Laju Pertumbuhan Ekonomi	5,00	6,00
		PDRB per kapita	70,00	75,00
<b>MISI 4: Peningkatan Reformasi Birokrasi</b>	Tujuan 6: Meningkatkan Tata Kelola Pemerintah Yang Profesional, Bersih Dan Akuntabel	Indeks Reformasi Birokrasi	60,00	70,00
		Indeks Daya Saing Daerah	3,35	3,76

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan yaitu hasil yang akan dicapai Kabupaten Gunung Mas dari masing-masing tujuan dalam rumusan yang lebih spesifik dan terukur dalam suatu indikator beserta targetnya. Oleh karena itu, sasaran dinyatakan sesuai indikator secara spesifik, fokus, terukur, dan dapat dicapai dengan indikator kinerja atau tolok ukur keberhasilan pencapaian sasaran yang akan diwujudkan selama 5 (lima) tahun. Setiap sasaran mencerminkan indikator kinerja yang akan dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang. Merujuk dari berbagai penjelasan di atas dan berdasarkan visi dan misi Kepala Daerah maka sasaran beserta indikator pada tiap tujuan yang dijabarkan sebagai berikut:

**1. T1. Menyediakan Infrastruktur Dasar yang Berkualitas**

Dalam rangka memaksimalkan pembangunan daerah Kabupaten Gunung Mas, tujuan ini dicapai dengan sasaran sebagai berikut:



- Meningkatnya kualitas perumahan dan kawasan pemukiman Masyarakat;
- Meningkatnya kapasitas dan kualitas aksesibilitas dan konektivitas antar wilayah; dan
- Meningkatnya pemerataan sarana dan prasarana pembangunan di seluruh wilayah.

## **2. T2. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup**

Dalam rangka memaksimalkan pembangunan daerah Kabupaten Gunung Mas, tujuan ini dicapai dengan sasaran sebagai berikut:

- Meningkatnya kualitas pengelolaan lingkungan hidup; dan
- Meningkatnya kualitas antisipasi dan penanganan bencana daerah.

## **3. T3. Meningkatkan Kualitas SDM yang Unggul, Berbudaya dan Berdaya Saing**

Dalam rangka memaksimalkan pembangunan daerah Kabupaten Gunung Mas, tujuan ini dicapai dengan sasaran sebagai berikut:

- Meningkatnya kualitas Pendidikan;
- Meningkatnya derajat kesehatan Masyarakat;
- Meningkatnya kesetaraan gender dalam Pembangunan; dan
- Meningkatnya pembangunan SDM yang berbudaya dan kehidupan yang berkualitas.

## **4. T4. Meningkatkan Pembangunan ekonomi wilayah yang berkeadilan dalam rangka mendukung transformasi ekonomi**

Dalam rangka memaksimalkan pembangunan daerah Kabupaten Gunung Mas, tujuan ini dicapai dengan sasaran sebagai berikut:

- Meningkatnya produktivitas sektor unggulan daerah;
- Meningkatnya pemberdayaan perekonomian kerakyatan berbasis hilirisasi; dan
- Meningkatnya daya saing perekonomian daerah.

## **5. T5. Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat**

Dalam rangka mencapai tujuan pembangunan daerah Kabupaten Gunung Mas, tujuan ini dicapai dengan sasaran sebagai berikut:

- Meningkatnya pemerataan kesejahteraan Masyarakat; dan
- Meningkatnya penyerapan tenaga kerja berkualitas.

## **6. T6. Meningkatkan tata Kelola pemerintah yang profesional, bersih, dan akuntabel**

Dalam rangka mencapai tujuan pembangunan daerah Kabupaten Gunung Mas, tujuan ini dicapai dengan sasaran sebagai berikut:

- Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah;
- Meningkatnya kualitas pelayanan publik berbasis teknologi informasi; dan
- Meningkatnya pengelolaan keuangan daerah yang bersih, transparan dan berkualitas.



Dengan rumusan tujuan, sasaran dan indikator di atas maka keterkaitan antara visi, misi, tujuan, sasaran beserta targetnya yang disajikan pada tabel berikut:



Tabel III.2

## Keterkaitan antara Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Gunung Mas Tahun 2025-2029

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET PEMBANGUNAN							
				Satuan	Baseline 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
<b>VISI :</b> <b>“MEWUJUDKAN</b> <b>GUNUNG MAS</b> <b>YANG MAJU,</b> <b>BERKELANJUTAN,</b> <b>BERDAYA SAING,</b> <b>SEJAHTERA, DAN</b> <b>MANDIRI “</b>  <b>MISI 1:</b> <b>Peningkatan</b> <b>Pembangunan</b> <b>Infrastruktur</b> <b>Wilayah yang</b> <b>Terintegrasi dan</b> <b>Berkelanjutan</b>  <b>MISI 2:</b> <b>Peningkatan</b> <b>Kualitas</b> <b>Pembangunan SDM</b> <b>yang Unggul,</b> <b>Berbudaya dan</b> <b>Berdaya Saing</b>	<b>Tujuan 1. Menyediakan</b> <b>Infrastruktur Dasar yang</b> <b>Berkualitas</b>		<b>Indeks Infrastruktur</b>	<b>Poin</b>		<b>60,0</b>	<b>62,5</b>	<b>65,0</b>	<b>67,5</b>	<b>70,0</b>	<b>75,0</b>
		Sasaran 1.1 Meningkatnya kualitas perumahan dan kawasan pemukiman masyarakat	Rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan	%		52,55	53,65	54,75	55,85	56,95	58,05
		Sasaran 1.2 Meningkatnya kapasitas dan kualitas aksesibilitas dan konektivitas antar wilayah	Indeks konektivitas wilayah	Poin	80,12	80,93	81,75	82,56	83,37	84,19	85,00
		Sasaran 1.3 Meningkatnya pemerataan sarana dan prasarana pembangunan di seluruh wilayah	Persentase desa mandiri	%		1,75	2,63	2,63	3,51	3,51	4,39
		<b>Tujuan 2:</b> <b>Meningkatkan Kualitas Lingkungan</b> <b>Hidup</b>		<b>Penurunan</b> <b>intensitas emisi GRK</b>	<b>%</b>		<b>74,17</b>	<b>74,64</b>	<b>75,12</b>	<b>75,59</b>	<b>76,06</b>



VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET PEMBANGUNAN							
				Satuan	Baseline 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
<b>MISI 3: Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif</b>		Sasaran 2.1 Meningkatnya kualitas pengelolaan lingkungan hidup	Indeks kualitas lingkungan hidup	Poin	69,33	70,44	71,55	72,67	73,78	74,89	76,00
		Sasaran 2.1 Meningkatnya kualitas antisipasi dan penanganan bencana daerah	Indeks risiko bencana	Poin		123,5 6	121,8 5	120,1 4	118,4 2	116,7 1	115,0 0
<b>MISI 4: Peningkatan Reformasi Birokrasi</b>	<b>Tujuan 3. Meningkatkan Kualitas SDM yang Unggul, Berbudaya dan Berdaya Saing</b>		<b>Indeks pembangunan manusia</b>	<b>Poin</b>	<b>73,88</b>	<b>74,17</b>	<b>74,64</b>	<b>75,12</b>	<b>75,59</b>	<b>76,06</b>	<b>76,53</b>
		Sasaran 3.1 Meningkatnya kualitas pendidikan	Indeks pendidikan	Poin	64,84	65,78	66,72	67,66	68,60	69,53	70,47
		Sasaran 3.2 Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Indeks kesehatan	Poin	82,43	82,54	82,78	83,01	83,25	83,49	83,72
		Sasaran 3.3 Meningkatnya kesetaraan gender dalam pembangunan	Indeks ketimpangan gender	Poin		0,49	0,47	0,45	0,42	0,40	0,38
		Sasaran 3.4 Meningkatnya pembangunan SDM	Indeks pembangunan kebudayaan	Poin		58,53	58,82	59,12	59,41	59,71	60,00



VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET PEMBANGUNAN							
				Satuan	Baseline 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
		yang berbudaya dan kehidupan yang berkualitas	Indeks Pembangunan Keluarga (Ibangga)	Poin		70.30	71.24	72.18	73.12	74.06	75.00
	<b>Tujuan 4: Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Wilayah Yang Berkeadilan Dalam Rangka Mendukung Tranformasi Ekonomi</b>		<b>Laju Pertumbuhan Ekonomi</b>	%	<b>4,48</b>	<b>5,00</b>	<b>5,20</b>	<b>5,40</b>	<b>5,60</b>	<b>5,80</b>	<b>6,00</b>
			<b>PDRB per kapita</b>	<b>Juta Rp/Kapita</b>	<b>67,08</b>	<b>70,00</b>	<b>71,00</b>	<b>72,00</b>	<b>73,00</b>	<b>74,00</b>	<b>75,00</b>
		Sasaran 4.1 Meningkatnya produktivitas sektor unggulan daerah	LPE kategori pertanian, kehutanan dan perikanan	Poin	2,18	6,50	6,52	6,54	6,56	6,58	6,60
		Sasaran 4.2 Meningkatnya pemberdayaan perekonomian kerakyatan berbasis hilirisasi	LPE kategori industri pengolahan	%	1,54	2,28	3,03	3,77	4,51	5,26	6,00
		Sasaran 4.3. Meningkatnya daya saing perekonomian daerah	Kontribusi PDRB Kabupaten Gunung Mas terhadap PDRB Provinsi Kalimantan Tengah*	%	4,38	4,33	4,36	4,39	4,42	4,45	4,47
	<b>Tujuan 5: Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat</b>		<b>Tingkat Kemiskinan</b>	%	<b>5,68</b>	<b>4,61</b>	<b>4,41</b>	<b>4,21</b>	<b>4,00</b>	<b>3,80</b>	<b>3,60</b>



VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET PEMBANGUNAN							
				Satuan	Baseline 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
		Sasaran 5.1 Meningkatnya pemerataan kejahteraan masyarakat	Gini rasio	Poin	0,309	0,280	0,274	0,268	0,262	0,256	0,250
		Sasaran 5.2 Meningkatnya penyerapan tenaga kerja berkualitas	Tingkat pengangguran terbuka	%	3,12	3,91	3,73	3,55	3,36	3,18	3,00
		<b>Tujuan 6. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintah yang Profesional, Bersih dan Akuntabel</b>	<b>Indeks reformasi birokrasi</b>	<b>Poin</b>		<b>60,00</b>	<b>62,00</b>	<b>64,00</b>	<b>66,00</b>	<b>68,00</b>	<b>70,00</b>
			<b>Indeks daya saing daerah</b>	<b>Poin</b>	<b>3,27</b>	<b>3,35</b>	<b>3,43</b>	<b>3,52</b>	<b>3,60</b>	<b>3,68</b>	<b>3,76</b>
		Sasaran 6.1 Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	Nilai SAKIP	Poin	61,63	63,03	64,42	65,82	67,21	68,61	70,00
		Sasaran 6.2 Meningkatnya kualitas pelayanan publik berbasis teknologi informasi	Indeks pelayanan publik	Poin		81,66	81,70	81,74	81,78	81,82	81,86



VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET PEMBANGUNAN							
				Satuan	Baseline 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
		Sasaran 6.3 Meningkatnya pengelolaan keuangan daerah yang bersih, transparan dan berkualitas	Indeks integritas nasional	Poin		74,59	75,67	76,75	77,84	78,92	80,00

Memahami bahwa Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) memiliki indikator tujuan dan sasaran jangka menengah yang harus didukung oleh pencapaian kinerja perangkat daerah. Maka hal ini menjadi elemen krusial dalam mencapai target pembangunan yang terintegrasi dan efektif. RPJMD sebagai dokumen perencanaan 5 (lima) tahun memuat visi, misi, tujuan, sasaran, serta indikator kinerja yang menjadi pedoman utama bagi seluruh sektor pembangunan di tingkat daerah. Indikator tujuan dan sasaran dalam RPJMD diturunkan secara spesifik ke dalam rencana pembangunan perangkat daerah agar setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) memiliki peran dan tanggung jawab yang jelas dalam mendukung pencapaian target pembangunan. Hal ini menciptakan kesinambungan antara kebijakan strategis daerah dan implementasinya di tingkat teknis melalui program, kegiatan, dan sub kegiatan yang terukur.

Keterpaduan ini memastikan bahwa setiap sasaran perangkat daerah mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah secara keseluruhan. Indikator kinerja di tingkat perangkat daerah harus selaras dengan indikator RPJMD agar perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi pembangunan berjalan terarah dan terukur.



Tabel III.3

## Penjabaran Tujuan dan Sasaran Daerah dan Perangkat Daerah Kabupaten Gunung Mas

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran RPJMD	Indikator Sasaran	Tujuan/Sasaran OPD	Indikator Tujuan/Sasaran OPD	Penanggung Jawab	
Menyediakan Infrastruktur Dasar yang Berkualitas	Indeks Infrastruktur	Meningkatnya kualitas perumahan dan kawasan pemukiman masyarakat	Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan	Meningkatnya akses masyarakat terhadap infrastruktur berkualitas dan terpenuhinya akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan sesuai dengan rencana tata ruang wilayah kabupaten	Persentase permukiman yang tertata	DPU	
					Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur Pekerjaan Umum		DPU
					Persentase ketaatan pembangunan terhadap RTRW/ RTR		
				Meningkatnya kualitas perumahan rakyat	Rasio rumah layak huni	DPU	
				Meningkatnya kualitas kawasan permukiman	1. Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kabupaten/kota yang ditangani 2. Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU	DPU	
				Meningkatkan kapasitas serta kualitas konektivitas wilayah dan Meningkatkan kualitas lingkungan hidup daerah	Indeks Konektivitas Wilayah		DLHKP
				Meningkatnya layanan transportasi darat yang aman	Persentase sarana prasarana perhubungan dalam kondisi baik	DLHKP	
							Tingkat penurunan jumlah kecelakaan
Meningkatnya akses masyarakat terhadap infrastruktur berkualitas dan	Persentase Panjang Jalan Kondisi Permukaan Mantap	DPU					



Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran RPJMD	Indikator Sasaran	Tujuan/Sasaran OPD	Indikator Tujuan/Sasaran OPD	Penanggung Jawab
				terpenuhinya akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan sesuai dengan rencana tata ruang wilayah kabupaten	Kewenangan Kabupaten/Kota	
				Meningkatnya pengelolaan irigasi dan konservasi SDA yang berkelanjutan	-Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi (Usulan baru dasar Permendagri 18/2020 hal.118) -Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kab/Kota (Usulan baru dasar Permendagri 18/2020 hal.118)	DPU
				Meningkatnya penyediaan akses air minum dan sanitasi yang layak dan aman	-Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik (Usulan baru dasar Permendagri 18/2020 hal.119) -Persentase jumlah Rumah tangga yang mendapat akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota (Usulan	DPU



Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran RPJMD	Indikator Sasaran	Tujuan/Sasaran OPD	Indikator Tujuan/Sasaran OPD	Penanggung Jawab
					baru dasar Permendagri 18/2020 hal.119)	
				Meningkatnya pemenuhan kebutuhan penyelenggaraan bangunan gedung, penataan bangunan dan lingkungannya	Jumlah bangunan gedung yang dibangun dan ditingkatkan	DPU
				Meningkatnya kualitas penyelenggaraan jasa konstruksi daerah	Jumlah bangunan beserta lingkungannya yang terbangun dan terkelola dengan baik	DPU
					Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	DPU
					Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	DPU
				Meningkatnya kepatuhan masyarakat dalam PBG (Persetujuan Bangunan Gedung)	Rasio kepatuhan PBG (Persetujuan Bangunan Gedung)	DPU
		Meningkatnya pemerataan sarana dan prasarana pembangunan di seluruh wilayah	Indeks Desa	Meningkatnya pemberdayaan dan kapasitas transmigran dalam pengembangan kawasan transmigrasi, dan Meningkatkan kapasitas UMKM daerah, serta Meningkatkan penyerapan tenaga kerja yang produktif dan berkualitas	Persentase transmigran yang dibina dan diberdayakan	DisnakertranskopUKM
				Meningkatnya pembinaan satuan pemukiman	Jumlah satuan pemukiman yang dibina	DisnakertranskopUKM
				Meningkatkan pemerataan	Persentase Desa Mandiri	DPMD



Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran RPJMD	Indikator Sasaran	Tujuan/Sasaran OPD	Indikator Tujuan/Sasaran OPD	Penanggung Jawab
				pembangunan wilayah perdesaan		
				Meningkatnya Upaya Pengentasan Desa Tertinggal	Persentase pengentasan desa tertinggal	DPMD
					Jumlah Desa yang menerapkan pengelolaan keuangan desa berbasis digital	DPMD
				Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa	Terbinanya Masyarakat Desa mendapat Pelatihan Ekonomi Produktif	DPMD
Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup	Penurunan Intensitas Emisi GRK	Meningkatnya kualitas pengelolaan lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Meningkatkan kapasitas serta kualitas konektivitas wilayah dan Meningkatkan kualitas lingkungan hidup daerah	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	DLHKP
				Meningkatnya kualitas udara	Indeks Kualitas Udara	DLHKP
				Meningkatnya kualitas air	Indeks Kualitas Air	DLHKP
				Meningkatnya kualitas tutupan lahan	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	DLHKP
				Meningkatnya tata kelola persampahan masyarakat	Persentase timbulan sampah yang terangkut ke TPA	DLHKP
		Meningkatnya kualitas antisipasi dan penanganan bencana daerah	Indeks Risiko Bencana	Meningkatkan keamanan, ketentraman dan ketertiban umum dan layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana kebakaran	Cakupan pelayanan kebakaran	SatpolPP
					Tingkat penyelesaian pelanggaran Ketertiban, Keamanan, dan Keindahan (K3)	SatpolPP



Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran RPJMD	Indikator Sasaran	Tujuan/Sasaran OPD	Indikator Tujuan/Sasaran OPD	Penanggung Jawab
				Meningkatkan kualitas penanganan bencana kebakaran	Waktu tanggap ( <i>response time</i> ) penanganan kebakaran	SatpolPP
				Menurunnya pelanggaran peraturan daerah	Persentase Penegakan Hukum Peraturan Daerah	SatpolPP
				Meningkatkan cakupan layanan bencana daerah	Indeks Ketahanan Daerah	BPBD
				Meningkatnya kualitas layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Persentase Jumlah Warga Negara yang Memperoleh Informasi dan Edukasi Rawan Bencana	BPBD
				Meningkatnya penanganan bencana pada saat tanggap darurat	Persentase Penanganan Tanggap Darurat Bencana	BPBD
				Meningkatnya penanganan pasca bencana	Persentase Penanganan Pasca Bencana	BPBD
Meningkatkan Kualitas SDM yang Unggul, Berbudaya dan Berdaya Saing	Indeks Pembangunan Manusia	Meningkatnya kualitas pendidikan	Indeks Pendidikan	Meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat yang merata	Harapan Lama Sekolah	Disdikpora
					Rata-rata Lama Sekolah	
				Meningkatnya partisipasi Pendidikan Anak Usia Dini	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan anak usia dini	Disdikpora
				Meningkatnya partisipasi pendidikan Sekolah Dasar/ sederajat	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	Disdikpora
				Meningkatnya partisipasi pendidikan Sekolah Menengah Pertama/ sederajat		Disdikpora



Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran RPJMD	Indikator Sasaran	Tujuan/Sasaran OPD	Indikator Tujuan/Sasaran OPD	Penanggung Jawab
				Meningkatnya Partisipasi Pendidikan Kesetaraan	Tingkat Partisipasi Warga Negara usia 7-18 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	Disdikpora
				Meningkatnya partisipasi pendidikan Sekolah Menengah Pertama/ sederajat	Iklm Keamanan SMP	Disdikpora
				Meningkatnya partisipasi pendidikan Sekolah Dasar/ sederajat	Iklm Kebhinekaan SD	Disdikpora
				Meningkatnya partisipasi pendidikan Sekolah Menengah Pertama/ sederajat	Iklm Kebinekaan SMP	Disdikpora
				Meningkatnya partisipasi pendidikan Sekolah Dasar/ sederajat	Iklm Inklusivitas SD	Disdikpora
				Meningkatnya partisipasi pendidikan Sekolah Menengah Pertama/ sederajat	Iklm Inklusivitas SMP	Disdikpora
				Meningkatnya partisipasi pendidikan Sekolah Dasar/ sederajat	Iklm Keamanan SD	Disdikpora
				Meningkatnya partisipasi pendidikan Sekolah Dasar/ sederajat	Kemampuan Literasi SD	Disdikpora
				Meningkatnya partisipasi pendidikan Sekolah Dasar/ sederajat	Kemampuan Numerasi SD	Disdikpora
				Meningkatnya partisipasi pendidikan Sekolah Menengah Pertama/ sederajat	Kemampuan Literasi SMP	Disdikpora



Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran RPJMD	Indikator Sasaran	Tujuan/Sasaran OPD	Indikator Tujuan/Sasaran OPD	Penanggung Jawab
				Meningkatnya partisipasi pendidikan Sekolah Menengah Pertama/ sederajat	Kemampuan Numerasi SMP	Disdikpora
				Meningkatnya partisipasi Pendidikan Anak Usia Dini	Peningkatan Proporsi Jumlah Satuan PAUD yang Mendapatkan Minimal Akreditasi B	Disdikpora
				Meningkatnya kualitas pendidik dan tenaga kependidikan	Pertumbuhan Proporsi Guru PAUD Formal dengan kualifikasi S1 / D IV	Disdikpora
				Meningkatnya peran pemuda dalam perekonomian	Persentase pemuda (16-30 tahun) yang mengikuti kegiatan sosial kemasyarakatan dalam tiga bulan terakhir	Disdikpora
				Meningkatnya peran pemuda dalam perekonomian	Persentase pemuda (16-30 tahun) yang mengikuti kegiatan organisasi dalam 3 bulan terakhir	Disdikpora
				Meningkatnya peran pemuda dalam organisasi dan kemasyarakatan	Indeks Pembangunan Pemuda	Disdikpora
				Meningkatnya peran pemuda dalam organisasi dan kemasyarakatan	Indeks Pembangunan Pemuda	Disdikpora
				Meningkatnya peran pemuda dalam perekonomian	Persentase Pemuda (16-30 Tahun) Yang Sedang Tidak Sekolah, Bekerja Atau Mengikuti Pelatihan	Disdikpora
				Meningkatnya prestasi keolahragaan daerah	Persentase penduduk berumur 10 tahun ke atas yang melakukan olahraga selama seminggu terakhir	Disdikpora



Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran RPJMD	Indikator Sasaran	Tujuan/Sasaran OPD	Indikator Tujuan/Sasaran OPD	Penanggung Jawab
				Meningkatnya prestasi keolahragaan daerah	Jumlah kampanye olahraga yang terselenggara setahun terakhir	Disdikpora
				Meningkatnya atlet berprestasi	Persentase Tenaga Keolahragaan yang Bersertifikat Nasional/Internasional	Disdikpora
				Meningkatnya atlet berprestasi	Persentase Olahragawan dalam Pemusatan Latihan (Nasional/Daerah) yang Berprestasi di Tingkat (Nasional)/Internasional	Disdikpora
				Meningkatnya kualitas kurikulum pendidikan	Persentase satuan pendidikan yang mengembangkan kurikulum muatan lokal	Disdikpora
				Meningkatkan budaya literasi masyarakat dan tata kelola pengarsipan dokumen daerah	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Perpus
				Meningkatnya kegemaran membaca oleh masyarakat	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat	Perpus
				Meningkatnya kunjungan perpustakaan daerah	Pertumbuhan kunjungan perpustakaan	Perpus
		Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Indeks Kesehatan	Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Usia Harapan Hidup	Dinkes
				Menurunnya keluhan kesehatan masyarakat	Angka Kesakitan	Dinkes
				Meningkatnya pelayanan kesehatan bagi kelompok rentan, khususnya ibu dan anak	Angka Kematian Bayi	Dinkes
					Angka Kematian Ibu	Dinkes
					Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita	Dinkes



Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran RPJMD	Indikator Sasaran	Tujuan/Sasaran OPD	Indikator Tujuan/Sasaran OPD	Penanggung Jawab
				Meningkatnya akses masyarakat terhadap jaminan kesehatan nasional	Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional	Dinkes
		Meningkatnya kesetaraan gender dalam pembangunan	Indeks Ketimpangan Gender	Meningkatnya kesetaraan Gender, Peran Perempuan, Perlindungan Anak dan terwujudnya keluarga yang berkualitas	Indeks Ketimpangan Gender	DP2KBP3A
					Indeks Pembangunan Gender (IPG)	DP2KBP3A
				Meningkatnya pemberdayaan perempuan dalam pembangunan	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	DP2KBP3A
					Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	DP2KBP3A
					Persentase ARG Pada belanja Langsung	DP2KBP3A
		Meningkatnya pembangunan SDM yang berbudaya dan kehidupan yang berkualitas	Indeks Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan pelestarian warisan budaya Dan kontribusi sektor pariwisata dalam pembangunan	Persentase pelestarian warisan budaya	Disbudpar
				Meningkatnya cagar budaya yang dilestarikan	Persentase Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	Disbudpar
				Meningkatkan kerukunan hidup dan toleransi antar umat beragama, stabilitas ipoleksosbudhankam dan demokrasi daerah	Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	Kesbangpol
					Persentase konflik Ipoleksosbud, hukum dan HAM yang diselesaikan	Kesbangpol
				Terselesaikannya konflik antar kelompok/umat	Angka Konflik yang Diselesaikan	Kesbangpol



Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran RPJMD	Indikator Sasaran	Tujuan/Sasaran OPD	Indikator Tujuan/Sasaran OPD	Penanggung Jawab
				beragama/suku dan lainnya		
					Persentase Masyarakat yang paham terhadap politik	Kesbangpol
					Persentase Masyarakat yang paham terhadap Kesatuan Bangsa	Kesbangpol
			Indeks Pembangunan Keluarga (Ibangga)	Meningkatnya kesetaraan Gender, Peran Perempuan, Perlindungan Anak dan terwujudnya keluarga yang berkualitas	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	DP2KBP3A
					Indeks Perlindungan Anak (IPA)	DP2KBP3A
				Meningkatnya pemenuhan hak anak dan perlindungan terhadap perempuan dan anak	Persentase anak korban kekerasan yang mendapat layanan komprehensif	DP2KBP3A
					Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait	DP2KBP3A
					Persentase Perempuan korban kekerasan dan TPPO yang mendapatkan layanan komprehensif	DP2KBP3A
					Pembelajaran Keluarga(PUSPAGA) yang berperspektif gender dan hak anak sesuai standar	DP2KBP3A
				Meningkatnya perencanaan pembangunan keluarga	TFR (Total Fertility Rate)	DP2KBP3A
					Angka Kelahiran Remaja umur 15-19 tahun(Age Spesifik Fertility Rate/ASFR 15-19)	DP2KBP3A



Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran RPJMD	Indikator Sasaran	Tujuan/Sasaran OPD	Indikator Tujuan/Sasaran OPD	Penanggung Jawab
					Persentase pemakaian kontrasepsi modern (mCPR)	DP2KBP3A
					Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi(Unmet need)	DP2KBP3A
					Persentase keluarga yang mengikuti kelompok kegiatan ketahanan keluarga	DP2KBP3A
Meningkatkan pembangunan ekonomi wilayah yang berkeadilan dalam rangka mendukung tranformasi ekonomi	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Meningkatnya produktivitas sektor unggulan daerah	LPE Kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi sektor pertanian	Pertumbuhan Produksi Pertanian	Dinas Pertanian
				Meningkatnya produksi sektor pertanian	Produksi Pertanian	Dinas Pertanian
				Meningkatkan kualitas sektor ekonomi pada komoditas perikanan dan Meningkatkan ketahanan pangan daerah	LPE subkategori perikanan	Perikanan & Ketapang
					Indeks Ketahanan Pangan	Perikanan & Ketapang
				Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	Perikanan & Ketapang
				Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	Perikanan & Ketapang
				Meningkatnya Konsumsi Ikan oleh Masyarakat	Angka Konsumsi Ikan	Perikanan & Ketapang
				Meningkatnya Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	Persentase Jumlah Cadangan Pangan	Perikanan & Ketapang
					Skor Pola Pangan Harapan Konsumsi	Perikanan & Ketapang



Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran RPJMD	Indikator Sasaran	Tujuan/Sasaran OPD	Indikator Tujuan/Sasaran OPD	Penanggung Jawab
				Meningkatnya ketersediaan pangan yang berkualitas	Skor Pola Pangan Harapan Ketersediaan	Perikanan & Ketapang
				Meningkatnya Penanganan Kerawanan Pangan	Persentase Penanganan Daerah Rentan Rawan Pangan	Perikanan & Ketapang
				Meningkatnya Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan	Persentase Pangan Segar yang Memenuhi Persyaratan dan Mutu Keamanan Pangan	Perikanan & Ketapang
	PDRB per Kapita	Meningkatnya pemberdayaan perekonomian kerakyatan berbasis hilirisasi	LPE Kategori Industri Pengolahan	Meningkatnya pemberdayaan dan kapasitas transmigran dalam pengembangan kawasan transmigrasi, dan Meningkatkan kapasitas UMKM daerah, serta Meningkatkan penyerapan tenaga kerja yang produktif dan berkualitas	Persentase UMKM yang naik skala usaha	DisnakertranskopUKM
				Optimalisasi kinerja koperasi dalam mengembangkan ekonomi kerakyatan	Persentase Koperasi Sehat	DisnakertranskopUKM
					Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB	DisnakertranskopUKM
				Meningkatnya pertumbuhan Usaha Kecil Menengah	Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah Non Pertanian pada Level Kabupaten/Kota**	DisnakertranskopUKM
				Meningkatkan sektor hilirisasi komoditas potensial wilayah	Rasio PDRB Industri Pengolahan	Perindag
					Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	Perindag
					Indeks Perkembangan Harga	Perindag
				Meningkatnya kewirausahaan daerah	Jumlah Kewirausahaan IKM Daerah	Perindag
				Meningkatnya perekonomian sektor	Proporsi Jumlah Industri Kecil dan	Perindag



Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran RPJMD	Indikator Sasaran	Tujuan/Sasaran OPD	Indikator Tujuan/Sasaran OPD	Penanggung Jawab
				Industri Kecil dan Menengah	Menengah pada Level Kabupaten/Kota	
				Meningkatnya daya saing perdagangan daerah	Pertumbuhan nilai neraca perdagangan daerah (Net Ekspor Barang dan Jasa) (INDIKATOR PROXY) :	Perindag
		Meningkatnya daya saing perekonomian daerah	Kontribusi PDRB Gunung Mas terhadap PDRB Kalimantan Tengah	Meningkatkan pelestarian warisan budaya Dan kontribusi sektor pariwisata dalam pembangunan	Pertumbuhan PAD Sektor Pariwisata	Disbudpar
				Meningkatnya kunjungan wisatawan domestik dan mancanegara	Pertumbuhan kunjungan wisatawan	Disbudpar
					Rata-rata Lama Tinggal	Disbudpar
				Meningkatnya kualitas sarana prasarana pendukung kepariwisataan daerah	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi makan dan Minum terhadap Produk Domestik Regional Bruto	Disbudpar
				Meningkatnya unit usaha ekonomi kreatif	Pertumbuhan pelaku usaha ekonomi kreatif	Disbudpar
				Meningkatkan penanaman modal pada aktivitas perekonomian daerah dan realisasi Investasi Daerah serta Nilai tambah baru yang diinvestasikan dalam pembangunan ekonomi wilayah	Pertumbuhan Nilai Investasi Daerah	DPMPTSP
				Meningkatkannya realisasi Investasi Daerah	Jumlah realisasi proyek PMDN dan PMA	DPMPTSP
				Meningkatnya Nilai tambah baru yang diinvestasikan dalam pembangunan ekonomi wilayah	Jumlah Penyerapan Tenaga Kerja (TKI) dan (TKA) melalui Investasi Daerah	DPMPTSP



Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran RPJMD	Indikator Sasaran	Tujuan/Sasaran OPD	Indikator Tujuan/Sasaran OPD	Penanggung Jawab
				Terlaksanannya pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase pelaksanaan pelayanan penunjang	DPMPSTP
Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat	Tingkat Kemiskinan	Meningkatnya pemerataan kesejahteraan masyarakat	Gini Rasio	Menurunkan jumlah PPKS di Kabupaten Gunung Mas	Tingkat penurunan jumlah PPKS	Dinsos
				Meningkatnya penanganan PPKS	Persentase penanganan PPKS	Dinsos
				Meningkatnya pemenuhan kebutuhan dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	Dinsos
				Terlaksanannya pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase pelaksanaan pelayanan penunjang	Dinsos
				Terkendalinya harga kebutuhan pokok di seluruh wilayah	Jumlah komoditas kebutuhan pokok yang mengalami kenaikan harga	Perindag
					Koefisien variasi harga antarwilayah tingkat kabupaten	Perindag
		Meningkatnya penyerapan tenaga kerja berkualitas	Tingkat Pengangguran Terbuka	Meningkatnya pemberdayaan dan kapasitas transmigran dalam pengembangan kawasan transmigrasi, dan Meningkatkan kapasitas UMKM daerah, serta Meningkatkan penyerapan tenaga kerja yang produktif dan berkualitas	Persentase penempatan tenaga kerja	DisnakertranskopUKM



Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran RPJMD	Indikator Sasaran	Tujuan/Sasaran OPD	Indikator Tujuan/Sasaran OPD	Penanggung Jawab
					Tingkat Produktivitas tenaga kerja	DisnakertranskopUKM
				Terwujudnya seluruh usaha yang menerapkan pembayaran sesuai UMR	Persentase pelaku usaha yang menerapkan UMR	DisnakertranskopUKM
				Meningkatnya kesempatan kerja berkualitas bagi masyarakat	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan	DisnakertranskopUKM
				Meningkatnya kompetensi dan kapasitas tenaga kerja	Persentase pekerja lulusan Pendidikan menengah dan tinggi yang bekerja di bidang keahlian menengah tinggi	DisnakertranskopUKM
				Meningkatnya pembinaan hubungan industrial dan perlindungan tenaga kerja	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	DisnakertranskopUKM
Meningkatkan tata kelola pemerintah yang profesional, bersih, dan akuntabel	Indeks Reformasi Birokrasi	Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	Nilai SAKIP	Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah dan Meningkatkan Inovasi Daerah	Indeks Perencanaan Pembangunan	BAPPERIDA
				Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	Persentase Keselarasan RPJMD dengan Renstra PD	BAPPERIDA
				Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	BAPPERIDA
				Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang infrastruktur dan kewilayahan	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	BAPPERIDA



Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran RPJMD	Indikator Sasaran	Tujuan/Sasaran OPD	Indikator Tujuan/Sasaran OPD	Penanggung Jawab
				Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang perekonomian dan SDA	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Perekonomian dan SDA	BAPPERIDA
				Meningkatnya Inovasi Daerah	Indeks Inovasi Daerah	BAPPERIDA
				Meningkatkan kualitas tata kelola manajemen ASN dan Meningkatkan kompetensi kinerja ASN	Indeks Merit Sistem Indeks Profesionalitas ASN	BKPSDM
				Meningkatnya kesesuaian kompetensi ASN dengan jabatan/tupoksi yang dijalankan	Persentase pejabat struktural yang sesuai dengan kompetensinya	BKPSDM
				Meningkatnya kesesuaian kompetensi ASN dengan jabatan/tupoksi yang dijalankan	Persentase pejabat struktural yang sesuai dengan kompetensinya (Mengikuti Diklat PIM dan/atau Assesment center)	BKPSDM
				Optimalisasi pelaksanaan diklat ASN	Persentase pemenuhan kebutuhan diklat	BKPSDM
				Optimalisasi pelaksanaan diklat ASN	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	BKPSDM
				Optimalisasi Kebutuhan Tenaga Keahlian	Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	BKPSDM
				Optimalisasi Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Persentase pegawai mendapat penghargaan Satya Lancana	BKPSDM
				Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan	Nilai LPPD	SETDA



Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran RPJMD	Indikator Sasaran	Tujuan/Sasaran OPD	Indikator Tujuan/Sasaran OPD	Penanggung Jawab
				Meningkatnya tata kelola hukum daerah	Persentase Reformasi Hukum	SETDA
				Meningkatnya Rumah Tangga yang menggunakan Listrik PLN	Rasio Elektrifikasi (RE)	SETDA
				Meningkatnya kinerja BUMD yang optimal	Return on Aset (ROA) BUMD	SETDA
				Meningkatnya nilai belanja pengadaan barang dan jasa	Rasio Nilai Belanja Pengadaan Barang dan Jasa	SETDA
				Meningkatnya Kualitas Layanan Pengadaan Barang dan Jasa	Level Kematangan UKPBJ	SETDA
				Meningkatnya Kepuasan Pelayanan Publik Pemerintah Daerah	Indeks Kepatuhan Pelayanan Publik	SETDA
				Meningkatkan tata kelola administrasi kependudukan dan pencatatan sipil daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	DUKCAPIL
				Meningkatnya masyarakat yang memiliki KTP elektronik	Persentase penduduk wajib KTP yang memiliki KTP elektronik	DUKCAPIL
				Meningkatnya masyarakat yang memiliki Kartu Identitas Anak (KIA)	Persentase penduduk usia di bawah 17 tahun yang wajib memiliki KIA	DUKCAPIL
				Meningkatnya Akses Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan	Pengguna Akses Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan	DUKCAPIL
				Meningkatnya masyarakat yang menggunakan Identitas Kependudukan Digital (IKD)	Persentase Penduduk yang menggunakan Identitas Kependudukan Digital (IKD)	DUKCAPIL



Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran RPJMD	Indikator Sasaran	Tujuan/Sasaran OPD	Indikator Tujuan/Sasaran OPD	Penanggung Jawab
				Meningkatnya Kualitas Profil Kependudukan	Cakupan Profil Kependudukan	DUKCAPIL
				Meningkatnya administrasi catatan sipil	Persentase akta perkawinan yang diterbitkan bagi melaporkan	DUKCAPIL
					Persentase akta kelahiran yang diterbitkan bagi yang melaporkan	DUKCAPIL
					Cakupan Profil Kependudukan	DUKCAPIL
					Persentase akta perceraian yang diterbitkan bagi yang melaporkan	DUKCAPIL
	Indeks Daya Saing Daerah	Meningkatnya kualitas pelayanan publik berbasis teknologi informasi	Indeks Pelayanan Publik	Meningkatkan budaya literasi masyarakat dan tata kelola pengarsipan dokumen daerah	Jumlah dokumen yang telah diarsipkan dengan baik	Perpus
				Meningkatnya kapasitas ASN dalam pengarsipan dokumen daerah	Persentase ASN yang telah mengikuti diklat kearsipan	Perpus
				Meningkatnya pengelolaan arsip, menjamin ketersediaan arsip sebagai bukti akuntabilitas kinerja	Indeks Nilai Pengawasan Kearsipan	Perpus
				Melestarikan informasi agar tetap utuh dan mudah diakses, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan arsip	Indeks Tingkat Digitalisasi Arsip	Perpus
				Terwujudnya Reformasi Tata Kelola	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Diskominfo



Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran RPJMD	Indikator Sasaran	Tujuan/Sasaran OPD	Indikator Tujuan/Sasaran OPD	Penanggung Jawab
				Pemerintahan yang Baik (Good Governace)		
					Indeks Pemerintah Digital	Diskominfo
				Meningkatnya Infrastruktur dan Akses Layanan Publik berbasis IT	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	Diskominfo
					Indeks SPBE	Diskominfo
				Meningkatnya Cakupan Akses Internet	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika	Diskominfo
					Cakupan Layanan Telekomunikasi	Diskominfo
				Menguatnya keamanan siber dan sandi lingkungan pemerintah daerah	Tingkat Keamanan Informasi Daerah	Diskominfo
				Tercapainya kolaborasi, integrasi, dan standarisasi dalam penyelenggaraan sistem statistik nasional	Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	Diskominfo
				Meningkatnya Keterbukaan Informasi Publik	Persentase Masyarakat Yang Menjadi Sasaran Informasi Publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas Pemerintah dan Pemerintah Kabupaten	Diskominfo
					Persentase Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Akses dan Kualitas Informasi	Diskominfo



Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran RPJMD	Indikator Sasaran	Tujuan/Sasaran OPD	Indikator Tujuan/Sasaran OPD	Penanggung Jawab
					Publik Pemerintah Daerah	
				Meningkatkan kinerja DPRD Kabupaten Gunung Mas	Indeks Kepuasan Anggota Dewan terhadap Layanan Sekretariat DPRD	SETWAN
				Meningkatnya layanan/dukungan terhadap penyelesaian produk hukum oleh DPRD	Persentase Prolegda yang berhasil diselesaikan	SETWAN
					Persentase Perda yang disahkan oleh DPRD	SETWAN
				Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik kecamatan	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Kecamatan	KECAMATAN
				Meningkatnya koordinasi penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan sosial	Persentase hasil koordinasi penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan sosial yang ditinjaklanjuti	KECAMATAN
				Meningkatnya koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Persentase hasil koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum yang ditinjaklanjuti	KECAMATAN
				Meningkatnya pembinaan, pemberdayaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa tepat waktu	KECAMATAN
		Meningkatnya pengelolaan keuangan daerah yang bersih, transparan dan berkualitas	Indeks Integritas Nasional	Meningkatkan kualitas tata kelola administrasi pemerintahan	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	BKAD



Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran RPJMD	Indikator Sasaran	Tujuan/Sasaran OPD	Indikator Tujuan/Sasaran OPD	Penanggung Jawab
				Menurunnya temuan kesalahan tata kelola administrasi	Opini BPK	BKAD
				Meningkatnya tata kelola aset daerah	Indeks Pengelolaan Aset Daerah	BKAD
				Meningkatnya tata kelola aset daerah	Persentase BMD dalam kondisi baik	BKAD
				Meningkatnya kualitas pengelolaan lahan pemerintah daerah	Persentase Lahan Pemerintah Daerah yang Bersertifikat	BKAD
				Meningkatnya Kualitas Pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintah Daerah	Indeks Maturitas SPIP	INSPEKTORAT
				Meningkatnya akuntabilitas dan kapabilitas pengawasan	Kapabilitas APIP	INSPEKTORAT
					Peringkat LAKIP Inspektorat	INSPEKTORAT
				Meningkatnya penanganan risiko yang menghambat pencapaian pelaksanaan pembangunan	Indeks Manajemen Resiko	INSPEKTORAT
				Meningkatkan kemandirian pembangunan daerah dan mengurangi ketergantungan dari pusat dalam membiayai pembangunan daerah	Rasio PAD	Bapenda
				Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah sebagai kontribusi terhadap anggaran dan Pendapatan daerah non migas	Persentase Realisasi PAD (Permintaan PD)	Bapenda

Keterangan: Cascading OPD dalam proses diskusi



### **3.2 Strategi, Arah Kebijakan, dan Program Pembangunan Daerah**

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan dokumen strategis yang menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dalam menjalankan pembangunan selama 5 (lima) tahun ke depan. Penyusunan strategi, arah kebijakan, dan program pembangunan dalam RPJMD menjadi hal yang penting untuk memastikan bahwa setiap langkah pembangunan terarah, terukur, dan berkelanjutan. Strategi yang matang memungkinkan identifikasi prioritas pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan potensi daerah, sementara arah kebijakan menjadi panduan normatif yang memastikan seluruh program pembangunan selaras dengan visi dan misi kepala daerah. Dengan demikian, RPJMD tidak hanya berfungsi sebagai dokumen perencanaan, tetapi juga sebagai alat untuk mencapai sinergi antar-sektor, efisiensi alokasi sumber daya, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara merata.

Perencanaan strategis yang dilakukan bertujuan untuk mengoperasionalkan visi dan misi kepala daerah ke dalam rencana kerja selama 5 (lima) tahun yang akan datang. Pengimplementasian tujuan dan sasaran pemerintah daerah yang sudah ditetapkan dijabarkan menjadi arah kebijakan pembangunan daerah. Selain itu, strategi dan arah kebijakan merupakan sarana dalam melaksanakan transformasi reformasi, dan perbaikan kinerja pemerintah daerah dalam melaksanakan program dan pelayanan kepada masyarakat.

#### **3.2.1 Strategi Pembangunan Daerah**

Strategi memegang peran penting dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Sebagai kerangka perencanaan yang sistematis, strategi memberikan panduan bagi pemerintah daerah dalam mengelola sumber daya secara efektif dan efisien untuk menghadapi tantangan serta memanfaatkan peluang pembangunan. Strategi yang dirancang dengan jelas dapat menjadi upaya dalam mencapai visi dan misi pembangunan daerah yang terfokus dan memberikan dampak yang signifikan. Oleh karena itu, strategi dirancang untuk menjembatani antara misi yang bersifat jangka panjang dengan kebijakan dan program konkret yang dapat diimplementasikan, sehingga setiap langkah pembangunan berjalan terarah dan memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat.

Pada tahap pertama RPJPD, Kabupaten Gunung Mas memiliki fokus dalam peningkatan infrastruktur pembangunan sosial ekonomi yang berkualitas dan merata. Hal ini dilakukan dalam rangka memperkuat fondasi transformasi pembangunan melalui peningkatan kualitas infrastruktur serta peningkatan ketahanan dan mitigasi bencana. Strategi yang dapat diterapkan dalam mewujudkan penguatan fondasi transformasi di Kabupaten Gunung Mas adalah sebagai berikut:



**Tabel III.1**  
**Strategi Pembangunan Jangka Menengah**  
**Kabupaten Gunung Mas**

<b>Tahap I (2026)</b>	<b>Tahap II (2027)</b>	<b>Tahap III (2028)</b>	<b>Tahap IV (2029)</b>	<b>Tahap V (2030)</b>
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>	<b>(4)</b>	<b>(5)</b>
1. Peningkatan aksesibilitas dan konektivitas wilayah yang merata dan terintegrasi 2. Optimalisasi pembangunan, sarana prasarana permukiman, kawasan perekonomian dan infrastruktur pelayanan public 3. Meningkatkan pendidikan menuju masyarakat yang unggul 4. Peningkatan hilirisasi potensi SDA unggulan dengan memperhatikan kondisi sosial budaya masyarakat 5. Pemanfaatan program perlindungan sosial yang adaptif dan integrative 6. Optimalisasi pelayanan publik yang mudah diakses, terjangkau, berkualitas dan prima	1. Peningkatan aksesibilitas dan konektivitas wilayah yang merata dan terintegrasi 2. Optimalisasi pembangunan, sarana prasarana permukiman, kawasan perekonomian dan infrastruktur pelayanan public 3. Meningkatkan pendidikan menuju masyarakat yang unggul 4. Peningkatan hilirisasi potensi SDA unggulan dengan memperhatikan kondisi sosial budaya masyarakat 5. Pemanfaatan program perlindungan sosial yang adaptif dan integrative 6. Optimalisasi pelayanan publik yang mudah diakses, terjangkau, berkualitas dan prima	1. Optimalisasi pembangunan, sarana prasarana permukiman, kawasan perekonomian dan infrastruktur pelayanan public 2. Meningkatkan pendidikan menuju masyarakat yang unggul 3. Peningkatan hilirisasi potensi SDA unggulan dengan memperhatikan kondisi sosial budaya masyarakat 4. Pemanfaatan program perlindungan sosial yang adaptif dan integrative 5. Optimalisasi pelayanan publik yang mudah diakses, terjangkau, berkualitas dan prima 6. Peningkatan kinerja pemerintah daerah yang baik, bersih dan akuntabel	1. Optimalisasi pelaksanaan pembangunan berwawasan lingkungan hidup 2. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat dan budaya PHBS 3. Penguatan sosial budaya masyarakat yang madani dan setara 4. Penguatan kapasitas UMKM dan akses permodalan, khususnya sektor ekonomi kerakyatan 5. Peningkatan kinerja pemerintah daerah yang baik, bersih dan akuntabel	1. Optimalisasi pelaksanaan pembangunan berwawasan lingkungan hidup 2. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat dan budaya PHBS 3. Penguatan sosial budaya masyarakat yang madani dan setara 4. Penguatan kapasitas UMKM dan akses permodalan, khususnya sektor ekonomi kerakyatan 5. Peningkatan kinerja pemerintah daerah yang baik, bersih dan akuntabel

**a. Peningkatan aksesibilitas dan konektivitas wilayah yang merata dan terintegrasi**

Strategi peningkatan aksesibilitas pembangunan di Kabupaten Gunung Mas diarahkan pada pemenuhan dan peningkatan kualitas infrastruktur yang merata, berkelanjutan, dan berpihak pada kepentingan masyarakat luas. Hal ini menitikberatkan pada pembangunan sarana prasarana permukiman seperti jalan lingkungan, sistem drainase, air bersih, dan sanitasi yang layak guna menciptakan permukiman yang sehat dan tertata. Selain itu, peningkatan konektivitas antarwilayah melalui pembangunan dan perbaikan jaringan jalan serta jembatan menjadi prioritas untuk memperlancar mobilitas masyarakat dan distribusi barang serta jasa, terutama di daerah terpencil dan pedalaman. Pada sektor perekonomian dan pelayanan publik, strategi difokuskan pada pembangunan infrastruktur pendukung kawasan ekonomi lokal seperti pasar rakyat, fasilitas penyimpanan hasil pertanian, serta sarana transportasi dan komunikasi yang memadai. Hal ini bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat sekaligus meningkatkan daya saing daerah.



**b. Optimalisasi pembangunan, sarana prasarana permukiman, kawasan perekonomian dan infrastruktur pelayanan publik**

Strategi optimalisasi pembangunan sarana prasarana permukiman, kawasan perekonomian, dan infrastruktur pelayanan publik di Kabupaten Gunung Mas dapat dimulai dengan **\*\*penyusunan perencanaan spasial yang terpadu dan berbasis data\*\***. Pemerintah daerah perlu memetakan kebutuhan prioritas infrastruktur seperti jalan penghubung antar kecamatan, jaringan air bersih, sanitasi, dan listrik, terutama di wilayah terpencil dan kawasan pertumbuhan ekonomi baru. Penguatan kolaborasi dengan pemerintah pusat dan provinsi serta pemanfaatan Dana Alokasi Khusus (DAK) dan skema KPBU (Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha) menjadi langkah strategis dalam percepatan pembangunan infrastruktur dasar.

Selain itu, pengembangan kawasan perekonomian seperti sentra UMKM, pasar rakyat, dan kawasan agrowisata perlu ditunjang dengan sarana prasarana yang memadai, termasuk akses transportasi dan fasilitas logistik. Pemerintah daerah juga perlu membangun infrastruktur pelayanan publik yang mendukung kualitas hidup masyarakat, seperti rumah sakit pratama, sekolah terpadu, dan balai pelayanan publik. Prinsip pembangunan berkelanjutan dan partisipatif harus diterapkan, dengan melibatkan masyarakat lokal dalam setiap tahapan pembangunan guna memastikan kebermanfaatannya jangka panjang serta pemberdayaan ekonomi lokal.

**c. Optimalisasi pelaksanaan pembangunan berwawasan lingkungan hidup**

Strategi optimalisasi pelaksanaan pembangunan berwawasan lingkungan hidup di Kabupaten Gunung Mas diarahkan pada pembangunan infrastruktur yang tidak hanya berkualitas, tetapi juga selaras dengan prinsip keberlanjutan lingkungan. Strategi ini menekankan pentingnya perencanaan infrastruktur yang memperhitungkan daya dukung dan daya tampung lingkungan, seperti pembangunan jalan dan jembatan yang menghindari kawasan lindung, serta penggunaan teknologi ramah lingkungan dalam sistem sanitasi, air bersih, dan pengelolaan limbah. Selain itu, ruang terbuka hijau dan infrastruktur hijau seperti taman kota dan sistem penyerapan air hujan menjadi bagian dari strategi untuk menekan degradasi lingkungan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Pemerintah Kabupaten Gunung Mas juga menegaskan kebijakan penegakan hukum terhadap aktivitas tambang ilegal. Langkah ini mencakup pengawasan intensif terhadap wilayah rawan tambang ilegal, penindakan tegas terhadap pelaku, serta kerja sama lintas sektor dalam penegakan hukum lingkungan. Kebijakan ini juga mengarah pada pemulihan ekosistem melalui program rehabilitasi tambang yang mencakup reklamasi lahan bekas tambang serta pelibatan masyarakat lokal dalam upaya pemulihan lingkungan.

**d. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat dan budaya PHBS**



Strategi peningkatan kualitas kesehatan di Kabupaten Gunung Mas difokuskan pada pemenuhan serta peningkatan infrastruktur dasar yang mendukung terciptanya masyarakat yang sehat dan berdaya saing. Dalam sektor kesehatan, pemerintah daerah berkomitmen membangun dan merevitalisasi fasilitas pelayanan kesehatan seperti puskesmas, puskesmas pembantu, dan rumah sakit dengan sarana dan prasarana yang memadai dan sesuai standar. Peningkatan akses masyarakat terhadap layanan kesehatan juga didorong melalui penyediaan transportasi rujukan medis dan pemanfaatan teknologi digital dalam layanan kesehatan jarak jauh, khususnya di daerah pedalaman dan terpencil.

**e. Meningkatkan pendidikan menuju masyarakat yang unggul**

Di bidang pendidikan, strategi diarahkan pada pembangunan dan perbaikan infrastruktur sekolah dari jenjang dasar hingga menengah, termasuk penyediaan ruang kelas yang layak, laboratorium, perpustakaan, dan fasilitas pendukung lainnya. Pemerintah daerah juga memperhatikan pemerataan infrastruktur pendidikan di wilayah pelosok agar tidak terjadi ketimpangan kualitas pembelajaran. Selain itu, digitalisasi sekolah melalui penyediaan jaringan internet dan perangkat pembelajaran modern menjadi bagian dari upaya mendorong pendidikan yang adaptif terhadap perkembangan zaman.

**f. Penguatan sosial budaya masyarakat yang madani dan setara**

Strategi penguatan sosial budaya masyarakat yang madani dan setara di Kabupaten Gunung Mas diarahkan pada penciptaan ruang-ruang publik yang inklusif dan fasilitas sosial budaya yang mampu menjadi wadah interaksi, edukasi, dan pelestarian nilai-nilai lokal. Pemerintah daerah berkomitmen meningkatkan kualitas infrastruktur seperti balai adat, taman budaya, dan pusat kegiatan masyarakat yang representatif serta mudah diakses oleh semua kalangan, termasuk kelompok rentan. Infrastruktur ini berperan penting dalam memperkuat identitas budaya lokal, memfasilitasi dialog antar komunitas, serta mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam kegiatan sosial dan kebudayaan. Selain itu, pemenuhan infrastruktur yang mendukung kesetaraan sosial juga menjadi fokus utama, seperti pembangunan fasilitas umum yang ramah difabel, ruang ibadah berbagai agama yang layak, serta tempat-tempat pelayanan sosial yang dapat dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat.

**g. Peningkatan hilirisasi potensi SDA unggulan dengan memperhatikan kondisi sosial budaya masyarakat**

Strategi peningkatan hilirisasi potensi sumber daya alam (SDA) unggulan di Kabupaten Gunung Mas dilakukan dengan memperhatikan kondisi sosial budaya masyarakat setempat serta didukung oleh pembangunan infrastruktur yang berkualitas. Dalam sektor pertanian, pemerintah daerah mendorong pertanian berkelanjutan melalui kebijakan subsidi pupuk organik dan penerapan pengendalian hama alami, guna mengurangi



ketergantungan pada bahan kimia berbahaya dan menjaga kesuburan tanah jangka panjang. Untuk menunjang hal tersebut, infrastruktur pertanian seperti irigasi, jalan usaha tani, gudang penyimpanan hasil panen, dan pusat pengolahan hasil pertanian terus ditingkatkan agar proses produksi hingga distribusi dapat berjalan efisien dan bernilai tambah tinggi bagi petani lokal.

Sementara itu, dalam sektor pariwisata, strategi diarahkan pada pengembangan destinasi yang mengedepankan kelestarian lingkungan dan nilai-nilai budaya lokal. Kebijakan pengendalian daya dukung lingkungan di kawasan wisata, seperti pengaturan jumlah pengunjung, pengelolaan sampah, dan pelestarian kawasan alami, menjadi prioritas untuk menjaga kualitas lingkungan sekaligus meningkatkan daya tarik wisata jangka panjang. Infrastruktur pendukung seperti akses jalan ke objek wisata, fasilitas sanitasi, pusat informasi wisata, serta akomodasi ramah lingkungan dibangun dan ditata dengan memperhatikan karakteristik sosial budaya masyarakat sekitar. Pendekatan ini tidak hanya meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui sektor hilir SDA unggulan, tetapi juga memastikan keberlanjutan ekologis dan pelestarian budaya daerah.

#### **h. Penguatan kapasitas UMKM dan akses permodalan, khususnya sektor ekonomi kerakyatan**

Penguatan kapasitas UMKM di Kabupaten Gunung Mas dapat dilakukan melalui pelatihan dan pendampingan berkelanjutan, terutama dalam aspek manajemen usaha, pemasaran digital, dan inovasi produk lokal. Pemerintah daerah dapat menggandeng perguruan tinggi dan lembaga pelatihan untuk membina pelaku usaha agar mampu mengelola usahanya secara profesional. Selain itu, digitalisasi UMKM menjadi langkah penting, seperti pelatihan penggunaan platform *e-commerce* dan aplikasi pencatatan keuangan. Penguatan kelembagaan melalui koperasi atau kelompok usaha bersama juga perlu ditingkatkan, disertai fasilitasi legalitas usaha agar UMKM lebih mudah mengakses pasar dan pembiayaan.

Dalam hal akses permodalan, strategi yang dapat diterapkan mencakup perluasan informasi dan pendampingan dalam pengajuan kredit usaha seperti KUR dan program pembiayaan dari lembaga keuangan mikro atau koperasi. Pemerintah daerah juga dapat berperan sebagai fasilitator antara pelaku UMKM dan lembaga keuangan agar tercipta kepercayaan dan kelayakan kredit. Selain itu, pembentukan dana bergulir atau dana bergotong royong berbasis desa bisa menjadi alternatif pembiayaan yang inklusif, terutama bagi pelaku usaha kecil yang belum *bankable*. Strategi-strategi ini perlu dijalankan secara kolaboratif dan berkelanjutan agar UMKM sebagai pilar ekonomi kerakyatan dapat tumbuh kuat dan mandiri.

#### **i. Pemanfaatan program perlindungan sosial yang adaptif dan integratif**



Strategi pemanfaatan program perlindungan sosial yang adaptif dan integratif di Kabupaten Gunung Mas diarahkan untuk menjawab tantangan kerentanan sosial dan ekonomi masyarakat melalui pendekatan yang holistik dan berbasis kebutuhan lokal. Pemerintah daerah memprioritaskan pembangunan infrastruktur layanan sosial yang berkualitas, seperti pusat pelatihan keterampilan, balai latihan kerja desa, serta fasilitas pendukung pemberdayaan masyarakat. Salah satu fokus utama adalah peningkatan keterampilan petani melalui pelatihan terpadu yang mencakup teknik pertanian modern, penggunaan alat pertanian yang efisien, serta pengelolaan hasil pascapanen. Infrastruktur pendukung seperti demplot pertanian, gudang komunal, dan akses jalan ke sentra produksi juga ditingkatkan agar petani lebih siap menghadapi perubahan iklim dan dinamika pasar, sehingga dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan mereka.

Selain itu, strategi ini juga mencakup rencana peningkatan kapasitas pelaku pariwisata lokal melalui pelatihan kewirausahaan, pelayanan prima, manajemen homestay, serta pemanfaatan teknologi digital untuk promosi dan pemasaran destinasi. Pembangunan infrastruktur pendukung seperti pusat informasi pariwisata, tempat pelatihan terpadu, dan akses transportasi menuju lokasi wisata dilakukan untuk memastikan bahwa masyarakat lokal benar-benar terlibat dalam rantai nilai pariwisata. Dengan pemanfaatan program perlindungan sosial yang tidak hanya bersifat bantuan langsung, tetapi juga meningkatkan kapasitas dan daya saing masyarakat, Kabupaten Gunung Mas menyiapkan pondasi untuk memperluas kesempatan kerja, memperbaiki taraf hidup, dan menciptakan masyarakat yang tangguh serta mandiri.

**j. Optimalisasi pelayanan publik yang mudah diakses, terjangkau, berkualitas dan prima**

Strategi optimalisasi pelayanan publik di Kabupaten Gunung Mas dapat dimulai dengan digitalisasi sistem layanan agar masyarakat dapat mengakses layanan pemerintahan secara cepat dan efisien, tanpa harus datang langsung ke kantor pelayanan. Pemerintah daerah dapat mengembangkan portal layanan satu pintu berbasis web dan aplikasi *mobile*, termasuk integrasi data kependudukan, perizinan, dan pengaduan masyarakat. Selain itu, penyediaan Pojok Pelayanan Publik di kecamatan dan desa, lengkap dengan tenaga pendamping dan akses internet, akan memperluas jangkauan layanan bagi masyarakat di daerah terpencil.

Peningkatan kualitas layanan juga perlu didukung oleh penguatan kapasitas aparatur sipil negara (ASN) melalui pelatihan layanan prima, komunikasi publik, dan pemanfaatan teknologi informasi. Pelayanan publik harus mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat, termasuk melalui survei kepuasan masyarakat sebagai dasar evaluasi kinerja layanan. Untuk memastikan keterjangkauan, pemerintah daerah dapat menetapkan standar pelayanan minimal (SPM) yang

berorientasi pada keadilan akses bagi seluruh lapisan masyarakat, termasuk kelompok rentan seperti masyarakat adat dan penyandang disabilitas.

**k. Peningkatan kinerja pemerintah daerah yang akuntabel dan berorientasi pelayanan**

Strategi peningkatan kinerja pemerintah daerah yang akuntabel dan berorientasi pelayanan di Kabupaten Gunung Mas dilaksanakan melalui penguatan tata kelola pemerintahan yang transparan, partisipatif, dan berbasis data. Pemerintah daerah menitikberatkan pada pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dengan membangun infrastruktur digital yang memadai, seperti jaringan internet yang stabil hingga ke tingkat kecamatan dan desa, serta sistem pelayanan publik berbasis elektronik (*e-government*). Dengan infrastruktur ini, proses administrasi dan pelayanan kepada masyarakat dapat dilakukan secara lebih cepat, efisien, dan terbuka, sehingga meningkatkan kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintah.

Selain itu, peningkatan kualitas infrastruktur fisik kantor pemerintahan, fasilitas pelayanan publik seperti kantor kecamatan, kelurahan, dan unit layanan terpadu juga menjadi bagian penting dalam mendukung pelayanan yang optimal. Pemerintah daerah mendorong pembentukan ruang pelayanan yang ramah masyarakat, inklusif, serta mudah diakses oleh semua kalangan, termasuk penyandang disabilitas. Di sisi lain, peningkatan kapasitas aparatur sipil negara melalui pelatihan dan bimbingan teknis secara berkala dilakukan untuk memastikan bahwa setiap pegawai memiliki kompetensi dalam menjalankan tugasnya secara profesional dan akuntabel.

### **3.2.2 Arah Kebijakan Pembangunan Daerah**

Arah kebijakan dirumuskan dalam rangka mencapai strategi pembangunan, juga sebagai pedoman dalam perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan yang berkelanjutan. Kebijakan ini disusun berdasarkan misi dan mempertimbangkan potensi, tantangan, dan kebutuhan masyarakat di Kabupaten Gunung Mas. Fokus utama arah kebijakan meliputi peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan ekonomi daerah, pengembangan infrastruktur yang berkelanjutan, serta tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Tema pembangunan per tahun dalam pembangunan jangka menengah Kabupaten Gunung Mas adalah sebagai berikut:

**Gambar III.1.**

**Tema Pembangunan Per Tahun Kabupaten Gunung Mas**



Dalam mewujudkan strategi pembangunan jangka menengah di Kabupaten Gunung Mas, dirumuskan arah kebijakan sebagai berikut:

**Tabel III.5**  
**Arah Kebijakan Pembangunan Jangka Menengah**  
**Kabupaten Gunung Mas Tahun 2025-2029**

Misi Ranwal RPJMD	Arah Kebijakan
MISI 1 : Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Wilayah yang Terintegrasi dan Berkelanjutan	Penyediaan fasilitas transportasi publik yang berkualitas dan merata, jaringan logistik, dan infrastruktur jalan dan jembatan yang handal
	Peningkatan akses perumahan dan permukiman layak huni dan penyediaan infrastruktur layanan dasar kewilayahan
	Peningkatan kemandirian dan produktivitas perdesaan dalam pembangunan ekonomi dan sarana prasarana kewilayahan
	Penguatan aksi pembangunan rendah karbon dalam mendukung pelestarian lingkungan
	Peningkatan mitigasi penanggulangan bencana, termasuk adaptasi perubahan iklim
MISI 2 : Peningkatan Kualitas Pembangunan SDM yang Unggul, Berbudaya dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas tenaga pendidik dan kependidikan serta penyediaan infrastruktur pendidikan yang merata dan memadai
	Peningkatan akses pendidikan hingga ke perguruan tinggi yang merata dan berkualitas
	Peningkatan aksesibilitas layanan kesehatan dan kualitas jaminan kesehatan masyarakat
	Optimalisasi penuntasan stunting dan pemenuhan kecukupan gizi
	Peningkatan pendidikan dan partisipasi pembangunan bagi perempuan
	Penguatan keluarga yang sehat dan sejahtera
	Mengembangkan karakter masyarakat yang kuat dan memiliki toleransi dan kebudayaan yang tinggi
MISI 3 : Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif	Penyediaan sarana dan prasarana pertanian berkualitas, khususnya produksi, pengolahan dan pemasaran
	Penguatan hilirisasi perekonomian berbasis potensi agro (pertanian dalam arti luas)
	Optimalisasi kemudahan, perlindungan dan pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
	Peningkatan peran PMA/PMDN terhadap akselerasi pertumbuhan ekonomi baru
	Pemerataan perlindungan sosial masyarakat pada masyarakat kurang mampu dan kaum marjinal



	Peningkatan produktivitas tenaga kerja dan perluasan lapangan kerja berkualitas
MISI 4 : Peningkatan Reformasi Birokrasi	Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif
	Peningkatan manajemen ASN yang lebih baik
	Penataan kelembagaan dan peningkatan kapasitas aparatur daerah yang adaptif dan sesuai dengan kebutuhan daerah
	Peningkatan kualitas pengelolaan anggaran pembangunan daerah yang bebas korupsi

### 3.2.3 Program Pembangunan Daerah

Program dalam mencapai strategi pembangunan jangka menengah daerah merupakan rangkaian langkah konkret yang dirancang untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan daerah secara efektif dan berkelanjutan. Program-program ini disusun berdasarkan arah kebijakan yang telah ditetapkan, dengan fokus pada berbagai sektor prioritas seperti peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, penguatan ekonomi lokal, pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan, serta optimalisasi tata kelola pemerintahan. Setiap program dirancang dengan pendekatan yang terukur dan berbasis data guna memastikan efektivitas pelaksanaannya serta dampak yang maksimal bagi masyarakat. Melalui sinergi antara pemerintah daerah, sektor swasta, dan masyarakat, program pembangunan ini diharapkan dapat menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, meningkatkan kesejahteraan sosial, serta memperkuat daya saing daerah Kabupaten Gunung Mas.



Tabel III.6

## Program Prioritas Dalam Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2025-2029

Visi/Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas (Sesuai Nomenklatur)	
<b>Visi :</b> <b>“MEWUJUDKAN GUNUNG MAS YANG MAJU, BERKELANJUTAN, BERDAYA SAING, SEJAHTERA, DAN MANDIRI”</b>  <b>MISI 1:</b> <b>Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Wilayah yang Terintegrasi dan Berkelanjutan</b>  <b>MISI 2:</b> <b>Peningkatan Kualitas Pembangunan SDM yang Unggul, Berbudaya dan Berdaya Saing</b>  <b>MISI 3:</b> <b>Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif</b>  <b>MISI 4:</b> <b>Peningkatan Reformasi Birokrasi</b>	Menyediakan Infrastruktur Dasar yang Berkualitas	Indeks Infrastruktur	Meningkatnya kualitas perumahan dan kawasan pemukiman masyarakat	Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan	Meningkatnya akses masyarakat terhadap air bersih	Persentase rumah tangga yang memiliki akses air minum bersih	Program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum	
					Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem pengelolaan air limbah	Persentase rumahtangga dengan akses sanitasi layak	Program pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	
					Meningkatnya kualitas kawasan permukiman	Persentase luas kawasan kumuh 10-15 Ha yang ditangani	Program perumahan dan kawasan permukiman kumuh	
					Meningkatnya penyediaan PSU permukiman	Persentase permukiman yang sudah dilengkapi PSU ( prasarana,sarana dan utilitas umum	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum	
					Meningkatnya aksesibilitas masyarakat yang nyaman dan aman	Tingkat kemantapan jalan	Program penyelenggaraan jalan	
						Persentase jembatan dalam kondisi baik		
	Meningkatnya pemerataan sarana dan prasarana pembangunan di seluruh wilayah	Persentase Desa Mandiri	Meningkatnya fasilitas sarana dan prasarana pembangunan desa	Persentase Desa yang memiliki sarana dan prasarana yang lengkap	Program Penataan Desa			
	Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup	Penurunan Intensitas Emisi GRK	Meningkatnya kualitas pengelolaan lingkungan hidup	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Menurunnya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	Pertumbuhan Indeks Kualitas Air	Program pengendalian pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup
							Pertumbuhan Indeks Kualitas Udara	
							Pertumbuhan Indeks Kualitas Tutupan Lahan	
						Meningkatnya kualitas layanan pencegahan dan	Persentase cakupan penyerahan penyebaran	Program penanggulangan bencana



Visi/Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas (Sesuai Nomenklatur)		
	Meningkatkan Kualitas SDM yang Unggul, Berbudaya dan Berdaya Saing	Indeks Pembangunan Manusia	penanganan bencana daerah		kesiapsiagaan terhadap bencana	informasi dan edukasi rawan bencana			
			Meningkatnya kualitas pendidikan	Indeks Pendidikan	Meningkatnya mutu dan distribusi pendidik dan tenaga pendidikan	Persentase guru yang memiliki sertifikat pendidik	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan		
			Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Indeks Kesehatan	Meningkatnya kualitas partisipasi anak usia sekolah	Angka Partisipasi Sekolah Usia 7-12 Tahun	Meningkatnya kualitas derajat kesehatan masyarakat	Persentase masyarakat yang menerapkan Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)	Program pengelolaan pendidikan
						Angka Partisipasi Sekolah Usia 13-15 Tahun			
					Angka Kematian Ibu (AKI)				
					Angka Morbiditas				
			Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	Indeks Kesehatan	Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	Persentase masyarakat yang menerapkan Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)	Program pemberdayaan masyarakat Bidang Kesehatan		
			Meningkatnya kesetaraan gender dalam pembangunan	Indeks Ketimpangan Gender	Meningkatnya kualitas dan efektivitas penyelenggaraan PUG dan peran perempuan dalam pembangunan	Persentase anggaran responsif gender (ARG)	Program pengarusutamaan gender dan perlindungan perempuan		
			Meningkatnya pembangunan SDM yang berbudaya dan kehidupan yang berkualitas	Indeks Pembangunan Kebudayaan	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kebudayaan	Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengembangan Kebudayaan	Program pengembangan kebudayaan		
	Meningkatnya warisan budaya yang dilestarikan	Persentase Warisan Budaya yang Dilestarikan				Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya			
	Indeks Pembangunan Keluarga (Ibangga)	Meningkatnya kualitas keluarga dalam pembangunan				Indeks Kualitas Keluarga	Program Peningkatan Kualitas Keluarga		
	Meningkatkan pembangunan	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Meningkatnya produktivitas sektor	LPE Kategori Pertanian,	Meningkatnya distribusi dan kualitas sarana	Pertumbuhan Produksi Tanaman Pangan	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian		



Visi/Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas (Sesuai Nomenklatur)		
	n ekonomi wilayah yang berkeadilan dalam rangka mendukung tranformasi ekonomi	PDRB per Kapita	unggulan daerah	Kehutanan dan Perikanan	pertanian dan perkebunan rakyat	Pertumbuhan Produksi Perkebunan	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri		
						Meningkatnya realisasi pembangunan industri		Persentase Realisasi Investasi Sektor Industri	
						Meningkatnya kapasitas Industri Kecil dan Menengah yang mandiri		Pertumbuhan pengusaha Industri Kecil dan Menengah	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)
						Meningkatnya kemudahan berinvestasi		Pertumbuhan jumlah proyek penanaman modal daerah	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal
						Meningkatnya penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri		Persentase promosi produk lokal yang difasilitasi/dilaksanakan	Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri
						Meningkatnya perlindungan dan jaminan sosial kepada masyarakat rentan		Persentase Penerima Manfaat yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar	Program perlindungan dan jaminan sosial
	Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat	Tingkat Kemiskinan	Meningkatnya pemerataan kesejahteraan masyarakat	Gini Rasio	Memberdayakan masyarakat setempat dengan menggunakan potensi sumber daya dan kearifan lokal	Meningkatnya perlindungan dan jaminan sosial kepada masyarakat rentan	Tingkat penurunan desa tertinggal	Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	
							Meningkatnya angkatan kerja yang kompeten dan produktif	Tingkat Kesempatan Kerja	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja
							Terlindunginya hak-hak pekerja	Persentase tenaga kerja yang mendapatkan jaminan sosial ketenagakerjaan	Program Pengawasan Ketenagakerjaan
							Meningkatnya pengembangan kompetensi ASN	Persentase ASN yang Ditingkatkan Kompetensinya	Program Kepegawaian Daerah
							Meningkatnya penyerapan tenaga kerja berkualitas	Tingkat Pengangguran Terbuka	
							Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja	Nilai SAKIP	
Meningkatkan tata kelola pemerintah yang	Indeks Reformasi Birokrasi								



Visi/Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas (Sesuai Nomenklatur)
	profesional, bersih, dan akuntabel		pemerintah daerah		Meningkatnya tata kelola pengembangan karir ASN	Persentase pengembangan karir ASN sesuai dengan kompetensinya	
					Meningkatnya kualitas kelembagaan pemerintah daerah	Persentase kesesuaian SOTK dengan program prioritas pembangunan daerah	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Masyarakat
					Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPD	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
						Persentase Keselarasan Renstra dengan Renja	
		Indeks Daya Saing Daerah	Meningkatnya kualitas pelayanan publik berbasis teknologi informasi	Indeks Pelayanan Publik	Meningkatnya pemanfaatan inovasi daerah dalam pembangunan	Persentase produk Inovasi yang Dimanfaatkan	Program Riset dan Inovasi Daerah
			Meningkatnya kualitas pengelolaan aplikasi informatika			Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika
			Meningkatnya pengelolaan keuangan daerah yang bersih, transparan dan berkualitas	Indeks Integritas Nasional	Meningkatnya tata kelola anggaran	Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalani APBD	Program Pengelolaan Keuangan Daerah
					Meningkatnya tata kelola akuntansi dan pelaporan	Persentase penurunan temuan BPK	Program Penyelenggaraan Pengawasan
					Menurunnya terjadinya penyelewengan atau penyimpangan, baik yang bersifat anggaran ataupun proses dan kewenangan	Persentase Tindaklanjut Rekomendasi BPK Tahun Anggaran N-1	
					Meningkatnya kualitas pendampingan dan asistensi	Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	

## **BAB IV**

### **PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH**

#### **4.1 Program Perangkat Daerah**

Bab ini membahas perencanaan pendanaan pembangunan serta program kerja perangkat daerah di Kabupaten Gunung Mas dalam rangka merealisasikan visi dan misi RPJMD Tahun 2025-2029. Kerangka pendanaan mencerminkan kemampuan keuangan daerah yang tersedia dan menjadi acuan dalam penyusunan kebijakan pembangunan. Sementara itu, anggaran belanja daerah dialokasikan untuk mendukung berbagai program strategis yang telah disusun. Program-program ini berfokus pada sektor prioritas, seperti infrastruktur, kesehatan, pendidikan, perekonomian, dan peningkatan layanan publik. Selain itu, pagu indikatif digunakan sebagai pedoman bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam menentukan besaran dana yang dapat digunakan untuk merancang serta melaksanakan program tahunan mereka.

Dalam menetapkan target kinerja berbagai sektor pemerintahan, aspek utama yang dipertimbangkan mencakup kapasitas keuangan daerah serta pagu indikatif yang bersumber dari APBD Kabupaten Gunung Mas, APBD Provinsi, APBN, dan sumber pendanaan lainnya. Dengan perencanaan yang sistematis dan berbasis data, pelaksanaan program pembangunan diharapkan dapat berlangsung secara lebih efisien dan efektif, sehingga manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Selain itu, pembangunan harus selaras dengan strategi peningkatan daya saing daerah, mengingat Kabupaten Gunung Mas memiliki potensi besar dalam sektor pertanian, perkebunan, dan industri. Oleh sebab itu, keseimbangan antara kebutuhan pembangunan dan ketersediaan anggaran menjadi faktor utama untuk memastikan setiap program dapat direalisasikan secara optimal.

Sistem pendanaan yang tertata dengan baik tidak hanya berfungsi sebagai panduan bagi OPD dalam menyusun Rencana Strategis (Renstra), tetapi juga memastikan bahwa kebijakan pembangunan dapat diimplementasikan secara efektif. Kolaborasi antara pemerintah daerah, pemerintah pusat, sektor swasta, dan masyarakat menjadi faktor kunci dalam memperkuat kapasitas fiskal serta mendukung pelaksanaan berbagai program pembangunan. Dengan pendekatan yang menyelaraskan kebijakan pendanaan, strategi pembangunan, serta pelaksanaannya, Kabupaten Gunung Mas diharapkan dapat mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.



Tabel IV.1

Indikasi Rencana Program Perangkat Daerah yang disertai Kebutuhan Pendanaan Kabupaten Gunung Mas Tahun 2025 – 2030

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kinerja Awal RPJM D	Target												Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2025		2026		2027		2028		2029		2030		K	Rp	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																		
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN																		
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi Kantor	Persentase	100	100	243,915,429,048	100	246,211,138,277	100	251,202,724,908	100	256,448,109,898	100	261,956,924,365	100	267,739,403,278	100	1,527,473,729,773	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
		Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	Persentase	100	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
		Persentase pegawai disiplin	Persentase	100	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
		Persentase Aparatur yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis	Persentase	100	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
		Persentase laporan kinerja dan keuangan yang selesai tepat waktu	Persentase	100	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Sekolah	Persentase	100	100	58973317788	100	59,528,369,145	100	60,735,223,611	100	62,003,440,866	100	63,335,349,501	100	64,733,424,104	100	369,309,125,015	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
		Kompetensi Literasi	Persentase	100	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kinerja Awal RPJMD	Target												Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2025		2026		2027		2028		2029		2030		K	Rp	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
		Kompetensi Numerasi	Persentase	100	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
		Proporsi Jumlah Satuan PAUD Terakreditasi Minimal B	Persentase	100	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
		Tingkat pertumbuhan pendidik Paud S1 dan D IV	Persentase	100	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
		Iklim Keamanan	Persentase	100	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
		Iklim Kebinekaan	Persentase	100	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
		Iklim Inklusivitas	Persentase	100	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
1.01.04	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN					136,259,324		137,541,785		140,330,252		143,260,500		146,337,908		149,568,194		853,297,962	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
						0		0		0		0		0		0		0	
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN					0		0		0		0		0		0		0	
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					126,036,214,627		127,222,455,703		129,801,713,138		132,512,113,505		135,358,633,405		138,346,561,459		789,277,691,838	Dinas Kesehatan
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					74,416,055,540		75,116,452,502		76,639,333,565		78,239,645,863		79,920,327,749		81,684,501,806		466,016,317,025	Dinas Kesehatan
1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN					7,666,896,283		7,739,056,394		7,895,954,944		8,060,831,035		8,233,987,401		8,415,745,751		48,012,471,808	Dinas Kesehatan



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kinerja Awal RPJMD	Target										Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
					2025		2026		2027		2028		2029		2030			K	Rp
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
1.02.04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN					546,384,514		551,527,034		562,708,474		574,458,436		586,798,496		599,751,579		3,421,628,534	Dinas Kesehatan
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN					959,325,527		968,354,609		987,986,645		1,008,616,876		1,030,283,182		1,053,025,818		6,007,592,657	Dinas Kesehatan
						0		0		0		0		0		0		0	
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					0		0		0		0		0		0		0	Rumah Sakit Umum Daerah Kuala Kurun
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					0		0		0		0		0		0		0	Rumah Sakit Umum Daerah Kuala Kurun
1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN					0		0		0		0		0		0		0	Rumah Sakit Umum Daerah Kuala Kurun
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN					0		0		0		0		0		0		0	Rumah Sakit Umum Daerah Kuala Kurun
						0		0		0		0		0		0		0	
1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG					0		0		0		0		0		0		0	
1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					18,080,909,489		18,251,085,319		18,621,100,560		19,009,929,309		19,418,285,501		19,846,927,831		113,228,238,009	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)					5,548,172,866		5,600,391,751		5,713,931,864		5,833,244,951		5,958,550,082		6,090,080,067		34,744,371,582	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kinerja Awal RPJMD	Target										Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
					2025		2026		2027		2028		2029		2030			K	Rp
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM					4,892,218,743	4,938,263,848	5,038,380,244	5,143,587,081	5,254,077,531	5,370,056,876			30,636,584,323	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang				
1.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH					2,245,139,463	2,266,270,506	2,312,215,973	2,360,497,547	2,411,203,879	2,464,429,178			14,059,756,546	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang				
1.03.08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG					17,484,881,221	17,649,447,289	18,007,265,159	18,383,276,361	18,778,171,292	19,192,683,639			109,495,724,962	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang				
1.03.09	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA					425,316,756	429,319,797	438,023,656	447,170,064	456,775,816	466,858,759			2,663,464,848					
1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN					65,118,565,996	65,731,455,855	67,064,069,232	68,464,439,639	69,935,138,314	71,478,897,707			407,792,566,744	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang				
1.03.11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI					425,316,756	429,319,797	438,023,656	447,170,064	456,775,816	466,858,759			2,663,464,848					
1.03.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG					425,316,756	429,319,797	438,023,656	447,170,064	456,775,816	466,858,759			2,663,464,848	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang				
						0	0	0	0	0	0			0					
1.04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN					0	0	0	0	0	0			0					
1.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN					192,001,985	193,809,090	197,738,298	201,867,288	206,203,641	210,755,413			1,202,375,714	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan				
1.04.03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN					537,775,763	542,837,258	553,842,525	565,407,356	577,552,988	590,301,985			3,367,717,875	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan				
1.04.05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)					21,161,666,963	21,360,838,595	21,793,899,735	22,248,979,968	22,726,914,872	23,228,592,414			132,520,892,547	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan				
						0	0	0	0	0	0			0					



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kinerja Awal RPJMD	Target										Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
					2025		2026		2027		2028		2029		2030			K	Rp
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					17,399,320,412	17,563,081,190	17,919,148,108	18,293,319,330	18,686,281,876	19,098,765,841			108,959,916,756			Satuan Polisi Pamong Praja		
1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					1,786,503,640	1,803,318,045	1,839,877,797	1,878,296,439	1,918,644,510	1,960,996,975			11,187,637,406			Satuan Polisi Pamong Praja		
1.05.04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN					288,036,074	290,747,043	296,641,532	302,835,729	309,341,005	316,169,448			1,803,770,831			Satuan Polisi Pamong Praja		
						0	0	0	0	0	0			0					
1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					0	0	0	0	0	0			0			Badan Penanggulangan Bencana Daerah		
1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA					1,714,117,302	1,730,250,414	1,765,328,822	1,802,190,800	1,840,904,030	1,881,540,439			10,734,331,808			Badan Penanggulangan Bencana Daerah		
						0	0	0	0	0	0			0					
1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL					0	0	0	0	0	0			0					
1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					6,694,700,923	6,757,710,823	6,894,713,963	7,038,683,058	7,189,882,453	7,348,593,065			41,924,284,286			Dinas Sosial		
1.06.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL					821,004,197	828,731,412	845,532,783	863,188,423	881,730,751	901,194,216			5,141,381,783			Dinas Sosial		
1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL					494,454,986	499,108,750	509,227,482	519,860,704	531,027,938	542,749,934			3,096,429,794			Dinas Sosial		



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kinerja Awal RPJMD	Target										Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
					2025		2026		2027		2028		2029		2030			K	Rp
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
1.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL					1,987,403,597		2,006,108,854		2,046,779,906		2,089,518,888		2,134,404,271		2,181,519,452		12,445,734,967	Dinas Sosial
1.06.06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA					171,461,942		173,075,726		176,584,594		180,271,871		184,144,329		188,209,160		1,073,747,621	Dinas Sosial
						0		0		0		0		0		0		0	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					0		0		0		0		0		0		0	
2.07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA					0		0		0		0		0		0		0	Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja, dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
2.07.02	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA					57,802,776		58,346,810		59,529,710		60,772,755		62,078,227		63,448,552		361,978,829	Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja, dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA					420,796,217		424,756,712		433,368,060		442,417,255		451,920,911		461,896,685		2,635,155,839	Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja, dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
2.07.04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA					21,573,512		21,776,560		22,218,049		22,681,986		23,169,222		23,680,664		135,099,993	Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja, dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
2.07.05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL					153,486,780		154,931,383		158,072,400		161,373,123		164,839,612		168,478,308		961,181,606	Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja, dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
						0		0		0		0		0		0		0	
2.08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK					0		0		0		0		0		0		0	
2.08.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP	Nilai	78	79	5,083,021,784	80	5,130,862,710	81	5,234,883,779	82	5,344,193,822	83	5,458,993,546	84	5,579,496,240	84	31,831,451,882	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kinerja Awal RPJMD	Target												Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2025		2026		2027		2028		2029		2030		K	Rp	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
2.08.02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	92.57	92.67	676,253,642	93	682,618,478	93	696,457,613	93	711,000,402	93	726,273,548	93	742,305,426	93	4,234,909,109	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Indeks	89.82	90.02	0	90	0	90	0	90	0	90	0	91	0	91	0	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Persentase ARG pada belanja langsung APBD	Persentase	2	3	0	4	0	5	0	6	0	7	0	8	0	8	0	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.08.03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait	Persentase	100	100	30,158,701	100	30,442,552	100	31,059,732	100	31,708,293	100	32,389,425	100	33,104,394	100	188,863,096	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Persentase kekerasan terhadap Perempuan, TPPO (100.000) Penduduk perempuan	Persentase	0.009	0.010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.08.04	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA					33,394,332		33,708,636		34,392,032		35,110,175		35,864,384		36,656,060		209,125,618	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.08.05	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Indeks	89.82	90.02	78,321,740	90	79,058,897	90	80,661,706	90	82,346,010	90	84,114,901	91	85,971,667	91	490,474,921	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kinerja Awal RPJMD	Target										Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
					2025		2026		2027		2028		2029		2030			K	Rp
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
																		Perlindungan Anak	
		Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	92.57	92.67	0	93	0	93	0	93	0	93	0	93	0	93	0	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.08.06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Indeks Perlindungan Anak (IPA)	Indeks	67.55	67.65	102,265,168	68	103,227,678	68	105,320,475	68	107,519,681	68	109,829,333	69	112,253,723	69	640,416,060	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.08.07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Indeks Perlindungan Anak (IPA)	Indeks	67.55	67.65	81,934,253	68	82,705,411	68	84,382,147	68	86,144,138	68	87,994,618	69	89,937,025	69	513,097,592	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
						0		0		0		0		0		0		0	
2.09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN					0		0		0		0		0		0		0	Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan
2.09.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Peringkat	A	A	6,935,944,990	AA	7,001,225,456	AA	7,143,165,515	AAA	7,292,322,548	AAA	7,448,970,425	AAA	7,613,400,186	AAA	43,435,029,119	Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan
2.09.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	Jumlah Ketersediaan Pangan Utama	Persentase	100	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan
2.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Persentase Ketersediaan Energi dan Protein Per Kapita	Persentase	100	100	405,848,766	100	409,668,577	100	417,974,034	100	426,701,785	100	435,867,853	100	445,489,270	100	2,541,550,285	Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kinerja Awal RPJMD	Target												Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2025		2026		2027		2028		2029		2030		K	Rp	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
2.09.04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANANA PANGAN	Persentase Penanganan Daerah Rawan Pangan	Persentase	12	13	126,880,027	14	128,074,210	15	130,670,735	16	133,399,282	17	136,264,859	18	139,272,791	18	794,561,904	Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan
2.09.05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase sampel aman Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT)	Persentase	90	91	102,944,782	92	103,913,689	93	106,020,393	94	108,234,214	95	110,559,215	96	112,999,717	96	644,672,010	Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan
						0		0		0		0		0		0		0	
2.10	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN					0		0		0		0		0		0		0	SEKRETARIAT DAERAH
2.10.05	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN					387,837,843		391,488,137		399,425,011		407,765,438		416,524,731		425,719,165			SEKRETARIAT DAERAH
2.10.06	PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE					67,625,364		68,261,848		69,645,761		71,100,040		72,627,355		74,230,543			SEKRETARIAT DAERAH
2.10.09	PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH					534,417,569		539,447,457		550,384,000		561,876,614		573,946,401		586,615,786			
						0		0		0		0		0		0			
2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP					0		0		0		0		0		0		0	
2.11.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					7,524,658,853		7,595,480,239		7,749,467,983		7,911,285,268		8,081,229,210		8,259,615,552		47,121,737,106	Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan, dan Perhubungan
2.11.02	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP					42,531,676		42,931,980		43,802,366		44,717,006		45,677,582		46,685,876		266,346,485	Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan, dan Perhubungan



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kinerja Awal RPJMD	Target										Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab								
					2025		2026		2027		2028		2029		2030			K	Rp						
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp									
2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP						257,316,637		259,738,477			265,004,312			270,537,889			276,349,369			282,449,549			1,611,396,233	Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan, dan Perhubungan
2.11.04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)						34,025,340		34,345,584			35,041,892			35,773,605			36,542,065			37,348,701			213,077,188	Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan, dan Perhubungan
2.11.05	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)						85,872,133		86,680,354			88,437,677			90,284,351			92,223,768			94,259,530			537,757,814	Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan, dan Perhubungan
2.11.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)						189,265,619		191,046,970			194,920,180			198,990,325			203,264,877			207,751,778			1,185,239,748	Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan, dan Perhubungan
2.11.07	PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH						88,032,789		88,861,346			90,662,885			92,556,025			94,544,240			96,631,224			551,288,509	Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan, dan Perhubungan
2.11.08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT						29,642,566		29,921,559			30,528,177			31,165,638			31,835,114			32,537,847			185,630,902	Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan, dan Perhubungan
2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN						3,718,133,661		3,753,128,388			3,829,217,819			3,909,176,035			3,993,149,847			4,081,295,274			23,284,101,024	Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan, dan Perhubungan
							0		0			0			0			0			0			0	



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kinerja Awal RPJMD	Target												Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2025		2026		2027		2028		2029		2030		K	Rp	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
2.12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL					0		0		0		0		0		0		0	
2.12.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Kantor	Persentase	100	100	6,325,813,918	100	6,385,351,887	100	6,514,805,970	100	6,650,842,176	100	6,793,710,281	100	6,943,675,725	100	39,614,199,957	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Persentase Disiplin Pegawai	Persentase	100	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Persentase Laporan Kinerja dan Keuangan Yang Selesai Tepat Waktu	Persentase	100	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Persentase Data Aset	Persentase	100	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Persentase Pelayanan Dinas	Persentase	100	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.12.02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Peningkatan Tertib Administrasi Kependudukan dalam Pelayanan, Penataan dan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Dokumen	750	760	303,255,866	770	306,110,081	780	312,316,035	790	318,837,533	800	325,686,547	810	332,875,804	810	1,899,081,866	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kinerja Awal RPJMD	Target												Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2025		2026		2027		2028		2029		2030		K	Rp	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
2.12.03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Tercapainya Administrasi Kependudukan Melalui Tertibnya Dokumen Akta Kelahiran, Kematian, Perkawinan dan Perceraian	Layanan	5	6	264,797,687	7	267,289,938	8	272,708,868	9	278,403,324	10	284,383,763	11	290,661,296	11	1,658,244,875	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.12.04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Tersedianya Data Kependudukan Yang Dimanfaatkan Oleh Lembaga/Instansi Pengguna Melalui Perjanjian Kerja Sama (PKS)	Dokumen	15	16	214,436,457	17	216,454,713	18	220,843,030	19	225,454,471	20	230,297,505	21	235,381,129	21	1,342,867,305	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.12.05	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Tersedianya Informasi Kependudukan berupa Buku Profil Kependudukan	Buku	35	36	21,602,519	37	21,805,839	38	22,247,922	39	22,712,483	40	23,200,375	41	23,712,503	41	135,281,641	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
						0		0		0		0		0		0		0	
2.13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA					0		0		0		0		0		0		0	
2.13.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi kantor	Persentase	100	100	5,000,384,644	100	5,047,447,797	100	5,149,777,745	100	5,257,310,682	100	5,370,244,051	100	5,488,787,675	100	31,313,952,593	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kinerja Awal RPJMD	Target												Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2025		2026		2027		2028		2029		2030		K	Rp	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
		Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	Persentase	100	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		Persentase pegawai disiplin	Persentase	100	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		Persentase aparatur yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis	Persentase	100	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		Persentase laporan kinerja dan keuangan yang selesai tepat waktu	Persentase	100	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		Jumlah pengunjung pameran pembangunan	Persentase	100	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2.13.02	PROGRAM PENATAAN DESA					0		0		0		0		0		0		0	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2.13.04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Jumlah BUMDes Aktif	Persentase	95	96	2,715,807,836	97	2,741,368,766	98	2,796,946,185	99	2,855,349,451	100	2,916,685,798	100	2,981,069,186	100	17,007,227,221	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa
		Status Klasifikasi Desa di Kabupaten Gunung Mas (Desa Swasembada)	Persentase	95	96	0	97	0	98	0	99	0	100	0	100	0	100	0	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa
		Persentase aparatur yang mengikuti pelatihan	Persentase	95	96	0	97	0	98	0	99	0	100	0	100	0	100	0	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kinerja Awal RPJMD	Target												Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2025		2026		2027		2028		2029		2030		K	Rp	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
		Persentase Pelayanan Kesehatan Aparatur Desa	Persentase	95	96	0	97	0	98	0	99	0	100	0	100	0	100	0	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa
2.13.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Jumlah kelompok usaha perempuan aktif	Persentase	95	96	540,917,425	97	546,008,490	98	557,078,049	99	568,710,442	100	580,927,027	100	593,750,503	100	3,387,391,936	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa
		Jumlah kelompok usaha aktif	Persentase	95	96	0	97	0	98	0	99	0	100	0	100	0	100	0	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa
		Jumlah Desa/Kelurahan yang mendapat akses TTG	Persentase	95	96	0	97	0	98	0	99	0	100	0	100	0	100	0	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa
		Status perkembangan Desa di Kabupaten Gunung Mas (Desa Tertinggal)	Persentase	95	96	0	97	0	98	0	99	0	100	0	100	0	100	0	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa
						0		0										0	
2.14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA					0		0										0	
2.14.02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK					257,741,954		260,167,797		265,442,336		270,985,059		276,806,145		282,916,408		1,614,059,698	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.14.03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	iBangga	Indeks	66.35	66.45	2,211,170,722	67	2,231,982,054	67	2,277,232,370	67	2,324,783,448	67	2,374,722,598	67	2,427,142,604	67	13,847,033,795	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kinerja Awal RPJMD	Target												Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2025		2026		2027		2028		2029		2030		K	Rp	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
2.14.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Menurunnya Angka melahirkan pada remaja usia 15-19 tahun (ASFR)	Per 1000	45	46	1,083,757,513	47	1,093,957,738	48	1,116,136,202	49	1,139,442,334	50	1,163,918,929	51	1,189,611,461	51	6,786,824,177	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Prevalensi Stunting	Persentase	12.35	12.45	0	13	0	13	0	13	0	13	0	13	0	13	0	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		iBangga	Indeks	66.35	66.45	0	67	0	67	0	67	0	67	0	67	0	67	0	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
					0		0		0		0		0		0		0	0	
2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN					0		0		0		0		0		0		0	
2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)					599,860,288		605,506,116		617,781,907		630,681,862		644,229,668		658,450,497		3,756,510,338	Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan, dan Perhubungan
2.15.03	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN					47,848,135		48,298,477		49,277,661		50,306,632		51,387,279		52,521,610		299,639,795	Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan, dan Perhubungan
						0		0		0		0		0		0		0	
2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA					0		0		0		0		0		0		0	



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kinerja Awal RPJMD	Target												Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2025		2026		2027		2028		2029		2030		K	Rp	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
2.16.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pelaksanaan administrasi dan pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran	Persentase	100	100	5,277,725,188	100	5,327,398,645	100	5,435,404,205	100	5,548,901,332	100	5,668,098,420	100	5,793,216,928	100	33,050,744,718	Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian
		Nilai Akuntabilitas Kinerja	Nilai	BB	BB	0	A	0	A	0	AA	0	AA	0	AAA	0	AAA	0	Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian
2.16.02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten (Permendagri 18 tahun 2020)	Persentase	75	76	2,794,810,420	77	2,821,114,915	78	2,878,309,076	79	2,938,411,287	80	3,001,531,903	81	3,067,788,197	81	17,501,965,797	Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian
		Nilai Keterbukaan Informasi Publik (Renstra 2025-2026)	Nilai	30.25	30.35	0	30	0	31	0	31	0	31	0	31	0	31	0	Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian
2.16.03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Indeks SPBE (IKU RPD 2025-2026)	Nilai	2.65	2.75	3,603,334,494	3	3,637,248,742	3	3,710,988,875	3	3,788,478,343	3	3,869,859,423	3	3,955,283,317	3	22,565,193,194	Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kinerja Awal RPJMD	Target												Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2025		2026		2027		2028		2029		2030		K	Rp	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
		Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi (Permendagri 18 tahun 2020/IKK RPD 2025-2026)	Persentase	73	74	0	75	0	76	0	77	0	78	0	79	0	79	0	Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian
						0		0		0		0		0		0	0		
2.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA					0		0		0		0		0		0	0		
2.17.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					5,711,405,764		5,765,160,982		5,882,041,561		6,004,864,960		6,133,856,696		6,269,256,427		35,766,586,391	Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian
2.17.03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI					90,012,507		90,859,696		92,701,750		94,637,463		96,670,389		98,804,307		563,686,112	Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian
2.17.07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)					306,228,064		309,110,254		315,377,032		321,962,446		328,878,587		336,138,306		1,917,694,688	Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian
						0		0		0		0		0		0		0	
2.18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL					0		0		0		0		0		0		0	
2.18.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					4,410,968,182		4,452,483,802		4,542,751,687		4,637,609,263		4,737,230,699		4,841,801,085		27,622,844,718	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.18.02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL					44,004,633		44,418,800		45,319,329		46,265,646		47,259,488		48,302,701		275,570,596	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kinerja Awal RPJMD	Target										Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
					2025		2026		2027		2028		2029		2030			K	Rp
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
2.18.03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA					334,554,619		337,703,416		344,549,881		351,744,456		359,300,350		367,231,604		2,095,084,326	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL					346,216,516		349,475,073		356,560,192		364,005,555		371,824,833		380,032,553		2,168,114,721	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL					261,003,810		263,460,354		268,801,644		274,414,514		280,309,268		286,496,860		1,634,486,449	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.18.06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL					58,279,454		58,827,975		60,020,629		61,273,925		62,590,163		63,971,788		364,963,934	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu
						0		0		0		0		0		0		0	
2.19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA					0		0		0		0		0		0		0	
2.19.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN					1,435,798,833		1,449,312,437		1,478,695,221		1,509,571,979		1,541,999,404		1,576,037,745		8,991,415,619	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
2.19.03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Tingkat Partisipasi Pemuda Dalam Kegiatan Ekonomi Mandiri	Persentase	100	100	6,581,422,013	100	6,643,365,742	100	6,778,050,695	100	6,919,583,736	100	7,068,224,734	100	7,224,249,853	100	41,214,896,774	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
		Tingkat Prestasi Pemuda Dalam Kegiatan Kepemudaan	Persentase	100	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kinerja Awal RPJMD	Target												Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2025		2026		2027		2028		2029		2030		K	Rp	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
		Tingkat partisipasi Pemuda Dalam Organisasi Kepemudaan dan Organisasi Sosial Kemasyarakatan	Persentase	100	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
		Peningkatan Prestasi Olahraga	Persentase	100	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
2.19.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Tingkat Partisipasi Pemuda Dalam Kegiatan Ekonomi Mandiri	Persentase	100	100	425,316,756	100	429,319,797	100	438,023,656	100	447,170,064	100	456,775,816	100	466,858,759	100	2,663,464,848	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
		Tingkat Prestasi Pemuda Dalam Kegiatan Kepemudaan	Persentase	100	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
		Tingkat partisipasi Pemuda Dalam Organisasi Kepemudaan dan Organisasi Sosial Kemasyarakatan	Persentase	100	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
		Peningkatan Prestasi Olahraga	Persentase	100	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
						0		0		0		0		0		0		0	
2.20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK					0		0		0		0		0		0		0	



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kinerja Awal RPJMD	Target												Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2025		2026		2027		2028		2029		2030		K	Rp	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
2.20.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase PD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	Persentase	100	100	169,000,482	100	170,591,099	100	174,049,595	100	177,683,939	100	181,500,804	100	185,507,282	100	1,058,333,202	Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian
		Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	Persentase	100	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian
		Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	Nilai	2	3	0	4	0	5	0	6	0	7	0	8	0	8	0	Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian
						0		0		0		0		0		0		0	
2.21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN					0		0		0		0		0		0		0	
2.21.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah	Persentase	35	36	144,271,979	37	145,629,853	38	148,582,295	39	151,684,854	40	154,943,227	41	158,363,469	41	903,475,677	Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian
		Persentase penilaian resiko keamanan informasi	Persentase	18.72	18.82	0	18.92	0	19.02	0	19.12	0	19.22	0	19	0	19	0	Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kinerja Awal RPJMD	Target												Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2025		2026		2027		2028		2029		2030		K	Rp	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
		Persentase pelaksanaan prosedur pengamanan informasi pada perangkat daerah	Persentase	10.25	10.35	0	10.45	0	10.55	0	10.65	0	10.75	0	11	0	11	0	Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian
						0		0		0		0		0		0	0		
2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN					0		0		0		0		0		0	0		
2.22.0 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					5,538,331,438		5,590,457,696		5,703,796,411		5,822,897,858		5,947,980,721		6,079,277,396		34,682,741,520	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
2.22.0 2	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN					4,214,184,215		4,253,847,723		4,340,088,539		4,430,714,288		4,525,891,371		4,625,796,619		26,390,522,754	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
2.22.0 3	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL					359,555,470		362,939,572		370,297,665		378,029,881		386,150,419		394,674,364		2,251,647,371	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
2.22.0 4	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH					165,691,244		167,250,714		170,641,489		174,204,668		177,946,794		181,874,820		1,037,609,730	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
2.22.0 5	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA					579,875,419		585,333,152		597,199,963		609,670,145		622,766,595		636,513,644		3,631,358,919	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
2.22.0 6	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN					21,265,583		21,465,732		21,900,920		22,358,235		22,838,517		23,342,658		133,171,644	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
						0		0		0		0		0		0		0	
2.23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN					0		0		0		0		0		0		0	
2.23.0 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					6,602,155,860		6,664,294,735		6,799,403,994		6,941,382,914		7,090,492,185		7,247,008,840		41,344,738,527	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kinerja Awal RPJMD	Target												Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
					2025		2026		2027		2028		2029		2030		K	Rp		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
2.23.02	PRGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN					1,012,213,975		1,021,740,839		1,042,455,206		1,064,222,800		1,087,083,588		1,111,080,045		6,338,796,453	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
2.23.03	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO					127,595,027		128,795,939		131,407,097		134,151,019		137,032,745		140,057,628		799,039,455	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
						0		0		0		0		0		0		0	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
2.24	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN					0		0		0		0		0		0		0	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
2.24.02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP					3,260,113,592		3,290,797,476		3,357,513,794		3,427,622,319		3,501,251,778		3,578,538,968		20,415,837,927	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
2.24.03	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP					0		0		0		0		0		0		0	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
						0		0		0		0		0		0		0		
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN					0		0		0		0		0		0				
3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN					0		0		0		0		0		0		0		
3.25.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	Ton	175	176	205,744,054	177	207,680,498	178	211,890,930	179	216,315,442	180	220,962,159	181	225,839,712	181	1,288,432,796	Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan	
3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	Ton	1,350	1,400	924,591,370	1,450	933,293,538	1,500	952,214,759	1,550	972,098,035	1,600	992,979,872	1,650	1,014,899,068	1,650	5,790,076,643	Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan	
		Jumlah Produksi Benih	Ekor	150,000	160,000	0	170000	0	180000	0	190000	0	200000	0	210,000	0	210,000	0		Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan
3.25.06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Jumlah produksi olahan hasil perikanan	Ton	35	36	213,729,070	37	215,740,668	38	220,114,509	39	224,710,738	40	229,537,796	41	234,604,650	41	1,338,437,431	Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan	
						0		0		0		0		0		0		0		
3.26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA					0		0		0		0		0		0		0		
3.26.02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA					80,797,605		81,558,065		83,211,541		84,949,088		86,773,896		88,689,357		505,979,552	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kinerja Awal RPJMD	Target										Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
					2025		2026		2027		2028		2029		2030			K	Rp
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
3.26.03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA					235,293,479	237,508,039	242,323,182	247,383,153	252,697,241	258,275,320			1,473,480,415	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata				
3.26.04	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL					29,082,394	29,356,115	29,951,269	30,576,684	31,233,508	31,922,962				DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA				
3.26.05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF					63,579,071	64,177,471	65,478,579	66,845,843	68,281,772	69,789,035			398,151,772	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata				
						0	0	0	0	0	0								
3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN					0	0	0	0	0	0				DINAS PERTANIAN				
3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					13,004,591,652	13,126,989,653	13,393,121,017	13,672,783,891	13,966,491,767	14,274,790,333				DINAS PERTANIAN				
3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN					8,685,541,225	8,767,288,728	8,945,033,250	9,131,815,233	9,327,977,630	9,533,884,895				DINAS PERTANIAN				
3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN					4,178,402,125	4,217,728,855	4,303,237,411	4,393,093,670	4,487,462,616	4,586,519,581				DINAS PERTANIAN				
3.27.04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER					254,291,614	256,684,983	261,888,912	267,357,437	273,100,597	279,129,063				DINAS PERTANIAN				
3.27.05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN					104,939,339	105,927,018	108,074,540	110,331,254	112,701,302	115,189,089				DINAS PERTANIAN				



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kinerja Awal RPJMD	Target										Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
					2025		2026		2027		2028		2029		2030			K	Rp
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
3.27.06	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN					74,929,967		75,635,201		77,168,599		78,779,963		80,472,251		82,248,608			DINAS PERTANIAN
3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN					719,429,354		726,200,556		740,923,257		756,394,537		772,642,803		789,698,243			DINAS PERTANIAN
						0		0		0		0		0		0			
3.28	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN					0		0		0		0		0		0	0		
3.28.04	PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA					382,523,998		386,124,278		393,952,408		402,178,561		410,817,841		419,886,300	2,395,483,385		Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan, dan Perhubungan
						0		0		0		0		0		0			
3.30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN					0		0		0		0		0		0			DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3.30.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					3,859,022,874		3,895,343,637		3,974,316,284		4,057,304,313		4,144,460,099		4,235,945,572			DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3.30.02	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN					18,719,041		18,895,223		19,278,297		19,680,849		20,103,617		20,547,388			DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3.30.04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING					592,297,033		597,871,677		609,992,690		622,729,998		636,106,988		650,148,516			DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3.30.06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN					293,830,592		296,596,098		302,609,169		308,927,976		315,564,122		322,529,934			DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3.30.07	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI					219,219,769		221,283,045		225,769,250		230,483,556		235,434,621		240,631,642			DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
						0		0		0		0		0		0			
3.31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN					0		0		0		0		0		0			DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kinerja Awal RPJMD	Target										Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
					2025		2026		2027		2028		2029		2030			K	Rp	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
3.31.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						299,820,406		302,642,288		308,777,937		315,225,555		321,996,980		329,104,792			DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3.31.02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI						243,518,611		245,810,585		250,794,051		256,030,902		261,530,755		267,303,826			DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3.31.04	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL						117,327,457		118,431,732		120,832,769		123,355,889		126,005,722		128,787,192			DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
							0		0		0		0		0		0			
3.32	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI						0		0		0		0		0		0	0		Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja, dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
3.32.02	PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI						123,341,859		124,502,741		127,026,860		129,679,319		132,464,987		135,389,040		772,404,806	Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja, dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
3.32.04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI						30,144,921		30,428,642		31,045,540		31,693,804		32,374,625		33,089,268		188,776,800	Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja, dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
							0		0		0		0		0		0			
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						0		0		0		0		0		0			SEKRETARIAT DAERAH
4.01	SEKRETARIAT DAERAH						0		0		0		0		0		0			SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						29,999,062,176		30,281,410,547		30,895,323,813		31,540,451,639		32,217,978,552		32,929,163,347			SEKRETARIAT DAERAH
4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT						17,876,517,418		18,044,769,530		18,410,602,006		18,795,035,318		19,198,775,328		19,622,572,155			SEKRETARIAT DAERAH
4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN						1,447,149,009		1,460,769,441		1,490,384,499		1,521,505,342		1,554,189,110		1,588,496,528			SEKRETARIAT DAERAH
							0		0		0		0		0		0			



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kinerja Awal RPJMD	Target										Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
					2025		2026		2027		2028		2029		2030			K	Rp
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
4.02	SEKRETARIAT DPRD					0		0		0		0		0		0		SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	
4.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					24,065,117,082		24,291,615,716		24,784,094,265		25,301,612,999		25,845,122,139		26,415,631,486		SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	
4.02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD					14,335,033,184		14,469,953,177		14,763,311,249		15,071,585,179		15,395,340,993		15,735,180,205		SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	
						0		0		0		0		0		0			
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN					0		0		0		0		0		0		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN	
5.01	PERENCANAAN					0		0		0		0		0		0		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN	
5.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					6,920,448,910		6,985,583,529		7,127,206,469		7,276,030,260		7,432,328,159		7,596,390,556		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN	
5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH					1,407,651,835		1,420,900,523		1,449,707,295		1,479,978,753		1,511,770,480		1,545,141,543		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN	
5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH					2,000,415,848		2,019,243,575		2,060,180,915		2,103,199,724		2,148,378,989		2,195,802,650		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN	
						0		0		0		0		0		0			



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kinerja Awal RPJMD	Target										Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
					2025		2026		2027		2028		2029		2030			K	Rp
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
5.05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN					0		0		0		0		0		0			
5.05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH					962,685,698		971,746,406		991,447,205		1,012,149,697		1,033,891,892		1,056,714,187			
						0		0		0		0		0		0			
5.02	KEUANGAN					0		0		0		0		0		0			BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					24,977,175,027		25,212,257,864		25,723,401,146		26,260,533,625		26,824,641,536		27,416,772,950			BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH					177,802,651,192		179,476,113,132		183,114,740,423		186,938,374,546		190,954,036,126		195,169,185,964			BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH					1,243,298,418		1,255,000,227		1,280,443,602		1,307,180,651		1,335,260,467		1,364,735,220			BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
						0		0		0		0		0		0			
5.02	KEUANGAN					0		0		0		0		0		0			BADAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Realisasi Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan	Persentase	100	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100		BADAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase Realisasi PAD	Persentase	100	100	2,316,030,729	100	2,337,828,993	100	2,385,225,208	100	2,435,031,294	100	2,487,338,701	100	2,542,244,612	100		BADAN PENDAPATAN DAERAH
						0		0		0		0		0		0			
5.03	KEPEGAWAIAN					0		0		0		0		0		0			BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					5,557,138,797		5,609,442,068		5,723,165,665		5,842,671,563		5,968,179,189		6,099,921,728			BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kinerja Awal RPJMD	Target										Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
					2025		2026		2027		2028		2029		2030			K	Rp
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH					1,825,029,799	1,842,206,809	1,879,554,976	1,918,802,120	1,960,020,302	2,003,286,103							BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
						0	0	0	0	0	0								
5.04	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN					0	0	0	0	0	0							BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
5.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA					2,894,087,429	2,921,326,310	2,980,552,117	3,042,789,273	3,108,152,054	3,176,761,898							BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
						0	0	0	0	0	0								
6	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN					0	0	0	0	0	0							INSPEKTORAT	
6.01	INSPEKTORAT DAERAH					0	0	0	0	0	0							INSPEKTORAT	
6.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					13,292,110,301	13,417,214,401	13,689,229,666	13,975,075,610	14,275,277,076	14,590,391,818							INSPEKTORAT	
6.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN					2,197,981,221	2,218,668,415	2,263,648,815	2,310,916,255	2,360,557,521	2,412,664,844							INSPEKTORAT	
6.01.03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI					990,161,678	999,480,987	1,019,744,067	1,041,037,428	1,063,400,166	1,086,873,831							INSPEKTORAT	
						0	0	0	0	0	0								
7	UNSUR KEWILAYAHAN					0	0	0	0	0	0							KECAMATAN KURUN	
7.01	KECAMATAN					0	0	0	0	0	0							KECAMATAN KURUN	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase	100	100	35,203,645,681	35,534,979,105	36,255,401,129	37,012,453,175	37,807,525,276	38,642,094,617	100	100	100	100	100	100	KECAMATAN KURUN	



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kinerja Awal RPJMD	Target												Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2025		2026		2027		2028		2029		2030		K	Rp	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Persentase	100	100	5,697,239,882	100	5,750,861,772	100	5,867,452,454	100	5,989,971,217	100	6,118,643,018	100	6,253,706,919	100		KECAMATAN KURUN
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Terlaksananya Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Persentase	100	100	652,618,094	100	658,760,474	100	672,115,922	100	686,150,430	100	700,889,768	100	716,361,321	100		KECAMATAN KURUN
						0		0		0		0		0		0			
7.01	KELURAHAN					0		0		0		0		0		0			KELURAHAN KURUN
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	TERCAPAINYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase	100	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100		KELURAHAN KURUN
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	TERCAPAINYA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase	100	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100		KELURAHAN KURUN
						0		0		0		0		0		0			
7.01	KELURAHAN					0		0		0		0		0		0			KELURAHAN TAMPANG TUMBANG ANJIR
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					0		0		0		0		0		0			KELURAHAN TAMPANG TUMBANG ANJIR



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kinerja Awal RPJMD	Target												Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2025		2026		2027		2028		2029		2030		K	Rp	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			KELURAHAN TAMPANG TUMBANG ANJIR	
						0	0	0	0	0	0	0	0	0					
7.01	KECAMATAN					0	0	0	0	0	0	0	0	0				KECAMATAN TEWAH	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					0	0	0	0	0	0	0	0	0				KECAMATAN TEWAH	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					0	0	0	0	0	0	0	0	0				KECAMATAN TEWAH	
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM					1,158,216,412	1,169,117,437	1,192,819,658	1,217,727,025	1,243,885,269	1,271,342,991							KECAMATAN TEWAH	
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA					0	0	0	0	0	0	0	0	0				KECAMATAN TEWAH	
						0	0	0	0	0	0	0	0	0					
7.01	KELURAHAN					0	0	0	0	0	0	0	0	0				KELURAHAN TEWAH	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					0	0	0	0	0	0	0	0	0				KELURAHAN TEWAH	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					0	0	0	0	0	0	0	0	0				KELURAHAN TEWAH	
						0	0	0	0	0	0	0	0	0					
7.01	KECAMATAN					0	0	0	0	0	0	0	0	0				KECAMATAN KAHAYAN HULU UTARA	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					0	0	0	0	0	0	0	0	0				KECAMATAN KAHAYAN HULU UTARA	



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kinerja Awal RPJMD	Target										Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
					2025		2026		2027		2028		2029		2030			K	Rp
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			KECAMATAN KAHAYAN HULU UTARA	
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			KECAMATAN KAHAYAN HULU UTARA	
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			KECAMATAN KAHAYAN HULU UTARA	
						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
7.01	KELURAHAN					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			KELURAHAN TUMBANG MIRI	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			KELURAHAN TUMBANG MIRI	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			KELURAHAN TUMBANG MIRI	
						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
7.01	KECAMATAN					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			KECAMATAN SEPANG	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			KECAMATAN SEPANG	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					203,842,965	205,761,516	209,933,043	214,316,672	218,920,453	223,752,938							KECAMATAN SEPANG	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			KECAMATAN SEPANG	
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			KECAMATAN SEPANG	



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kinerja Awal RPJMD	Target										Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
					2025		2026		2027		2028		2029		2030			K	Rp
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA					0	0		0		0		0		0			KECAMATAN SEPANG	
						0	0		0		0		0		0				
7.01	KELURAHAN					0	0		0		0		0		0			KELURAHAN SEPANG SIMIN	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					0	0		0		0		0		0			KELURAHAN SEPANG SIMIN	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					0	0		0		0		0		0			KELURAHAN SEPANG SIMIN	
						0	0		0		0		0		0				
7.01	KECAMATAN					0	0		0		0		0		0			KECAMATAN MANUHING	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					0	0		0		0		0		0			KECAMATAN MANUHING	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					0	0		0		0		0		0			KECAMATAN MANUHING	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					0	0		0		0		0		0			KECAMATAN MANUHING	
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA					0	0		0		0		0		0			KECAMATAN MANUHING	
						0	0		0		0		0		0				
7.01	KELURAHAN					0	0		0		0		0		0			KELURAHAN TUMBANG TALAKEN	



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kinerja Awal RPJMD	Target										Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
					2025		2026		2027		2028		2029		2030			K	Rp
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					0	0			0	0			0	0			KELURAHAN TUMBANG TALAKEN	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					0	0			0	0			0	0			KELURAHAN TUMBANG TALAKEN	
						0	0			0	0			0	0				
7.01	KECAMATAN					0	0			0	0			0	0			KECAMATAN RUNGAN	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					0	0			0	0			0	0			KECAMATAN RUNGAN	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat				0	0			0	0			0	0			KECAMATAN RUNGAN	
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Peningkatan kesadaran masyarakat berbangsa dan bernegara	Kegiatan	1	2	0	3	0	4	0	5	0	6	0	7	0	7	KECAMATAN RUNGAN	
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa	Tahun	1	2	0	3	0	4	0	5	0	6	0	7	0	7	KECAMATAN RUNGAN	
						0	0			0	0			0	0				
7.01	KELURAHAN					0	0			0	0			0	0			KELURAHAN JAKATAN RAYA	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatkan wawasan Pegawai	Tahun	1	2	0	3	0	4	0	5	0	6	0	7	0	7	KELURAHAN JAKATAN RAYA	



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kinerja Awal RPJMD	Target										Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
					2025		2026		2027		2028		2029		2030			K	Rp
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Peningkatan Pemberdayaan Kelurahan	Tahun	1	2	0	3	0	4	0	5	0	6	0	7	0	7		KELURAHAN JAKATAN RAYA
						0		0		0		0		0		0			
7.01	KECAMATAN					0		0		0		0		0		0			KECAMATAN MIHING RAYA
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					0		0		0		0		0		0			KECAMATAN MIHING RAYA
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					0		0		0		0		0		0			KECAMATAN MIHING RAYA
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM					0		0		0		0		0		0			KECAMATAN MIHING RAYA
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA					0		0		0		0		0		0			KECAMATAN MIHING RAYA
						0		0		0		0		0		0			
7.01	KELURAHAN					0		0		0		0		0		0			KELURAHAN KAMPURI
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					0		0		0		0		0		0			KELURAHAN KAMPURI
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					0		0		0		0		0		0			KELURAHAN KAMPURI
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM					0		0		0		0		0		0			KELURAHAN KAMPURI
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA					0		0		0		0		0		0			KELURAHAN KAMPURI



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kinerja Awal RPJMD	Target										Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
					2025		2026		2027		2028		2029		2030			K	Rp
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
7.01	KECAMATAN					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			KECAMATAN RUNGAN HULU	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			KECAMATAN RUNGAN HULU	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			KECAMATAN RUNGAN HULU	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			KECAMATAN RUNGAN HULU	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					29,221,264	29,496,292	30,094,288	30,722,690	31,382,650	32,075,396							KECAMATAN RUNGAN HULU	
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			KECAMATAN RUNGAN HULU	
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			KECAMATAN RUNGAN HULU	
						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
7.01	KELURAHAN					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			KELURAHAN TUMBANG RAHUYAN	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			KELURAHAN TUMBANG RAHUYAN	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			KELURAHAN TUMBANG RAHUYAN	
						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kinerja Awal RPJMD	Target										Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
					2025		2026		2027		2028		2029		2030			K	Rp
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
7.01	KECAMATAN					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			KECAMATAN DAMANG BATU	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			KECAMATAN DAMANG BATU	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			KECAMATAN DAMANG BATU	
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			KECAMATAN DAMANG BATU	
						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
7.01	KECAMATAN					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			KELURAHAN TUMBANG MARIKOI	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			KELURAHAN TUMBANG MARIKOI	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			KELURAHAN TUMBANG MARIKOI	
						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
7.01	KECAMATAN					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			KECAMATAN MANUHING RAYA	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			KECAMATAN MANUHING RAYA	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			KECAMATAN MANUHING RAYA	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			KECAMATAN MANUHING RAYA	



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kinerja Awal RPJMD	Target										Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
					2025		2026		2027		2028		2029		2030			K	Rp
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM					0	0			0	0			0	0			KECAMATAN MANUHING RAYA	
						0	0			0	0			0	0				
7.01	KELURAHAN					0	0			0	0			0	0			KELURAHAN TEHANG	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					0	0			0	0			0	0			KELURAHAN TEHANG	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					0	0			0	0			0	0			KELURAHAN TEHANG	
						0	0			0	0			0	0				
7.01	KECAMATAN					0	0			0	0			0	0			KECAMATAN MIRI MANASA	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					0	0			0	0			0	0			KECAMATAN MIRI MANASA	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					0	0			0	0			0	0			KECAMATAN MIRI MANASA	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					0	0			0	0			0	0			KECAMATAN MIRI MANASA	
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM					0	0			0	0			0	0			KECAMATAN MIRI MANASA	
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA					0	0			0	0			0	0			KECAMATAN MIRI MANASA	
						0	0			0	0			0	0				
7.01	KELURAHAN					0	0			0	0			0	0			KELURAHAN TUMBANG NAPOI	



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kinerja Awal RPJMD	Target										Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
					2025		2026		2027		2028		2029		2030			K	Rp
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					0	0		0		0		0		0			KELURAHAN TUMBANG NAPOI	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					0	0		0		0		0		0			KELURAHAN TUMBANG NAPOI	
						0	0		0		0		0		0				
7.01	KECAMATAN					0	0		0		0		0		0			KECAMATAN RUNGAN BARAT	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					0	0		0		0		0		0			KECAMATAN RUNGAN BARAT	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					0	0		0		0		0		0			KECAMATAN RUNGAN BARAT	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					0	0		0		0		0		0			KECAMATAN RUNGAN BARAT	
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM					0	0		0		0		0		0			KECAMATAN RUNGAN BARAT	
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA					0	0		0		0		0		0			KECAMATAN RUNGAN BARAT	
						0	0		0		0		0		0				
7.01	KELURAHAN					0	0		0		0		0		0			KELURAHAN RABAMBANG	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					0	0		0		0		0		0			KELURAHAN RABAMBANG	



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kinerja Awal RPJMD	Target										Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
					2025		2026		2027		2028		2029		2030			K	Rp
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			KELURAHAN RABAMBANG	
8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
8.01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
8.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					4,795,778,553	4,840,915,973	4,939,058,777	5,042,191,674	5,150,504,028	5,264,197,075	30,032,646,079						Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
8.01.02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN					1,322,913,318	1,335,364,455	1,362,437,102	1,390,886,265	1,420,764,178	1,452,126,353	8,284,491,670						Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
8.01.03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENIDDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK					1,353,038,504	1,365,773,176	1,393,462,318	1,422,559,320	1,453,117,609	1,485,193,959	8,473,144,886						Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
8.01.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN					376,672,139	380,217,342	387,925,717	396,026,026	404,533,142	413,462,871	2,358,837,236						Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
8.01.06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL					546,952,056	552,099,918	563,292,972	575,055,139	587,408,017	600,374,555	3,425,182,658						Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
<b>Total :</b>						<b>1,199,681,480,000</b>	<b>1,210,972,770,000</b>	<b>1,235,523,550,000</b>	<b>1,261,322,620,000</b>	<b>1,288,417,350,000</b>	<b>1,316,858,080,000</b>	<b>4,953,123,682,972</b>							



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kinerja Awal RFJMD	Target										Kondisi Kinerja pada Akhir periode RFJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
					2025		2026		2027		2028		2029		2030			K	Rp
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			



## 4.2 Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Penetapan indikator kinerja dalam pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah terbagi menjadi dua yakni Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Daerah (IKD). Indikator kinerja utama merupakan indikator yang menentukan target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Gunung Mas Tahun 2025-2029. Sedangkan Indikator Kinerja Daerah (IKD) merupakan indikator yang menentukan target penyelenggaraan pemerintahan daerah selama pelaksanaan pembangunan jangka menengah.

### 4.2.1. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah alat ukur kuantitatif untuk mengetahui hasil dari pelaksanaan sasaran pembangunan daerah. Tujuan penetapan IKU adalah memberikan gambaran tentang keberhasilan pencapaian target indikator penting yang memiliki daya ungkit tinggi bagi perwujudan visi pembangunan jangka menengah daerah. Pencapaian indikator tersebut merupakan akumulasi dari pencapaian beberapa target indikator program pembangunan daerah yang telah dirumuskan. Berikut ini penetapan indikator kinerja utama pada pembangunan Kabupaten Gunung Mas tahun 2025-2029.

**PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH IV | 1**

**PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH IV | 1**

**PROGRAM PERANGKAT DAERA DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH IV | 1**



**Tabel IV.1**  
**Penetapan Indikator Kinerja Utama**  
**Kabupaten Gunung Mas Tahun 2025-2030**

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline 2024	Target					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
<b>Indikator Tujuan</b>									
1	Indeks Infrastruktur	Poin		60.0	62.5	65.0	67.5	70.0	75.0
2	Penurunan Intensitas Emisi GRK	%		10.00	15.00	20.00	25.00	30.00	35.00
3	Indeks Pembangunan Manusia	Poin	73.88	74.17	74.64	75.12	75.59	76.06	76.53
4	Laju pertumbuhan Ekonomi	%	4.48	5.00	5.20	5.40	5.60	5.80	6.00
5	PDRB per Kapita	Juta Rp/Kapita	67.08	70.00	71.00	72.00	73.00	74.00	75.00
6	Tingkat Kemiskinan	%	5.68	4.61	4.41	4.21	4.00	3.80	3.60
7	Indeks Reformasi Birokrasi	Poin		60.00	62.00	64.00	66.00	68.00	70.00
8	Indeks Daya Saing Daerah	Poin	3.27	3.35	3.43	3.52	3.60	3.68	3.76
<b>Indikator Sasaran</b>									
1	Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan	%		52.55	53.65	54.75	55.85	56.95	58.05
2	Indeks Konektivitas Wilayah	Poin	80.12	80.93	81.75	82.56	83.37	84.19	85.00
3	Persentase Desa Mandiri	%		1.75	2.63	2.63	3.51	3.51	4.39
4	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Poin	69.33	70.44	71.55	72.67	73.78	74.89	76.00
5	Indeks Risiko Bencana	Poin		123.56	121.85	120.14	118.42	116.71	115.00
6	Indeks Pendidikan	Poin	64.84	65.78	66.72	67.66	68.60	69.53	70.47
7	Indeks Kesehatan	Poin	82.43	82.54	82.78	83.01	83.25	83.49	83.72
8	Indeks Ketimpangan Gender	Poin		0.49	0.47	0.45	0.42	0.40	0.38
9	Indeks Pembangunan Kebudayaan	Poin		58.53	58.82	59.12	59.41	59.71	60.00
10	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	Poin	<del>69.36</del>	70.30	71.24	72.18	73.12	74.06	75.00
11	LPE Kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	%	2.18	6.50	6.52	6.54	6.56	6.58	6.60



No.	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline 2024	Target					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
12	LPE Kategori Industri Pengolahan	%	1.54	2.28	3.03	3.77	4.51	5.26	6.00
13	Kontribusi PDRB Gunung Mas terhadap PDRB Kalimantan Tengah	%	4.38	4.33	4.36	4.39	4.42	4.45	4.47
14	Gini Rasio	Poin	0.309	0.280	0.274	0.268	0.262	0.256	0.250
15	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	3.12	3.91	3.73	3.55	3.36	3.18	3.00
16	Nilai SAKIP	Poin	61.63	63.03	64.42	65.82	67.21	68.61	70.00
17	Indeks Pelayanan Publik	Poin		81.66	81.70	81.74	81.78	81.82	81.86
18	Indeks Integritas Nasional	Poin		74.59	75.67	76.75	77.84	78.92	80.00

Sumber : Tim Penyusun, 2025



#### **4.2.2. Indikator Kinerja Daerah (IKD)**

Kinerja pembangunan suatu daerah pada dasarnya digambarkan melalui tingkat efisiensi dan efektivitas pencapaian sasaran yang telah direncanakan pada awal pembuatan rencana pembangunan daerah. Oleh karena itu, penetapan indikator kinerja harus ditetapkan secara tepat agar dapat menggambarkan keadaan capaian pembangunan secara riil.

Berdasarkan uraian makna penetapan kinerja pemerintah tersebut, maka untuk dapat mengukur tingkat capaian kinerja pelaksanaan pembangunan daerah diperlukan penetapan indikator kinerja daerah. Penetapan indikator kinerja daerah beserta targetnya dalam perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Gunung Mas diuraikan dalam tabel sebagai berikut:



**Tabel IV.2**  
**Penetapan Indikator Kinerja Daerah**  
**Kabupaten Gunung Mas Tahun 2025-2030**

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline 2024	Target Tahun						KET.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
<b>I</b>	<b>ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI</b>									
1.	Indeks Ketahanan Pangan		NA	56,78	57,42	58,07	58,71	59,36	60,00	
2.	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan	%	NA	7,44	7,06	6,71	6,38	6,06	5,75	
3.	Rumah tangga dengan akses air minum aman (%)		NA	35,00	36,00	37,00	38,00	39,00	40,00	
4.	% RT Pengguna Listrik PLN		NA	75,00	76,00	77,00	78,00	79,00	80,00	
5.	Luas Layanan Irigasi yang direhabilitasi dan/atau dimodernisasi		NA	20,00	21,00	22,00	23,00	24,00	25,00	
6.	Luas Layanan Irigasi yang direhabilitasi dan/atau dimodernisasi		NA	20,00	21,00	22,00	23,00	24,00	25,00	
7.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	IKLH	69.33	70,44	71,55	72,67	73,78	74,89	76,00	
8.	Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi aman		NA	14,00	15,20	16,40	17,60	18,80	20,00	
9.	Rumah tangga dengan akses air minum jaringan perpipaan		NA	36,48	37,18	37,89	38,59	39,30	40,00	
10.	Persentase angka BABS di tempat terbuka		NA	3,00	2,90	2,80	2,70	2,60	2,50	
11.	Persentase rumah layak, terjangkau, dan berkelanjutan		NA	52,55	53,65	54,75	55,85	56,95	58,05	
12.	Persentase kondisi mantap jalan		NA	35,00	36,20	37,40	38,60	39,80	41,00	
13.	<b>Penurunan Intensitas Emisi GRK</b>	%	NA	10,00	15,00	20,00	25,00	30,00	35,00	
14.	Indeks Risiko Bencana	poin	NA	123,56	121,85	120,14	118,42	116,71	115,00	
15.	Indeks Ketahanan Daerah	poin	NA							
16.	Jumlah Penduduk	Ribu Jiwa	145.54	148,23	150,94	153,61	156,26	158,87	161,46	
17.	Laju Pertumbuhan Penduduk	%	1.89	1,85	1,83	1,77	1,73	1,67	1,63	
18.	Rasio Penduduk	%	110.49	110,21	109,99	109,69	109,42	109,22	108,93	



No.	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline 2024	Target Tahun						KET.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
19.	Kepadatan Penduduk	Orang/m2	15,62	15,91	16,20	16,49	16,77	17,05	17,33	
<b>II ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT</b>										
1.	<b>Laju Pertumbuhan Ekonomi</b>	%	4,48	5,00	5,20	5,40	5,60	5,80	6,00	
2.	<b>Tingkat Kemiskinan</b>	%	5,68	4,61	4,41	4,21	4,00	3,80	3,60	
3.	<b>PDRB Per Kapita</b>	<b>Rp Juta</b>	67,08	70,00	71,00	72,00	73,00	74,00	75,00	
4.	Pengeluaran Per Kapita (Ribu/Tahun)		NA	11.600	11.680	11.760	11.840	11.920	12.000	
5.	<b>Tingkat Pengangguran Terbuka</b>	%	3,12	3,91	3,73	3,55	3,36	3,18	3,00	
6.	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan			48,2	48,23	48,26	48,29	48,32	48,35	
7.	<b>Indeks Gini</b>	<b>angka</b>	0,309	0,280	0,274	0,268	0,262	0,256	0,250	
8.	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan		NA	43,97	46,38	48,78	51,19	53,59	56,00	
9.	<b>Indeks Modal Manusia</b>	<b>angka</b>	73,88	74,17	74,64	75,12	75,59	76,06	76,53	
10.	Indeks Kesehatan		82,20	82,54	82,78	83,01	83,25	83,49	83,72	
11.	Usia Harapan Hidup	tahun	73,58	73,65	73,804	73,958	74,112	74,266	74,42	
12.	Angka Kematian Ibu		110	109,65	109,3	108,95	108,6	108,25	107,9	
13.	Indeks Keluarga Sehat	indeks								
14.	Prevalensi Stunting	%	10,39	10,13	9,88	9,62	9,36	9,11	8,85	
15.	Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (treatment coverage)		NA	90,00	90,65	91,30	91,95	92,60	93,25	
16.	Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional	%	NA	99,5	99,5	99,5	99,5	99,5	99,5	
17.	Indeks Pendidikan		64,84	65,78	66,72	67,66	68,60	69,53	70,47	
18.	Rata-Rata Lama Sekolah	tahun	9,37	9,48	9,58	9,69	9,79	9,90	10,00	
19.	Harapan Lama Sekolah	tahun	12,10	12,31	12,52	12,74	12,95	13,16	13,37	
20.	Angka Partisipasi Sekolah (5-6)		NA	100	100	100	100	100	100	
21.	Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7 - 15		NA	100	100	100	100	100	100	
22.	Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7 - 18 Kesetaraan		NA	100	100	100	100	100	100	
23.	Angka Literasi/Numerasi	%	NA							



No.	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline 2024	Target Tahun						KET.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
24.	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	indeks	NA	38.65	40.59	42.62	44.75	46.98	49.33	
25.	Kemampuan Literasi SD		NA	52.86	55.29	57.72	60.14	62.57	65.00	
26.	Kemampuan Literasi SMP		NA	68.12	68.50	68.87	69.25	69.62	70.00	
27.	Kemampuan Numerasi SD		NA	37.83	38.26	38.70	39.13	39.57	40.00	
28.	Kemampuan Numerasi SMP		NA	63.54	63.63	63.72	63.82	63.91	64.00	
29.	Proporsi Jumlah Satuan PAUD Terakreditasi Minimal B		NA	30.29	30.43	30.57	30.72	30.86	31.00	
30.	Proporsi Guru PAUD dengan Kualifikasi S1/D4		NA	64.80	64.84	64.88	64.92	64.96	65.00	
31.	Iklm Keamanan SD		NA	77.16	77.33	77.50	77.66	77.83	78.00	
32.	Iklm Keamanan SMP		NA	77.60	77.68	77.76	77.84	77.92	78.00	
33.	Iklm Kebinekaan SD		NA	77.50	77.60	77.70	77.80	77.90	78.00	
34.	Iklm Kebinekaan SMP		NA	79.76	79.81	79.86	79.90	79.95	80.00	
35.	Iklm Inklusivitas SD		NA	61.75	61.80	61.85	61.90	61.95	62.00	
36.	Iklm Inklusivitas SMP		NA	65.27	65.36	65.44	65.53	65.61	65.70	
37.	Indeks Literasi Digital	angka	NA							
38.	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	%	NA							
39.	Indeks Kerukunan Umat Beragama	skor	NA	80.40	80.72	81.04	81.36	81.68	82.00	
40.	Indeks Pembangunan Kebudayaan	angka	NA	58.53	58.82	59.12	59.41	59.71	60.00	
41.	Indeks Perlindungan Anak	angka	NA							
42.	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	0-100	NA	70.30	71.24	72.18	73.12	74.06	75.00	
43.	Capaian Kabupaten Layak Anak		NA	501.00	521.00	541.00	561.00	581.00	601.00	
44.	Indeks Ketimpangan Gender	poin	NA	0.490	0.468	0.446	0.424	0.402	0.380	
45.	Angka kelahiran Total/Total Fertility Rate (TFR)	%	NA	2.34	2.33	2.32	2.31	2.30	2.29	
<b>III ASPEK DAYA SAING DAERAH</b>										
1.	Angka Ketergantungan	%	44.13	44.15	44.22	44.32	44.43	44.60	44.77	
2.	Kontribusi PDRB Kategori Industri Pengolahan	%	8.28	10.07	11.85	13.64	15.43	17.21	19.00	



No.	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline 2024	Target Tahun						KET.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
3.	Kontribusi PDRB Kategori Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor		9.98	9.98	9.99	9.99	9.99	10.00	10.00	
4.	Rasio PDRB Akomodasi Makan dan Minum	%	1.65	1.68	1.70	1.71	1.73	1.74	1.75	
5.	Skor dan Predikat Inovasi Daerah		50.54	52,12 (Inovatif)	53,69 (Inovatif)	55,27 (Inovatif)	56,85 (Inovatif)	58,42 (Inovatif)	60 (Inovatif)	
6.	Laju Pertumbuhan Ekonomi Kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan		2.18	6.50	6.52	6.54	6.56	6.58	6.60	
7.	Kontribusi PDRB Kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan		33.05	33.12	33.18	33.25	33.32	33.38	33.45	
8.	LPE Kategori Industri Pengolahan	%	1.54	2.28	3.03	3.77	4.51	5.26	6.00	
9.	Kontribusi PDRB Gunung Mas terhadap PDRB Kalimantan Tengah		4.38	4.33	4.36	4.39	4.42	4.45	4.47	
10.	jumlah kunjungan wisatawan mancanegara dan nusantara		NA	25,843	26,674	27,506	28,337	29,169	30,000	
11.	Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer	%	NA							
12.	Indeks Infrastruktur		NA	60.0	62.5	65.0	67.5	70.0	75.0	
13.	Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan	%	NA	52.55	53.65	54.75	55.85	56.95	58.05	
14.	Persentase Desa Mandiri	%	NA	1.75	2.63	2.63	3.51	3.51	4.39	
15.	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB	%	NA							
16.	Tingkat Inflasi	%	NA							
17.	Indeks Konektivitas Wilayah		80.12	80.93	81.75	82.56	83.37	84.19	85.00	
<b>IV</b>	<b>ASPEK PELAYANAN UMUM</b>									
1.	Indeks Reformasi Hukum		NA							
2.	Indeks Reformasi Birokrasi		NA	60.00	62.00	64.00	66.00	68.00	70.00	



No.	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline 2024	Target Tahun						KET.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
3.	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP)		B (61,63)	63.03	64.42	65.82	67.21	68.61	70.00	
4.	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	poin	NA	2.65	2.67	2.69	2.71	2.73	2.75	
5.	Persentase permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan		NA	15.00	16.00	17.00	18.00	19.00	20.00	
6.	Persentase aplikasi umum SPBE yang digunakan oleh Pemda		NA	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	
7.	Indeks Pelayanan Publik	angka	NA	81.66	81.70	81.74	81.78	81.82	81.86	
8.	Indeks Integritas Nasional	angka	NA	74.59	75.67	76.75	77.84	78.92	80.00	
9.	Persentase Penegakan Perda	%	NA	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	
10.	Indeks Daya Saing Daerah	nilai	3.27	3.35	3.43	3.52	3.60	3.68	3.76	

Sumber : Tim Penyusun, 2025

\*tahun 2023

\*\*tahun 2022

## BAB V

### PENUTUP

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gunung Mas Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran dari *milestone* pertama Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Gunung Mas periode tahun 2025-2045. RPJMD Kabupaten Gunung Mas Tahun 2025-2029 merupakan dokumen yang akan menjadi acuan, pedoman dan arahan bersama bagi seluruh pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan pembangunan di Kabupaten Gunung Mas 5 (lima) tahun ke depan agar senantiasa selaras, terpadu dan searah dengan pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah dan pembangunan nasional.

Keberhasilan pelaksanaan RPJMD Kabupaten Gunung Mas Tahun 2025-2029 ditentukan oleh dukungan yang solid dari seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas serta kerjasama yang kuat antara Pemerintah Kabupaten Gunung Mas dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota lainnya. Tidak kalah penting komitmen dan dukungan DPRD Kabupaten Gunung Mas serta kerjasama dengan *stakeholders* pembangunan lainnya.

Dokumen ini juga merupakan implementasi dari Visi, Misi, dan Program Prioritas Bupati/Wakil Bupati terpilih periode tahun 2025-2029 yang disusun melalui pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, serta pendekatan atas-bawah dan bawah-atas. Keterpaduan langkah dalam mencapai tujuan, upaya-upaya yang dilakukan serta penentuan keterlibatan berbagai pihak dan pemangku kepentingan secara runut dan jelas dijabarkan dalam dokumen RPJMD ini. Untuk itu, menjadi penting dipahami oleh segenap pihak terkait tentang bagaimana mengoperasionalkan RPJMD ini, baik dalam tahapan normal maupun masa transisi, agar dokumen RPJMD ini benar-benar menjadi rujukan dalam pengelolaan kinerja oleh perangkat daerah dalam koordinasi pemerintah daerah.

#### 5.1. Pedoman Transisi

Setelah berakhirnya RPJMD Kabupaten Gunung Mas Tahun 2025-2029, perlu disusun RPJMD Kabupaten Gunung Mas Tahun 2030-2034 sebagai acuan bagi penyusunan dokumen perencanaan 5 (lima) tahun berikutnya. Pada masa transisi tersebut, diperlukan sebuah pedoman bagi penyusunan perencanaan pembangunan tahun 2030. Pedoman transisi demikian dimaksudkan sebagai acuan penyelenggaraan perencanaan pembangunan daerah pada akhir periode RPJMD hingga terpilihnya kepala daerah baru dan tersedianya dokumen RPJMD sebagai hasil penjabaran visi dan misi kepala daerah terpilih. Pedoman transisi ini juga dimaksudkan untuk memberikan panduan kepada pemerintah daerah agar lebih siap dalam menyusun dokumen rencana pembangunan pada periode berikutnya sehingga tidak terjadi kekosongan pengaturan sebagai upaya untuk menjaga kesinambungan pembangunan dan ketersediaan dokumen rencana pembangunan.

Dalam rangka keberlanjutan pembangunan Kabupaten Gunung Mas maka pedoman transisi ditetapkan sebagai berikut:

- 1) RPJMD ini menjadi pedoman penyusunan RKPD dan kebijakan umum serta

prioritas program APBD masa transisi yaitu tahun pertama di bawah kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati terpilih hasil pemilihan umum kepala daerah pada periode berikutnya.

- 2) RPJMD sebagai pedoman dimaksud pada butir 1) antara lain bertujuan menyelesaikan masalah-masalah pembangunan yang belum seluruhnya tertangani sampai dengan akhir periode RPJMD dan masalah-masalah pembangunan yang akan dihadapi dalam tahun pertama masa kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati terpilih periode berikutnya.
- 3) RKPd masa transisi di tahun 2030 menjadi bagian tidak terpisahkan dari RPJMD periode saat ini tahun 2025-2029, dikarenakan dalam penyusunan dokumen RPJMD Kabupaten Gunung Mas tahun 2025-2029 memuat hingga tahun 2030.

## 5.2. Kaidah Pelaksanaan

RPJMD Kabupaten Gunung Mas tahun 2025-2029 merupakan panduan bagi Pemerintah Kabupaten Gunung Mas serta pemangku kepentingan lainnya dalam melaksanakan pembangunan 5 (lima) tahun ke depan. Oleh karena itu, konsistensi, transparansi, inovasi, kerjasama, dan rasa tanggung jawab yang tinggi sangat diperlukan guna mencapai target-target yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Gunung Mas tahun 2025-2029. Dalam hal ini, penting untuk menyusun kaidah pelaksanaan RPJMD Kabupaten Gunung Mas tahun 2025-2029 sebagai aturan atau patokan dalam pelaksanaan RPJMD Kabupaten Gunung Mas tahun 2025-2029. Adapun tujuan disusunnya kaidah pelaksanaan ini adalah untuk menciptakan koordinasi dan keberlanjutan program, sehingga terjadi efisiensi dan efektivitas baik dalam pembiayaan maupun waktu pelaksanaan serta menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Kaidah pelaksanaan RPJMD Gunung Mas tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Bupati berkewajiban menyebarluaskan Peraturan Daerah tentang RPJMD Kabupaten Gunung Mas tahun 2025-2029 kepada masyarakat;
2. Seluruh OPD/unit kerja yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas agar melaksanakan program-program dalam RPJMD tahun 2025-2029 dengan sebaik-baiknya;
3. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan RPJMD Kabupaten Gunung Mas tahun 2025-2029, Pemerintah Daerah Kabupaten Gunung Mas berkewajiban untuk melakukan pemantauan, fasilitasi, dan mediasi terhadap penjabaran RPJMD Tahun 2025-2029 ke dalam Rencana OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas;
4. Setiap OPD berkewajiban untuk menyusun Renstra perangkat daerah Kabupaten Gunung Mas yang memuat Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi OPD dengan berpedoman pada RPJMD ini;
5. RPJMD Kabupaten Gunung Mas Tahun 2025-2029 merupakan pedoman dalam menyusun RKPd setiap tahun selama 5 (lima) tahun masa kepemimpinan bupati yang dalam penyelenggaraannya dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Gunung Mas dan selanjutnya RKPd



merupakan dasar dalam penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS);

6. Terhadap perubahan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan nomenklatur urusan pemerintahan yang terbentuk setelah RPJMD ditetapkan, maka RPJMD dapat dirubah terhadap nomenklatur program, urusan dan OPD sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
7. Pemenintah Daerah Kabupaten Gunung Mas melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan RPJMD; dan
8. Evaluasi pelaksanaan RPJMD Kabupaten Gunung Mas tahun 2025-2029 dilakukan pada tahun ketiga dan pada akhir masa jabatan Bupati terhadap indikator kinerja misi, sedangkan evaluasi tahunan dilakukan terhadap indikator kinerja program dengan menggunakan data yang diperoleh dari lembaga resmi atau melakukan survei yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Gunung Mas serta melaporkan hasilnya kepada Bupati.

Dalam hal pelaksanaan RPJMD terjadi perubahan capaian sasaran tahunan disebabkan karena perkembangan keadaan dalam tahun berjalan tetapi tidak mengubah target pencapaian sasaran akhir pembangunan jangka menengah, penetapan perubahan RPJMD ditetapkan dengan peraturan kepala daerah.

**BUPATI GUNUNG MAS**

**TTD**

**JAYA SAMAYA MONONG**